



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2016**

**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun keempat Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 di Tahun 2017, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 **Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1**);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26 **Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23**);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1 **Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44**);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017

### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut dari perencanaan SKPD tahun 2017.
- (2) RKPD Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

### BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

#### Pasal 3

RKPD Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 beserta capaian kinerjanya yang tertuang dalam Lampiran RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kadar Maron Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801  
email : [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id) web : [www.bappeda.temanggungkab.go.id](http://www.bappeda.temanggungkab.go.id)

**TEMANGGUNG**

---

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Setda  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tanggal : 12 Mei 2016  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Mohon koreksi Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

---

Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun keempat Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 di Tahun 2017, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon koreksi.

An. KEPALA BAPPEDA  
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN LITBANG

**Dr. DANANG PURWANTO, S.Sos,MSi**

Pembina

NIP. 19690501 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kadar Maron Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801  
email : [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id) web : [www.bappeda.temanggungkab.go.id](http://www.bappeda.temanggungkab.go.id)

TEMANGGUNG

---

**NOTA-DINAS**

Kepada Yth : Yth. Bapak Bupati Temanggung  
Lewat : 1. Yth. Bapak Wakil Bupati Temanggung  
: 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tanggal : 21 Mei 2016  
Nomor : 050/  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Bendel  
Perihal : Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

---

Menindaklanjuti hasil Musrenbang Kabupaten Temanggung 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 di Graha Bhumi Phala Kabupaten Temanggung, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014;
2. Dari Hasil penghitungan terhadap RKPD Tahun 2017 hasil Musrenbang Kabupaten Temanggung dapat kami simpulkan sebagai berikut:
  - a. Rencana Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp.1.968.308.888.000 (Satu trilyun sembilan ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Rencana Belanja Daerah sebesar Rp. 2.066.465.025.456 (Dua trilyun enam puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari :

- DAK	:	Rp.	423.868.105.500
- Ban-Keu	:	Rp.	158.696.500.000
- DBHCHT	:	Rp.	30.973.804.075
- BLUD	:	Rp.	93.000.000.000
- DAU dll	:	Rp.	<u>1.359.926.615.881</u>
- TOTAL	:	Rp.	2.066.465.025.456
  - c. Berdasarkan pendapatan dan belanja di atas maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 98.156.137.456 (sembilan puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

d. Dari defisit tersebut akan ditutup dengan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah), dan rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 79.606.137.456 (Tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Agar tidak ada pinjaman daerah maka rencananya masih akan dirasionalisasi pada pembahasan PPAS.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tanda tangan.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Ir. BAMBANG DEWANTORO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023 198503 1 005



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Maksud dan Tujuan .....	I-3
C. Landasan Hukum .....	I-3
D. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
E. Kaidah Pelaksanaan .....	I-6
F. Sistematika Penulisan .....	I-6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-1
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II-1
1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	II-1
2) Letak dan Kondisi Geografis .....	II-3
3) Kondisi Topografi.....	II-3
4) Kondisi Geologi.....	II-5
b. Demografi.....	II-5
1) Pertumbuhan Penduduk.....	II-6
2) Sebaran dan Kepadatan Penduduk .....	II-7
3) Struktur Penduduk .....	II-7
4) Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-9
5) Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	II-10
6) Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama dan Etnis .....	II-11
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-12
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-13
1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-13
2) PDRB Perkapita.....	II-14
a) PDRB Perkapita Kabupaten .....	II-14
b) PDRB Perkapita Kecamatan.....	II-16
3) Pengeluaran Riil Perkapita.....	II-17
4) Pertumbuhan Ekonomi .....	II-17
a) Struktur Ekonomi Daerah .....	II-17
b) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten.....	II-19
c) Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan .....	II-21
5) Analisis Tipologi <i>Klassen</i> .....	II-22
6) Laju Inflasi .....	II-24
7) Indeks Ketimpangan.....	II-25
a) Ketimpangan Antar Wilayah / Pembangunan Regional.....	II-25
b) Ketimpangan Individu Masyarakat .....	II-27
8) Jumlah Rumah Tangga Miskin .....	II-28
b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat .....	II-28
1) Urusan Pendidikan.....	II-28
a) Angka Melek Huruf.....	II-28
b) Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	II-29
c) Angka Partisipasi Kasar .....	II-30
d) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan.....	II-30
e) Angka Partisipasi Murni.....	II-31

2)	Urusan Kesehatan.....	II-31
a)	Angka Kematian Bayi.....	II-31
b)	Angka Harapan Hidup.....	II-32
c)	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-32
d)	Angka Kematian Ibu.....	II-34
e)	Angka Kematian Balita.....	II-34
f)	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan.....	II-35
3)	Urusan Tenaga Kerja.....	II-36
a)	Persentase Penduduk yang Bekerja.....	II-36
b)	Perbandingan TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk.....	II-36
c.	Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga.....	II-37
1)	Urusan Kebudayaan.....	II-37
a)	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian.....	II-37
2)	Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-38
b)	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga.....	II-38
3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-39
a.	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-39
1)	Urusan Pendidikan.....	II-39
a)	Pendidikan Dasar.....	II-40
-	Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	II-40
-	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah.....	II-41
-	Rasio Guru/Murid.....	II-41
b)	Pendidikan Menengah.....	II-43
-	Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	II-43
-	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk ... Usia Sekolah.....	II-43
-	Rasio Guru Terhadap Murid.....	II-44
c)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	II-45
d)	Kondisi Ruang Kelas.....	II-46
-	Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat.....	II-46
-	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat.....	II-47
-	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat	II-47
e)	Angka Putus Sekolah (APtS).....	II-48
f)	Angka Kelulusan.....	II-48
g)	Angka Melanjutkan.....	II-49
h)	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV, S2 atau Lebih.....	II-49
2)	Urusan Kesehatan.....	II-50
a)	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).....	II-50
b)	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk.....	II-51
c)	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk.....	II-53
d)	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.....	II-53
e)	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani.....	II-54
f)	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.....	II-55
g)	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI).....	II-55
h)	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.....	II-56
i)	Cakupan Ibu Hamil Dengan K4.....	II-57

j)	Cakupan Kunjungan Neonatus.....	II-57
k)	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA.....	II-58
l)	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD .....	II-58
m)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.....	II-59
n)	Cakupan Kunjungan Bayi .....	II-60
o)	Cakupan Kunjungan Nifas.....	II-60
p)	Persentase Penanganan KLB<24 jam.....	II-61
q)	Persentase Rumah Tangga yang Ber-PHBS....	II-61
r)	Persentase Desa Siaga Aktif.....	II-62
3)	Urusan Pekerjaan Umum .....	II-62
a)	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik .....	II-62
b)	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk..	II-64
c)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi .....	II-64
d)	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk.....	II-65
4)	Urusan Perumahan .....	II-65
a)	Jumlah Kebutuhan Rumah .....	II-65
b)	Rumah Tangga Pengguna Listrik .....	II-66
c)	Rumah Tangga Bersanitasi.....	II-66
d)	Lingkungan Pemukiman Kumuh .....	II-67
e)	Penataan Drainase .....	II-67
f)	Rumah Layak Huni.....	II-67
g)	Rumah Tidak Layak Huni.....	II-68
h)	Tipe Rumah .....	II-69
5)	Urusan Penataan Ruang.....	II-70
a)	Ruang Terbuka Hijau .....	II-70
b)	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan.....	II-72
6)	Urusan Perencanaan Pembangunan .....	II-73
7)	Urusan Perhubungan .....	II-73
a)	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum .	II-73
b)	Rasio Ijin Trayek.....	II-74
c)	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum .....	II-74
d)	Jumlah Terminal .....	II-75
8)	Urusan Lingkungan Hidup .....	II-76
a)	Persentase Penanganan Sampah .....	II-76
b)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum....	II-77
c)	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk .....	II-77
9)	Urusan Pertanahan .....	II-78
a)	Persediaan Luas Lahan Bersertifikat .....	II-78
b)	Penyelesaian Kasus Tanah Negara.....	II-78
10)	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II-79
a)	Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah	II-79
b)	Penerapan KTP Berbasis NIK.....	II-79
11)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-79
a)	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah .....	II-80
b)	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta ...	II-80
c)	Partisipasi Perempuan yang Bekerja Mandiri.	II-81
d)	Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik...	II-81
e)	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	II-82
f)	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan .....	II-83
g)	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan .....	II-83

12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	II-84
a) Peserta KB.....	II-84
b) Rasio Akseptor KB .....	II-84
c) Cakupan Peserta KB Aktif .....	II-85
d) Tahapan Keluarga Sejahtera.....	II-86
13) Urusan Sosial.....	II-87
a) Sarana Sosial .....	II-87
b) PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial .....	II-87
c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ...	II-88
d) Penanganan Lansia .....	II-88
14) Urusan Ketenagakerjaan .....	II-89
a) Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja, Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-89
b) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja .....	II-90
c) Pencari Kerja yang Ditempatkan.....	II-90
d) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah .....	II-91
15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah....	II-91
a) Persentase Koperasi Aktif .....	II-91
b) Jenis dan Jumlah Koperasi .....	II-92
c) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM .....	II-92
d) Jumlah BPR/LKM .....	II-93
16) Urusan Penanaman Modal .....	II-94
a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA).....	II-94
b) Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA .....	II-96
17) Urusan Kebudayaan .....	II-97
a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ..	II-97
b) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya ....	II-97
18) Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-97
a) Jumlah Organisasi Pemuda.....	II-97
b) Jumlah Organisasi Olahraga .....	II-98
c) Jumlah Kegiatan Kepemudaan .....	II-98
d) Jumlah Kegiatan Olahraga .....	II-98
e) Lapangan Olahraga .....	II-99
19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	II-99
a) Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP .....	II-99
b) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah.....	II-100
c) Jumlah Partai Politik.....	II-100
20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	II-100
a) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk .....	II-100
b) Jumlah Linmas Per 10.000 Jumlah Penduduk.....	II-101
c) Rasio Poskamling Per Jumlah Desa/ Kelurahan.....	II-101
d) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP.....	II-102
e) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten ..	II-102
f) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten.....	II-102
g) Cakupan Kantor Pemerintahan Desa yang Baik.....	II-103
21) Urusan Ketahanan Pangan.....	II-103
22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...	II-105

a)	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) .....	II-105
b)	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK .....	II-106
c)	Jumlah LSM .....	II-106
23)	Urusan Kearsipan.....	II-107
a)	Pengelolaan Arsip Secara Baku .....	II-107
b)	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.....	II-107
24)	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-108
a)	Jumlah Jaringan Komunikasi .....	II-108
b)	Rasio Warnet Terhadap Penduduk.....	II-108
c)	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal .....	II-109
d)	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal .....	II-109
-	Jumlah Penyiaran Radio .....	II-109
-	Jumlah Penyiaran TV .....	II-110
e)	Website Milik Pemerintah Daerah.....	II-110
f)	Pusat Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	II-111
25)	Urusan Perpustakaan.....	II-111
a)	Jumlah Perpustakaan .....	II-111
b)	Jumlah Pengunjung Perpustakaan.....	II-112
c)	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan .....	II-112
b.	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-113
1)	Urusan Pertanian .....	II-113
a)	Pertanian.....	II-113
b)	Perkebunan .....	II-115
c)	Peternakan .....	II-117
2)	Urusan Kehutanan .....	II-118
3)	Urusan Energi, Sumber Daya Mineral .....	II-119
a)	Pertambangan Tanpa Ijin.....	II-119
4)	Urusan Pariwisata .....	II-119
a)	Kunjungan Wisata.....	II-119
b)	Tempat Wisata dan Cagar Budaya .....	II-119
5)	Urusan Kelautan dan Perikanan .....	II-120
6)	Urusan Perdagangan .....	II-121
7)	Urusan Perindustrian.....	II-122
8)	Urusan Transmigrasi.....	II-125
a)	Jumlah Transmigrasi.....	II-125
4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-126
a.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-126
1)	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	II-126
a)	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita .....	II-126
b.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-127
1)	Urusan Perhubungan .....	II-128
a)	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum .....	II-128
b)	Jumlah Orang Melalui Terminal .....	II-128
2)	Urusan Penataan Ruang.....	II-128
a)	Ketaatan Terhadap RTRW.....	II-128
b)	Luas Wilayah Produktif.....	II-129
3)	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian.....	II-129
a)	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya .....	II-129
b)	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran.....	II-130
c)	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel ..	II-130
4)	Urusan Lingkungan Hidup .....	II-131
a)	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan	

Air Bersih .....	II-131
b) Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nutrafah .....	II-132
5) Urusan Energi, Sumber Daya Mineral .....	II-132
a) Rasio Ketersediaan Daya Listrik .....	II-132
b) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.....	II-133
6) Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-133
a) Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon.....	II-133
c. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-134
1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	II-134
a) Angka Kriminalitas .....	II-134
b) Jumlah Demo .....	II-135
c) Lama Proses Perijinan .....	II-135
d) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha .....	II-136
e) Perkembangan Perijinan .....	II-136
2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa... ..	II-136
a) Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.....	II-136
d. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-138
1) Urusan Ketenagakerjaan .....	II-138
a) Rasio Lulusan S1/S2/S3.....	II-138
b) Rasio Ketergantungan .....	II-138
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD 2013-2018 sampai Tahun 2015 .....	II-140
2.2.1 Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-141
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 atas Capaian RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 .....	II-141
A. Urusan Wajib .....	II-141
1) Pendidikan .....	II-141
2) Kesehatan .....	II-155
3) Pekerjaan Umum .....	II-162
4) Perumahan .....	II-165
5) Penataan Ruang .....	II-168
6) Perencanaan Pembangunan .....	II-170
7) Perhubungan .....	II-172
8) Komunikasi dan Informatika .....	II-174
9) Lingkungan Hidup .....	II-176
10) Pertanahan .....	II-179
11) Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II-180
12) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-183
13) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	II-188
14) Sosial .....	II-190
15) Ketenagakerjaan .....	II-193
16) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	II-194
17) Penanaman Modal .....	II-195
18) Kebudayaan .....	II-197
19) Pemuda dan Olahraga .....	II-198
20) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	II-199
21) Otonomi Daerah .....	II-200
22) Ketahanan Pangan .....	II-204
23) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-206
24) Statistik .....	II-209
25) Kearsipan .....	II-209
26) Perpustakaan .....	II-210
B. Urusan Pilihan .....	II-211

1) Pertanian .....	II-211
2) Kehutanan .....	II-215
3) Pariwisata .....	II-216
4) Perikanan .....	II-217
5) Perdagangan .....	II-218
6) Perindustrian .....	II-220
7) Transmigrasi.....	II-220
C. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-221
1) Urusan Pendidikan.....	II-221
2) Urusan Kesehatan .....	II-222
3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-223
4) Urusan Ketenagakerjaan .....	II-223
5) Urusan Transmigrasi .....	II-223
6) Urusan Perencanaan Pembangunan.....	II-224
7) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-224
8) Urusan Perpustakaan.....	II-224
9) Urusan Kearsipan.....	II-224
10) Urusan Sosial .....	II-224
11) Urusan Pertanian .....	II-224
12) Urusan Perikanan.....	II-225
13) Urusan Ketahanan Pangan .....	II-225
14) Urusan Penanaman Modal.....	II-226
15) Urusan Koperasi dan UMKM .....	II-226
16) Urusan Pariwisata .....	II-226
17) Urusan Kebudayaan .....	II-227
18) Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-227
19) Urusan Otonomi Daerah.....	II-227
20) Urusan Politik Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-228
21) Urusan Lingkungan Hidup .....	II-228
22) Urusan Keluarga Berencana .....	II-228
23) Urusan Pekerjaan Umum .....	II-229
24) Urusan Penataan Ruang.....	II-229
25) Urusan Perumahan .....	II-229
26) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral .....	II-229
27) Urusan Perhubungan .....	II-229
28) Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) .....	II-229
29) Urusan Kependudukan.....	II-230
D. Isu Strategis .....	II-231
1) Urusan Pendidikan.....	II-231
2) Urusan Kesehatan .....	II-232
3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-232
4) Urusan Ketenagakerjaan .....	II-233
5) Urusan Transmigrasi .....	II-233
6) Urusan Perencanaan Pembangunan.....	II-233
7) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-233
8) Urusan Perpustakaan.....	II-234
9) Urusan Kearsipan.....	II-234
10) Urusan Sosial .....	II-234
11) Urusan Pertanian .....	II-234
12) Urusan Perikanan.....	II-235
13) Urusan Ketahanan Pangan .....	II-235
14) Urusan Penanaman Modal.....	II-235
15) Urusan Koperasi dan UMKM .....	II-235
16) Urusan Perdagangan .....	II-236
17) Urusan Pariwisata .....	II-236
18) Urusan Kebudayaan .....	II-236
19) Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-236
20) Urusan Otonomi Daerah.....	II-236
21) Urusan Politik Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-237

22) Urusan Lingkungan Hidup .....	II-237
23) Urusan Keluarga Berencana .....	II-238
24) Urusan Pekerjaan Umum .....	II-238
25) Urusan Penataan Ruang .....	II-239
26) Urusan Perumahan .....	II-239
27) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral .....	II-239
28) Urusan Perhubungan .....	II-239
29) Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) .....	II-240
30) Urusan Kependudukan .....	II-241

### BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH .....	III-1
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan	
Tahun 2016 .....	III-1
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	III-1
b. Distribusi PDRB/ Struktur Ekonomi .....	III-6
c. PDRB Perkapita .....	III-9
d. Indeks Perkembangan PDRB .....	III-11
e. Indek Berantai .....	III-12
f. Perkembangan PDRB Sektoral .....	III-13
1) Sektor Pertanian .....	III-13
2) Sektor Pertambangan dan Penggalan .....	III-14
3) Sektor Industri Pengolahan .....	III-14
4) Sektor Listrik dan Air Bersih .....	III-15
5) Sektor Bangunan / Konstruksi .....	III-15
6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan .....	III-15
7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .....	III-15
8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan ....	III-16
9) Sektor Jasa-Jasa .....	III-16
g. Inflasi dan Indeks Harga Implisit .....	III-16
h. Pengeluaran Riil Perkapita .....	III-20
i. Indeks Ketimpangan Antar Warga / Pembangunan	
Regional Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran .....	III-21
j. Ketimpangan Individu Masyarakat .....	III-22
k. Investasi .....	III-22
l. Keuangan Daerah .....	III-22
1) Ketergantungan Fiskal (KF) .....	III-24
2) Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KKP) .....	III-24
3) Proposi Belanja Modal (PBM) .....	III-25
4) Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP) .....	III-25
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015	
dan Tahun 2016 .....	III-26
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-28
1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-29
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2017 .....	III-31
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-31
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-32
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-34
1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	III-34
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
(SILPA) .....	III-34
b) Penerimaan Pinjaman Daerah .....	III-34
c) Penerimaan Pembiayaan yang Lain .....	III-34
2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	III-34
a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah .....	III-35
b) Pembentukan Dana Cadangan .....	III-35
c) Pembayaran Pokok Hutang .....	III-35
d) Pengeluaran Pembiayaan yang Lain .....	III-35

### BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH



TAHUN 2014 .....	IV-1
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	IV-1
1. Visi .....	IV-1
2. Misi .....	IV-2
3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.....	IV-5
B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung.....	IV-14
C. Pokok-Pokok Pikiran RKPD Kabupaten Temanggung .....	IV-52
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015.....	V-1
A. Urusan Wajib .....	V-1
1. Pendidikan .....	V-1
2. Kesehatan .....	V-4
3. Pekerjaan Umum .....	V-7
4. Perumahan .....	V-8
5. Penataan Ruang .....	V-9
6. Lingkungan Hidup .....	V-9
7. Perencanaan Pembangunan.....	V-10
8. Statistik .....	V-11
9. Perhubungan .....	V-11
10. Komunikasi dan Informatika .....	V-12
11. Pertanahan .....	V-12
12. Kependudukan dan Catatan Sipil.....	V-12
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	V-12
14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	V-13
15. Sosial .....	V-13
16. Ketenagakerjaan .....	V-15
17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	V-16
18. Penanaman Modal .....	V-16
19. Kebudayaan .....	V-16
20. Pemuda dan Olahraga .....	V-17
21. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	V-17
22. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	V-18
23. Ketahanan Pangan .....	V-20
24. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	V-20
25. Statistik .....	V-21
26. Kearsipan .....	V-21
27. Perpustakaan .....	V-21
B. Urusan Pilihan.....	V-22
1. Pertanian .....	V-22
2. Kehutanan .....	V-22
3. Energi dan Sumber Daya Mineral .....	V-22
4. Pariwisata .....	V-22
5. Kelautan dan Perikanan .....	V-23
6. Perdagangan .....	V-23
7. Perindustrian .....	V-24
8. Transmigrasi .....	V-24
BAB VI PENUTUP .....	VI-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Dan Luas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-2
Tabel 2.2.	Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung .....	II-2
Tabel 2.3.	Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2015.....	II-4
Tabel 2.4.	Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung .....	II-4
Tabel 2.5.	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-6
Tabel 2.6.	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2014.....	II-7
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-8
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-8
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-10
Tabel 2.10.	Penduduk Usia 10 Tahun keatas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 .....	II-11
Tabel 2.11.	Komposisi Penduduk Menurut Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-11
Tabel 2.12.	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-12
Tabel 2.13.	Perbandingan IPM antara Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .....	II-13
Tabel 2.14.	Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-13
Tabel 2.15.	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-14
Tabel 2.16.	Perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-15
Tabel 2.17.	PDRB Perkapita Kecamatan (Rupiah) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-16
Tabel 2.18.	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-17
Tabel 2.19.	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-19
Tabel 2.20.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2014 .....	II-19
Tabel 2.21.	Pertumbuhan Ekonomi per Sektor (%) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-20
Tabel 2.22.	Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan (%) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-22
Tabel 2.23.	Penduduk Analisis Tipologi <i>Klassen</i> per kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 .....	II-23
Tabel 2.24.	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2014 .....	II-24
Tabel 2.25.	Indeks Williamson Antar Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014.....	II-26
Tabel 2.26.	Perhitungan Indeks Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-27
Tabel 2.27.	Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-29
Tabel 2.28.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-29
Tabel 2.29.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-30

Tabel 2.30.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-30
Tabel 2.31.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-31
Tabel 2.32.	PDRB Angka Kematian Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-32
Tabel 2.33.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-32
Tabel 2.34.	Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-33
Tabel 2.35.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-34
Tabel 2.36.	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-35
Tabel 2.37.	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-35
Tabel 2.38.	Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-36
Tabel 2.39.	TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-37
Tabel 2.40.	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-38
Tabel 2.41.	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-39
Tabel 2.42.	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-40
Tabel 2.43.	Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-41
Tabel 2.44.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-42
Tabel 2.45.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-43
Tabel 2.46.	Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-44
Tabel 2.47.	Rasio Guru Sekolah Menengah per 10.000 murid Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-45
Tabel 2.48.	Perkembangan PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-46
Tabel 2.49.	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD/MI Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-46
Tabel 2.50.	Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-47
Tabel 2.51.	Kondisi Ruang Kelas SMA/MA/SMK Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-47
Tabel 2.52.	Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-48
Tabel 2.53.	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-49
Tabel 2.54.	Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-49
Tabel 2.55.	Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S <sub>1</sub> /D-IV, S <sub>2</sub> atau lebih di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-50
Tabel 2.56.	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-51
Tabel 2.57.	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-51
Tabel 2.58.	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-52

Tabel 2.59.	Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-53
Tabel 2.60.	Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-54
Tabel 2.61.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-55
Tabel 2.62.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-55
Tabel 2.63.	Cakupan Desa UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> ) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-56
Tabel 2.64.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-56
Tabel 2.65.	Cakupan Ibu Hamil K4 Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-57
Tabel 2.66.	Penanganan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-58
Tabel 2.67.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-58
Tabel 2.68.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-59
Tabel 2.69.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-60
Tabel 2.70.	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-60
Tabel 2.71.	Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-61
Tabel 2.72.	Jumlah Desa/Kelurahan dengan kejadian KLB ditangani < 24 jam di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-61
Tabel 2.73.	Persentase Rumah Tangga yang Ber-PHBS Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-62
Tabel 2.74.	Jaringan Jalan Dirinci menurut status dan kondisi jalan Tahun 2011-2015 .....	II-63
Tabel 2.75.	Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Temanggung Tahun 2015....	II-64
Tabel 2.76.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-65
Tabel 2.77.	Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-65
Tabel 2.78.	Kebutuhan Rumah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-66
Tabel 2.79.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-66
Tabel 2.80.	Rumah Tangga ber Sanitasi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-67
Tabel 2.81.	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-68
Tabel 2.82.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-68
Tabel 2.83.	Perkembangan Peningkatan Tipe Rumah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-69
Tabel 2.84.	Jumlah Rumah Menurut Tipe Rumah Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 .....	II-69
Tabel 2.85.	Persentase Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-71
Tabel 2.86.	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-72
Tabel 2.87.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-73
Tabel 2.88.	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Temanggung	

	Tahun 2010-2015 .....	II-74
Tabel 2.89.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-75
Tabel 2.90.	Jumlah Terminal Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-75
Tabel 2.91.	Prosentase Volume Sampah Yang Direduksi Pada Tingkat TPST Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-76
Tabel 2.92.	Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapat Air Minum Layak Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-77
Tabel 2.93.	TPS per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 .....	II-78
Tabel 2.94.	Jumlah Bidang Lahan Bersertifikat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2015 .....	II-78
Tabel 2.95.	Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-79
Tabel 2.96.	Kepemilikan KTP Berbasis NIK Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-79
Tabel 2.97.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-80
Tabel 2.98.	Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-80
Tabel 2.99.	Pekerja Perempuan yang Bekerja Mandiri Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-81
Tabel 2.100.	Partisipasi perempuan dalam partai politik Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-82
Tabel 2.101.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-83
Tabel 2.102.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-83
Tabel 2.103.	Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-84
Tabel 2.104.	Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-84
Tabel 2.105.	Rasio Akseptor KB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-85
Tabel 2.106.	Persentase Peserta KB Aktif Terhadap PUS Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-85
Tabel 2.107.	Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-86
Tabel 2.108.	Perkembangan Sarana Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 .....	II-87
Tabel 2.109.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-87
Tabel 2.110.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-88
Tabel 2.111.	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 .....	II-89
Tabel 2.112.	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-90
Tabel 2.113.	Angka Sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-90
Tabel 2.114.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-91
Tabel 2.115.	Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-91
Tabel 2.116.	Klasifikasi Jenis Koperasi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-92
Tabel 2.117.	Jumlah UKM non BPR/LKM-UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2015 .....	II-93
Tabel 2.118.	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-94

Tabel 2.119. Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-95
Tabel 2.120. Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-96
Tabel 2.121. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-97
Tabel 2.122. Organisasi Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-98
Tabel 2.123. Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-98
Tabel 2.124. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-98
Tabel 2.125. Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-99
Tabel 2.126. Lapangan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-99
Tabel 2.127. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015.....	II-99
Tabel 2.128. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-100
Tabel 2.129. Jumlah Partai Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-100
Tabel 2.130. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-101
Tabel 2.131. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-101
Tabel 2.132. Rasio Jumlah Poskamling Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-101
Tabel 2.133. Cakupan patrol petugas satpol pp Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-102
Tabel 2.134. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-102
Tabel 2.135. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-103
Tabel 2.136. Cakupan Kantor Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-103
Tabel 2.137. Perkembangan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-105
Tabel 2.138. Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-107
Tabel 2.139. Pengelolaan Arsip Secara Baku Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-107
Tabel 2.140. Operator Telekomunikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-108
Tabel 2.141. Rasio Warnet Terhadap penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-108
Tabel 2.142. Jumlah Media Cetak (Surat Kabar) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-109
Tabel 2.143. Jumlah Stasiun Radio Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-110
Tabel 2.144. Jumlah TV Nasional Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-110
Tabel 2.145. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-111
Tabel 2.146. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-112
Tabel 2.147. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-112
Tabel 2.148. Koleksi Buku Perpustakaan Milik Pemda Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-113
Tabel 2.149. Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan	

	Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-113
Tabel 2.150.	Produksi dan Konsumsi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-114
Tabel 2.151.	Perkembangan Sektor Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-115
Tabel 2.152.	Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-117
Tabel 2.153.	Perkembangan Wisatawan (jiwa) Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-119
Tabel 2.154.	Perkembangan Sektor Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-120
Tabel 2.155.	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-121
Tabel 2.156.	Nama dan Alamat SPBU – SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-122
Tabel 2.157.	Perkembangan Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-122
Tabel 2.158.	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-123
Tabel 2.159.	Jumlah Transmigrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-126
Tabel 2.160.	Pendapatan per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2010- 2015 .....	II-127
Tabel 2.161.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-128
Tabel 2.162.	Jumlah Orang yang Melalui terminal Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-128
Tabel 2.163.	Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-129
Tabel 2.164.	Rasio Luas Wilayah Produktif (Ha) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-129
Tabel 2.165.	Jumlah Restoran dan Rumah Makan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2014 .....	II-130
Tabel 2.166.	Perkembangan Penginapan/Hotel Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-131
Tabel 2.167.	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015.....	II-131
Tabel 2.168.	Kasus Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nufah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-132
Tabel 2.169.	Penggunaan Daya Listrik Terpasang (KwH) Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-133
Tabel 2.170.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-133
Tabel 2.171.	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-133
Tabel 2.172.	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015 .....	II-134
Tabel 2.173.	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-135
Tabel 2.174.	Lama Perijinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 .....	II-135
Tabel 2.175.	Jumlah dan Jenis Perizinan yang Dikeluarkan Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 .....	II-136
Tabel 2.176.	Status Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 .....	II-137
Tabel 2.177.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-138
Tabel 2.178.	Rasio Ketergantungan ( <i>dependencyratio</i> ) Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015 .....	II-139
Tabel 2.179.	Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung .....	II-140
Tabel 2.180.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .....	II-142
Tabel 2.181.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan .....	II-155

Tabel 2.182.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .....	II-163
Tabel 2.183.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan .....	II-166
Tabel 2.184.	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang .....	II-168
Tabel 2.185.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan .....	II-170
Tabel 2.186.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan .....	II-172
Tabel 2.187.	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	II-174
Tabel 2.188.	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup .....	II-177
Tabel 2.189.	Capaian Kinerja Pertanahan .....	II-180
Tabel 2.190.	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-181
Tabel 2.191.	Urusan Pemberdayaan dan perlindungan anak .....	II-183
Tabel 2.192.	Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera .....	II-188
Tabel 2.193.	Urusan Sosial .....	II-190
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan.....	II-193
Tabel 2.195.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-195
Tabel 2.196.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal .....	II-196
Tabel 2.197.	Urusan Kebudayaan .....	II-197
Tabel 2.198.	Urusan Pemuda dan Olahraga .....	II-199
Tabel 2.199.	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-199
Tabel 2.200.	Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah .....	II-201
Tabel 2.201.	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan .....	II-204
Tabel 2.202.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-207
Tabel 2.203.	Urusan Statistik.....	II-209
Tabel 2.204.	Urusan Kearsipan .....	II-210
Tabel 2.205.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan .....	II-211
Tabel 2.206.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	II-212
Tabel 2.207.	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan.....	II-215
Tabel 2.208.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata.....	II-216
Tabel 2.209.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan perikanan .....	II-217
Tabel 2.210.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	II-218
Tabel 2.211.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian .....	II-220
Tabel 2.212.	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi.....	II-220
Tabel 3.1.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Tahun 2010–2014.....	III-2
Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010–2014.....	III-3
Tabel 3.3.	Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2010–2014(%) .....	III-3
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Sektor dan Sub Sektor 2014 (%) .....	III-4
Tabel 3.5.	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 (%) .....	III-7
Tabel 3.6.	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 (%).....	III-8
Tabel 3.8.	Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010–2014 .....	III-8
Tabel 3.9.	PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya Tahun 2010–2014 .....	III-9
Tabel 3.10.	Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010–2014.....	III-12
Tabel 3.11.	Perkembangan Laju Inflasi Kota Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2014 .....	III-18
Tabel 3.12.	Laju Inflasi Kota Temanggung Per Bulan Dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014.....	III-19
Tabel 3.13.	Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-22
Tabel 3.14.	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-23
Tabel 3.15.	Ketergantungan Fiskal Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-24
Tabel 3.16.	Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-25
Tabel 3.17.	Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Temanggung	



	Tahun 2010-2014 .....	III-25
Tabel 3.18.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 .....	III-30
Tabel 3.19.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 .....	III-33
Tabel 3.20.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 .....	III-36
Tabel 3.21	Alokasi Dana DAK Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-37
Tabel 4.1.	Keterkaitan Antara Visi , Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung .....	IV-9
Tabel 4.2.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 .....	IV-23

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung .....	I-2
Gambar 1.2	Hubungan Rancangan Awal RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Temanggung .....	II-1
Gambar 2.2	Kuadran Tipologi <i>Klassen</i> Struktur dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan .....	II-23
Grafik 2.1	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014.....	II-18
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2010- 2014 .....	II-21
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Kabupaten Temanggung Tahun 2005- 2014 .....	II-25
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Williamson Antar Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	II-27
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2010- 2014 .....	III-5
Grafik 3.2	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014.....	III-10
Grafik 3.3	Peringkat PDRB per Kapita Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 .....	III-11
Grafik 3.4	Indeks Berantai PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-13
Grafik 3.5	Inflasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-17
Grafik 3.6	Inflasi Kota Temanggung Tahun 2005-2014.....	III-18
Grafik 3.7	Laju Inflasi Kota Temanggung 2013-2014.....	III-19
Grafik 3.8	Perkembangan Indeks Williamson Antar Kecamatan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 .....	III-21

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan tahapan ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan tahun ke IV pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2017.

Adapun visi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD 2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf d, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

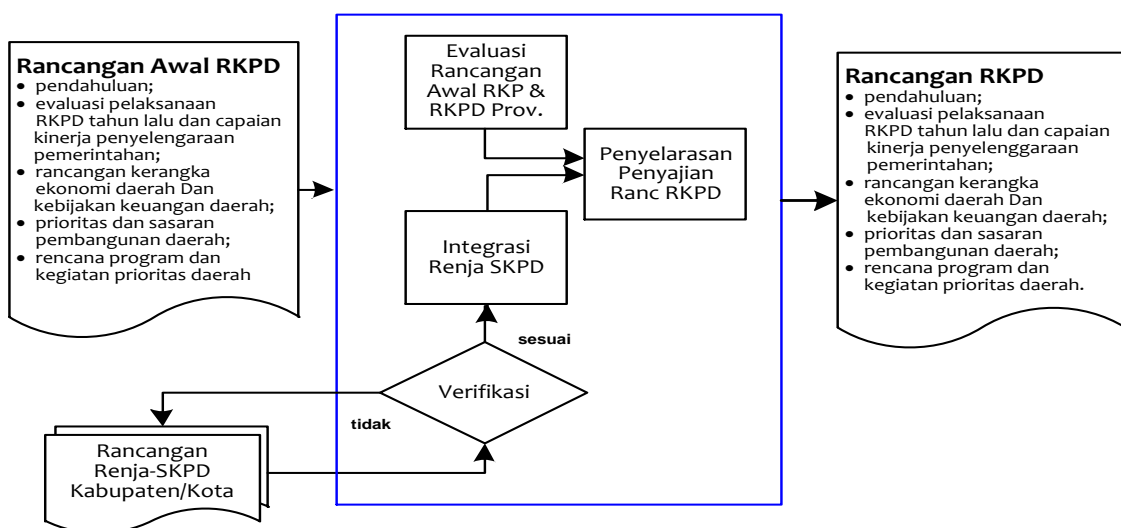
Bahwa dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan RKPD dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun 2015;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Forum konsultasi publik;
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
13. Penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
14. Penyusunan dan pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
16. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Penyusunan RKPD yang dijelaskan dalam bagian ini digunakan untuk menyusun RKPD merupakan rangkaian mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD melalui proses sebagai dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1  
Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung



Dari gambar tersebut tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan

rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyesuaian penyajian RKP.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Perumusan RKP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKP untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Temanggung menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKP merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

## **C. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

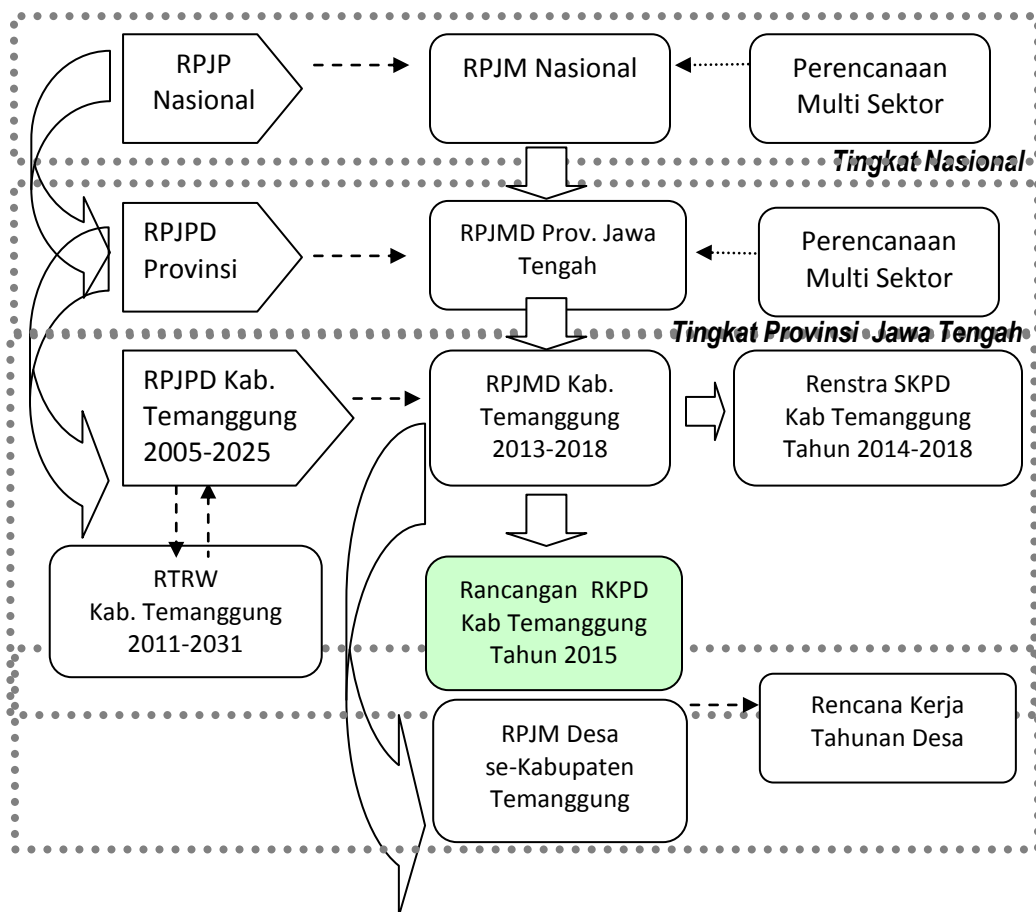
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan  
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

#### D. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.2.  
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 didasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional antara lain *Roadmap* Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) di Indonesia, *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan *Masterplan* Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 juga disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan multi sektoral di tingkat daerah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta dokumen perencanaan multi sektoral di tingkat Provinsi Jawa Tengah antara lain Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, dan dokumen perencanaan lainnya.

#### **E. Kaidah Pelaksanaan**

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama satu tahun di Tahun 2017 dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya.

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285, perubahan RKPD dapat dilaksanakan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rancanangan awal RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang yang meliputi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2017 dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, di samping itu juga memuat dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi



dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta memuat permasalahan pembangunan daerah yang meliputi: permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

### BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan perumusan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, yang terdiri atas kebijakan umum, strategi, prioritas pembangunan daerah, prioritas pengembangan kewilayahan, tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, indikator kinerja, target, dan satuan.

### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat perencanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

### BAB VI PENUTUP

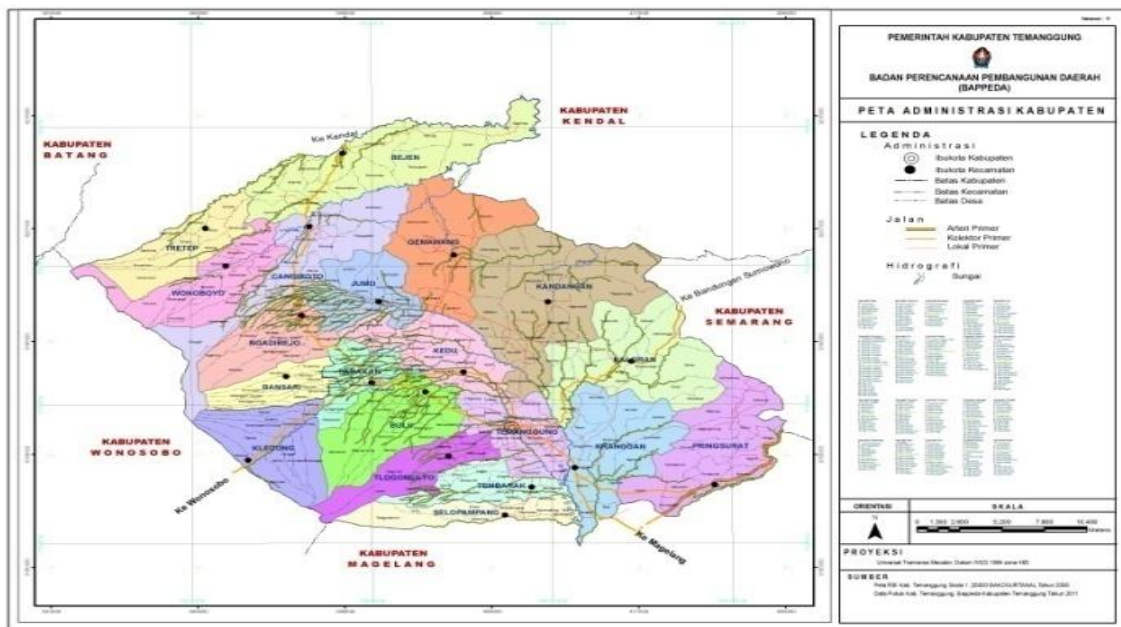
## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan daerah, maka perlu diketahui gambaran umum kondisi daerah yang ada pada tahun penyusunan perencanaan sebagai basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan daerah tersebut. Gambaran umum kondisi daerah dimaksud meliputi aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, dilengkapi dengan hasil analisis terhadap lingkungan strategis yang melingkupinya.

Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Kabupaten Temanggung



Gambaran umum kondisi daerah akan memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan/capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian hasil pembangunan daerah pada periode berikutnya.

#### 1. Aspek Geografi dan Demografi

##### a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha. Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.425 Dusun, 139 lingkungan,

1.518 Rukun Warga, 5.792 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Secara rinci, pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	%
1	Parakan	14	2	57	22	77	340	2,223	2,55
2	Kledung	13	-	42	-	44	144	3,221	3,70
3	Bansari	13	-	45	-	45	182	2,254	2,59
4	Bulu	19	-	94	-	86	310	4,304	4,94
5	Temanggung	6	19	23	108	138	590	3,339	3,96
6	Tlogomulyo	12	-	52	-	44	161	2,484	2,72
7	Tembarak	13	-	75	-	60	226	2,683	3,08
8	Selopampang	12	-	43	-	52	141	1,729	1,99
9	Kranggan	12	1	100	6	97	268	5,761	6,62
10	Pringsurat	14	-	118	-	112	376	5,728	6,58
11	Kaloran	14	-	111	-	104	428	6,392	7,34
12	Kandangan	16	-	110	-	104	385	7,836	9,00
13	Kedu	14	-	108	-	108	421	3,496	4,02
14	Ngadirejo	19	1	98	3	113	405	5,331	6,12
15	Jumo	13	-	69	-	61	281	2,932	3,37
16	Gemawang	10	-	59	-	63	336	6,711	7,71
17	Candiroti	14	-	77	-	74	283	5,994	6,88
18	Bejen	14	-	51	-	54	152	6,884	7,91
19	Tretep	11	-	32	-	27	155	3,365	3,86
20	Wonobojo	13	-	61	-	55	208	4,398	5,05
<b>Jumlah</b>		<b>266</b>	<b>23</b>	<b>1.425</b>	<b>139</b>	<b>1.518</b>	<b>5.792</b>	<b>87.065</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan di Kabupaten Temanggung yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu seluas 7.836 Ha atau sebesar 9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Selopampang yaitu seluas 1.729 Ha atau hanya sebesar 1,99 persen dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroti
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonobojo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, maka dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

## **2) Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Berdasarkan zona fisiografi, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 2 (dua) zona yaitu:

- 1) Zona gunung dan pegunungan dengan morfologi berupa rangkaian gunung dan pegunungan dengan lembah dan lereng yang curam, dan
- 2) Zona depresi sentral yang merupakan dataran dengan dukungan aliran sungai dan lembah yang subur.

## **3) Kondisi Topografi**

Kabupaten Temanggung memiliki topografi yang kompleks dan beranekaragam sesuai dengan tipikal wilayah yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70% (datar sampai dengan sangat curam).

Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara.

Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, tergambarakan melalui tabel 2.3.

Tabel 2.3.  
Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Jenis/Kelas Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase
1	Datar (0 - 2 %)	968	1,17
2	Bergelombang (2 – 15 %)	32.492	39,31
3	Curam (15 - 40 %)	31.232	37,88
4	Sangat Curam (> 40 %)	17.983	21,64
Jumlah		82.675	100

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.3, maka topografi dan kemiringan wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500-1.450 m dpl, wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.  
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian  
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	400 – 500	8.468	10,21	Temanggung, Jumo, Tembarak, Candiroto, Pringsurat, Kandangan
2	500 – 750	36.194	43,80	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu, Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak, Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat, Bejen, Candiroto, Kandangan
3	750 – 1.000	20.079	24,30	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu, Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak, Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat, Bejen, Candiroto, Kandangan, Ngadirejo
4	1.000 – 1.500	11.428	13,80	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Tlogomulyo, Kaloran, Selopampang, Candiroto
5	> 1.500	6.429	7,80	Parakan, Bulu, , Tretep, Wonoboyo, Selopampang, Ngadirejo, Tlogomulyo
Jumlah		82.598	100	

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Berdasarkan tabel 2.4 maka sebagian besar wilayah terletak pada ketinggian 500-750 m dpl, yaitu mencakup 43,8 persen dari total luas wilayah. Sedangkan luas terkecil ada pada ketinggian >1500 m dpl, hanya 7,8 persen.

Selanjutnya berdasarkan tabel-tabel tersebut diketahui adanya perbedaan luas wilayah, dari sisi administrasi, kemiringan, dan ketinggian. Perbedaan tersebut disebabkan karena metode dan pendekatan penghitungan yang berbeda.

#### **4) Kondisi Geologi**

Dilihat dari sisi geologi, jenis tanah di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

a) Latosol coklat

Jenis tanah latosol coklat meliputi lahan seluas 26.563,47 Ha (32,13 persen) membentang di tengah-tengah wilayah Kabupaten Temanggung dari arah Barat Laut ke Tenggara.

b) Latosol coklat kemerahan

Jenis tanah latosol coklat kemerahan meliputi lahan seluas 7.879,93 Ha (9,53 persen) membentang sebagian besar di bagian Timur – Tenggara.

c) Latosol merah kekuningan

Jenis tanah latosol merah kekuningan meliputi lahan seluas 29.209,08 Ha (35,33 persen) membentang di bagian Timur dan Barat.

d) Regosol

Jenis tanah regosol meliputi lahan seluas 16.873,97 Ha (20,14 persen) membentang sebagian di sekitar kali Progo dan lereng-lereng terjal.

e) Andosol

Jenis tanah andosol meliputi lahan seluas 2.149,55 Ha (2,60 persen) membentang di aluvial antar bukit.

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi:

1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir .

#### **b. Demografi**

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi demografi yang meliputi jumlah, struktur, distribusi, dan perubahan yang terjadi dalam komposisi penduduk di dalam wilayah.

## 1) Pertumbuhan Penduduk

Selama periode 2010-2015, pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung fluktuatif dan belum memiliki kecenderungan menurun pada setiap tahunnya walaupun kisaran angka pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sudah dibawah 1%.

Pertumbuhan penduduk terkait tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk (terdapat faktor penambah yaitu kelahiran dan migrasi masuk/ imigrasi) atau penurunan jumlah penduduk (terdapat faktor pengurang yaitu kematian/mortalitas dan migrasi keluar/ emigrasi) pada suatu daerah dari waktu ke waktu.

Tabel 2.5.  
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kelahiran kasar (CBR) per 1.000	7,58	8,03	7,83	7,95	9,36	n.a
2	Angka kematian kasar (CDR) per 1.000	4,82	4,97	4,74	4,90	5,30	n.a
3	Angka kematian bayi (IMR) per 1.000	14,63	17,53	11,50	15,41	15,00	16,82
4	Laju pertumbuhan penduduk (‰)	0,92	0,76	0,86	0,88	-0,13	5,65
5	Migrasi Masuk	2.326	2.781	3.119	3.198	3.189	1.513
6	Migrasi Keluar	2.738	3.222	3.392	2.696	3.498	1.684

Sumber : BPS, Disdukcapil dan Dinas Kesehatan 2015

Dari tabel 2.5 dapat dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Temanggung periode tahun 2010 sampai dengan 2015, di mana Angka kelahiran kasar (CBR) jika dibandingkan antara tahun 2010 sebesar 7,58 dan pada tahun 2014 mencapai 9,39, atau mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen. Untuk data tahun 2015 sementara belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses pendataan oleh BPS Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Angka kematian kasar (CDR), jika dibandingkan antara tahun 2010 sebesar 4,82 dan pada tahun 2014 mencapai 5,30 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,48. Sedangkan Angka kematian bayi (IMR), jika dibandingkan antara tahun 2010 sebesar 14,63 dan pada tahun 2015 mencapai 16,82 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,19.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk, jika dibandingkan antara tahun 2010 sebesar 0,92‰ dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 5,56‰.

## 2) Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk tahun 2014 rata-rata 849 jiwa/km<sup>2</sup> dengan persebaran penduduk relatif merata. Sebaran penduduk menurut luas wilayah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan tercantum pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.  
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2014

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Parakan	51 030	22.23	2 296
2	Kledung	24 608	32.21	764
3	Bansari	22 090	22.53	980
4	Bulu	46 380	43.04	1 078
5	Temanggung	79 756	33.39	2 389
6	Tlogomulyo	22 367	24.84	900
7	Tembarak	29 022	26.84	1 081
8	Selopampang	18 357	17.29	1 062
9	Kranggan	45 610	57.61	792
10	Pringsurat	48 701	57.27	850
11	Kaloran	40 612	63.92	635
12	Kandangan	48 079	78.36	614
13	Kedu	56 139	34.96	1 606
14	Ngadirejo	52 007	53.31	976
15	Jumo	28 336	29.32	966
16	Gemawang	31 834	67.11	474
17	Candiroto	30 299	59.94	505
18	Bejen	19 570	68.84	284
19	Tretep	19 689	33.65	585
20	Wonoboyo	24 429	43.98	555
	Jumlah	738.915	870.65	849

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.6, pada tahun 2014 jumlah penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Temanggung dengan kepadatan sebanyak 2.389 jiwa/Km<sup>2</sup> dan paling sedikit di Kecamatan Bejen sebanyak 284 jiwa/Km<sup>2</sup>.

## 3) Struktur Penduduk

Penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai ciri-ciri demografis seperti pada umumnya penduduk Indonesia, yaitu



jumlahnya besar, berusia muda, tingkat perkembangan tinggi, dan perbandingan kota dan pedesaan agak timpang.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung laki-laki 370.398 jiwa (50,13%) dan perempuan 368.517 jiwa (49,87%). Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini terlihat pada rasio perbandingan jenis kelamin angkanya selalu lebih besar dari 100 persen dalam dua tahun terakhir, tahun 2014 sebesar 100,51 persen dan tahun 2015 sebesar 100,39 persen. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Temanggung tercantum pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah (SIAK)	Selisih
1	2010	361.728	359.951	721.679	817.537	95.858
2	2011	364.590	362.594	727.184	819.107	91.920
3	2012	367.807	365.611	733.418	821.517	88.099
4	2013	370.997	368.876	739.873	746.313	6.440
5*	2014	370.398	368.517	738.915	731.061	7.854
6*	2015	389.578	391.091	780.669	788.264	7.595

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan \*Catatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2015  
Keterangan : \*Penduduk pertengahan tahun, Disdukcapil data akhir tahun

Ada perbedaan jumlah penduduk antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan metode perhitungan yang berbeda, BPS menggunakan data sensus penduduk dengan obyek pendataan penduduk pertengahan tahun yang berdomisili di Kabupaten Temanggung, sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penghitungan berdasarkan penduduk yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Tabel 2.8.  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah
1	0 - 4	55.470
2	5 - 9	60.503
3	10 - 14	57.770
4	15 - 19	58.789
5	20 - 24	61.972
6	25 - 29	59.910
7	30 - 34	60.964
8	35 - 39	62.835
9	40 - 44	59.910
10	45 - 49	60.964

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah
11	50 - 54	62.835
12	55 - 59	59.849
13	60 - 64	60.360
14	65 - 69	52.351
15	70 - 74	45.853
16	>= 75	23.041
	Jumlah	788.264

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Temanggung telah menikmati Bonus Demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun berjumlah 614.521 jiwa (77,96 persen). Artinya lebih dari dua kali lipat kelompok umur tidak produktif yaitu tahun 173.743 jiwa (22,04 persen).

Menurut analisis dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010 - 2035, menunjukkan bahwa dua orang usia produktif bertanggung jawab terhadap satu orang usia tidak produktif. Hanya yang menjadi masalah, apakah kelompok usia produktif itu termasuk penduduk yang berkualitas/produktif, yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu dengan penghasilan yang memadai.

Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi, imbasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya, terutama dalam menyiapkan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

#### **4) Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Selama periode 2010-2015, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tamat SD, SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan derajat pendidikannya.

Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 penduduk yang belum tamat SD sejumlah 174.184 orang, tamat SD/ sederajat sejumlah 192.462 orang, tamat SLTP/ sederajat

sejumlah 104.719 orang, tamat SLTA/ sederajat sejumlah 75.575 orang, tamat diploma I/II/III sejumlah 9.919 orang serta tamat DIV/Sarjana (S1) sejumlah 14.212 orang, tamat pasca sarjana (S2) sejumlah 626 orang dan tamat doktor (S3) sejumlah 84 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut tingkat pendidikan per kecamatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		D IV/ Sarjana	DI/DII/ DIII	SLTA	SLTP	SD	Tidak tamat SD	
1	Parakan	1460	1012	7223	6423	10026	11012	37156
2	Kledung	138	105	1298	3147	7203	5269	17160
3	Bansari	245	185	1449	3019	5209	10451	20558
4	Bulu	703	479	3823	5.440	10.755	17.965	34269
5	Temanggung	4606	2426	16607	11228	18399	13284	66550
6	Tlogomulyo	167	138	1383	2767	5859	5849	16163
7	Tembarak	426	303	2801	4261	7036	5895	20722
8	Selopampang	268	207	1839	2607	5840	4258	15019
9	Kranggan	904	563	5654	7805	9355	10572	34853
10	Pringsurat	642	420	5042	8011	13323	5399	32837
11	Kaloran	508	438	3905	6968	11070	6265	29154
12	Kandangan	633	497	3920	6676	11117	7973	30816
13	Kedu	1129	824	5787	7075	13888	17376	46079
14	Ngadirejo	908	390	5462	8330	16938	11221	43249
15	Jumo	387	336	2296	4024	7589	6820	21452
16	Gemawang	188	192	1285	3676	8589	8772	22702
17	Candiroto	495	512	2651	3954	8878	10975	27465
18	Bejen	170	214	1447	3372	6737	3456	15396
19	Tretep	82	87	458	2501	6259	5756	15143
20	Wonobojo	153	211	1248	3435	6392	5616	17055
	Jumlah	14212	9539	75578	99823	190462	174184	563798

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.9 Kecamatan Temanggung memiliki penduduk yang telah menempuh perguruan tinggi dengan kualifikasi sarjana sebanyak 4.606 orang. Sedangkan terendah menempuh perguruan tinggi dengan kualifikasi sarjana adalah kecamatan Tretep sebanyak 82 orang.

Untuk pendidikan DI-DIII Kecamatan Temanggung juga menduduki tempat terbanyak yaitu sejumlah 2.426 orang. Sedangkan terendah Kecamatan Tretep yang warganya mengenyam pendidikan DI-DIII sebanyak 87 orang.

##### 5) Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sebagai daerah agraris maka sebagian besar penduduk usia 10 tahun ke atas mempunyai mata pencaharian atau jenis pekerjaan pada bidang pertanian (kurang lebih 53 persen). Jenis pekerjaan lainnya adalah bidang industri, bangunan, perdagangan, pengangkutan, jasa, dan bidang lainnya.

Berdasarkan perbandingan tiga sektor utama jenis pekerjaan, sektor pertanian masih mendominasi yaitu sebesar 53 persen, selanjutnya sektor pelayanan/jasa sebesar 30,30 persen dan sektor manufaktur/industri sebesar 16,70 persen (Data Susenas, 2012). Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung usia 10 tahun ke atas menurut lapangan usaha tercantum pada tabel 2.10.

Tabel 2.10.  
Penduduk Usia 10 tahun ke atas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015

No	Sektor/ Lapangan Usaha	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pertanian	208.957	53,00	213.910	53,00	213.910	53,00	218.366	53,00	236.198	58,23
2	Industri	41.791	10,60	42.782	10,60	42.782	10,60	43.673	10,60	28.141	6,94
3	Bangunan	20.896	5,30	21.390	5,30	21.390	5,30	21.836	5,30	18.799	4,63
4	Perdagangan	62.687	15,90	64.171	15,90	64.171	15,90	65.508	15,90	57.880	14,27
5	Pengangkutan	10.645	2,70	10.898	2,70	10.898	2,70	11.125	2,70	11.000	2,71
6	Jasa	42.974	10,90	43.995	10,90	43.995	10,90	44.911	10,90	47.855	11,80
7	Lain-lain	6.308	1,60	6.457	1,60	6.457	1,60	6.592	1,60	5.757	1,42
<b>Jumlah</b>		<b>383.719</b>	<b>100</b>	<b>403.603</b>	<b>100</b>	<b>412.011</b>	<b>100</b>	<b>412.011</b>	<b>100</b>	<b>405.630</b>	<b>100</b>

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## 6) Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Etnis

Dari komposisi penduduk berdasarkan agama dapat disampaikan bahwa mayoritas penduduk memeluk Agama Islam yaitu sebesar 93,79 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, selanjutnya diikuti oleh pemeluk Agama Kristen dan Katholik.

Tabel 2.11.  
Komposisi Penduduk Menurut Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2015

NO	Agama dan Aliran Kepercayaan	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	Islam	724.362	93,92
2	Kristen	19.653	2,55
3	Katholik	14.494	1,88
4	Budha	12.198	1,57
5	Hindu	455	0,06
6	Lainnya	201	0,02
<b>Jumlah</b>		<b>771.269</b>	<b>100</b>

Sumber : Kemenag Temanggung Tahun 2015

Agama Islam, Kristen dan Katholik tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, bahkan ada beberapa kecamatan yang hanya memiliki penganut tiga agama tersebut, yaitu Kecamatan Kledung, Tembarak, Selopampang, Kandangan dan Kedu. Agama Hindu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan

Temanggung, Parakan dan Candiroto. Agama Budha tersebar di 13 kecamatan dengan pengikut terbanyak di Kecamatan Kaloran, selanjutnya di Kecamatan Jumo. Komposisi penduduk menurut Agama dapat dilihat pada tabel 2.11.

## 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indexs* (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran riil per kapita dalam paritas daya beli masyarakat). Nilai IPM Kabupaten Temanggung tahun 2013 sebesar 75,00 sehingga termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah keatas.

Tabel 2.12.  
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

No	Variabel	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,8	74,11	74,47	74,74	75,00	n.a
1.	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	72,43	72,54	72,66	72,77	72,87	72,87
2.	Angka Melek Huruf (%)	95,94	95,94	95,96	95,97	95,99	95,99
	Rata-rata lama sekolah (th)	6,86	7,01	7,09	7,10	7,10	7,10
3.	Pengeluaran riil per kapita (Rp)	633,870	635,010	638,120	640.560	643.280	n.a

Sumber : ASPM Kabupaten Temanggung Tahun 2014, \* Dinas Pendidikan Kab.Temanggung.

Pada tahun 2013, apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah maka nilai IPM Kabupaten Temanggung berada di peringkat 9 (sembilan) dari 35 kabupaten/kota yang ada. Nilai IPM pada tahun 2013 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun peringkatnya menurun karena tahun 2009-2013 peringkat tujuh tapi di tahun 2013 menduduki peringkat sembilan.

Apabila dibandingkan dengan Angka IPM Provinsi Jawa Tengah maka Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di atas Angka IPM Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13.  
Perbandingan IPM antara Kabupaten Temanggung  
dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

No	Variabel	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Temanggung	Jateng	Temanggung	Jateng	Temanggung	Jateng	Temanggung	Jateng
	IPM	74,11	72,49	74,47	72,94	74,74	73,36	75,00	74,05
1.	Angka Harapan Hidup (th)	72,54	71,40	72,66	71,55	72,77	71,70	72,87	71,97
2.	Angka Melek Huruf (%)	95,94	89,95	95,96	90,34	95,97	90,45	95,99	91,71
	Rata-rata lama sekolah (th)	7,01	7,24	7,09	7,29	7,10	7,39	7,10	7,43
3.	Pengeluaran riil per kapita (Rp)	635,010	637,270	638,907	640.410	640.560	643.530	640,560	646,440

Sumber : ASPM Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah 2016

#### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

##### 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Salah satu indikator ekonomi makro daerah adalah PDRB. Perkembangan PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14.  
Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jutaan Rupiah	Pertumbuhan (%)	Jutaan Rupiah	Pertumbuhan (%)
2010	5.069.020,30	12,58	2.409.386,40	4,31
2011	5.603.983,71	10,55	2.521.439,02	4,65
2012	6.198.351,81	10,61	2.648.488,46	5,04
2013	6.915.876,33	11,58	2.781.320,87	5,02
2014	7.679.241,74	11,04	2.917.973,80	4,91

Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten. Temanggung Tahun 2015

Tabel 2.14 menunjukkan adanya peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku telah mencapai nilai Rp. 7.679.241,74 juta. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp. 6.915.876,33 juta sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 11,04 persen.

Pertumbuhan PDRB adhb sebesar 11,04 persen tersebut sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil

atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2014 sebesar 4,91 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,02 persen.

Dari Tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku adalah tahun 2010 yang mencapai 12,58 persen, sedangkan pertumbuhan terendah 10,55 persen terjadi pada tahun 2011. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan tampak bahwa pertumbuhan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung turun 0,02 persen dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2014 pertumbuhannya kembali turun menjadi 4,91 persen.

## 2) PDRB Perkapita

### a) PDRB Perkapita Kabupaten

Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB Perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangannya tercantum pada tabel 2.15.

Tabel 2.15.  
Perkembangan PDRB Per Kapita  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB Per kapita ADHB		PDRB Per kapita ADHK	
	Rupiah	Pertumbuhan (%)	Rupiah	Pertumbuhan (%)
2010	7.064.501,89	11,55	3.357.870,71	3,35
2011	7.738.502,63	9,54	3.481.837,83	3,69
2012	8.482.526,56	9,61	3.624.491,54	4,10
2013	9.381.988,23	10,60	3.773.103,86	4,10
2014	10.392.591,49	10,77	3.948.997,92	4,66

Sumber : PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2014

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama ini selalu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 PDRB perkapita Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 10.392.591,49 rupiah. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,77 persen dibandingkan PDRB perkapita tahun 2013 yang sebesar 9.381.988,23 rupiah. Sedangkan menurut harga konstan, besarnya PDRB perkapita tahun 2014 tumbuh sebesar 4,66 persen sehingga mencapai 3.948.997,92 rupiah meningkat dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 3.773.103,86 rupiah.

Jika memperhatikan tabel perkembangan PDRB perkapita dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita selalu naik yang menandakan bahwa kemakmuran penduduk Kabupaten Temanggung semakin meningkat. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Capaian PDRB perkapita Kabupaten Temanggung tersebut masih jauh dibawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah, namun setidaknya sudah dapat menggambarkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung. Perbandingan PDRB perkapita antara Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah tersebut pada tabel 2.16.

Tabel 2.16.  
Perbandingan PDRB Per Kapita  
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB perkapita ADHB (Rp.)		PDRB perkapita ADHK (Rp.)	
	Temanggung	Jawa Tengah	Temanggung	Jawa Tengah
2010	7.064.501	13.730.016	3.357.870	5.773.809
2011	7.738.502	15.240.878	3.481.837	6.058.600
2012	8.482.526	16.726.187	3.624.491	6.338.572
2013	9.381.988	18.740.496	3.773.103	6.706.740
2014	10.392.591		3.948.997	

Sumber : PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah.



## b) PDRB Perkapita Kecamatan

Pada tahun 2014 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, kecamatan dengan PDRB per kapita terbesar dicapai oleh Kecamatan Kledung dengan besaran 13.810.922,87 rupiah, sedangkan kecamatan dengan PDRB per kapita terendah adalah Kecamatan Candiroto yaitu sebesar 7.716.631,90 rupiah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, kecamatan yang menikmati kenaikan PDRB per kapita terbesar adalah Kecamatan Kranggan yang naik 12,71 persen yaitu dari 10.353.751,28 rupiah pada tahun 2013 menjadi 11.697.017,32 rupiah pada tahun 2014, sedangkan Kecamatan Tlogomulyo merupakan kecamatan yang PDRB per kapitanya mengalami kenaikan terendah yang hanya naik sebesar 7,73 persen yaitu dari 9.698.387,58 rupiah menjadi 10.447.786,92 rupiah.

Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di tingkat kecamatan selama 5 (lima) tahun terakhir tercantum pada tabel 2.17.

Tabel 2.17.  
PDRB Perkapita Kecamatan (Rupiah)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Parakan	8.736.752,28	9.321.346,62	10.309.153,85	11.374.402,71	12.863.724,48
2	Kledung	9.256.716,86	10.366.282,03	11.260.307,55	12.481.939,03	13.810.922,87
3	Bansari	6.447.682,17	7.237.362,19	7.856.181,34	8.556.046,94	9.552.012,68
4	Bulu	6.641.383,22	7.179.483,06	7.703.732,29	8.417.316,88	9.331.287,62
5	Temanggung	8.292.136,71	9.123.884,47	9.982.829,06	11.296.396,98	12.444.495,34
6	Tlogomulyo	7.053.933,03	7.971.303,09	8.709.421,61	9.657.294,57	10.447.786,92
7	Tembarak	6.895.223,99	7.698.483,50	8.338.075,47	9.276.908,80	10.188.023,22
8	Selopampang	6.249.404,86	6.722.242,98	7.333.816,59	8.099.564,55	8.907.657,02
9	Kranggan	7.845.437,35	8.185.278,10	9.171.900,08	10.353.751,28	11.697.017,32
10	Pringsurat	9.431.900,64	10.231.636,08	11.265.457,83	12.492.360,75	13.730.622,57
11	Kaloran	6.492.527,52	7.014.959,91	7.635.003,57	8.392.951,08	9.422.845,96
12	Kandangan	5.945.331,44	6.717.280,94	7.402.371,46	8.120.593,17	9.046.991,20
13	Kedu	6.358.778,01	6.662.878,35	7.382.099,01	8.055.197,94	8.907.995,51
14	Ngadirejo	6.023.948,38	6.710.054,89	7.363.873,83	8.218.491,78	9.062.730,21
15	Jumo	6.790.380,32	7.580.219,41	8.263.149,81	9.009.992,22	9.921.646,49
16	Gemawang	5.628.413,48	6.151.870,09	6.693.373,39	7.277.246,94	7.926.032,86
17	Candiroto	5.265.337,75	5.807.660,79	6.343.687,90	6.943.234,15	7.716.631,90
18	Bejen	6.955.916,12	7.721.769,35	8.363.567,49	9.101.919,32	9.938.848,24
19	Tretep	5.610.170,04	6.607.046,59	7.242.942,53	7.896.205,27	8.669.244,76
20	Wonobojo	6.128.300,67	7.067.114,23	7.829.903,98	8.576.405,08	9.416.696,14
	Kab. Temanggung	7.064.501,89	7.738.502,63	8.482.526,56	9.381.988,23	

Sumber : Gambaran PDRB Tingkat Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

### 3) Pengeluaran Riil Perkapita

Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat sepanjang tahun 2009-2013 yang ditunjukkan dengan kenaikan pengeluaran riil perkapita. Pengeluaran riil perkapita masyarakat di Kabupaten Temanggung tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 643.280,-. Pengeluaran riil perkapita memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat dikatakan bisa memenuhi standar hidup layak.

### 4) Pertumbuhan Ekonomi

#### a) Struktur Ekonomi Daerah

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Temanggung, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB. Hal ini dapat dilihat pada persentase distribusi PDRB menurut sektor baik menurut harga berlaku maupun harga konstan, dimana sektor pertanian menyumbang di atas 30 persen dari nilai total PDRB dan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 17 persen. Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18.  
Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

Sektor	Tahun (%)				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	33,11	32,75	32,57	32,03	30,69
2. Pertambangan dan Penggalian	1,05	0,96	0,86	0,85	0,85
3. Industri Pengolahan	17,68	17,26	17,61	17,80	18,34
4. Listrik dan Air Bersih	1,05	1,05	1,06	1,09	1,09
5. Bangunan	5,60	5,52	5,60	5,61	5,67
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	16,65	16,63	16,63	16,78	17,17
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,23	5,28	5,16	5,20	5,33
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush.	4,11	4,23	4,19	4,38	4,52
9. Jasa-jasa	15,52	16,32	16,32	16,26	16,34
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : PDRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

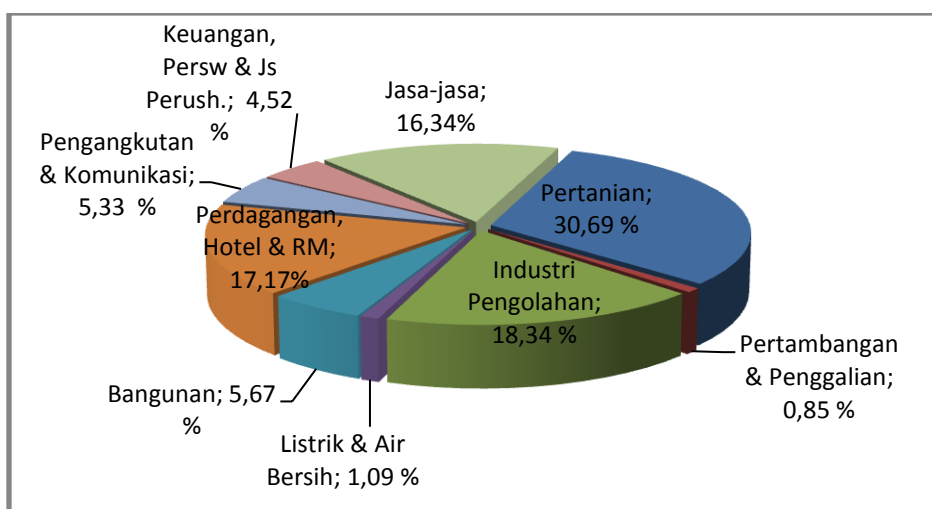
Pada tahun 2014, sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor pertanian sebesar 30,69 persen. Pada tahun 2014 peran sektor pertanian

mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2013 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,03 persen.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor industri pengolahan 18,34 persen dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dengan memberikan andil sebesar 17,17 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 0,85 persen.

Dari distribusi antar sektor terlihat bahwa ke sembilan sektor selama lima tahun terakhir memperlihatkan peranannya dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Kontribusi sektor Pertanian, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir.

Sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan sektor Listrik dan Air Bersih cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan yang relatif kecil. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti.



Gambar 2.2.  
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

Menurut harga konstan, andil terbesar pada PDRB tahun 2014 adalah sektor Pertanian sebesar 28,46 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memberikan sumbangan sebesar 29,13 persen. Andil terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yang memberikan

sumbangan sebesar 20,26 persen. Sektor berikutnya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang memberikan sumbangan sebesar 17,78 persen mengalami peningkatan 0,44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memberikan andil sebesar 17,34 persen. Sedangkan andil terkecil diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,65 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19.  
Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

Sektor	Tahun (%)				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	31,00	29,83	29,85	29,13	28,46
2. Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,79	0,68	0,66	0,65
3. Industri Pengolahan	19,78	20,09	19,96	20,21	20,26
4. Listrik dan Air Bersih	0,95	0,96	1,00	1,03	1,03
5. Bangunan	5,24	5,27	5,43	5,44	5,47
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	17,08	17,10	17,01	17,34	17,78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,71	5,98	5,98	6,01	6,05
8. Keuangan,Persewaan dan Jasa Perush.	3,94	4,04	4,06	4,25	4,35
9. Jasa-jasa	15,41	15,94	16,03	15,93	15,95
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2014

## b) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2014 sebesar 4,91 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 5,04 persen.

Tabel 2.20.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung,  
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2010	4,31	5,84	6,10
2011	4,65	6,01	6,46
2012	5,04	6,34	6,23
2013	5,02	5,81	5,78
2014	4,91	5,42	5,02

Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ini menunjukkan bahwa

perekonomian di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.20.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2014 sebesar 5,42 persen. Demikian juga bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah di Kabupaten Temanggung dikarenakan sektor yang dominan adalah sektor pertanian. Daerah agraris pada umumnya pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada daerah industri namun pertumbuhannya lebih merata. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota se wilayah karesidenan Kedu, maka Kabupaten Temanggung menempati posisi ketiga, yaitu setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.21.  
Pertumbuhan Ekonomi per Sektor (%)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

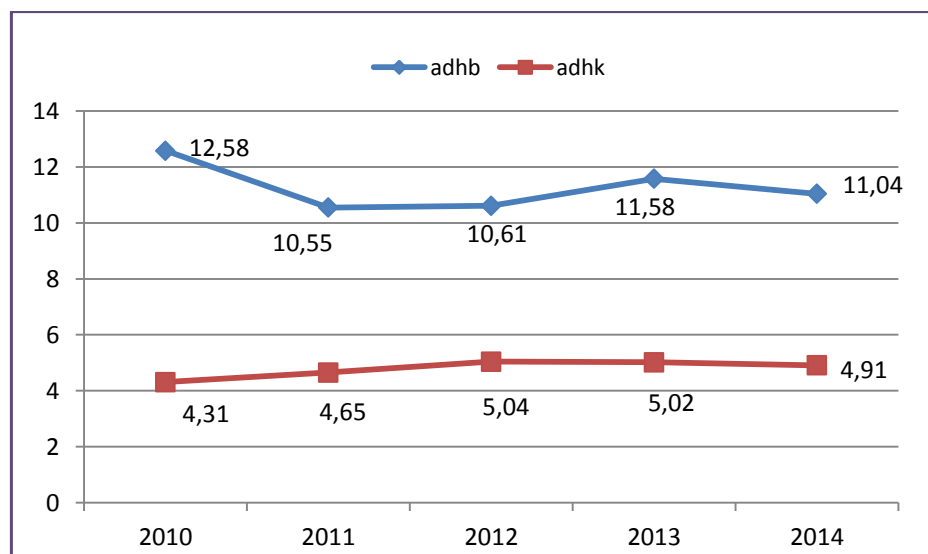
Sektor	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Pertanian	3,66	0,70	5,11	2,48	2,49	
2. Pertambangan dan Penggalian	-5,76	-6,58	-9,44	2,09	3,39	
3. Industri Pengolahan	3,78	6,28	4,36	6,36	5,19	
S4. Listrik dan Air Bersih	8,86	5,76	9,14	7,42	4,87	
S5. Bangunan	2,80	5,31	8,21	5,23	5,43	
S6. Perdagangan, Hotel dan RM	3,74	4,74	4,50	7,03	7,58	
u7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,20	9,72	4,92	5,61	5,68	
m8. Keuangan, Persw. dan Jasa Perusahaan	4,10	7,37	5,75	9,75	7,51	
b9. Jasa-jasa	7,29	8,18	5,61	4,41	5,00	
r	Pertumbuhan Ekonomi	4,31	4,65	5,04	5,02	4,91

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2015

Pada tabel 2.36 diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 semua sektor tumbuh positif. Dari sembilan sektor yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, ada enam sektor yang mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang sebesar 4,91 persen. Keenam sektor tersebut adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang mencapai 7,58 persen, sektor Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan yang sebesar 7,51 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 5,68 persen, sektor Bangunan 5,43 persen, sektor Industri Pengolahan 5,19 persen dan sektor Jasa-jasa yang sebesar 5,00 persen. Untuk tiga sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten adalah sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 4,87 persen, sektor Pertambangan dan Penggalan 3,39 persen dan sektor Pertanian yang tumbuh 2,49 persen.

Sektor Pertanian pada tahun 2014 pertumbuhannya hampir sama dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 2,48 persen. Di tahun 2014 semua sub sektor dalam sektor Pertanian mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub sektor Peternakan dan hasil-hasilnya yang tumbuh sebesar 4,97 persen sedangkan pertumbuhan terendah dialami oleh sub sektor Perikanan yang hanya tumbuh sebesar 1,69 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan yang tumbuh sebesar 2,03 persen disusul kemudian sub sektor Kehutanan dan Tanaman Perkebunan masing-masing tumbuh sebesar 2,02 persen dan 1,80 persen.



Gambar 2.3.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

### c) **Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan**

Pertumbuhan ekonomi di tingkat kecamatan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22.  
Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan (%)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Parakan	8,12	3,94	5,76	5,52	6,20
2	Kledung	7,55	9,38	3,67	5,06	3,93
3	Bansari	0,21	4,49	3,68	4,29	4,96
4	Bulu	6,19	2,59	3,8	5,02	4,68
5	Temanggung	0,27	5,72	5,43	7,47	4,23
6	Tlogomulyo	15,8	0,27	4,28	4,33	4,30
7	Tembarak	6,44	5,41	3,97	4,83	4,39
8	Selopampang	1,45	1,20	4,73	4,67	4,62
9	Kranggan	1,23	3,96	6,94	7,04	6,91
10	Pringsurat	3,26	5,91	5,99	4,97	3,73
11	Kaloran	0,32	1,23	3,75	4,34	6,38
12	Kandangan	0,41	6,60	5,03	4,64	5,92
13	Kedu	0,26	1,86	5,23	3,64	5,20
14	Ngadirejo	13,8	12,37	5,65	4,58	4,06
15	Jumo	5,71	2,62	3,74	3,78	5,16
16	Gemawang	3,24	0,69	3,93	3,64	4,73
17	Candiroto	1,86	4,03	5,18	3,59	4,95
18	Bejen	0,31	0,64	4,09	2,61	4,13
19	Tretep	12,7	5,54	5,14	3,23	4,37
20	Wonoboyo	14,8	5,73	6,16	3,17	4,27

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014

### 5) Analisis Tipologi *Klassen*

Analisis Tipologi *Klassen* digunakan untuk mengetahui struktur dan pola pertumbuhan ekonomi di masing-masing kecamatan. Analisis ini menggunakan data PDRB per kapita Kecamatan dan laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan. Analisis Tipologi *Klassen* pada dasarnya membagi suatu wilayah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita dengan hasil analisis berupa empat klasifikasi pola dan struktur pertumbuhan suatu wilayah dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

a) Daerah cepat tumbuh;

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kabupaten, namun PDRB per kapitanya lebih tinggi dari PDRB per kapita kabupaten.

b) Daerah maju tapi tertekan;

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita kabupaten.

- c) Daerah berkembang cepat;  
 Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten tetapi PDRB per kapitanya lebih rendah dari PDRB per kapita kabupaten.
- d) Daerah relatif tertinggal;  
 Daerah yang pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya lebih rendah dari angka tingkat kabupaten.



Gambar.2.4.

Kuadran Tipologi *Klassen* Struktur dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per kapita tingkat kecamatan yang dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per kapita tingkat Kabupaten, maka akan diperoleh pembagian daerah dalam Kuadran *Klassen* sebagaimana tercantum pada tabel 2.23.

Tabel 2.23.  
 Analisis Tipologi *Klassen* per kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

No	Kecamatan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Parakan	II	I	II	II	II
2	Kledung	II	II	I	II	I
3	Bansari	IV	IV	IV	IV	III
4	Bulu	III	IV	IV	IV	IV
5	Temanggung	I	II	II	II	I
6	Tlogomulyo	II	I	I	I	I
7	Tembarak	III	III	IV	III	IV
8	Selopampang	IV	IV	IV	III	IV
9	Kranggan	I	I	II	II	II
10	Pringsurat	I	II	II	I	I
11	Kaloran	IV	IV	IV	III	III
12	Kandangan	IV	III	IV	III	III
13	Kedu	IV	IV	III	III	III
14	Ngadirejo	III	III	III	III	IV
15	Jumo	III	IV	IV	III	III
16	Gemawang	IV	IV	IV	III	IV
17	Candiroto	IV	IV	III	III	III
18	Bejen	IV	IV	IV	III	IV
19	Tretep	III	III	III	III	IV
20	Wonobojo	III	III	III	III	IV

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014



Berdasarkan tabel 2.23 pada tahun 2014 terdapat 6 kecamatan yang berada di kwadran IV, hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi di kecamatan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi kabupaten dan pendapatan per kapitanya yang juga lebih rendah dari pendapatan per kapita kabupaten. Pendapatan per kapita yang rendah belum tentu nilai PDRB Kecamatannya rendah karena pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk di suatu daerah.

## 6) Laju Inflasi

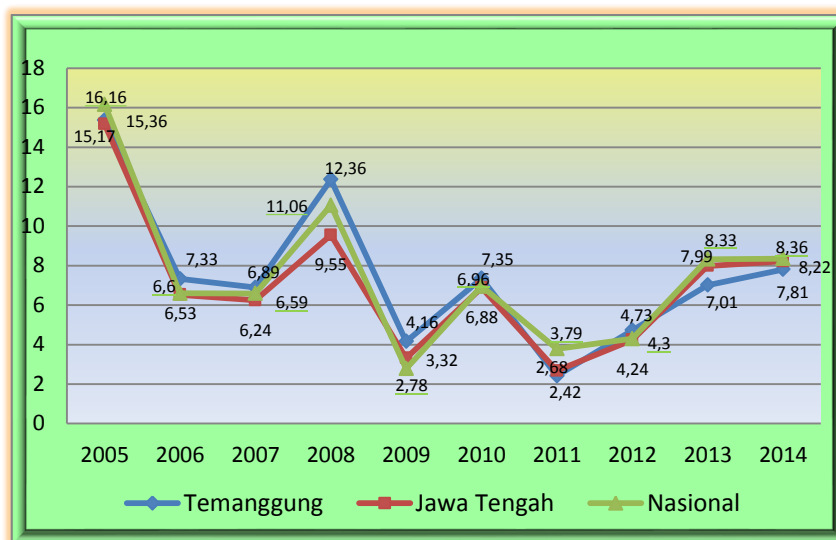
Laju inflasi menunjukkan perkembangan indeks harga konsumen atau mencerminkan kestabilan nilai tukar rupiah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Temanggung sangat dipengaruhi berbagai faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Daerah. Perkembangan harga barang dan jasa di Temanggung tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional.

Tabel 2.24.  
Perkembangan Laju Inflasi  
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2009-2014

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2009	12,36	9,55	11,06
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,30
2013	7,01	7,99	8,33
2014	7,81	8,22	8,36

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Selama periode 2009-2014, perkembangan laju inflasi di Kabupaten Temanggung tercantum pada tabel 2.24. Laju inflasi tahun 2014 naik sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pada Tahun 2014 dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,22 persen dan inflasi nasional sebesar 8,36 persen maka angka inflasi Temanggung masih lebih rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (data diolah)

Grafik 2.5.  
Perkembangan Inflasi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2005 – 2014

## 7) Indeks Ketimpangan

### a) Ketimpangan Antar Wilayah/Pembangunan Regional

Pembangunan yang dilakukan belum tentu dirasakan secara merata di semua wilayah administrasi yang dimiliki Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan secara alami pembangunan akan menghasilkan ketimpangan ekonomi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan secara regional dalam hal ini adalah ketimpangan ekonomi regional dilakukan dengan menggunakan *Indeks Williamsons (IW)*, dihitung dengan melihat PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Secara teknis, *Indeks Williamson* merupakan salah satu ukuran statistik untuk menghitung tinggi rendahnya variasi dari sekumpulan data. *Indeks Williamson* yang tinggi mengindikasikan adanya variasi data yang tinggi atau sama artinya dengan sebaran data yang tidak merata. Ketidakmerataan yang dalam konteks sebaran data PDRB per kapita menurut kecamatan dianggap sebagai ketimpangan pendapatan.

Rentang nilai *Indeks Williamson* dari nol sampai satu, dan idealnya diharapkan nilai indeks mendekati angka nol, yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang tinggi atau dapat dikatakan ketimpangan yang semakin kecil.

Dan bila semakin jauh dari nol maka akan menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Hasil analisis ketimpangan berdasarkan *indeks Williamson* dapat dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai *Indeks Williamson*  $< 0,3$ , tingkat ketimpangan sedang dengan nilai *Indeks Williamson* antara  $0,3- 0,7$  dan tingkat ketimpangan tinggi bila *Indeks Williamson*  $> 0,7$ .

Untuk melihat ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Temanggung maka dihitunglah *Indeks Williamson*. Dari hasil penghitungan tersebut menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Pada tahun 2010 *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung sebesar 0,18 kemudian turun pada tahun 2010-2012 menjadi 0,17 dan pada tahun 2013-2014 naik lagi menjadi 0,18. *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25.

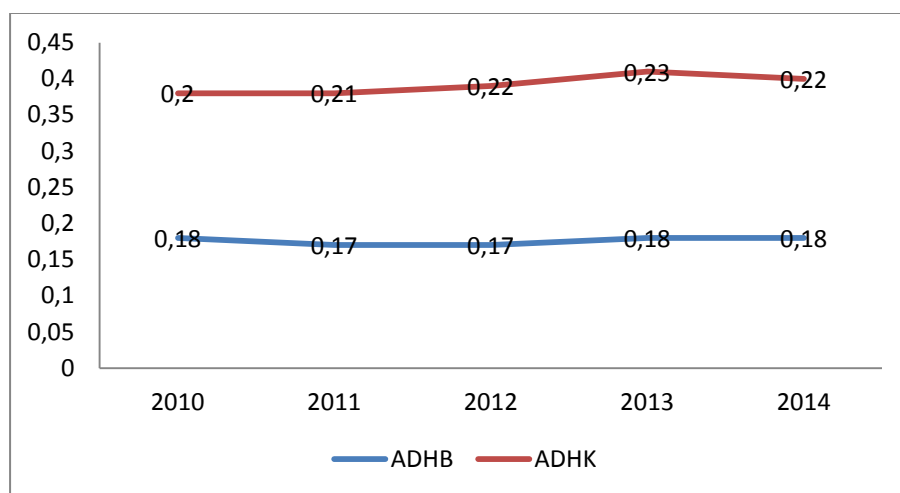
Dari hasil angka *Indeks Williamson* tersebut maka dapat diketahui bahwa ketimpangan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung berada pada ketimpangan yang rendah atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemerataan pendapatannya cukup tinggi karena nilai *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung  $< 0,3$ .

Sementara trend perkembangan ketimpangan pendapatan yang dicerminkan dalam *Indeks Williamson* di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25.  
Indeks Williamson Antar Kecamatan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014

Tahun	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
2010	0,18	0,20
2011	0,17	0,21
2012	0,17	0,22
2013	0,18	0,23
2014	0,18	0,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (data diolah)

Grafik 2.6.  
Perkembangan Indeks Williamson Antar Kecamatan  
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2010 – 2014

#### b) Ketimpangan Individu Masyarakat

Selain ketimpangan regional, pembangunan yang dilakukan belum tentu dirasakan dalam proporsi yang sama oleh setiap individu masyarakat di Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan tersebut digunakan alat ukur yaitu *Indeks Gini*.

Indeks Gini Kabupaten Temanggung dihitung berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.26. Sedangkan untuk data tahun 2013 dan tahun 2014 belum ada karena data terkait dengan data hasil susenas.

Tabel 2.26  
Perkembangan Indeks Gini  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Gini Ratio</b>	0,2759	0,3807	0,3479	0,3440	
<b>Criteria</b>	Low	Medium	Low	Low	

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2013, data diolah

Indeks Gini Kabupaten Temanggung tahun 2013 nilainya 0,3440 semakin mengecil dibandingkan dengan indeks gini tahun 2012 yang nilainya 0,3479 atau dengan kata lain ketimpangannya semakin mengecil. Sesuai kriteria UNDP

Kabupaten Temanggung ketimpangannya Low karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5. Namun angka tersebut di atas juga menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

## **8) Jumlah Rumah Tangga Miskin**

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2009-2014 mengalami penurunan. Jumlah rumah tangga miskin yang dipakai sebagai data dasar RPJMD 2013-2018 adalah data PPLS Tahun 2011 sejumlah 34.962 rumah tangga (17,27 persen), perkembangan pada tahun 2014 menjadi 29.376 (14,25 persen) rumah tangga, sehingga terjadi penurunan 3,02 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil validasi data PPLS Tahun 2011 oleh Bapermades. Pada tahun 2015 dilakukan validasi dan verifikasi data PBIJKN (Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan desa/kelurahan.

### **b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat**

Fokus Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Urusan Pendidikan meliputi angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni. Urusan Kesehatan meliputi angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan persentase balita gizi buruk. Ketenagakerjaan meliputi rasio penduduk yang bekerja. Secara jelas digambarkan dalam uraian berikut ini.

#### **1) Urusan Pendidikan**

##### **a) Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang mendasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca.

Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan

cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Pada tahun 2014 capaian angka melek huruf di Kabupaten Temanggung sebesar 95,99 persen. Menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Sisanya penduduk yang belum melek huruf sebesar 4,01 persen, yaitu sebagian besar penduduk berusia lanjut usia yang tidak memungkinkan tersentuh dengan program pengentasan melek huruf karena faktor usia.

Tabel 2.27.  
Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Melek Huruf	95,94	95,96	95,97	95,99	95,99	95,99

Sumber : ASPM dan BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### b) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung tahun 2014 mencapai 7,10 yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Temanggung mencapai SMP kelas satu atau masih dibawah jenjang pendidikan dasar. Dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 7,09 maka ada peningkatan sebesar 0,01.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Masih menjadi kewajiban pemerintah daerah bersama masyarakat untuk lebih mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar \_ambilan tahun melalui peningkatan capaian angka rata-rata lama sekolah.

Tabel 2.28.  
Angka Rata-rata Lama Sekolah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata Lama Sekolah	7,01	7,09	7,10	7,10	7,10	7,10

Sumber : ASPM dan Dinas Pendidikan Tahun 2015

### c) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 tahun. APK merupakan daya serap penduduk usia sekolah di tiap jenjang pendidikan.

Selama enam tahun terakhir APK yang tertinggi terdapat di tingkat SD/Sederajat dan yang terendah di tingkat SMA/Sederajat. Berdasarkan APK diketahui bahwa pada tingkat SD/Sederajat jumlah siswanya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal ini menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD/Sederajat. Perkembangan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan dasar tersebut pada tabel 2.29.

Tabel 2.29.  
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Jenis Sekolah	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/Sederajat	101,75	101,97	103,51	105,68	103,80	103,86
2.	SMP/Sederajat	92,58	95,95	96,00	95,11	96,07	96,11
3.	SMA/Sederajat	42,76	42,48	55,00	55,10	56,76	56,86

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

### d) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah jumlah penduduk yang memperoleh ijazah pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk dikali 100.

Tabel 2.30.  
Angka Pendidikan yang Ditamatkan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 - 2014

NO	Jenis Sekolah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tamatan SD/Sederajat (orang)	256.852	259.787	262.742	265.645	268.519
2.	Tamatan SMP/Sederajat (orang)	104.041	105.225	106.478	107.682	108.871
3.	Tamatan SMA/Sederajat (orang)	64.417	65.200	65.986	66.761	67.529
4.	Tamatan DI/DII/DIII (orang)	8.897	9.002	9.107	9.211	9.315
5.	Tamatan DIV/Sarjana (orang)	10.561	10.691	10.823	10.953	11.082
6.	Jumlah Penduduk (orang)	647.703	655.163	662.684	670.059	677.374
7.	Angka APT SD	39,66	39,65	39,65	39,65	39,64
8.	Angka APT SMP	16,06	16,06	16,07	16,07	16,07
9.	Angka APT SMA	9,95	9,95	9,96	9,96	9,97
10.	Angka APT DI/DII/DIII	1,37	1,37	1,37	1,37	1,38
11.	Angka APT DIV/Sarjana	1,63	1,63	1,63	1,63	1,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

Berdasarkan APT dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung hanya

tamat SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Perkembangan APT selama lima tahun terakhir pada setiap tingkatan pendidikan tersebut dalam tabel 2.30.

**e) Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia 7-18 tahun yang terdaftar di sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 tahun. APM merupakan daya serap penduduk usia sekolah di tiap jenjang pendidikan. Perkembangan APM selama enam tahun terakhir pada setiap tingkatan pendidikan tersebut dalam tabel 2.31.

Tabel 2.31.  
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Jenis Sekolah	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/Sederajat	94,60	95,35	95,40	95,42	95,45	95,49
2.	SMP/Sederajat	80,15	82,86	83,63	83,64	83,69	83,74
3.	SMA/Sederajat	32,75	35,64	35,80	38,99	40,36	40,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Selama enam tahun terakhir APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/Sederajat dan yang terendah di tingkat SMA/Sederajat. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan paling tinggi terdapat di tingkat SD/Sederajat.

Angka APM tingkat SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat yang lebih rendah menggambarkan tingkat partisipasi sekolah tingkat tersebut masih kurang, salah satu penyebabnya adalah adanya anak usia sekolah yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di luar Temanggung.

**2) Urusan Kesehatan**

**a) Angka Kematian Bayi**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan termasuk neonatal (kurang dari satu tahun). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.



Tabel 2.32.  
Angka Kematian Bayi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	193	209	149	173	165	184
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	12.344	11.924	12.371	11.228	11.010	10.939
3.	Angka kematian bayi	15,55	17,53	12,21	15,41	15,00	16,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Temanggung 2015

Angka kematian bayi pada tahun 2010-2015 masih fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel 2.32. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan bayi.

#### b) Angka Harapan Hidup

Pada tahun 2014 angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung telah mencapai 72,78 tahun. AHH yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang sejak lahir hingga akhir hayat. Bila dibandingkan dengan AHH tahun 2013 yang angkanya 72,87 tahun maka terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan.

Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Tabel 2.33.  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Angka Harapan Hidup	72,54	72,66	72,77	72,87	72,78	n.a

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015, \* prediksi

#### c) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak

dilihat dari berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Temanggung mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita. Hasil kegiatan PSG yang ditampilkan dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan BB/U tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,75 persen dari tahun 2014 yang sebesar 2,00 persen.

Penurunan tersebut cukup bermakna sehingga mencapai target yang ditetapkan yaitu nasional yaitu < 5%. Penurunan tersebut juga menunjukkan semakin baiknya program penanggulangan gizi buruk di Kabupaten Temanggung. Persentase gizi balita dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34.  
Kondisi Status Gizi Balita  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase balita gizi buruk	1,30	0,68	1,30	0,93	2,00	0,75
2.	Persentase balita gizi kurang	14,40	14,61	14,40	13,47	14,00	6,56
3.	Persentase balita gizi baik	83,00	83,59	83,00	83,75	82,20	89,9
4.	Persentase balita gizi lebih	1,30	1,12	1,30	1,85	1,80	2,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Selama enam tahun terakhir persentase balita gizi buruk terendah pada tahun 2011 yaitu 0,68 persen dan tertinggi pada tahun 2014 yaitu 2,00 persen, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 0,75 persen. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir selalu di bawah 10 persen, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional <5 persen.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

**d) Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Tabel 2.35.  
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup  
Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	49,23	113,42	109,02	88,92	62,34	127,16	27,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

**e) Angka Kematian Balita**

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian balita selama lima tahun masih fluktuatif, dari 16,93 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 18,84 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Faktor penyebab kematian balita antara lain karena penyakit infeksi dan juga dipengaruhi kematian bayi.

Tabel 2.36.  
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Kematian Balita Per 1.000 KH	16,93	18,87	13,00	16,74	20,98	18,84

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

**f) Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum pangan dan non pangan esensial. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin namun perlu memperhatikan pula tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2010 nilainya 1,73 kemudian tahun 2013 menjadi 1,46. Nilai indeks semakin mengecil sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat makin bagus karena semakin rendah nilai indeks maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dan dikatakan bahwa kesenjangan pengeluaran rata-rata individu semakin baik.

Tabel 2.37.  
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014**	2015**
Jumlah penduduk miskin (000)	95,4	94,9	89,5	91,1	n.a	n.a
Tingkat kemiskinan (%)	13,46	13,38	12,32	12,42	n.a	n.a
Indeks kedalaman kemiskinan	1,73	1,93	1,85	1,46	n.a	n.a
Indeks keparahan kemiskinan	0,34	0,45	0,41	0,26	n.a	n.a
Garis kemiskinan (Rp)	176.814	198.888	221.216	n.a	n.a	n.a

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, \*PPLS 2011,\*\*Data menunggu dari TKPKD*

Nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2010 nilainya 0,34 kemudian pada tahun 2013 menjadi 0,26. Nilai indeks semakin mengecil,

menunjukkan perkembangan yang bagus karena semakin rendah nilai indeks berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tidak timpang. Untuk data tahun 2014 karena belum selesai pendataannya maka data belum dapat ditampilkan. Secara jelas tercantum pada tabel 2.37.

### 3) Urusan Tenaga Kerja

#### a) Persentase Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel 2.38 dapat diketahui bahwa terjadi jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data aplikasi ketenagakerjaan pada tahun 2015 data yang masuk 254 desa dari 289 desa/kelurahan yang ada, dengan hasil nilai TPT 4,08 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 95,92 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.38.  
Persentase Penduduk Bekerja  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase penduduk yang bekerja	96,40	97,40	96,6	94,53	94,14	95,92

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung dan Disnakertrans Tahun 2015.

#### b) Perbandingan TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk

Selain rasio jumlah penduduk yang bekerja juga perlu diukur tingkat pengangguran terbuka sebagai proporsi pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja dan kemudian disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor jumlah penduduk, tampak dalam tabel 2.39.

Tabel 2.39.  
TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2009	4,09	0,93	73,39	4,24
2010	4,31	0,92	77,57	3,60
2011	4,65	0,76	76,70	2,60
2012	5,04	0,86	77,41	3,40
2013	5,02	0,88	76,87	5,47
2014	4,91	-0,13	85,38	5,86
2015	n.a	5,65	86,21	4,08

*Sumber : BPS dan Disnakertrans Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja saat ini maka salah satu fokus kebijakan dalam pembangunan pendidikan di daerah saat ini adalah melalui pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu

### **c. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga**

Fokus Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan olahraga. Secara jelas digambarkan dalam uraian berikut ini.

#### **1) Urusan Kebudayaan**

##### **a) Jumlah grup dan gedung kesenian**

Kelompok kesenian pada tahun 2015 sejumlah 1.165 kelompok yang tersebar di 20 kecamatan se Kabupaten Temanggung. Kelompok kesenian yang ada yang sudah terintegrasi dengan 64 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Temanggung, ada 5 jenis kesenian tradisional khas Kabupaten Temanggung antara lain Cengklungan, Wayang Kedu, Bangilun, Gatholoco dan Wulungunu.

Kelompok kesenian yang sudah teregistrasi sampai akhir tahun 2015 sebanyak 1.165 Grup Kesenian dengan kesenian yang paling berkembang dan mendominasi adalah grup kesenian kudu lumping.

Pada tahun 2012 Dinas Budparpora telah menciptakan tari kreasi baru dalam rangka pengembangan seni budaya yang menggarap seni tradisioanal asli Temanggung yaitu kolaborasi dari

Wulungsunu dan Gatholoco yang digarap oleh putra daerah yaitu DIDIK NINI THOWOK dengan nama tari “ WULANGGOTHO”, Tari ini telah disosialisasikan kepada masyarakat pencinta seni di Kabupaten Temanggung dan telah dilombakan pada tahun 2015 baik antar sekolah maupun antar kelompok seni.

Seni budaya di Kabupaten Temanggung termasuk berkembang dan beraneka ragam. Dalam rangka melestarikan seni dan budaya maka di Kabupaten Temanggung pada tiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya masyarakat.

Kelompok kesenian yang ada di masyarakat sudah terorganisir dengan 32 jenis kesenian tradisional khas Temanggung, antara lain adalah kuda lumping, prajuritan, rebana, cengklungan, sorengan, kubro, dan lain-lain. Kesenian yang paling berkembang dan penggemarnya juga paling banyak adalah kuda lumping.

Gedung Pemuda dan Kebudayaan, yang dibangun pada tahun 2014 yang berada di kawasan Kelurahan Kowangan meskipun dinamakan Gedung Kebudayaan masih belum memenuhi syarat sebagai gedung kesenian karena yang dinamakan gedung kesenian mempunyai spesifikasi khusus. Sedangkan untuk mendukung kegiatan kesenian di desa/kelurahan sebagian besar masih mempergunakan gedung balai pertemuan yang ada di desa/kelurahan.

Perkembangan jumlah grup kesenian dan gedung kesenian selama enam tahun terakhir tersebut pada tabel 2.40.

Tabel 2.40.  
Jumlah Grup dan Gedung Kesenian  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian	1.067	1.067	1.067	1.067	1.076	1.165
2	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	1	1	1
3	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
4	Rasio grup kesenian (per 10.000 penduduk)	14,6	14,6	14,5	14,4	14,7	14,9

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

## 2) Urusan Pemuda dan Olahraga

### a) Jumlah klub dan gedung olahraga

Gedung yang disediakan pemerintah secara fisik sudah cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan olah raga tingkat kabupaten, selain itu juga didukung dengan tempat-tempat pertemuan di tingkat desa/kelurahan yang sebagian besar juga

digunakan untuk kegiatan olahraga tingkat desa/kelurahan. Gambaran jumlah klub olahraga dan gedung olahraga dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41.  
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Capaian Pembangunan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah klub olahraga	807	807	807	1.024	1.024	1.091
2	Jumlah gedung olahraga.	2	2	2	2	2	5
3	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
4	Rasio klub olahraga (per 10.000 penduduk)	11,2	11,1	11,0	13,8	14,0	13,9

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

### 3. Aspek Pelayanan Umum

#### a. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Fokus layanan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, otonomi daerah, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, dan perpustakaan.

#### 1) Urusan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.



Adapun yang dibahas adalah Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Fasilitas Pendidikan, Angka Putus Sekolah (APtS), Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV,S2 atau lebih.

**a) Pendidikan Dasar**

Fokus layanan pendidikan dasar meliputi angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid.

**- Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dibanding jumlah penduduk usia pendidikan dasar di kali 1.000.

Data APS pendidikan dasar untuk 6 tahun terakhir masih fluktuatif, namun tampak bahwa APS pendidikan dasar penduduk usia 7-12 tahun lebih besar dibandingkan APS pendidikan dasar penduduk usia 13-15 tahun.

Tabel 2.42.  
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APS 7 - 12 tahun	959,4	981,7	996,5	987,91	994,25	999,31
2.	APS 13 - 15 tahun	938,6	960,2	957,4	873,60	993,25	993,34

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.42 menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Temanggung yaitu APS pendidikan dasar 7-12 tahun sampai tahun 2015 telah mencapai 999,31 dan APS pendidikan dasar 13-15 tahun telah mencapai 993,34. Tampak bahwa lebih tinggi APS pendidikan dasar 7-12 tahun.

Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

**- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar (negeri dan swasta) per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Temanggung berdasarkan jenjang yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs tercantum pada tabel 2.43.

Tabel 2.43.  
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah sekolah negeri	424	417	413	411	411	411
1.1.1	Jumlah SD negeri	422	415	411	409	409	409
1.1.2	Jumlah MI negeri	2	2	2	2	2	2
1.2.	Jumlah sekolah swasta	155	158	158	163	164	165
1.2.1	Jumlah SD swasta	20	20	23	23	23	23
1.2.2	Jumlah MI swasta	135	135	135	140	141	142
1.3.	Jumlah sekolah SD/MI	579	575	571	574	575	576
1.4.	Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	76.035	75.501	74.343	71.530	72.848	69.970
1.5.	Rasio per 10.000	76,15	76,16	76,81	80,25	78,93	86,61
	Rasio ideal per 10.000	52					
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah sekolah negeri	43	44	44	44	44	44
2.1.1	Jumlah SMP negeri	41	42	42	42	42	42
2.1.2	Jumlah MTs negeri	2	2	2	2	2	2
2.2.	Jumlah sekolah swasta	57	61	61	61	62	62
2.2.1	Jumlah SMP swasta	28	31	30	30	31	31
2.2.2	Jumlah MTs swasta	29	30	31	31	31	31
2.3.	Jumlah sekolah SMP/MTs	100	105	105	105	106	106
2.4.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	36.972	36.139	35.740	36.005	34.381	34.394
2.5.	Rasio per 10.000	27,05	29,05	29,38	29,16	30,83	30,8
	Rasio ideal per 10.000	52					

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Ketersediaan sekolah SD/MI hampir menyeluruh ada di semua desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung, sehingga dari segi akses dan transportasi semua penduduk usia 7-12 tahun sudah tidak merasakan kesulitan untuk menempuh pendidikan di SD/MI. Rasio 86,61 menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI di Kabupaten Temanggung cukup memadai.

Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs di Kabupaten Temanggung masih kurang memadai dengan angka 30,8 karena kondisi ideal di antara 10.000 penduduk usia 13-15 tahun adalah tersedia 52 SMP/MTs (rasio 52).

**- Rasio guru/murid**

Rasio guru per (terhadap) murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan

dasar. Rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar di SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dapat dilihat di tabel 2.44.

Tabel 2.44.  
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah guru dan kepala sekolah	5.799	5.673	5.682	5.728	5.527	5.488
1.1.1	Jumlah guru SD PNS	3.182	3.104	2.941	2.806	2.616	2.689
1.1.2	Jumlah guru SD Non PNS	1.272	1.299	1.425	1.576	1.634	1.558
1.1.3	Jumlah guru MI PNS	182	192	177	164	162	153
1.1.4	Jumlah guru MI Non PNS	1.163	1.078	1.139	1.182	1.115	1.088
1.2.	Jumlah murid sekolah negeri	59.404	58.802	57.695	56.305	55.245	54.599
1.2.1	Jumlah murid SD negeri	58.869	58.230	57.055	55.598	54.492	53.773
1.2.2	Jumlah murid MI negeri	535	572	640	707	753	826
1.3.	Jumlah murid sekolah swasta	17.837	18.021	18.989	19.461	20.107	20.978
1.3.1	Jumlah murid SD swasta	4.115	4.285	4.600	4.860	5.174	5.233
1.3.2	Jumlah murid MI swasta	13.722	13.736	14.389	14.601	14.933	15.745
1.4.	Jumlah murid	77.241	76.823	76.684	75.766	75.352	75.577
1.5.	Rasio per 10.000	750,77	738,45	740,96	756,01	733,49	726,25
	Rasio ideal per 10.000	500					
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah guru dan kepala sekolah	2.123	2.119	2.136	2.201	2.167	2.158
2.1.1	Jumlah guru SMP PNS	1007	1.001	975	950	933	442
2.1.2	Jumlah guru SMP Non PNS	520	558	557	581	612	603
2.1.3	Jumlah guru MTs PNS	105	89	94	102	95	89
2.1.4	Jumlah guru MTs Non PNS	491	471	510	568	527	524
2.2.	Jumlah murid sekolah negeri	20.879	22.481	21.944	20.032	20.498	20.739
2.2.1	Jumlah murid SMP negeri	19.264	20.751	20.310	18.431	18.788	18.978
2.2.2	Jumlah murid MTs negeri	1.615	1.730	1.634	1.601	1.710	1.761
2.3.	Jumlah murid sekolah swasta	10.100	10.725	11.292	10.588	11.521	11.885
2.3.1	Jumlah murid SMP swasta	5.457	5.746	5.531	5.067	5.633	5.900
2.3.2	Jumlah murid MTs swasta	4.643	4.979	5.761	5.521	5.888	5.985
2.4.	Jumlah murid	30.979	33.206	33.236	30.620	32.019	32.624
2.5.	Rasio per 10.000	685,30	638,14	642,67	718,81	676,79	661,48
	Rasio ideal per 10.000	500					

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Rasio guru dan murid lebih banyak di SD/MI dibandingkan SMP/MTs, perkembangannya relatif stabil untuk SD/MI dan untuk SMP/MTs selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 rasio guru dan murid di SD/MI adalah 726,25. Menunjukkan bahwa ketersediaan guru relatif memadai bahkan cenderung kelebihan guru. Idealnya per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI maupun SMP/MTs terdapat 500 guru.

## b) Pendidikan Menengah

Fokus pelayanan pendidikan menengah meliputi angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid.

### - **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah dibanding jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Perkembangan APS pendidikan menengah tahun 2010-2015 masih fluktuatif, bila dibandingkan dengan pendidikan dasar masih jauh perbedaannya. Hal ini kemungkinan karena faktor ekonomi, karena biaya pendidikan di jenjang pendidikan menengah termasuk tinggi, selain itu siswa juga membutuhkan biaya transportasi menuju sekolah karena keterbatasan jumlah sekolah yang ada dan juga untuk biaya keperluan sekolah lainnya.

Tabel 2.45.  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	11.857	12.491	14.621	15.321	15.352	15.410
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 thn	33.314	33.379	33.314	35.006	34.659	34.477
3.	APS Pendidikan Menengah	355,92	374,22	438,88	437,67	442,94	446,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah relatif rendah. APS pendidikan menengah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2010 sebesar 355,92 meningkat menjadi 446,96 pada tahun 2015. Capaian tersebut termasuk kategori rendah walaupun capaiannya meningkat.

### - **Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Temanggung termasuk masih rendah, hal ini karena keterbatasan keberadaan sekolah yang hanya tersebar di beberapa kecamatan, namun secara bertahap telah dilaksanakan beberapa pembangunan sekolah terutama SMK sehingga mengalami peningkatan.

Namun apabila dibandingkan dengan pendidikan dasar masih jauh lebih tinggi rasio ketersediaan sekolah di pendidikan dasar, menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah dasar lebih memadai. Rasio ketersediaan sekolah selama enam tahun terakhir tersebut pada tabel 2.46.

Tabel 2.46.  
Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah SMA/MA negeri	7	7	7	7	7	7
1.1	Jumlah SMA negeri	6	6	6	6	6	6
1.2	Jumlah MA negeri	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah SMA/MA swasta	17	19	20	20	22	24
2.1	Jumlah SMA swasta	7	7	7	7	9	9
2.2	Jumlah MA swasta	10	12	13	13	13	15
3.	Jumlah SMK negeri/swasta	19	22	22	23	23	23
3.1	Jumlah SMK negeri	6	6	6	6	6	6
3.2	Jumlah SMK swasta	13	16	16	17	17	17
4.	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK	43	48	49	50	52	54
5.	Jumlah penduduk usia 16 - 18 th	33.314	33.379	33.314	35.006	34.659	34.477
6.	Rasio per 10.000	12,90	14,38	14,71	14,28	15,00	15,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung 2015

#### - Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah untuk 6 (enam) tahun terakhir, tercantum dalam tabel 2.47.

Tabel 2.47.  
Rasio Guru Sekolah Menengah per 10.000 murid  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah murid sekolah negeri	8.878	9.378	9.687	9.977	10.434	11.155
1.1	Jumlah murid SMA negeri	3.840	3.898	3.946	4.056	4.215	4.527
1.2	Jumlah murid MA negeri	894	944	980	1.053	1.053	1.080
1.3	Jumlah murid SMK negeri	4.144	4.536	4.761	4.868	5.166	5.548
2.	Jumlah murid sekolah swasta	6.988	7.593	8.224	8.486	8.715	8.991
2.1	Jumlah murid SMA swasta	881	951	1.021	1.042	1.007	1.075
2.2	Jumlah murid MA swasta	911	1.137	1.413	1.583	1.751	1.875
2.3	Jumlah murid SMK swasta	5.196	5.505	5.790	5.861	5.957	6.041
3.	Jumlah murid sekolah SMA/MA/SMK negeri dan swasta	15.866	16.971	17.911	18.463	19.149	20.146
4.	Jumlah guru dan kepala sekolah	1.306	1.413	1.445	1.503	1.555	1.600
5.	Jumlah guru PNS	515	529	528	518	499	541
5.1	Jumlah guru SMA PNS	232	232	223	223	213	232
5.2	Jumlah guru MA PNS	74	69	71	71	69	70
5.3	Jumlah guru SMK PNS	209	228	234	224	217	239
6.	Jumlah guru Non PNS	791	884	917	985	1.056	1.060
6.1	Jumlah guru SMA Non PNS	172	173	188	193	250	225
6.2	Jumlah guru MA Non PNS	181	232	243	261	268	302
6.3	Jumlah guru SMK Non PNS	438	479	486	531	538	533
7.	Rasio per 10.000	823,14	832,60	806,77	814,06	812,05	794

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung 2015

### c) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak agar anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang digunakan menghitung usia 0-6 atau 3-6 tahun.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2009 mencapai 54,94 dan tahun 2015 mencapai 76,24. Terjadi peningkatan, hal ini didukung dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini sehingga hampir semua desa/kelurahan mempunyai PAUD baik yang dikelola oleh desa maupun perorangan, jumlah sekolah PAUD meningkat dari tahun 2009 yaitu 62 unit menjadi 776 unit pada Tahun 2015. Untuk jumlah murid PAUD meningkat tajam lima kali lipat sebesar 44,6 persen. Angka APK, APM, jumlah PAUD, murid dan guru secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat bagus.

Perkembangan PAUD di Kabupaten Temanggung selama tujuh tahun tersebut pada tabel 2.48.

Tabel 2.48.  
Perkembangan PAUD Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

Uraian	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Sekolah	54,94	65,36	67,84	76,15	76,15	76,18	76,24
Angka Partisipasi Kasar	55,91	58,16	64,59	62,54	66,13	67,13	67,63
Angka Partisipasi Murni	51,23	48,70	51,76	51,90	51,77	51,79	51,88
Jumlah sekolah PAUD	62	90	131	152	152	271	776
Jumlah Guru PAUD	272	336	523	583	909	1.719	2.402
Jumlah Siswa PAUD	2.047	2.510	4.093	4.912	7.439	5.472	24.427

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2015

#### d) Kondisi Ruang Kelas

##### - Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat

Bangunan atau gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa saat proses pembelajaran di kelas, sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa.

Tabel 2.49.  
Persentase Kondisi Ruang Kelas SD/MI  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No.	Kecamatan	SD			MI			SD dan MI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
01	PARAKAN	92,12	3,64	4,24	85,96	10,53	3,51	90,54	5,41	4,05
02	KLEDUNG	87,76	8,16	4,08	0	0	100,00	84,31	7,84	7,84
03	BANSARI	95,29	2,35	2,35	73,68	5,26	21,05	91,35	2,88	5,77
04	BULU	90,23	6,90	2,87	73,47	12,24	14,29	86,55	8,07	5,38
05	TEMANGGUNG	93,09	5,11	1,80	87,50	8,33	4,17	92,72	5,32	1,96
06	TLOGOMULYO	91,46	2,44	6,10	50,00	33,33	16,67	86,17	6,38	7,45
07	TEMBARAK	89,00	6,00	5,00	74,24	21,21	4,55	83,13	12,05	4,82
08	SELOPAMPANG	92,21	5,19	2,60	77,78	11,11	11,11	89,47	6,32	4,21
09	KRANGGAN	93,14	3,43	3,43	81,82	12,12	6,06	91,35	4,81	3,85
10	PRINGSURAT	88,89	7,25	3,86	74,73	16,48	8,79	84,56	10,07	5,37
11	KALORAN	94,67	3,55	1,78	65,57	14,75	19,67	86,96	6,52	6,52
12	KANDANGAN	86,39	12,24	1,36	81,58	11,40	7,02	84,29	11,88	3,83
13	KEDU	92,17	6,63	1,20	84,93	2,74	12,33	89,96	5,44	4,60
14	NGADIREJO	93,60	4,43	1,97	66,67	20,00	13,33	90,13	6,44	3,43
15	JUMO	87,13	7,92	4,95	70,27	16,22	13,51	82,61	10,14	7,25
16	GEMAWANG	90,08	4,13	5,79	82,35	14,71	2,94	88,39	6,45	5,16
17	CANDIROTO	88,62	5,69	5,69	66,67	17,65	15,69	82,18	9,20	8,62
18	BEJEN	87,21	8,14	4,65	90,00	10,00	0	87,93	8,62	3,45
19	TRETEP	94,03	4,48	1,49	69,70	30,30	0	86,00	13,00	1,00
20	WONOBOYO	86,79	11,32	1,89	75,86	20,69	3,45	84,44	13,33	2,22
	<b>Rata</b>	<b>90,00</b>	<b>5,89</b>	<b>3,12</b>	<b>76,18</b>	<b>14,22</b>	<b>9,60</b>	<b>87,48</b>	<b>7,86</b>	<b>4,66</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Pada tahun 2015 persentase kelas SD/MI dalam kondisi baik 87,48 persen, kondisi rusak ringan 7,86 persen dan

kondisi rusak berat 4,66 persen. Secara lebih jelas tercantum pada tabel 2.49.

- **Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat.**

Capaian pembangunan fasilitas pendidikan direpresentasikan dengan besaran ruang kelas dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 persentase kelas SMP/MTs dalam kondisi baik 89,16 persen, kondisi rusak ringan 8,85 persen dan kondisi rusak berat 1,99 persen. Secara lebih jelas tercantum pada tabel 2.50.

Tabel 2.50.  
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No.	Kecamatan	SMP			MTs			SMP dan MTs		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
01	PARAKAN	100,00	-	-	94,87	5,13	-	96,87	2,13	-
02	KLEDUNG	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-
03	BANSARI	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-
04	BULU	90,92	9,08	-	33,33	66,67	-	83,87	16,13	-
05	TEMANGGUNG	97,19	2,81	-	55,56	44,44	-	95,19	4,81	-
06	TLOGOMULYO	86,85	13,15	-	-	-	-	86,85	13,15	-
07	TEMBARAK	100,00	-	-	80,00	20,00	-	89,47	10,53	-
08	SELOPAMPANG	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
09	KRANGGAN	92,11	7,86	-	71,43	28,57	-	84,07	15,96	-
10	PRINGSURAT	93,02	6,98	-	71,43	28,57	-	87,72	12,28	-
11	KALORAN	89,36	10,64	-	35,71	42,86	21,43	78,15	17,38	4,48
12	KANDANGAN	88,47	7,89	3,64	68,18	18,18	13,64	82,68	10,83	6,49
13	KEDU	94,74	5,26	-	91,67	8,33	-	93,83	6,17	-
14	NGADIREJO	89,83	5,29	4,88	73,33	13,33	13,33	87,28	6,54	6,19
15	JUMO	82,13	17,87	-	78,57	21,43	-	80,52	19,48	-
16	GEMAWANG	100,00	-	-	60,00	40,00	-	90,48	9,52	-
17	CANDIROTO	83,52	7,66	8,82	44,44	22,22	33,33	75,34	10,71	13,95
18	BEJEN	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
19	TRETEP	69,62	30,38	-	66,67	16,67	16,67	68,01	22,90	9,09
20	WONOBOYO	100,00	-	-	66,67	33,33	-	88,00	12,00	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>93,55</b>	<b>5,39</b>	<b>1,06</b>	<b>74,61</b>	<b>20,31</b>	<b>5,08</b>	<b>89,16</b>	<b>8,85</b>	<b>1,99</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

- **Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat.**

Pada tahun 2015 persentase ruang kelas SMA, MA dan SMK dalam kondisi baik 97,92 persen, 83,33 persen dan 97,56 persen. Kondisi ruang kelas SMA, MA, dan SMK dalam kondisi rusak ringan 2,08 persen, 16,67 persen dan 2,44 persen. Sedangkan ruang kelas SMA, MA dan SMK kondisi rusak berat tidak ada. Secara lebih jelas tercantum pada tabel 2.51.

Tabel 2.51.  
Kondisi Ruang Kelas SMA/MA/SMK  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No.	Kecamatan	SMA			MA			SMK		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
01	PARAKAN	100,00	-	-	50,00	50,00	-	94,59	5,41	-
02	KLEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	BANSARI	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
04	BULU	-	-	-	100,00	-	-	66,67	33,33	-
05	TEMANGGUNG	96,30	3,70	-	94,87	5,13	-	97,84	2,16	-



No.	Kecamatan	SMA			MA			SMK		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
06	TLOGOMULYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	TEMBARAK	100,00	-	-	64,29	33,33	-	-	-	-
08	SELOPAMPANG	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
09	KRANGGAN	-	-	-	66,67	-	-	100,00	-	-
10	PRINGSURAT	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
11	KALORAN	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KANDANGAN	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
13	KEDU	-	-	-	77,78	22,22	-	100,00	-	-
14	NGADIREJO	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
15	JUMO	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
16	GEMAWANG	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
17	CANDIROTO	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
18	BEJEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TRETEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WONOBOYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>97,92</b>	<b>2,08</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>	<b>16,67</b>	<b>-</b>	<b>97,56</b>	<b>2,44</b>	<b>-</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### e) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2013 ke 2015 berbeda-beda naik turunnya. APtS SD/MI tahun 2013 dan 2015 tetap sama sebesar 0,16 persen. APtS SMP/MTs tahun 2013 sebesar 0,82 persen turun menjadi 0,51 persen pada tahun 2015. APS SMA/MA/SMK tahun 2013 sebesar 1,23 persen naik menjadi 1,60 persen pada tahun 2015.

Perkembangan angka putus sekolah setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52.  
Angka Putus Sekolah (APtS)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
APtS SD/MI	0,21	0,18	0,15	0,16	0,17	0,16
APtS SMP/MTs	0,98	0,91	0,84	0,82	0,55	0,51
APtS SMA/MA/SMK	1,65	0,97	1,01	1,23	1,62	1,60

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2015.

#### f) Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pada tahun 2009-2015 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53.  
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

Uraian (orang)	Tahun					
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI	11.093	11.344	11.204	11.799	11.911	12.058
SMP/MTs	9.025	9.737	9.684	9.480	9.389	9.911
SMA/MA/SMK)	4.176	4.448	4.816	5.070	5.388	5.753

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### g) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah siswa baru tingkat pertama pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa lulusan pada jenjang pendidikan di bawahnya pada tahun ajaran sebelumnya. Jumlah siswa lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam kurun waktu tahun 2009 - 2015 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2009 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 89,81 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 97,02 persen. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2009 sebesar 64,98 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 73,74 persen. Perkembangan angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs selama enam tahun terakhir tercantum pada tabel 2.54.

Tabel 2.54.  
Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015

Uraian	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI ke SMP/MTS	89,18	92,94	90,41	98,36	92,53	97,02	97,20
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	64,98	64,21	64,50	68,32	64,36	72,97	73,74

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### h) Guru yang memenuhi kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub>, S<sub>2</sub> atau lebih

Guru yang memenuhi kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub>, S<sub>2</sub> atau lebih diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas anak didiknya. Selama kurun waktu tahun 2010 - 2015, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub>, S<sub>2</sub> atau lebih di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.55.

Tabel 2.55.  
Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S<sub>1</sub>/D-IV, S<sub>2</sub>  
atau lebih di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub></b>							
a. Guru SD/MI	1.517	2.231	2.867	3.576	3.576	4.508	4.666
b. Guru SMP/MTs	1.523	1.606	1.661	1.726	1.726	1.823	1.904
c. Guru SMA/MA/SMK	1.098	1.087	1.217	1.228	1.228	1.381	1.493
<b>Kualifikasi S<sub>2</sub> atau lebih</b>							
a. Guru SD/MI	15	12	15	19	19	31	53
b. Guru SMP/MTs	28	45	43	53	53	62	87
c. Guru SMA/MA/SMK	31	33	49	80	80	90	119

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung 2015

## 2) Urusan Kesehatan

### a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah :

- a) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas);
- b) Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera);
- c) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lain yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- d) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi/derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan/ditingkatkan.

Rasio posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Temanggung tahun 2009 – 2015 tercantum pada tabel 2.56.

Tabel 2.56.  
Rasio Posyandu dan Balita  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah posyandu	1.477	1.486	1.485	1.493	1.497	1.505	1.506
2.	Jumlah balita	55.750	56.844	58.448	58.592	58.221	45.428	53.645
3.	Rasio	1 : 38	1 : 38	1 : 39	1 : 39	1 : 39	1 : 31	1 : 36
	Rasio Ideal	1 : 50						

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2015

Rasio posyandu terhadap jumlah balita idealnya adalah 1 : 50, di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 rasionya 1 : 36, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu termasuk memadai dalam melayani balita yang ada. Rasio posyandu terhadap balita yang masih kurang memadai adalah di Kecamatan Tretep, Kledung dan Kranggan sehingga perlu adanya peningkatan jumlah posyandu di tiga kecamatan tersebut.

**b) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk**

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada tabel 2.75.

Tabel 2.75.  
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	715.072	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
2	Jumlah Puskesmas	23	23	24	24	24	24	24
	a. Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	3	3	3	4
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	20	20	21	21	21	21	20
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 31.90	1 : 31.377	1 : 30.299	1 : 30.559	1 : 30.828	1 : 30.461	1 : 32.528
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	41	41	40	40	40	41	40
	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 17.441	1 : 17.602	1 : 18.180	1 : 18.335	1 : 18.497	1 : 17.831	1 : 19.517
4	Jumlah Pos Kesehatan Desa	152	156	157	159	161	162	162
	Rasio PKD per satuan penduduk	1 : 4.704	1 : 4.626	1 : 4.632	1 : 4.613	1 : 4.595	1 : 4.513	1 : 4.819

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Jumlah Puskesmas pada Tahun 2015 ada 24 terdiri dari 20 Puskesmas dengan rawat jalan dan 4 Puskesmas dengan rawat inap tersebar di 20 kecamatan sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui puskesmas sudah tersedia. Juga didukung dengan adanya 40 puskesmas pembantu dan 24 puskesmas keliling. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya masih dibawah standart Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk.

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, dan PKD.

Tabel 2.58.  
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Poliklinik Kesehatan Desa	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Parakan	51.145	2	1 : 25.573	2	1 : 25.573	7	1 : 7.307
2	Kledung	24.988	1	1 : 24.988	2	1 : 12.494	9	1 : 2.777
3	Bansari	22.323	1	1 : 22.323	0	0	8	1 : 2.481
4	Bulu	46.232	1	1 : 46.232	2	1 : 23.116	7	1 : 6.605
5	Temanggung	79.630	2	1 : 39.815	2	1 : 39.815	6	1 : 9.954
6	Tlogomulyo	22.266	1	1 : 22.266	2	1 : 11.133	6	1 : 3.711
7	Tembarak	29.031	1	1 : 29.031	0	0	7	1 : 4.839
8	Selopampang	18.419	1	1 : 18.419	1	1 : 18.419	8	1 : 2.303
9	Kranggan	45.237	2	1 : 22.619	2	1 : 22.619	6	1 : 7.540
10	Pringsurat	48.510	1	1 : 48.510	4	1 : 12.128	5	1 : 9.702
11	Kaloran	41.076	2	1 : 20.538	4	1 : 10.269	6	1 : 6.846
12	Kandangan	48.089	1	1 : 48.089	2	1 : 24.045	12	1 : 4.008
13	Kedu	55.856	1	1 : 55.856	2	1 : 27.928	10	1 : 6.207
14	Ngadirejo	52.230	1	1 : 52.230	1	1 : 52.230	12	1 : 4.186
15	Jumo	28.392	1	1 : 28.392	2	1 : 14.466	11	1 : 2.840
16	Gemawang	31.848	1	1 : 31.848	2	1 : 15.924	9	1 : 4.550
17	Candiroto	30.594	1	1 : 30.594	3	1 : 10.198	9	1 : 3.400
18	Bejen	19.633	1	1 : 19.633	2	1 : 9.817	10	1 : 1.964
19	Tretep	19.807	1	1 : 19.807	2	1 : 9.904	7	1 : 2.830
20	Wonobojo	24.567	1	1 : 24.567	3	1 : 8.189	7	1 : 3.071
	Jumlah	739.873	24	1 : 30.829	40	1 : 18.497	162	1 : 4.596

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Rasio puskesmas dibanding jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Kedu, jumlah penduduk lebih banyak di Kecamatan Temanggung namun karena ada dua puskesmas maka rasionya lebih kecil dibanding Kecamatan Kedu. Jumlah PKD paling banyak di Kecamatan Ngadirejo dan Kandangan sedangkan paling sedikit di Kecamatan Pringsurat.

### c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada tabel 2.59.

Tabel 2.59.  
Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk  
Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk	722.087	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
2.	Jumlah Rumah Sakit	4	4	4	4	4	4	4
2.1	Rumah Sakit Pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3	3	3
3.	Rasio Rumah Sakit	1 : 180.522	1 : 180.420	1 : 181.796	1 : 183.355	1 : 184.969	1 : 182.765	1 : 195.168

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2009–2015 jumlah rumah sakit ada 4 (empat), terdiri dari rumah sakit daerah 1 (satu) buah dan rumah sakit swasta 3 (unit) buah.

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2015 adalah 1: 195.168 artinya satu rumah sakit melayani 195.168 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Temanggung dengan penduduk sebesar 780.669 jiwa membutuhkan 8 rumah sakit atau membutuhkan 4 rumah sakit baru.

### d) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk selama enam tahun terakhir tersebut dalam tabel 2.60.

Selain dokter umum juga ada dokter gigi yang tersebar di kecamatan. Rasio dokter gigi persatuan penduduk per kecamatan selama enam tahun terakhir tersebut dalam tabel 2.84. Rasio terkecil di Kecamatan Kedu dan rasio terbesar di Kecamatan Temanggung.

Tabel 2.60.  
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
2	Jumlah dokter umum	77	88	89	91	91	91
3	Rasio dokter umum	1 : 9.373	1 : 8.263	1 : 8.240	1 : 8.128	1 : 8.034	1 : 17.742
4	Jumlah dokter gigi	37	38	39	39	39	29
5	Rasio dokter gigi	1:19.505	1:19.137	1:18.806	1:18.972	1 : 18.745	1 : 26.919
6	Jumlah dokter spesialis	22	24	24	25	25	25
7	Rasio dokter spesialis	1:32.804	1 : 30.299	1:30.559	1 : 29.595	1 : 29.242	1 :31.227

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Rasio dokter umum 1 banding 17.742 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 17.742 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter.

Jumlah dokter paling banyak di Kecamatan Temanggung sedangkan paling sedikit di kecamatan Bansari dan Wonobojo. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk maka rasio paling kecil di Kecamatan Temanggung dan paling besar di Kecamatan Kedu.

#### e) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU).

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2015 mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerjanya. Secara rinci terlihat pada tabel 2.61.

Tabel 2.61.  
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	2.701	2.691	2.776	2.652	3.619	3.863
2	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	2.426	2.608	3.243	2.972	3.619	3.863
3	Cakupan komplikasi kebidanan	89,82	96,92	116,82	112,07	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**f) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.62.  
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	12.168	11.944	12.488	9.495	11.031	10.970
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	12.916	12.043	12.532	12.628	11.033	11.561
3	Cakupan pertolongan persalinan	94,21	99,18	99,65	75,19	99,98	94,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2010 sampai dengan 2015 cenderung fluktuatif, hal ini bukan karena kurangnya penanganan namun karena sebagian dari jumlah ibu sasaran bersalin belum proses melahirkan sampai dengan bulan Desember.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.62.

**g) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada  $\geq 80\%$  sasaran bayi (0-11 bulan) dalam satu tahun. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi : 1(satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis



Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B, 1 (satu) dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 (dua) dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 (satu) dosis DT, 1 (satu) dosis campak, 2 (dua) dosis TT.

Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan desa UCI tiap tahun fluktuatif, pada tahun 2011 mencapai 100%, pada tahun 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2015 mendekati 100% karena ada desa yang capaiannya kurang dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Rincian data selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.63.

Tabel 2.63.  
Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	287	289	288	288	288	288
2	Persentase	99,31	100	99,65	99,65	99,65	99,65

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### **h) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejak 2010 sampai dengan 2015 selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah serta masyarakat di lingkungan sekitar. Secara jelas tersebut pada tabel 2.64.

Tabel 2.64.  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Balita Gizi Buruk	20	31	253	16	28	25
2	Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan	20	31	253	16	28	25
2	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015

### **i) Cakupan Ibu hamil dengan K4**

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga.

Cakupan ibu hamil dengan K4 di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 masih fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.65.

Tabel 2.65.  
Cakupan Ibu Hamil K4  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	12.607	12.554	12.801	11.694	11.094	10.991
2	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	93,35	93,30	92,24	92,41	94,30	90,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

### **j) Cakupan Kunjungan Neonatus**

Masa neonatal dalam siklus hidup manusia merupakan masa yang paling rentan karena seseorang masih dalam kondisi yang sangat lemah sehingga tingkat ketergantungannya sangat tinggi pada ibunya. Tingginya kematian pada bayi, sepertiganya terjadi dalam satu bulan pertama setelah kelahiran dan sekitar 80% kematian ini terjadi pada minggu pertama.

Berdasarkan hasil penelitian, kematian neonatal di Indonesia pada Tahun 1998–2002 sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan AKI terakhir yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup sehingga perlu mendapatkan perhatian sama besarnya dengan upaya penurunan AKI. Pelayanan kesehatan terhadap neonatal idealnya dilakukan minimal dilakukan pada saat bayi berusia 6-48 jam selama satu kali, 3-7 hari selama satu kali dan 8-28 hari selama satu kali.

Capaian kunjungan neonatus lengkap selama 6 tahun terakhir cenderung fluktuatif, mengalami 100 persen pada tahun 2014 seperti terlihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.66.  
 Penanganan Neonatus  
 Dengan Komplikasi Yang Ditangani  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah bayi lahir hidup	12.305	12.318	12.144	11.203	11.010	10.939
2	Jumlah kunjungan neonates	11.886	11.524	11.729	10.927	11.055	10.938
3	Cakupan kunjungan neonates	96,59	93,55	96,58	97,54	99,95	99,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**k) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2010 - 2015 masih fluktuatif. Masih rendahnya cakupan karena masih adanya sebagian masyarakat yang dropout dalam berobat. Perkembangannya tercantum pada tabel 2.67.

Tabel 2.67.  
 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC  
 BTA Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	301	283	202	179	275	285
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA	810	815	853	820	824	791
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37,16	34,72	23,68	21,83	12,00	36,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2015

**l) Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD**

Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantara nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500 – 100 juta jiwa per tahun. dengan demikian sekitar dua per lima penduduk dunia bertempat tinggal di daerah berisiko tinggi termasuk Indonesia.

Hasil Riskesdas 2007 di Jawa Tengah menyebutkan bahwa DBD lebih banyak diderita penduduk laki-laki, DBD terutama

diderita penduduk <15 tahun, mereka yang berpendidikan rendah dan mereka yang hidup di perkotaan juga lebih rawan terkena DBD.

Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, kasus DBD cenderung meningkat sejak tahun 2010 yaitu sebanyak 237 kasus menjadi 493 kasus di Tahun 2015. Seluruh kasus yang terjadi baik melalui penularan setempat maupun import dari wilayah luar Temanggung telah mendapatkan penanganan seluruhnya (100%).

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Temanggung tahun 2010-2015 tercantum pada tabel 2.68.

Tabel 2.68.  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penderita demam berdarah DBD	237	87	41	320	283	493
2.	Jumlah penderita demam berdarah ditangani	237	87	41	320	283	493
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2015

**m) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

Perkembangannya selama tahun 2010-2015 tersebut pada tabel 2.69.

Tabel 2.69.  
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat  
miskin Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis (orang)	8.225	15.497	871	154.771	158.834	51.530
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	3,51	6,61	0,38	53,01	34,42	76,29

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2015*

#### n) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2010 - 2015 cenderung fluktuatif. Capaian pada tahun 2015 sebesar 96,27 persen paling tinggi dalam enam tahun terakhir. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Temanggung telah melebihi target SPM sebesar 90 persen, perkembangannya selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.70.

Tabel 2.70.  
Cakupan Kunjungan Bayi  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Kunjungan Bayi	94,8	95,3	94,4	97,8	98,8	96,27
2	Jumlah Kunjungan Bayi	11.713	11.366	11.682	10.960	10.876	10.531
3	Jumlah Bayi Lahir Hidup	12.344	11.924	12.371	11.211	11.010	10.939

*Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung Tahun 2015*

#### o) Cakupan kunjungan Nifas

Pada saat masa nifas (paska persalinan) masih terjadi kemungkinan kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan paska persalinan minimal 3 (tiga) kali.

Cakupan pelayanan kepada ibu paska persalinan yang sesuai standar pada kurun waktu tahun 2010 - 2015 cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap ibu pasca melahirkan telah

merata dan sesuai standar. Data cakupan kunjungan nifas dapat dilihat pada tabel 2.71.

Tabel 2.71.  
Cakupan Kunjungan Nifas  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Kunjungan Nifas	89,63	96,89	94,56	96,25	99,98	92,35
2	Jumlah Kunjungan Nifas	11.576	11.668	11.823	10.828	11.031	10.677
3	Jumlah Ibu Nifas	12.916	12.043	12.503	10.842	11.031	11.561

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**p) Persentase penanganan KLB<24 Jam**

Kemampuan wilayah memberikan jaminan hidup yang sejahtera bagi penduduknya salah satunya dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap Desa/Kelurahan yang terkena Kejadian Luar Biasa (KLB).

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung yang terkena KLB selama enam tahun terakhir tidak sama setiap tahunnya. Dari Desa/Kelurahan yang terkena KLB tersebut telah tertangani seluruhnya, namun tidak semuanya dapat tertangani <24 jam. Hal tersebut disebabkan karena laporan yang terlambat dari desa/kelurahan yang terkena KLB. Jumlah desa/kelurahan dengan kejadian KLB ditangani selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.72.

Tabel 2.72.  
Jumlah Desa/Kelurahan dengan kejadian KLB  
ditangani < 24 jam di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa/kelurahan dengan kejadian KLB	38	24	26	45	31	24
2	Jumlah Desa/kelurahan dengan kejadian KLB yang ditangani <24 jam	37	23	25	44	31	24
3	Jumlah Desa/kelurahan dengan kejadian KLB yang tidak dapat ditangani <24 jam	1	1	1	1	0	0
4	Cakupan Desa/ Kelurahan dengan KLB yang ditangani < 24 jam (%)	97,37	95,83	96,15	97,78	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**q) Persentase rumah tangga yang Ber-PHBS**

Salah satu tolak ukur dari kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari rumah tangga yang mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Jumlah rumah tangga yang dipantau perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS dari tahun ke tahun tersebut pada tabel 2.73.

Tabel 2.73.  
 Persentase Rumah Tangga yang Ber-PHBS  
 Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah rumah tangga yang dipantau	200.064	205.747	208.532	205.988	197.660	204.180
2	Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS	139.429	152.357	156.964	156.897	156.294	170.725
3	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	69,69	74,10	75,27	76,2	79,07	79,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### r) **Persentase Desa Siaga Aktif**

Jumlah desa siaga aktif di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mencapai 100%, menunjukkan bahwa semua desa/kelurahan mampu dalam memberikan jaminan kehidupan masyarakat untuk memperoleh jaminan layanan kesehatan yang memadai. Keberadaan Desa Siaga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui pelayanan dasar kesehatan.

### 3) **Urusan Pekerjaan Umum**

#### a) **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a) Jalan Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6$  %), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b) Jalan Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6-1 %). Kerusakan yang ada belum menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu - lintas.

- c) Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10- 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- d) Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Tabel 2.74.  
 Jaringan Jalan  
 Dirinci menurut status dan kondisi jalan  
 Tahun 2011 - 2015

NO	KONDISI JALAN	KONDISI JALAN														
		JALAN NASIONAL					JALAN PROVINSI					JALAN KABUPATEN				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Baik	21,33	26,33	26,33	26,33	26,33	29,53	28,33	28,33	28,33	28,33	426,3	451,8	509,75	439,42	439,42
	Persen	46,7	57,7	57,7	57,7	57,7	49,8	47,7	47,7	47,7	47,7	70,5	74,7	69,7	59,45	59,45
2	Sedang	24,33	19,33	19,33	19,33	19,33	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	77,9	50,1	69,70	129,65	129,65
	Persen	53,3	42,3	42,3	42,3	42,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	12,9	8,3	15,8	17,54	17,54
3	Rusak	0	0	0	0	0	10,2	18,4	18,4	18,4	18,4	100,7	99,9	106,49	72,08	72,08
	Persen	0	0	0	0	0	17,2	31,0	31,0	31,0	31,0	16,6	16,5	14,6	9,75	9,75
4	Rusak Berat	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3,0	0	97,98	97,98
	Persen	0	0	0	0	0	11,8	0	0	0	0	0	0,5	0	13,27	13,27
	<b>Jumlah</b>	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	604,9	604,9	739,13	739,13	739,13

Sumber data : DPU Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel 2.74 diketahui bahwa jalan nasional yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung adalah sepanjang 45,66 Km. Pada tahun 2015 dari semua ruas jalan nasional tersebut 26,33 km dalam kondisi baik. Sedangkan yang kondisinya sedang menjadi 19,33 Km.

Untuk ruas-ruas jalan berstatus jalan provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung adalah sepanjang 59,33 Km. Apabila dilihat dari kondisi jalan pada Tahun 2015 maka jalan provinsi dalam kondisi baik 28,33 Km, kondisi sedang 12,6 Km, kondisi rusak 18,4 Km dan kondisi rusak berat tidak ada.



Jaringan jalan yang berstatus jalan kabupaten ada 545 ruas jalan dan mencakup 739,13 Km. Data Tahun 2015 menunjukkan bahwa jalan kabupaten dalam kondisi baik ada 439,42 Km, jalan yang kondisinya sedang 129,65 Km dan yang kondisinya rusak ringan yaitu 72,08 Km dan kondisi rusak berat yaitu 97,98 Km.

**b) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk**

Sarana peribadahan yang tidak ada di Kabupaten Temanggung adalah pura, walaupun ada penduduk yang beragama Hindu sejumlah 422 orang. Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar adalah ketersediaan masjid. Rasionya pada tahun 2015 sebesar 1 : 488, rasio ini akan lebih besar apabila jumlah mushola diikutkan.

Jumlah penduduk menurut agama dan ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 tersebut pada tabel 2.75.

Tabel 2.75.  
Rasio Tempat Ibadah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

NO	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah Pemeluk	Rasio
1	Mesjid	1.482	724.362	1 : 488
2	Gereja	96	34.147	1 : 355
3	Pura	0	455	-
4	Vihara	87	12.198	1 : 154
5	Kelenteng	8	201	1 : 25
	Jumlah	1.673	771.363	1 : 461

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**c) Persentase rumah tinggal bersanitasi**

Pelayanan di bidang sanitasi yang meliputi pengelolaan air limbah dan drainase pada tahun 2010 persentasenya mencapai 73,48%, mengalami kenaikan pada tahun 2015 yang mencapai 84,21%. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel 2.76.

Tabel 2.76.  
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi  
 Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	130.193	136.452	138.084	139.138	195.991	165.297
2.	Jumlah rumah tinggal	177.182	193.685	195.282	196.825	196.294	196.294
3.	Persentase	73,48	70,45	70,71	70,69	99,84	84,21

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**d) Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk**

Indikator lainnya untuk melihat kinerja di bidang persampahan adalah dengan melihat rasio Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per satuan penduduk. Ratio TPS adalah jumlah TPS per 1.000 jumlah penduduk.

Dalam data pada tabel 2.77 tampak bahwa ada peningkatan rasio selama enam tahun terakhir, dari 1 : 9.892 menjadi 1 : 8.500 jiwa penduduk. Namun capaian tersebut masih jauh dari angka ideal ratio TPS, sehingga masih sangat relevan untuk terus melakukan pembangunan di bidang persampahan. Data rasio TPS per satuan penduduk tercantum pada tabel 2.77.

Tabel 2.77.  
 Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk  
 Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah TPS (unit)	75	82	139	164	430
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	44.166	45.288	47.450	982.59	507.79
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	727.184	733.418	739.873	731.061	752.993
4.	Presentase daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk	6,07	6,17	6,41	6,17	6,74
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	1 : 8978	1 : 8.836	1 : 8.504	1 : 8.830	1 : 1.751

Sumber : DPU Kabupaten Temanggung tahun 2015

**4) Urusan Perumahan**

**a) Jumlah Kebutuhan Rumah**

Jumlah rumah yang dibutuhkan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah kepala keluarga (yang tercatat di Disdukcapil) dikurangi jumlah rumah. Secara rinci tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78.  
Kebutuhan Rumah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah KK	243.232	245.760	248.985	241.809	239.692	246.088
2.	Jumlah rumah	177.182	193.685	195.282	196.825	196.294	196.294
3.	Kebutuhan rumah	66.050	52.075	53.703	44.984	43.398	49.794

*Sumber : BPS, Bappeda, Bapermades Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

### b) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, secara jelas tergambar pada tabel 2.79.

Tabel 2.79.  
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	148.514	157.390	168.101	175.475	169.278	169.278
2.	Jumlah Rumah Tangga	190.113	191.074	192.080	193.096	193.096	193.096
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	78,12	82,37	87,52	90,87	95,33	95,33

*Sumber : PLN Kabupaten Temanggung Tahun 2015,\* Data sementara*

### c) Rumah tangga bersanitasi

Jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Temanggung selama enam tahun terakhir masih fluktuatif, dari jumlah rumah tangga yang bersanitasi ada penurunan karena jumlah rumah tangga yang bertambah sehingga persentase rumah tangga yang bersanitasi masih fluktuatif. Secara jelas tercantum pada tabel 2.80.

Tabel 2.80.  
Rumah Tangga ber Sanitasi  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah tangga bersanitasi (%)	73,48	70,45	70,71	74,28	94,3	71,25

*Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

**d) Lingkungan pemukiman kumuh**

Penanganan permukiman kumuh menjadi salah satu fokus dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. Kondisi permukiman yang sehat dan tertata dengan baik menjadi faktor peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Luasan kawasan kumuh pada tahun 2014 ada 47,62 Ha meliputi kawasan perkotaan Temanggung dan Parakan.

**e) Penataan Drainase**

Sistim drainase adalah sistim jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematuan air hujan dan berfungsi menghindarkan kawasan dari genangan. Sistem drainase menjadi salah satu pendukung/ komponen utama dari upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, disamping dua komponen lainnya yaitu pengolahan air limbah dan persampahan. Sampai dengan tahun 2014, penataan sistim drainase yang sudah memadai pada skala kawasan/kota baru mencapai 38,72%. Hal ini berarti di beberapa titik khususnya di perkotaan Parakan dan Temanggung yang perlu penanganan saluran drainase karena masih terjadi genangan dan luapan air hujan ke jalan.

**f) Rumah layak huni**

Rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah kali 100 persen. Rumah layak huni di Kabupaten Temanggung selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar 94,50 persen menjadi 86,6 persen pada tahun 2015. Perkembangan karena adanya beberapa program pemugaran rumah yang didukung pemerintah Kabupaten Temanggung melalui program pemugaran perumahan di desa binaan, program PNPM Mandiri Perdesaan, program PNPM Mandiri perkotaan, program pemugaran rumah tidak layak huni oleh dinas sosial, dan program rehab rumah oleh beberapa lembaga swasta seperti BAZDA, LAZIS dan TAMZIS. Persentase rumah layak huni tercantum pada tabel 2.81.

Tabel 2.81.  
Persentase Rumah Layak Huni  
Kabupaten Temanggung  
tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah layak huni	167.376	182.530	183.765	186.118	183.354	169.964
3.	Jumlah rumah	177.182	193.685	195.282	196.825	196.294	196.294
4.	Persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah	94,50	94,20	94,30	94,60	93,45	86,6

*Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

**g) Rumah tidak layak huni**

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat dalam tabel 2.82.

Tabel 2.82.  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah tidak layak	10.100	9.806	11.155	11.157	10.707	12.858	26.330
2.	Jumlah rumah	173.677	177.182	193.685	192.814	195.282	196.292	196.294
3.	Persentase rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah	5,8	5,5	5,8	5,7	5,4	6,5	13,4

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Berdasarkan data pada tabel 2.82, bisa dilihat bahwa persentase RTLH terhadap total jumlah rumah mengalami penurunan meskipun relatif kecil. Pada tahun 2009 persentasenya 5,8 persen, sedangkan pada tahun 2015 angkanya 13,4 persen atau mengalami peningkatan hamper 100 % persen. Jika melihat data tersebut maka dapat dikatakan bahwa mekipun RTLH terus ditangani namun juga terdapat penambahan jumlah rumah, sehingga persentase RTLH terhadap jumlah rumah yang ada masih relatif kecil.

## h) Tipe rumah

Perkembangan tipe rumah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 tercantum pada table berikut.

Tabel 2.83.  
Perkembangan Peningkatan Tipe Rumah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Tipe Rumah	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tipe A	54.661	66.029	66.061	68.577	70.224	70.224
2	Tipe B	73.215	85.813	84.910	85.573	85.910	85.910
3	Tipe C	49.306	41.843	41.843	41.132	40.160	40.160
4	Jumlah Rumah	177.182	193.685	192.814	195.282	196.294	196.294

Sumber: Bapermades Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

Dari tabel 2.83 pada tahun 2015 rumah tipe B menduduki persentase terbesar dengan jumlah 85.910 buah. Sedangkan rumah tipe A sebanyak 70.224 buah dan rumah tipe C sebanyak 40.160 buah.

Apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, maka telah terjadi peningkatan jumlah bangunan rumah maupun tipe rumahnya yang menggambarkan terjadi peningkatan kemampuan dalam penyediaan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan peningkatan kualitas bangunan rumah.

Tabel 2.84.  
Jumlah Rumah Menurut Tipe Rumah  
Per Kecamatan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2014

Kecamatan	Rumah Tinggal Menurut Tipe (unit)			Jumlah (Unit)
	A	B	C	
1. Parakan	5.599	5.968	2.191	13.758
2. Kledung	1.873	3.419	1.321	7.530
3. Bansari	1.776	2.962	1.318	6.056
4. B u l u	7.348	3.423	1.606	12.337
5. Temanggung	11.301	7.121	1.695	20.117
6. Tlogomulyo	1.706	2.924	2.939	7.569
7. Tembarak	2.853	3.372	1.049	7.274
8. Selopampang	1.233	2.324	1.202	4.759
9. Kranggan	4.573	5.415	2.127	12.168
10. Pringsurat	4.266	5.878	2.860	13.004
11. Kaloran	3.736	5.025	2.954	11.715
12. Kandangan	3.999	4.784	2.364	11.147
13. K e d u	4.023	7.973	2.657	14.653
14. Ngadirejo	3.548	6.620	3.170	13.257
15. J u m o	2.499	3.676	2.283	7.526
16. Gemawang	1.956	3.140	2.166	7.247
17. Candiroto	3.028	2.750	2.153	8.466
18. Bejen	1.958	6.620	1.487	6.213
19. Tretep	1.131	2.759	1.000	4.890
20. Wonobojo	1.815	3.070	1.613	6.480
Jumlah	68.577	85.910	40.160	196.212

Sumber: Bapermades Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

Adapun rincian jumlah tipe rumah di tahun 2015 menurut tipenya di masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.84.

Dari tabel 2.84 tampak bahwa jumlah tipe rumah tahun 2014 yang memiliki rumah tipe A terbanyak adalah Kecamatan Temanggung yaitu 11.301 rumah. Adapun Kecamatan Kedu merupakan kecamatan yang memiliki rumah tipe B terbanyak sejumlah 7.973 rumah. Sedangkan Kecamatan Ngadirejo merupakan kecamatan yang memiliki tipe C paling banyak sejumlah 3.170 rumah.

## **5) Urusan Penataan Ruang**

Rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2028. Mengacu pada perda tersebut kemudian pada tahun 2009 disusun RDTRK Kecamatan Temanggung, RDTRK Kecamatan Parakan dan RDTRK Kecamatan Ngadirejo. Kemudian pada tahun 2011 disusun RDTRK Kecamatan Bulu dan Kledung serta RDTRK Kecamatan Kaloran dan Kandangan.

Selanjutnya pada tahun 2012 ada perubahan sehingga disusun lagi rencana tata ruang wilayah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Kemudian dijabarkan secara rinci ke dalam rencana detail tata ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Kecamatan Kranggan, RDTRK Kecamatan Pringsurat, RDTRK Kecamatan Temanggung, RDTRK Kecamatan Parakan, RDTRK Kecamatan Ngadirejo, RDTRK Kecamatan Kedu, RDTRK Kecamatan Bansari, RDTRK Kecamatan Jumo dan Gemawang, RDTRK Kecamatan Bejen dan Candiroti, RDTRK Kecamatan Selopampang-Tembarak-Tlogomulyo, RDTRK Kecamatan Tretap dan Wonobojo.

### **a) Ruang terbuka hijau**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemic, introduksi)

guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 % yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % terdiri dari RTH Privat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah Ruang Terbuka milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan mikrolimat, maupun system ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Tabel 2.85.  
 Persentase Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan  
 Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan (%)	11	11,18	29,15	29,15	29,5	30

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan table capaian konerja urusan lingkungan hidup, dari jumlah 9 target indicator sebanyak 4 indikator telah tercapai 100 % yaitu presentase cakupan fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan, presentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang di tindak lanjuti, presentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL/UPL dan AMDAL dan indicator terbangunnya sumber energy alternative terbarukan.

Dua indicator dengan predikat cukup yaitu presentase usaha dan uatau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dan presentase luas lahan yang di tetapkan



dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomassa.

Sedangkang dua indicator dengan predikat sangat adalah tersedianya luas ruang terbuka hijau public pada skala kota dengan rendah dengan capaian sebesar 26,73 % presentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dengan capaian 33,33 %.

Walaupun capaian RTH public masih kurang dari target namun capaian luasan RTH kawasan perkotaan privat dan public sudah mencapai lebih dari 30 %. Di Temanggung masih lebih banyak RTH privat daripada RTH Publik dikarenakan luasan RTH sebagian besar mash berupa sawah.

**b) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan**

Sebuah bangunan berfungsi untuk memberikan ruang bagi aktifitas kegiatan manusia. Pendirian suatu bangunan harus memperhatikan konsep keruangan baik tata bangun, tata letak, ketinggian, garis sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), dan Koefisien Luas Bangunan (KLB).

Untuk menjaga agar setiap bangunan dapat memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan tersebut diperlukan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun rasio bangunan yang mempunyai IMB dapat dilihat pada tabel 2.86.

Tabel 2.86.  
Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bangunan	178092	194.619	196.346	199.720	199.871	
2.	Jumlah Bangunan yang memiliki IMB	13.291	13.603	13.938	14.110	14.261	
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	7,46	6,99	7,10	7,06	7,14	

Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan 2.86, selama enam tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah bangunan yang mempunyai IMB, yaitu dari 13.033 unit menjadi 14.261 unit, berarti terdapat penambahan 1.228 unit bangunan. Namun apabila dilihat dari proporsi setiap tahun terjadi fluktuatif. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah bangunan baru lebih tinggi dibanding dengan jumlah bangunan yang mempunyai IMB.

Perlu adanya kebijakan pengendalian dan sosialisasi yang lebih intensif tentang IMB.

## 6) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2009. Sedangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014. Sedangkan untuk Dokumen Rencana Kerja Pembangunan daerah pada setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada setiap tahunnya diharapkan tercapai 100%.

Pada tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, dari 747 indikator kinerja daerah baru 202 indikator, sehingga baru tercapai 46,62 %. Beberapa indikator kinerja daerah yang belum tercapai akan diupayakan percepatan.

## 7) Urusan Perhubungan

### a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Selanjutnya dilihat dari perkembangan jumlah penumpang, selama lima tahun bersifat fluktuatif. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.87.

Tabel 2.87.  
Jumlah Penumpang Angkutan Umum  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penumpang	11.176.020	12.086.765	12.039.985	12.021.336	10.533.531	10.404.259

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

Tabel 2.87 menunjukkan bahwa jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2010 sebesar 11.176.020 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 10.533.531 orang. Namun apabila dicermati, jumlah penumpang angkutan umum selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut dimungkinkan terjadi diakibatkan adanya perubahan kondisi

ekonomi masyarakat dan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua.

**b) Rasio Ijin Trayek**

Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di dalam urusan perhubungan. Saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat 34 jaringan trayek yang dilayani oleh angkutan umum.

Moda angkutan umum yang beroperasi yaitu mulai Bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi), Minibus, Angkutan perkotaan (Angkot), dan angkutan perdesaan (Angkudes). Disamping itu terdapat juga moda angkutan yang bersifat tradisional yang mendukung pelayanan sebagian kawasan perkotaan yaitu delman/andong.

Dalam rangka melegalisasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan adanya Ijin Trayek. Untuk ijin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana tertera dalam tabel 2.88.

Tabel 2.88.  
Rasio Ijin Trayek  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Ijin Trayek	523	523	523	543	591	591
2.	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.509	731.061	780.669
3.	Rasio Ijin Trayek	1 : 1.379	1 : 1.390	1 : 1.102	1 : 1.334	1 : 1.237	1:1.321

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.88 menunjukkan bahwa perkembangan ijin trayek dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan sebesar 68 (enam puluh delapan) ijin trayek yang di keluarkan. Apabila dilihat dari proporsinya maka semua angkutan umum di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai ijin trayek (proporsi 100%).

**c) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan penumpang umum dan juga angkutan barang. Pengujian tersebut adalah uji berkala kendaraan bermotor untuk pemeriksaan laiknjalan yang dilakukan dalam periode satu tahun. Jumlah Uji Kir di Kabupaten Temanggung selama tahun 2010-2015 tercantum pada tabel 2.89.

Tabel 2.89.  
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Angkutan Umum (unit kendaraan)	1.068	1.234	1.247	1.509	1.609	1.833
2.	Frekuensi Uji KIR Angkutan Umum (kali)	2.135	2.467	2.493	2.771	3.217	3.257
3.	Persentase (%)	86,1	86,9	81,4	83,0	99,9	77,7

*Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung tahun 2015.*

Dari tabel 2.89 diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat jumlah angkutan penumpang umum dan angkutan barang sebesar 1.833 buah dan kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 3.257 kendaraan.

#### **d) Jumlah Terminal**

Dalam memperlancar operasi angkutan umum, terdapat fasilitas prasarana transportasi yaitu terminal bus. Terminal bus merupakan tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah terminal di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.90.

Tabel 2.90.  
Jumlah Terminal  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah terminal tipe B	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah terminal tipe C/Sub Terminal	9	9	9	10	10	9
3.	Jumlah	10	10	10	11	11	10

*Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Tabel 2.90 memberikan gambaran tentang terminal yang ada di Kabupaten Temanggung. Satu terminal tipe B yang ada yaitu Terminal Madureso, sedangkan Terminal Tipe C atau kategori sub terminal adalah sub terminal yang berada di Ngadirejo, Kranggan, Pingit, Candiroto, Gemawang, terminal Kerkhof, Temanggung Plaza, Maron dan Terminal Mudal. Pada tahun 2015 sub terminal Parakan hilang karena untuk perluasan pasar Legi Parakan.

Saat ini keberadaan terminal dan beberapa sub terminal

tidak berfungsi secara optimal sebagai transit mobil transportasi. Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan kajian ulang, diantaranya adalah Terminal Maron, Sub Terminal Parakan dan Ngadirejo selama ini digunakan untuk transit bus malam.

## 8) Urusan Lingkungan Hidup

### a) Persentase penanganan sampah

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir, telah digalakkan Program 3 R dalam penanganan masalah sampah yaitu Reduce (pengurangan), Reuse (Pemanfaatan kembali) dan Recycle (Pendaauran ulang).

Penerapan 3 R sampah terus dikembangkan dalam masyarakat pada skala rumah tangga dan pada komunitas terkecil yaitu pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sejak tahun 2012 masyarakat mulai dikenalkan dengan Bank Sampah melalui Program Peningkatan Kualitas Lingkungan, dimana setiap RT/RW yang mulai mengelola bank sampah dapat mengajukan dana stimulan dari APBD. Namun pada tahun 2014 ada kebijakan bahwa bank sampah dapat mengajukan bantuan berupa barang.

Gerakan Bank Sampah terbukti dapat meningkatkan persentase sampah yang ditangani dan masyarakat sudah terlihat mulai menyadari nilai ekonomis sampah, namun apabila dilihat dari volume sampah, tetap masih belum terlihat menurun karena belum semua RT/RW mengelola bank sampah.

Data volume sampah yang direduksi ditingkat TPST disajikan pada tabel 2.91.

Tabel 2.91.  
Prosentase Volume Sampah Yang Direduksi  
Pada Tingkat TPST Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Volume sampah yang direduksi (m <sup>3</sup> )	128,72	130,03	171,37	188,11	195,79	202,7
2.	Volume sampah yang seharusnya direduksi (m <sup>3</sup> )	1.489,00	1.533,95	1.438,16	1.6540,19	1.665	1.882
3.	Prosentase (%)	8,64	8,48	11,92	11,40	11,76	10,77

Sumber : DPU Kabupaten Temanggung tahun 2015.

Berdasarkan tabel 2.91 diketahui bahwa pada tahun 2010 proporsi volume sampah yang berhasil direduksi baru mencapai 8,64%. Angka ini terus bergerak naik menjadi 10,77% pada tahun 2015. Pada tahun tersebut terjadi kenaikan volume sampah yang telah direduksi pada skala komunitas RT/RW di perkotaan mulai

digalakkan bank sampah dan telah berdiri satu buah TPST-3R di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung. Keberadaan Bank Sampah tersebut sangat mendukung besarnya volume sampah yang dapat direduksi dari tahun ketahun.

**b) Persentase penduduk berakses air minum**

Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat.

Ukuran tingkat pelayanan akses air minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.

Proporsi jumlah rumah tangga yang sudah terlayani air minum tercantum pada tabel 2.92.

Tabel 2.92.  
Proporsi Rumah Tangga  
Yang Mendapat Air Minum Layak  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi rumah tangga dengan air minum layak	60,80	67,71	70,91	74,48	82,48	82,69	70,31

Sumber data : DPU Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.92 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 rumah tangga yang mendapat air minum layak sudah mencapai 70,31. Angka tersebut meliputi penduduk perkotaan dan perdesaaan yang terlayani air minum dari PDAM dan Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP-SPAM) sebagai hasil dari berbagai program penyediaan air minum seperti PAMSIMAS, PNPM, PSAB dan DAK.

**c) Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk**

Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk kali 100%. TPS per satuan penduduk selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercapai 6,07% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,74%. Sedangkan untuk

rasio jumlah TPS terhadap jumlah penduduk juga ada peningkatan dari 1 : 8.978 pada tahun 2011 menjadi 1 : 1.751 pada tahun 2015. Secara jelas tersebut pada tabel 2.125. Namun capaian tersebut masih jauh dari angka ideal rasio TPS.

Tabel 2.93.  
TPS per Satuan Penduduk  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah TPS (unit)	75	82	139	164	430
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	44.166	45.288	47.450	982.59	507.79
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	727.184	733.418	739.873	731.061	752.993
4.	Persentase daya tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	6,07	6,17	6,41	6,17	6,74
5.	Rasio jumlah TPS terhadap jumlah pendudu	1 : 8.978	1 : 8.836	1 : 8.500	1 : 8.830	1:1.751

Sumber : DPU Kabupaten Temanggung tahun 2015

## 9) Urusan Pertanahan

### a) Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Jumlah bidang lahan bersertifikat dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94.  
Jumlah Bidang Lahan Bersertifikat  
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2015

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah tanah bersertifikat HGB	4.189	6.923	6.029
2.	Jumlah tanah bersertifikat HGU	10	17	11
3.	Jumlah tanah bersertifikat HM	200.870	199.092	202.862
4.	Jumlah tanah bersertifikat Hak Pakai	7.089	1.899	1.095
5.	Jumlah tanah bersertifikat Wakaf	271	n.a.	n.a
6.	Jumlah total bidang tanah sesuai SPPT	547.985	n.a.	558.031
7.	Jumlah tanah yang bersertifikat (BPN)	216.617	207.931	209.997
8.	Jumlah tanah milik Pemda	1.288	n.a.	n.a
9.	Jumlah tanah milik Pemda yang bersertifikat	977	n.a.	n.a

Sumber : BPN dan DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Tabel 2.94 menunjukkan adanya penurunan jumlah bidang lahan bersertifikat dari tahun 2013 sebanyak 216.617 buah menjadi sebanyak 209.997 buah di tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

### b) Penyelesaian kasus tanah Negara

Tanah milik Pemda ada sejumlah 1.288 bidang, yang bersertifikat ada 977 bidang dan yang belum bersertifikat

sejumlah 311 bidang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

## 10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

### a) Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dilihat berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte lahir dan Akte Nikah.

Tabel 2.95.  
Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kepemilikan KTP	418.416	491.324	507.516	530.602	572.978	579.144
2	Kepemilikan KK	243.232	245.760	248.985	241.809	259.558	246.088
3	Kepemilikan Akte Nikah	238	231	188	186	181	193
4	Kepemilikan Akte Lahir	225.778	317.939	331.639	358.917	376.666	462.030

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Temanggung tahun 2015

### b) Penerapan KTP berbasis NIK

Kepemilikan KTP Berbasis NIK di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sejak tahun 2010 – 2015, secara jelas tercantum pada tabel 2.96.

Tabel 2.96.  
Kepemilikan KTP Berbasis NIK  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kepemilikan KTP Berbasis NIK	418.416	491.324	507.516	530.602	572.978	579.144

Sumber : DDA Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## 11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta,



besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun yang dibahas dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu 1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah. 2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta sebagai berikut :

**a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Secara jelas tercantum pada tabel 2.97.

Tabel 2.97.  
Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	2	2	2	2	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	26	27	24	22	22	26
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	218	260	264	262	258	278
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4.256	4.574	4.555	4.240	5060	4216
5	Jumlah pekerja perempuan	163.548	189.085	166.331	217.149	190.835	417.223
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2,60	2,42	2,74	1,95	2,65	1,01

Sumber : Badan KB dan PP dan BKD Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**b) Partisipasi perempuan di lembaga swasta**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat dengan tabel 2.98.

Tabel 2.98.  
Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	10.510	17.708	7.677	48.003	48.010	11.838
2	Jumlah pekerja perempuan	163.548	189.085	166.331	190.835	190.835	417.223
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	6,43	9,36	4,61	25,15	25,15	2,84

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.98 dapat dilihat menurunnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta, di tahun 2014

sebanyak 48.010 menurun menjadi 11.838 pekerja perempuan atau sebesar 2,84% hal ini diasumsikan karena keterbatasan modal usaha dan skil sehingga terjadi penurunan.

**c) Partisipasi Perempuan yang Bekerja Mandiri**

Persentase partisipasi perempuan yang bekerja mandiri adalah adalah proporsi perempuan yang bekerja secara perorangan (swasta) namun bukan bekerja di bawah suatu lembaga/kantor/perusahaan terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun partisipasi perempuan yang bekerja mandiri dapat dilihat dengan tabel 2.99.

Tabel 2.99.  
Pekerja Perempuan yang Bekerja Mandiri  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang bekerja mandiri	148.782	166.803	154.099	n.a.	n.a.	1.777
2	Jumlah pekerja perempuan	163.548	189.085	166.331	190.835	190.835	417.223
3	Persentase pekerja perempuan yang bekerja mandiri	90,97	88,22	92,65	n.a.	n.a.	0,43

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.99 dapat dilihat partisipasi perempuan yang bekerja mandiri pada tahun 2012 sebanyak 154.099 dari 166.331 pekerja perempuan atau sebesar 92,65%. Pada tahun 2013 dan 2014 tidak tersedia sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 1.777 orang. Proses pendataan perempuan yang bekerja mandiri mengalami kesulitan karena tidak semua mendaftarkan diri di Disperindakop, sebagian besar usaha non formal (penjual gorengan, penjual makanan kecil keliling dan lain sebagainya).

**d) Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik**

Dari tabel 2.100 dapat dilihat partisipasi perempuan yang berkecimpung di dunia politik, terutama yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2010-2013 sebanyak 8 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 18% dan sejak tahun 2014 bertambah menjadi 14 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 31%. Hal ini sudah sesuai ketentuan bahwa unsur perempuan dalam partai politik minimal 25%.

Tabel 2.100.  
Partisipasi perempuan dalam partai politik  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD	8	8	8	8	14	14
2	Jumlah anggota DPRD	45	45	45	45	45	45
3	Persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD	18%	18%	18%	18%	31%	31%

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### e) Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Tabel 2.101.  
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah KDRT	41	112	145	88	89	62	16
2	Jumlah Rumah Tangga	189.191	190.113	191.080	192.080	192.080	192.080	232.000
3	Rasio KDRT	1 : 4.614	1 : 1.697	1 : 1.318	1 : 2.183	1:2158	1:6402	1:16.571

*Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015,*

Dari tabel 2.101, KDRT di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, pada tahun 2014 sebanyak 62 kejadian menjadi 16 kejadian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan anak dan perempuan di keluarga.

**f) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 2.102.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif. Partisipasi terendah pada tahun 2011.

Tabel 2.102.  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bekerja	168.531	147.789	n.a	217.149	190.835	417.223
2	Mencari Kerja	8.699	12.145	n.a	593	593	872
3	Angkatan Kerja	177.230	161.945	n.a	217.742	191.428	418.095
4	Partisipasi Angkatan Kerja (%)	95,1	91,3	n.a	n.a	40,81%	86,21%

*Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

**g) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan**

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat memperhatikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan supervisi dilaksanakan secara terpadu antara Women Child Center, BKBPP, Kejaksaan, Polres, Tim Penggerak PKK Kabupaten dan LSM Sahabat Perempuan. Jumlah kegiatan supervise penanganan korban kekerasan dan penanganan korban KDRT yang melapor tersebut pada tabel 2.103.

Tabel 2.103.  
Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan supervise	60	100	60	n.a.	n.a.	12
2	Persentase korban KDRT yang melapor tertangani	100	100	100	100	100	85,71

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## 12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

### a) Peserta KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dimana dicanangkan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB.

Tabel 2.104.  
Jumlah Penduduk Peserta KB  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Tidak KB
1	2010	146.871	120.264 (81.88%)	26.607 (18.11%)
2	2011	148.963	122.041 (81.92%)	26.922 (18.07%)
3	2012	151.148	125.845 (83.25%)	25.303 (16.74%)
4	2013	140.757	113.432 (80.58%)	27.325 (19.41%)
5	2014	140.016	111.498 (79,63%)	28.518 (25,57%)
6	2015	142.274	116.549 (81,92%)	10.965 (7,68%)

Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.104 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 dengan jumlah 142.274 pasangan. Dengan perincian yang mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 116.459 pasangan (81,92%) dan yang tidak mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 10.965 pasangan (7,68%).

### b) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.105.

Tabel 2.105.  
Rasio Akseptor KB  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Akseptor KB Laki-laki	610	527	401	451	272	4.016
2	Akseptor KB Perempuan	19.490	21.987	19.027	15.707	13.080	112.527
3	Jumlah Akseptor KB	20.100	22.514	19.428	16.158	13.352	116.543
4	Jumlah Pasangan Usia subur	146.869	147.947	151.148	144.146	139.734	142.704
5	Rasio Akseptor KB	1 : 7	1 : 7	1 : 8	1 : 9	1 : 10	1 : 1,2

*Sumber : Badan KB dan PP Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

**c) Cakupan Peserta KB Aktif**

Sedangkan persentase peserta KB aktif terhadap PUS di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.106.

Tabel 2.106.  
Persentase Peserta KB Aktif Terhadap PUS  
Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase PA terhadap PUS
1	Parakan	9.008	9.090	99,10
2	Kledung	4.095	5.160	79,36
3	Bansari	3.989	4.802	83,07
4	Bulu	7.323	8.976	81,58
5	Temanggung	10.703	13.151	81,38
6	Tlogomulyo	3.774	4.595	82,13
7	Tembarak	4.360	5.372	81,16
8	Selopampang	2.915	3.513	82,97
9	Kranggan	6.607	7.960	83,00
10	Pringsurat	7.838	9.306	84,22
11	Kaloran	6.858	8.388	81,76
12	Kandangan	7.919	9.579	82,67
13	Kedu	8.322	10.114	82,28
14	Ngadirejo	8.408	10.307	81,57
15	Jumo	4.347	5.452	79,73
16	Gemawang	5.310	6.607	80,36
17	Candiroto	5.203	6.195	83,99
18	Bejen	3.332	4.071	81,84
19	Tretep	3.487	5.104	68,31
20	Wonoboyo	4.247	4.962	85,59
	Jumlah	118.045	142.704	82,72

*Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Dari tabel 2.106, persentase tertinggi peserta KB aktif terhadap PUS diduduki oleh Kecamatan Parakan sebanyak 99.10%. Sedangkan persentase terendah peserta KB aktif terhadap PUS diduduki oleh Kecamatan Tretep sebanyak 68,31%.

Sedangkan rata-rata persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 82,72%.

#### d) Tahapan Keluarga Sejahtera

Dengan pendekatan Pentahapan Keluarga Sejahtera maka keluarga diklasifikasikan menjadi Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Definisi dari klasifikasi keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

- Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal (agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan)
- Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi)
- Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan (menabung dan memperoleh informasi)
- Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologis dan kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberi sumbangan/kontribusi terhadap masyarakat secara teratur dalam bentuk material dan keuangan, dan berperan aktif dalam lembaga di kemasyarakatan.

Tabel 2.107.  
Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

No	Tahapan Keluarga Sejahtera (KK)	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Pra Sejahtera	53.744	50.752	51.172	48.044	53.866	53.866
2	Sejahtera I	20.919	19.147	24.891	23.207	28.814	28.814
3	Sejahtera II	46.075	46.952	36.505	41.070	31.568	31.568
4	Sejahtera III	90.47	97.362	100.518	101.512	102.280	102.280
5	Sejahtera III Plus	2.893	3.504	4.598	5.765	7.981	7.981

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2015, data sementara.

Kondisi ini telah berubah dengan adanya program-program pemberdayaan keluarga sehingga dapat dilihat, mulai tahun 2012 terjadi perbaikan peningkatan kondisi kesejahteraan

keluarga di semua level. seperti pada Sejahtera I dan Sejahtera II yang menurun, dan sebaliknya semakin banyak yang telah mencapai Sejahtera III dan Sejahtera III Plus.

Peningkatan strata yang terjadi tidak semata-mata adanya peningkatan dari kondisi awal sejumlah 53.866 pada tingkatan Pra Sejahtera namun juga disertai adanya keluarga-keluarga baru karena pernikahan.

### 13) Urusan Sosial

#### a) Sarana Sosial

Sarana sosial yang ada di Kabupaten Temanggung adalah panti asuhan anak, panti sosial bina netra dan panri sosial bina grahita. Sejak tahun 2011-2015 jumlahnya sama. Secara rinci tersebut dalam tabel 2.108. Pada tahun 2015 jumlah sarana panti asuhan anak yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan mempunyai SIOP bertambah 2 panti yaitu Panti Asuhan Darul Mutaqien yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Selopampang dan Panti Asuhan Darul Hadlonah Putra yang berada di Desa Campursari Kecamatan Bulu.

Tabel 2.108.  
Perkembangan Sarana Sosial  
Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015

No	Kriteria	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Panti asuhan anak	6	6	6	6	8
2	Panti sosial bina netra	1	1	1	1	1
3	Panti sosial bina grahita	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

#### b) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Tabel 2.109.  
PMKS yang memperoleh bantuan sosial  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	1.703	1.494	10.625	9.834	9.204	8.963
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	42.900	45.295	45.898	45.898	45.003	44.877
3	Persentase PMKS yang menerima bantuan	3,97	3,29	23,15	21,43	20,45	19,97

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang memperoleh bantuan sosial selama enam tahun terakhir



mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2013 menurun dari 23,15% menjadi 21,14%. Secara jelas tercantum pada tabel 2.109.

### c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga/masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial secara memadai dan wajar) (Depsos, 1004).

Tabel 2.110.  
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	KATEGORI	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Anak jalanan	85	80	72	65	75	19
2.	Penderita sakit jiwa	796	850	459	998	0	0
3.	Gepeng	85	85	37	97	102	98
4.	Tuna susila	12	9	9	17	12	3
5.	Penderita HIV/AIDS	31	27	27	72	0	0
6.	Penderita Narkoba	60	0	0	0	0	0
7.	Penyandang cacat	5.591	4.691	7.662	7.391	7.331	6.749
8.	Bekas narapidana	97	274	299	323	391	482
9.	Korban NAPZA	41	23	28	49	35	59

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

### d) Penanganan Lansia

Salah satu penanganan urusan sosial adalah pelayanan terhadap penduduk lanjut usia (lansia). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Jumlah lansia setiap tahun bertambah sebagaimana tabel 2.111. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena factor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan dan terlantar secara spikis, dan sosial.

Tabel 2.111.  
Jumlah Penduduk Lanjut Usia  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2011-2015

NO	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk lanjut usia	11.696	12.525	7.451	6.898	10.001

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

#### **14) Urusan Ketenagakerjaan**

##### **a) Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja, Pengangguran Dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tenaga kerja menunjukkan jumlah penduduk dalam usia kerja yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Data tentang ketenagakerjaan dibedakan menjadi:

- Angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau pekerja dan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja;
- Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja;
- TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah angka untuk menyatakan jumlah angkatan kerja yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja
- Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja);
- Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Data perkembangan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.112.

Tabel 2.112.  
Data Ketenagakerjaan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja	410.860	380.592	411.144	437.543	403.959	418.095
2	Bukan Angkatan Kerja	118.804	115.617	119.981	131.656	69.196	66.878
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) (%)	77,57	76,70	77,41	76,74	85,38	86,21
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	3,60	5,24	3,40	4,86	5,86	4,08
5	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,40	97,40	96,60	95,14	94,14	95,92
6	Jumlah Pengangguran	14.797	19.956	13.975	16.519	26.673	17.065
	Jumlah penduduk usia kerja/produktif	529.664	496.209	531.125	569.199	473.155	484.973

Sumber : BPS dan Disnakertrans Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### b) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Temanggung meningkat tajam pada tahun 2014. Secara rinci perkembangan tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.113.

Tabel 2.113.  
Angka Sengketa pengusaha-pekerja  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja	3	4	3	15	8	14

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### c) Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Jumlah pencari yang ditempatkan di kabupaten Temanggung tahun 2009-2015 terlihat fluktuatif, hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan/latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar. Secara jelas terlihat pada tabel 2.114.

Tabel 2.114.  
Pencari Kerja Yang Ditempatkan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

NO	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penempatan pencari kerja yang mendaftarkan diri	10,60	52,30	63,73	23,48	33,33	75,38	70

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### d) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2015 tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin bagus sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan suasana menjadi kondusif.

#### 15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun tingkat perkembangan koperasi dapat dilihat sebagai berikut :

##### a) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif yaitu koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif sebagaimana tabel 2.115.

Dari tabel 2.115 jumlah dan persentase koperasi aktif dari tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan kecenderungan selalu meningkat dari 78,03% pada tahun 2010 menjadi 84,47% koperasi aktif pada tahun 2015 dalam menjalankan usahanya.

Tabel 2.115.  
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah total koperasi	446	456	473	485	489	509
2	Jumlah koperasi aktif	348	360	383	405	409	430
3	Persentase koperasi aktif	78,03	78,95	80,97	83,51	83,64	84,47

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## b) Jenis dan Jumlah Koperasi

Di Kabupaten Temanggung jenis koperasi dapat diklasifikasikan menjadi 22 (dua puluh dua) jenis yaitu Koperasi Unit Desa, Pontren, Koperasi KOPINKRA/ KOPTI, Koperasi KPRI, Koperasi KOPKAR, Koperasi AD, Koperasi Kepolisian, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Angkutan, Koperasi Wanita, Koperasi Profesi/TKBM Koperasi Veteran, Koperasi Wredatama, Koperasi Pepabri, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pemuda, Koperasi Pedagang Kaki Lima, Koperasi Pertanian, Lain-Lain, dan Koperasi Sekunder.

Jumlah koperasi berdasarkan klasifikasinya selama 6 (enam) tahun dapat dilihat pada tabel 2.116. Perkembangan Koperasi Serba Usaha merupakan perkembangan jumlah koperasi yang paling banyak dimana pada tahun 2013 telah mencapai 124 koperasi. Sedangkan koperasi AD, Kepolisian, Wanita, Veteran, Pepabri, dan koperasi mahasiswa merupakan jenis koperasi yang tidak berkembang secara jumlah dimana hanya terdapat 1 (satu) koperasi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.116.  
Klasifikasi Jenis Koperasi  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	KOPERASI UNIT DESA	15	15	15	15	15	15
2	KOPPONTREN	23	23	23	23	23	23
3	KOPINKRA/KOPTI	3	3	2	3	3	3
4	KPRI	64	64	64	64	64	64
5	KOPKAR	28	28	29	29	24	24
6	KOP AD	1	1	1	1	1	1
7	KOP KEPOLISIAN	1	1	1	1	1	1
8	KOP SERBA USAHA	115	115	120	125	130	141
9	KOP PASAR	22	22	22	22	22	22
10	KOP SIMPAN PINJAM	22	29	59	47	47	59
11	KOP ANGKUTAN	21	23	4	23	23	24
12	KOP WANITA	1	1	1	1	1	1
13	KOP PROFESI/TKBM	2	2	2	2	1	1
14	KOP VETERAN	1	1	1	1	1	1
15	KOP WREDATAMA	3	3	3	3	3	3
16	KOP PEPABRI	1	1	1	1	1	1
17	KOP MAHASISWA	0	1	1	1	1	1
18	KOP PEMUDA	5	5	5	5	5	5
19	KOP PEDAGANG KAKI LIMA	2	2	2	2	2	2
20	KOP PERTANIAN	78	78	78	78	79	79
21	KOP LAIN-LAIN	33	33	33	34	34	34
22	KOP SEKUNDER	3	3	4	4	4	4

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung tahun 2015

## c) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Usaha swasta kecil non BPR/LKM merupakan usaha ekonomi produktif yang bergerak dibidang usaha selain jasa keuangan, berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Sedangkan yang masuk kategori usaha menengah non BPR/LKM merupakan usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang usaha selain jasa keuangan, berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

UKM non BPR/LKM-UKM dapat dibedakan sebagai berikut yaitu: 1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 2) Pertambangan dan penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gas, Air, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel, Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan, 9) Jasa-jasa. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.117.

Tabel 2.117.  
Jumlah UKM non BPR/LKM-UKM  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2015

NO	Uraian	2013	2014	2015
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	2.460	2.460	2.460
2	Pertambangan dan penggalian	91	91	91
3	Industri Pengolahan	15.731	15.864	15.864
4	Llstriik, Gas, Air	4	4	4
5	Bangunan	68	68	68
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	6.165	6.165	6.165
7	Pengangkutan dan Komunikasi	196	196	196
8	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	228	228	228
9	Jasa-jasa Swasta	347	347	347
	Jumlah	25.290	25.423	25.423

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung tahun 2015

Dari data tersebut di atas jumlah UKM non BPR/LKM-UKM sebanyak 25.290 buah. Jumlah 3 (tiga) besar UKM non BPR/LKM-UKM yaitu industri pengolahan sebanyak 15.731 buah, kemudian disusul perdagangan, hotel dan restoran dengan jumlah 6.165 buah, dan yang ketiga adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan jumlah 2.460 buah.

#### d) Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk

kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel 2.118.

Tabel 2.118.  
Jumlah BPR/LKM  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah BPR	21	21	21	21	21	21
2	Jumlah BMT dan KJKS	7	7	7	9	9	9
3	LKM						
	a. Komisi Ekonomi Kecamatan	20	20	20	20	20	20
	b. UKM	n.a	n.a	n.a	12	12	12
	c. KUBE	91	101	101	101	101	101
	d. PUAP	137	176	250	281	281	281

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung dan BI tahun 2015.

Berdasarkan tabel 2.118 pada tahun 2014 jumlah BPR sebanyak 21 buah, jumlah BMT dan KJKS sebanyak 9 buah, Komisi Ekonomi Kecamatan sebanyak 20 buah, UKM (LKM) PUAP sebanyak 281 buah, KUBE pada tahun 2011 sebanyak 101 buah. Sedangkan pada tahun 2012 sampai tahun 2015 tidak ada pembentukan KUBE baru. Jumlah BPR yang tercantum adalah BPR yang terdaftar di BI Jawa Tengah, secara realita lebih dari itu karena kemungkinan terdaftar di BI Yogyakarta, namun tidak bisa dicantumkan agar ada kesesuaian pelaporan BI ke pusat.

## 16) Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Penanaman modal di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :

### a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Investor di Kabupaten Temanggung terdiri dari Investor PMDN dan PMA. Investor PMDN adalah investor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi. Sedangkan investor PMA adalah investor yang melakukan penanaman modal asing secara langsung.

Jumlah investor PMDN dan PMA dapat dilihat dalam tabel 2.119.

Tabel 2.119.  
Jumlah Investor PMDN dan PMA  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

Tahun	PMA	PMDN
2010	0	283
2011	1	246
2012	0	503
2013	0	181
2014	1	176
2015	0	190*

Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung, \* data posisi bulan Oktober 2015.

Dari tabel 2.119 dapat dilihat investor dari penanaman modal asing (PMA) berjumlah 1 (satu) investor yang dilakukan pada tahun 2011, yang berinvestasi di bidang peternakan. Sedangkan investasi PMDN dalam rentang antara tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami perkembangan terbanyak pada tahun 2012 dengan 503 investasi dan jumlah investasi yang sedikit pada tahun 2009 sebanyak 78 investasi. Di tahun 2015, terdapat 1 PMA dan 190 PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2015 tidak ada PMA yang masuk, namun ada tahun 2015 juga terjadi peningkatan jumlah PMDN, yaitu s.d bulan Oktober sejumlah 190 investasi dengan nilai investasi sejumlah RP. 90.863 M dengan sektor terbanyak masih didominasi oleh perdagangan skala menengah dan kecil, industri pengolahan kayu, dan terakhir sektor perumahan. Sedangkan investasi yang patut didorong pergerakannya karena tingkat laju investasi hampir tidak ada adalah sektor pariwisata.

Selama 5 tahun terakhir ini tingkat pembangunan ODTW (obyek Daya Tarik Wisata) bisa dikatakan tidak ada sama sekali, disamping pembangunan hotel sebagai pendukung MICE juga pertumbuhannya lambat sekali, padahal pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan investasi di bidang industri ekonomi kreatif ini sangat tinggi, namun di Kabupaten Temanggung pergerakan industri kreatif ini kurang maksimal.

Selain itu yang patut didorong pergerakannya karena potensi yang ada di Kabupaten Temanggung adalah sektor perikanan bidang pembibitan, sektor perkebunan dan sektor sekunder lainnya seperti industri makanan. Yang meski masih



banyak permohonan ijin di sektor ini namun laju investasinya masih minim bahkan hampir sama dari tahun ke tahun.

**b) Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA**

Yang dimaksud jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Jumlah persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan jumlah investasi riil adalah banyaknya investasi PMDN berskala nasional dan banyaknya investasi PMA berskala nasional yang telah terealisasi pada suatu periode tahun tertentu.

Pada tahun 2011 nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 4 (empat) milyar rupiah. Adapun nilai investasi PMDN tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.120.

Tabel 2.120.  
 Nilai Investasi PMDN  
 Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2015

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)
2010	283	25,316	283	25,316
2011	247	10,953	247	10,953
2012	503	123,457	503	123,457
2013	181	85,692	181	85,692
2014	176	69,429	176	69,429
2015	190	69,429	190	90.863*

Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung, \* data s.d bulan Oktober 2015.

Dari tabel 2.120 selama enam tahun terakhir realisasi nilai investasi adalah sama besar dengan persetujuan investasinya. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 503 investasi dengan nilai sebesar 123,457 milyar. Sedangkan nilai investasi terendah terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah sebanyak 78 investasi dengan nilai sebesar 38,334 milyar. Pada tahun 2009 terjadi nilai investasi yang termasuk besar karena dengan jumlah investor 82 nilai investasinya 123,213 hal ini karena banyaknya usaha industri pengolahan kayu yang mengajukan perpanjangan dan berdiri pada tahun 2009.

## 17) Urusan Kebudayaan

### a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin dilaksanakan di Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung kelestarian seni dan budaya Kabupaten Temanggung. Perkembangan jumlah kegiatannya secara jelas tampak pada tabel 2.121.

Tabel 2.121.  
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pertunjukan seni budaya	12	8	11	3	3	4

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

### b) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Temanggung ada di desa tempat budaya tersebut ada serta gedung pertemuan yang disediakan pemerintah daerah untuk kegiatan kesenian dan budaya, yaitu di Pendopo pengayoman serta Gedung Kesenian.

Budaya yang ada juga berkembang secara turun menurun dan biasanya dilakukan melalui upacara adat yang diikuti sekelompok masyarakat di suatu wilayah. Tradisi Suran Traji di Desa Traji Kecamatan Ngadirejo pada setiap malam 1 (satu) Sura. Tradisi Nyadran Pete di Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan dan Desa Jetis Kecamatan Selopampang menjelang bulan ramadhan. Tradisi Nyadran Kali di Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung. Tradisi Nyadran Nyai Cemoro di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan. Tradisi Padusan di Pikatan Desa Mudal Kecamatan Temanggung pada satu hari sebelum bulan puasa. Tradisi Jumat Pahingan di Masjid Jami Desa Menggoro Kecamatan Tembarak pada setiap malam jumat pahing, dan lain-lain.

## 18) Urusan Pemuda dan Olahraga

### a) Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2015 jumlahnya tetap yaitu 7 buah seperti tercantum pada tabel 2.122.

Tabel 2.122.  
Organisasi Pemuda  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	7	7	7	7	7	7

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

**b) Jumlah Organisasi Olah Raga**

Organisasi olahraga di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2013 jumlahnya tetap yaitu 56 buah dan baru bertambah 1 organisasi di tahun 2014 menjadi 57 organisasi seperti tercantum pada tabel 2.123.

Tabel 2.123.  
Jumlah Organisasi Olahraga  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi olahraga	56	56	56	56	57	57

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

**c) Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2015 jumlahnya meningkat dari 7 kegiatan menjadi 9 kegiatan seperti tercantum pada tabel 2.124.

Tabel 2.124.  
Jumlah Kegiatan Kepemudaan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	7	7	9	9	9	9

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

**d) Jumlah Kegiatan Olah Raga**

Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010 jumlahnya meningkat dari 65 kegiatan dari tahun 2010 menjadi 109 kegiatan seperti tercantum pada tabel 2.125.

Tabel 2.125.  
Jumlah Kegiatan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan olahraga	65	65	70	80	109	81

*Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

**e) Lapangan Olah Raga**

Lapangan olahraga milik pemerintah kabupaten terdiri dari :

- Lapangan sepak bola (stadion Bumi Phala, Lapangan Sidorejo, Lapangan Sroyo dan lapangan Atletik)
- Lapangan basket satu buah
- Lapangan tenis tiga buah
- Lapangan bulu tangkis satu buah

Tabel 2.126.  
Lapangan Olahraga  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lapangan olahraga	773	788	800	815	798	798
	a.Olahraga sepak bola	254	255	256	256	254	254
	b.Olahraga futsal	2	7	11	15	15	15
	c.Olahraga volley	365	365	365	365	358	358
	d.Ola raga bulu tangkis	142	151	158	169	159	159
	e.Olahraga basket	3	3	3	3	3	3
	f.Olahraga bola tenis	7	7	7	7	7	7
	g.Kolam renang	2	2	2	2	2	2

*Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

**19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**a) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP**

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2015 jumlahnya tetap yaitu 1 kali kegiatan seperti tercantum pada tabel 2.127.

Tabel 2.127.  
Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan  
OKP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1

*Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.*

## b) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2015 jumlahnya sama yaitu 1 kali kegiatan seperti tercantum pada tabel 2.128.

Tabel 2.128.  
Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan	1	1	1	2	2	5

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

## c) Jumlah Partai Politik

Jumlah partai politik di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2010-2015 jumlahnya sama yaitu 44 partai seperti tercantum pada tabel 2.129.

Tabel 2.129.  
Jumlah Partai Politik  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah partai politik	44	44	44	44	44	44

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

## 20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

### a) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Rasio jumlah polisi pamong praja tersebut menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja tercantum pada tabel 2.130.

Tabel 2.130.  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah polisi pamong praja	195	195	182	137	126	122
2.	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	738.915
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja	3 : 10.000	3 : 10.000	2 : 10.000	2 : 10.000	2 : 10.000	2:10.000

*Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

**b) Jumlah Linmas Per 10.000 Jumlah Penduduk**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Tabel 2.131.  
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Linmas	Na	Na	9.158	8.879	8.789	8.797
2.	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
3.	Rasio	Na	na	125	119	120	112

*Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Dari tabel 2.131 rasio jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk pada tahun 2012 sebesar 125 per 10.000 penduduk dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 112 per 10.000 penduduk.

**c) Rasio poskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan**

Rasio pos siskamling merupakan perbandingan jumlah pos siskamling pada masing-masing desa/kelurahan pada periode tahun tertentu. Rasio ini menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Adapun rasio jumlah pos siskamling dapat dilihat pada tabel 2.132.

Tabel 2.132.  
Rasio Jumlah Poskamling  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Poskamling	867	867	867	867	867	867
2.	Jumlah desa/kelurahan	289	289	289	289	289	289
3.	Rasio jumlah poskamling per desa/kel	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1

*Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Dari tabel 2.132 jumlah poskamling dari tahun 2010 sampai dengan 2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 867 buah dengan rasio per desa/kelurahan 3:1.

**d) Cakupan Patrol Petugas Satpol PP**

Cakupan patrol petugas satuan polisi pamong praja (satpol pp) adalah jumlah patroli petugas satpol pp dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam waktu 24 jam. Cakupan selama enam tahun terakhir tercantum pada tabel 2.133.

Tabel 2.133.  
Cakupan patrol petugas satpol pp  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan patrol ipetugas satpol polisi pamong praja	120	150	137	137	123	120

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**e) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten.**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama enam tahun terakhir tercantum pada tabel 2.134.

Tabel 2.134.  
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	2.500	3.830	3.806	1.200	965	263
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan (kasus)	2.500	3.830	3.806	1.200	965	263
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015

**f) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jumlah mobil pemadam kebaran dibagi jumlah penduduk kali 100. Perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2010-2015 sebagaimana tersebut pada tabel 2.135.

Tabel 2.135.  
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten  
kabupaten temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran	3	3	4	4	4	5
2.	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	780.669
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	0,00042	0,00041	0,00055	0,00054	0,0000054	0,000065

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### g) Cakupan Kantor Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan kantor pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 tersebut pada tabel 2.136.

Tabel 2.136.  
Cakupan Kantor Pemerintahan Desa Yang Baik  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Kondisi Kantor Desa		Nama Desa yang Mempunyai Kantor Desa Rusak
			Baik	Rusak	
1.	Parakan	14	14	0	-
2.	Kledung	13	12	1	Kruwisan
3.	Bansari	13	13	0	-
4.	Bulu	19	19	0	-
5.	Temanggung	6	6	0	-
6.	Tlogomulyo	12	12	0	-
7.	Tembarak	13	12	1	Gandu
8.	Selopampang	12	11	1	Kebonagung
9.	Kranggan	12	12	0	-
10.	Pringsurat	14	14	0	-
11.	Kaloran	14	12	2	Tleter, Tlogowungu
12.	Kandangan	16	15	1	Wadas
13.	Kedu	14	14	0	-
14.	Ngadirejo	18	18	0	-
15.	Jumo	13	13	0	-
16.	Gemawang	10	9	1	Banaran
17.	Candiroto	14	14	0	-
18.	Bejen	14	13	1	Prangkokan
19.	Tretep	11	10	1	Tempelsari
20.	Wonobojo	13	12	1	Pesantren
Jumlah		266	256	10	-
Cakupan kantor desa yang baik (%)					96,24

Sumber : Bagian Pemdes Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### 21) Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan, sesuai definisi menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,



aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tdk bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang, yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Kondisi Ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dari sisi ketersediaan energi dan protein per kapita selama 5 (lima) tahun terakhir sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk tingkat Kabupaten/Kota, yaitu 90% dari standar ketersediaan per kapita sebesar 2200 kkal/kap/hr untuk energi dan 57 gr/kap/hr untuk standar ketersediaan protein.

Namun untuk aspek konsumsi dan pemanfaatan pangan, yang dicerminkan dari capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), dalam 5 (lima) tahun terakhir masih belum memenuhi target capaian sebagaimana SPM sebesar 90 yang ditargetkan dicapai di tahun 2015. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu ketersediaan atau konsumsi pangan. Belum idealnya skor PPH ini sangat dipengaruhi oleh KPA (*knowledge, attitude, dan practice*) konsumsi pangan ideal pada masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap pangan juga mempengaruhi capaian skor PPH, khususnya untuk komponen pangan hewani, yang masih dibawah standar ideal. Meskipun secara ketersediaan cukup, namun harga pangan hewani yang lebih tinggi dibanding kelompok pangan lain, menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan hewani relatif kecil.

Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya pola konsumsi ideal, diversifikasi konsumsi melalui pemberdayaan pangan lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan mutlak diperlukan. Kondisi perkembangan capaian SPM ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel. 2.137

Tabel 2.137.  
Perkembangan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

KRITERIA	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan energy dan protein perkapita						
a.Energi (Kkal/kapita/hari)	3.337,30	2.412,20	2.846,55	2.794,62	2.706	2.833
b.Protein (Kkal/kapita/hari)	81,76	61,51	74,99	70,88	134,08	150,46
Tingkat ketersediaan energy dan protein						
a.Energi (%)	151,70	109,65	129,39	127,03	169	128,8
b.Protein (%)	143,44	107,96	131,56	124,35	253	263,16
Tingkat konsumsi rata-rata Penduduk						
a.Energi (Kkal/kapita/hari)	2.305,00	2.016,30	2.246,00	2.194,50	2.320,4	1.828,1
b.Protein (Kkal/kapita/hari)	59,70	54,50	60,00	55,20	62,1	50,4
Tingkat konsumsi energy protein						
a.Energi (%)	115,25	100,82	112,30	109,70	116	91,4
b.Protein (%)	114,91	104,81	115,38	96,84	119	96,9
Kecamatan yang mempunyai cadangan pangan (%)	50	70	80	80	85	82
Penguatan cadangan pangan (%)	100	100	100	100	100	100
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	66,67	66,67	66,67	66,67	100	100
Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	n.a	n.a	46,67	50	91	83,3
Skor pola pangan harapan	83	86	88	88,5	89,2	82,9
Penanganan kerawanan pangan	100	100	100	-	100	100

Sumber : KKP Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## 22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Adapun jumlah LPMD di Kabupaten Temanggung 266 dan LPMK 23 buah.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan SKPD terkait maupun program lainnya.

Tugas LPMD/LPMK adalah:

- Menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan secara partisipatif;
- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan;
- Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya LPMD/LPMK mempunyai fungsi :

- Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

**b) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga.

Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 22 desa/kelurahan yang menjadi lokasi desa/kelurahan binaan dan 2 desa pemberdayaan masyarakat berperspektif gender sedangkan pembinaan bagi desa/ kelurahan lainnya dilaksanakan secara berjenjang.

Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat.

**c) Jumlah LSM**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif dapat dilihat dalam tabel 2.138.

Tabel 2.138.  
Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LSM terdaftar	28	38	36	25	42	42
2.	Jumlah LSM aktif	28	38	36	25	28	28

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung tahun 2015

### 23) Urusan Kearsipan

#### a) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2010-2015 tersebut pada tabel 2.139.

Tabel 2.139.  
Pengelolaan Arsip Secara Baku  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pengelolaan arsip secara baku oleh SKPD	10	15	25	25	28	32

Sumber : Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Temanggung Tahun 2015

Pada tahun 2015 pengelolaan arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 32 SKPD yaitu Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Sekretariat DPRD, DKK, Dinas Sosial, Dispendukcapil, Disperindagkop & UMKM, Dintanbunhut, Disnakan, DPPKAD, Inspektorat, Bappeda, BKD, Bapermades, BKBPP, Kantor Ketahanan Pangan, RSUD, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Kedu, Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kledung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Jumo, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Ngadirejo, dan KPU.

#### b) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD dan Desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi,

penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

Pada tahun 2015 dilaksanakan bimbingan teknis kearsipan di 20 SKPD dan lomba arsip di 19 desa 19 kecamatan serta diadakan fumigasi gudang depo arsip seluar 84 M2.

## 24) Urusan Komunikasi dan Informatika

### a) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Tabel 2.140.  
Operator Telekomunikasi  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah operator telepon genggam	8	8	8	7	5	5
2	Jumlah operator telepon stasioner	1	1	1	1	1	1
3	Total operator telekomunikasi	9	9	9	8	8	6

Sumber : PT. Telkom Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2015

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah operator telepon genggam tahun 2010 ada 8 (Delapan) operator, namun pada tahun 2015 terdapat satu operator yang tidak lagi beroperasi dan satu operator yang di merger. sehingga jumlah operator menjadi 5 buah. yaitu Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren dan Tri. Sedangkan jumlah jaringan telepon stasioner hanya terdapat satu operator yaitu PT. Telkom.

### b) Rasio Warnet terhadap Penduduk

Rasio warnet terhadap penduduk adalah jumlah warnet dibagi jumlah penduduk kali 1.000. Perkembangan rasio warnet tahun 2010-2015 sebagaimana tersebut pada tabel 2.141.

Tabel 2.141.  
Rasio Warnet Terhadap penduduk  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Jenis Kriteria	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah warnet	25	77	71	70	70	70
2	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	738.915
3	Rasio warnet per 1000 penduduk	0,035	0,106	0,097	0,095	0,095	0,094

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015

### c) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Media Cetak mempunyai makna sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. Unsur-unsur utama adalah tulisan (teks), gambar visualisasi atau keduanya. Adapun jumlah media cetak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.142.

Tabel 2.142.  
Jumlah Media Cetak (Surat Kabar)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Jenis Media	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cetak Nasional	6	6	6	6	6	6
2.	Cetak Lokal	9	9	10	11	11	12

*Sumber Bagian Humas Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa media cetak nasional sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 berjumlah 6 (enam) media cetak yang beredar secara nasional yang beredar di Temanggung diantaranya adalah Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo, Sindo, dan Jawa Pos.

Sedangkan media cetak lokal pada tahun 2015 berjumlah 12 (dua belas) yang beredar di Temanggung antara lain: Radar Semarang, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, Magelang Ekspres, Tribun Jateng, Tribun Jogja, Jateng Pos, Bernas, Gema Bhumi Phala, Bambu Runcing, dan Lontar.

### d) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik (listrik) untuk mengakses kontennya. Media elektronik dibagi menjadi media radio dan televisi, sebagaimana tersebut pada uraian berikut ini.

#### - Jumlah penyiaran radio

Dari tabel tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa Radio Nasional dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 4 (empat) radio. Dengan pengertian yang memiliki frekuensi pancar secara nasional baik langsung maupun tidak langsung. Radio Nasional yang mampu ditangkap di Temanggung antara lain RRI, Elshinta, KBR 68H, dan Trijaya.

Tabel 2.143.  
Jumlah Stasiun Radio  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Jenis Media	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Radio Nasional	4	4	4	4	4	4
2.	Radio Lokal	5	5	5	5	5	6

*Sumber Bagian Humas Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Sedangkan Radio Lokal dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 6 (enam) radio. Dengan pengertian hanya memiliki frekuensi pancar tingkat lokal saja. Radio lokal yang mampu di tangkap di Temanggung adalah Best FM, Ofa Radio, eRTe FM, O2 FM, dan Angkasa 7 FM, dan Santika FM.

- **Jumlah Penyiaran TV**

Selanjutnya untuk Televisi Nasional dan lokal dapat dilihat sebagaimana tabel 2.144, Dari Tabel 2.144 terlihat, TV nasional dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 11 (sebelas) yang memiliki frekuensi pancar nasional. Televisi nasional yang mampu ditangkap di Temanggung adalah MNC TV, Metro TV, RCTI, Global TV, SCTV, TVRI, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, dan INDOSIAR.

Tabel 2.144.  
Jumlah TV Nasional  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Jenis Media	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	TV Nasional	11	11	11	11	11	11
2.	TV Lokal	9	9	9	9	9	9

*Sumber Bagian Humas Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Adapun Televisi lokal dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 9 (sembilan ) yang hanya bersifat lokal saja. TV lokal yang mampu ditangkap di Temanggung adalah Cakra TV, TVKU, Jogja TV, TATV, Borobudur (Kompas TV), Pro TV, ADI TV, TVRI Yogyakarta, dan TVRI Semarang.

**e) Website Milik Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai website resmi milik pemda yaitu <http://www.temanggungkab.go.id/>. Website tersebut terhubung langsung dengan beberapa SKPD yang juga sudah mempunyai website dan berada di bawah domain [temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id).

#### **f) Pusat Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Pembangunan Jaringan online untuk mengkoneksikan seluruh SKPD se-Kabupaten Temanggung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Teknologi informasi dan komunikasi data memungkinkan penyampaian informasi dapat diperoleh lebih cepat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah.

Pelaksanaan Pembangunan Pusat Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Temanggung terangkum pada tabel 2.145.

Tabel 2.145.  
Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan	1	2	2	6	6	8
Besaran Bandwith	2 Mb	4 Mb	8 Mb	10 Mb	10 Mb	40 Mb
SKPD terkoneksi online	1	6	10	4	4	6

*Sumber Bagian Santel dan PDE Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Dari tabel 2.145 ada peningkatan aplikasi sistem pemerintahan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dari 1 (satu) menjadi 8 (delapan). Demikian pula besaran Bandwith pada tahun 2015 sebesar 30 (empat puluh) Mb. Sedangkan SKPD yang sudah terkoneksi sebanyak 53 SKPD termasuk 4 Desa dimana tahun berikutnya akan terkoneksi jaringan komunikasi online ke desa-desa se Kabupaten Temanggung secara bertahap.

Implementasi pelaksanaan e-Government di Kabupaten Temanggung yang menonjol adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan sarana untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu proses pengadaan dilakukan dengan on line sehingga proses pengadaan dapat terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitas.

### **25) Urusan Perpustakaan**

#### **a) Jumlah perpustakaan**

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dengan 6 (enam) indikator yaitu : jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda), jumlah perpustakaan desa/kelurahan, jumlah perpustakaan SD, jumlah perpustakaan



SMP, jumlah perpustakaan SMA/MA, dan jumlah perpustakaan SMK. Data jumlah perpustakaan dapat dilihat dalam tabel 2.146.

Tabel 2.146.  
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan	289	289	289	289	289	289
3.	Jumlah perpustakaan SD	301	301	301	313	313	578
4.	Jumlah perpustakaan SMP	63	66	73	74	74	106
5.	Jumlah perpustakaan SMA/MA	21	21	21	21	21	21
6.	Jumlah perpustakaan SMK	12	12	15	16	16	16

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel diatas bahwa jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Temanggung sampai dengan Desember 2015 sebesar 1.010 perpustakaan yang terdiri dari 266 perpustakaan Desa, 23 perpustakaan Kelurahan, 433 perpustakaan SD, 145 perpustakaan MI, 106 perpustakaan SMP, 21 perpustakaan SMA/MA dan 16 perpustakaan SMK.

#### b) Jumlah pengunjung perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun, baik yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Adapun jumlah Pengunjung Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.147.

Tabel 2.147.  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pengunjung	30.125	32.671	56.473	76.598	63.487	71.959

Sumber : Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kab Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.147 jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 telah mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2009.

#### c) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.148.

Tabel 2.148.  
Koleksi Buku Perpustakaan Milik Pemda  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Koleksi Buku perpustakaan	34.083	36.536	39.346	41.946	43.086	44.814

*Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab Temanggung Tahun 2015*

**b. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

**1) Urusan Pertanian**

**a) Pertanian**

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia menghasilkan bahan pangan. Komoditas tanaman pangan Kabupaten Temanggung terdiri dari 7 (tujuh) jenis tanaman yaitu tanaman padi sawah, tanaman padi ladang, tanaman jagung, tanaman kacang kedelai, tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, dan tanaman ubi jalar.

Tabel 2.149.  
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

JENIS DATA	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tanaman Padi Sawah						
- Luas tanam (ha)	30.863	25.799	25.687	26.618	25.375	21.689
- Luas panen (ha)	28.175	24.781	25.753	25.678	26.175	25.403
- Produktivitas (Kw/ha)	62	61	62	60	60,43	64,31
Tanaman Padi Ladang						
- Luas tanam (ha)	107	516	404	1.465	25	-
- Luas panen (ha)	188	113	552	852	891	-
- Produktivitas (Kw/ha)	36,49	36,67	37,80	37,15	38,80	-
Tanaman Jagung						
- Luas tanam (ha)	24.504	24.951	23.254	23.839	21.450	15.355
- Luas panen (ha)	30.519	19.015	24.872	22.331	22.865	19.190
- Produktivitas (Kw/ha)	50	40	56	49,82	45,72	42,81
Tanaman Kacang Kedelai						
- Luas tanam (ha)	24	11	9	4	n.a.	8
- Luas panen (ha)	32	8	17	2	1	8
- Produktivitas (Kw/ha)	44	18	19	21	20,92	22,67
Tanaman Kacang Tanah						
- Luas tanam (ha)	697	571	579	388	269	294
- Luas panen (ha)	850	509	653	440	210	341
- Produktivitas (Kw/ha)	10,5	10,7	10,4	15,35	13,38	15,23
Tanaman Ubi Kayu						
- Luas tanam (ha)	3.235	3.078	2.783	1.712	2.288	921
- Luas panen (ha)	3.247	3.032	2.308	2.461	1.739	1.970
- Produktivitas (Kw/ha)	290,3	247,9	244,8	257,35	302,69	242,58
Tanaman Ubi Jalar						
- Luas tanam(ha)	376	233	224	251	199	197
- Luas panen (ha)	362	379	115	280	251	219
- Produktivitas (Kw/ha)	129	149	55	143,9	172,26	200,85

*Sumber : Distanbunhut Kabupaten Temanggung Tahun 2015*

Tabel 2.149 merupakan gambaran perkembangan komoditas utama yang dilihat dari luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas dan jumlah konsumsi masing-masing komoditas dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2015.

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa luas areal padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Sebagaimana daerah pegunungan/ dataran tinggi, pola konsumsi masyarakat Kabupaten Temanggung adalah padi dan jagung. Pada daerah-daerah tertentu konsumsi jagung lebih banyak dari pada beras. Sejalan dengan kondisi tersebut, sektor pertanian merupakan sektor perekonomian utama di Kabupaten Temanggung, dengan produk tanaman pangan yang utama adalah padi dan jagung.

Secara umum kondisi luas lahan dan jumlah produksi selama lima tahun terakhir (2009-2015) mengalami fluktuasi. Luas tanaman padi tahun 2009-2015 cenderung menurun, tetapi pada tahun 2015 produktifitas tanaman padi meningkat per hektarnya. Luas tanaman jagung dari tahun 2009-2015 cenderung menurun namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2014 tetapi menurun lagi di tahun 2015.

Tabel 2.150.  
Produksi dan Konsumsi Komoditas Tanaman Pangan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

Jenis Data (ton)	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tanaman Padi Sawah							
- Produksi gabah	173.027	174.685,00	151.164,10	159.668,60	147.123	158.178,00	163.366,70
- Produksi beras	117.658,36	110.400,92	95.535,71	100.910,56	100.043	99.240,88	10.249,63
- Jumlah konsumsi beras	67.060	31.452,07	54.526,39	54.952,37	58.076,26	61.910,17	88.108,39
Tanaman Padi Ladang							
- Produksi gabah	35,47	686,01	414,37	2.086,56	3.165,18	3.806	
- Produksi beras	22,42	433,56	261,88	1.318,71	2.152,32	2.588,08	
Tanaman Jagung							
- Produksi	133.758,4	152.595	76.060	139.283,2	111.327	104.532,00	82.152
- Jumlah konsumsi	22.132	11.643,66	8.022,76	8.306,75	2.910,91	9.513,72	4.046,88
Tanaman Kedelai							
- Produksi	120,4	140,8	14,4	32	4,15	2,00	1,8
- Jumlah konsumsi	7.654	15.690,54	5.537,84	8.661,74	7.951,76	8.803,74	15.406,54
Tanaman Kacang Tanah							
- Produksi	1.090,96	892,50	544,63	679,1	200	281	485,24
- Jumlah konsumsi	2.426	2.626,92	4.188,88	4.827,86	3.194,91	4.685,86	4.685,86
Tanaman Ubi Kayu							
- Produksi	117.891,20	94.260,41	75.163,28	56.499,84	61.554	52.638	47.788,26
- Jumlah konsumsi	40.653	14.483,57	52.751,44	75.257,77	59.283,25	69.009,96	5.395,84
Tanaman Ubi Jalar							
- Produksi	7.056	4.669,8	5.647,1	1.782,5	3.589	4.324	4.398,61
- Jumlah konsumsi	2.426	4.401,87	6.176,82	7.880,77	7.454,78	7.170,79	17.891,47

Sumber : Distanbunhut dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Terlihat bahwa untuk padi, jagung, kacang tanah dan ubi kayu mengalami surplus, yakni jumlah produksi lebih tinggi daripada jumlah konsumsi, sementara untuk kacang kedelai dan ubi jalar mengalami kekurangan/defisit. Kekurangan produksi yang paling besar ada pada komoditas kedelai. Kebutuhan kedelai yang tinggi belum diimbangi luas areal tanam, sehingga ke depan perlu pengembangan kedelai sesuai dengan potensi yang ada. Tingkat konsumsi beras pada tahun 2015 meningkat cukup signifikan, hal ini disebabkan semakin menurunnya konsumsi sumber karbohidrat non beras.

#### b) Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan dapat dilihat dari 10 (sepuluh) komoditas yaitu tanaman teh, tanaman kopi robusta, tanaman tembakau, tanaman kakao, tanaman lada, tanaman panili, tanaman tebu, tanaman kelapa, tanaman cengkeh, dan tanaman aren. Perkembangan komoditas tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.151.

Tabel 2.151.  
Perkembangan Sektor Perkebunan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015

Jenis Data	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tanaman Teh							
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	6,57	6,57	5,97	6,17	5,25	5,25	5,25
- Luas tanaman (ha)	7,00	7,00	6,40	6,40	6,00	6,00	6,00
- Jumlah produksi (ton)	17,14	7,33	8,48	11,21	7,21	7,93	10,06
- Produktivitas (ton/ha)	2,61	1,12	1,42	1,82	1,37	1,51	1,916
Tanaman Kopi Robusta	7.568,09	7.556,82	7.551,62	7.610,29	8.158,55	8.158,55	8.158,55
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	9.272,98	9.268,42	9.262,02	9.256,28	9.304,47	9.304,47	9.561,55
- Luas tanaman (ha)	6.044,04	6.044,00	2.514,22	8.518,45	7.388,79	10.254,33	7.536,49
- Jumlah produksi (ton)	0,80	0,80	0,33	1,10	0,90	1,25	0,924
- Produktivitas (ton/ha)							
Tanaman Kopi Arabika	646,83	678,10	678,10	1.048,57	1.377,82	1.377,82	1.377,82
- Luas Tanaman Menghasilkan (ha)	1.073,72	1.160,57	1.431,74	1.429,48	1.463,93	1.743,93	1.840,30
- Luas Tanaman (ha)	428,30	458,79	254,45	991,63	1.027,11	1.405,96	1.109,42
- Jumlah Produksi (ton)	0,66	0,68	0,38	0,95	0,74	0,94	0,805
- Produktivitas (ton/ha)							
Tanaman Tembakau							
- Luas panen (ha)	13.088,30	14.577,65	14.244,00	15.587,50	14.517,00	12.587,00	18.248
- Luas tanam (ha)	13.088,30	14.582,15	14.244,00	15.587,50	14.948,00	15.730,00	19.209
- Jumlah produksi (ton)	6.786,64	6.373,99	9.126,40	9.978,50	7.146,12	6.922,92	10.581,3
- Produktivitas (ton/ha)	0,52	0,44	0,64	0,64	0,49	0,55	0,58
Tanaman Kakao							
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	81,74	90,34	90,92	228,80	179,66	179,66	179,66
- Luas tanaman (ha)	531,12	530,74	531,65	528,60	258,01	258,01	256,80
- Jumlah produksi (ton)	55,86	61,44	73,47	181,14	46,12	40,50	137,65
- Produktivitas (ton/ha)	0,68	0,68	0,81	0,79	0,25	0,22	0,766
Tanaman Lada							
- Luas tanaman menghasilkan	13,11	13,36	9,10	10,42	10,42	10,42	10,42

Jenis Data	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(ha)							
- Luas tanaman (ha)	18,34	17,02	17,02	15,91	15,91	15,91	15,91
- Jumlah produksi (ton)	9,84	7,87	8,33	9,14	8,54	7,44	8,23
- Produktivitas (ton/ha)	0,75	0,59	0,92	0,88	0,82	0,71	0,79
Tanaman panili							
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	40,78	41,43	39,22	60,24	24,34	20,59	20,59
- Luas tanaman (ha)	80,70	80,40	78,93	73,43	34,14	34,14	32,20
- Jumlah produksi (ton)	27,07	28,28	11,93	13,68	6,39	5,32	9,69
- Produktivitas (ton/ha)	0,66	0,68	0,30	0,22	0,26	0,21	0,471
Tanaman Tebu							
- Luas panen (ha)	103,00	211,40	211,40	210,08	214,98	214,98	168,22
- Luas tanam (ha)	103,00	211,40	211,40	210,08	209,98	214,98	168,22
- Jumlah produksi (ton)	449,74	161,75	232,09	1.002,63	1.139,63	668,70	8,499
- Produktivitas (ton/ha)	4,37	0,77	1,10	4,77	5,30	3,10	0,492
Tanaman Kelapa							
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	1.476,88	1.525,89	1.527,32	1.637,66	1.712,72	1.712,72	1.712,72
- Luas tanaman (ha)	1.957,64	1.960,62	1.954,62	1.942,37	1.934,42	1.934,42	1.929,21
- Jumlah produksi (ton)	918,60	918,6	837,22	1.150,85	1.193,23	1.178,37	876,57
- Produktivitas (ton/ha)	0,62	0,62	0,55	0,70	0,69	0,68	0,51
Tanaman Cengkeh							
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	852,79	822,01	832,95	865,26	871,96	871,96	871,96
- Luas tanaman (ha)	1.322,06	1.308,06	1.391,31	1.347,04	1.377,04	1.417,04	1.466,30
- Jumlah produksi (ton)	150,27	163,11	22,46	185,53	167,14	203,80	132,88
- Produktivitas (ton/ha)	0,18	0,20	0,03	0,21	0,19	0,23	0,152
Tanaman Aren							
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	329,83	292,52	286,52	296,67	296,67	378,65	378,65
- Luas tanaman (ha)	483,72	483,70	475,26	469,96	471,46	471,46	469,30
- Jumlah produksi (ton)	1.037,28	1.044,04	730,63	922,06	877,62	1.054,39	1.195,46
- Produktivitas (ton/ha)	3,14	3,57	2,55	3,11	2,96	2,78	3,157

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan hasil kajian MP3ET (2011) subsektor perkebunan merupakan salah satu dari enam subsektor yang berpeluang untuk masih berkembang di masa yang akan datang. Kajian tersebut juga menunjukkan komoditas kopi dan tembakau memiliki daya saing dengan subsektor sejenis daerah lain di Jawa Tengah.

Demikian pula berdasarkan analisis tabel input Output (2012). Tembakau mempunyai pengaruh yang signifikan, dimana sektor tembakau menerima pasokan bahan dari 16 sektor yang lain. Komoditas tembakau belum tergantikan karena memberi hasil dalam jangka pendek yang langsung bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kabupaten Temanggung merupakan penghasil tembakau Voor-Oogst terbaik di Indonesia, karena memiliki sifat khusus, yaitu aroma khas dan senyawa nikotin yang tinggi. Tembakau Temanggung memiliki kadar nikotin tinggi berkisar 3-8 %. Pengembangan tembakau tersebar di Kecamatan Kledung, Bansari, Bulu, Temanggung, Kedu, Jumo, Selopampang,

Tlogomulyo, Tembarak, Ngadirejo, Tretep, Parakan dan Wonobojo.

Salah satu komoditas tahunan yang juga mempunyai potensi dan keunggulan untuk dikembangkan adalah tanaman kopi. Kopi mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi disamping itu juga dapat digunakan konservasi lingkungan.

Berdasarkan karakteristik ketinggian tempat, ada dua jenis kopi yaitu kopi robusta (450-1.000 m dpl) dan kopi arabika (> 1.000 m dpl). Sampai saat ini luas areal dan produksi kopi robusta Kabupaten Temanggung menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah.

Selain kopi dan tembakau Kabupaten Temanggung juga memiliki jenis tanaman perkebunan lain, yaitu teh, kakao, lada, panili, tebu, kelapa, cengkeh dan aren, dengan komoditas yang masih berpotensi untuk dikembangkan adalah cengkeh.

### c) Peternakan

Peternakan adalah usaha budidaya ternak untuk diambil manfaatnya. Potensi peternakan yang ada di Kabupaten Temanggung cukup beragam, antara lain ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, burung puyuh, dan angsa. yang terlihat dalam tabel 2.152.

Tabel 2.152.  
Perkembangan Sektor Peternakan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2015

Jenis Data	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sapi Potong							
- Jumlah populasi (ekor)	35.718	35.944	40.311	43.515	27.282	29.115	32.665
- Jumlah produksi (ton)	453,60	548,55	572,29	720,00	365,06	3878	519,624
- Jumlah pemotongan/th (ekor)	3.223	3.450	3.538	4.500	2.296	0,82	3.093
- Laju pertumbuhan populasi/th (%)	0,14	0,63	12,15	7,95	- 37,61	1,6	1
- Rata-rata kepemilikan per peternak (ekor)	2	2	3	4	2	-	2
Sapi Perah							
- Jumlah populasi (ekor)	199	200	207	247	264	246	269
- Jumlah produksi susu/th (liter)	162.780	273.318	563.372	730.256	737.688	680.625	175.512
- Laju pertumbuhan (%)	1,02	0,5	3,5	19	4,76	0,74	0,01
- Rata-rata kepemilikan per peternak (ekor)	5	5	5	5	5	5	-
- Rata-rata produktivitas ekor/hari (liter)	9,5	11,8	14,6	14,4	14,5	15	12
Jumlah populasi kambing (ekor)	55.685	55.910	55.858	58.731	61.098	70.046	75.685
Jumlah populasi domba (ekor)	250.421	251.278	251.283	270.497	287.584	286.058	350.770
Jumlah populasi babi (ekor)	225	231	215	209	78	84	85
Jumlah populasi kerbau (ekor)	2.288	2.343	1.355	1.392	1.411	1.425	1.434
Jumlah populasi kuda (ekor)	439	439	439	444	447	451	453
Jumlah populasi kelinci (ekor)	8.965	9.085	9.229	9.360	9.756	9.856	9.859
Ternak unggas							
a. Populasi ayam buras (ekor)	1.637.325	1.635.780	1.648.624	1.658.996	1.659.835	1.862.390	1.877.909
b. Ayam petelur							
- Jumlah populasi (ekor)	575.005	575.415	671.911	678.694	686.825	681.503	682.641

- Jumlah produksi telur (ton)	3.653	4.066	4.169	4.431	4.464	4.480,31	4.445
- Jumlah peternak (orang)	25	25	67	67	68	70	50
- Kepemilikan/peternak (ekor)	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.500
c. Ayam Pedaging							
- Jumlah populasi (ekor)	555.000	575.000	582.550	588.550	600.000	786.136	933.967
- Jumlah peternak (orang)	125	125	125	125	130	150	125
- Jumlah produksi daging(ton)	5.006	4.442	5.050	5.100	5.199	7.861	1.238
- Kepemilikan/peternak (ekor)	4.440	4.600	4.660	4.708	4.615	5.000	7.000
d. Itik							
- Jumlah populasi (ekor)	100.250	101.067	101.575	101.805	102.838	102.145	102.190
- Jumlah peternak (orang)	6.683	5.053	5.078	5.090	5.120	5.120	13.372
- Jumlah produksi telur (ton)	577	722	686	658	664	659,47	660
- Kepemilikan/peternak(ekor)	15	20	20	20	20	20	8
e. Populasi Itik Manila (ekor)	24.488	24.782	24.609	24.865	24.977	24.950	24.975
f. Populasi Burung puyuh (ekor)	51.562	50.975	51.137	51.410	51.255	51.357	18.745
g. Populasi Burung Merpati (ekor)	18.919	19.011	22.771	22.928	23.064	23.064	33.707
h. Populasi Angsa (ekor)	18.355	18.997	18.961	18.762	18.758	18.745	51.476

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Potensi peternakan didukung oleh ketersediaan hijauan makanan ternak per satuan ternak yaitu limbah pertanian 54.139 (Animal Unit/Au), rumput lapangan 7.358 Au dan rumput unggul 44.860 Au.

Berdasarkan analisis, sektor peternakan khususnya ruminansia kecil memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan sektor sejenis di kabupaten/kota se Jawa Tengah (MP3ET, 2011). Populasi sapi perah, domba, kelinci, ayam buras, ayam petelur, itik, burung merpati, dan kuda selama lima tahun terakhir relatif selalu meningkat.

## 2) Urusan Kehutanan

Hasil hutan adalah segala jenis kayu tebangan, tanaman hasil penghijauan, dan hasil hutan lainnya, termasuk bambu/kayu dari kebun. Jenis kayu utama yang dihasilkan adalah kayu Albasia, untuk produksi kotak dan kayu lapis, serta kayu keras untuk industri mebel.

Kabupaten Temanggung memiliki hutan negara/rakyat seluas 16.117 Ha. Hutan negara/rakyat merupakan hutan produksi yang menghasilkan kayu. Selain sebagai hutan produksi juga sebagai kawasan konservasi, yang berfungsi untuk mengurangi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas lahan.

Berdasarkan analisis MP3ET (2011) menunjukkan bahwa Albasia kehutanan memiliki daya saing tinggi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Penelitian tersebut juga menunjukkan sektor kehutanan terutama penyediaan kayu masih akan berperan semakin kuat untuk ekonomi Kabupaten Temanggung.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh kajian tabel Input Output (2013) struktur ekonomi di Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan nilai output industri pengolahan kayu menempati

urutan pertama dengan nilai tambah sebesar 82,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha industri pengolahan kayu mendorong aktivitas perdagangan dan pengangkutan serta penyediaan bahan baku.

### 3) Urusan Energi, Sumber Daya Mineral

#### a) Pertambangan tanpa ijin

Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah pertambangan, namun ada beberapa lokasi yang sebagian masyarakat melakukan penambangan pasir tanpa ijin. Beberapa lokasi sudah ditutup oleh pemerintah daerah dan tanahnya dibeli pemda untuk dilaksanakan reklamasi. Lokasi bekas penambangan pasir di Desa Kwadungan Gunung saat ini menjadi lokasi ATP dan Rest Area. Ada salah satu lokasi penambangan pasir tanpa ijin yang juga sudah dibeli pemda dan dinyatakan sebagai lokasi cagar budaya yaitu Situs Liyangan di Desa Purbasari Kecamatan Ngadirejo.

### 4) Urusan Pariwisata

#### a) Kunjungan Wisata

Jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata baru yang mulai tumbuh dan ramai dikunjungi wisatawan, antara lain adalah Pikatan water park dan Posong.

Perkembangan wisatawan tahun 2009-2015 sebagaimana tersebut pada tabel 2.153.

Tabel 2.153.  
Perkembangan Wisatawan (jiwa)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wisatawan manca negara	n.a	45	12	77	21	155	8
2.	Jumlah wisatawan domestik	289.387	258.422	335.856	360.061	269.614	338.781	150.945

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2015

#### b) Tempat Wisata Dan Cagar Budaya

Kabupaten Temanggung memiliki keragaman wisata, yaitu wisata alam dan buatan. Obyek wisata di Kabupaten Temanggung adalah Kledung Pass atau wisata Sumbing Sindoro, Posong,



Pikatan Water Park di Kecamatan Temanggung, Wana Wisata Jumprit di Kecamatan Ngadirejo, Candi Pringapus di Kecamatan Ngadirejo, Prasasti Gondosuli di Kecamatan Bulu, Taman Rekreasi Kartini di Kecamatan Temanggung, Monumen Meteorit di Kecamatan Bulu, Monumen Bambang Sugeng di Kecamatan Temanggung, Curug Lawe di Kecamatan Gemawang, Curug Troch di Kecamatan Wonobojo, Agrowisata, Goa Wonotirto, Goa Lawa di Kecamatan Bejen dan wisata tradisi. Cagar budaya di Kabupaten Temanggung ada sejumlah 43 buah.

Wisata yang menjadi andalan dan jumlah pengunjungnya paling banyak adalah Water Park Pikatan di Desa Mudal Kecamatan Temanggung. Pembangunan wisata yang sedang berjalan saat ini adalah di Situs Liyangan dimana saat ini masih dalam proses ekskavasi.

#### e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan sektor perikanan dapat dilihat dari perkembangan empat hal, yaitu kolam air tenang, sawah/mina padi, perairan umum, dan unit pembenihan rakyat yang dapat dilihat di tabel 2.154.

Tabel 2.154.  
Perkembangan Sektor Perikanan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

Jenis Data	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kolam air tenang							
- Luas areal (ha)	113,07	114,20	115,57	117,88	119,29	120,25	120,29
- Produksi ikan nila (ton)	291,49	297,74	299,82	335,8	414,71	519,59	619,06
- Produksi ikan lele (ton)	403,09	485,43	710,6	1.225,5	1.513,49	1.946,59	2.182,97
- Produksi ikan gurami (ton)	2,27	2,30	2,37	3,18	3,93	3,94	3,25
- Produksi ikan mas (ton)	261,34	261,53	261,73	277,13	342,26	364,15	n.a
- Produksi ikan patin (ton)	2,15	2,25	2,57	3,37	4,16	n.a.	n.a
- Produksi ikan lainnya (ton)	37,17	37,37	37,61	19,10	23,59	25,65	29,33
- Nilai produksi (juta)	19.643,85	21.800,42	25.294,29	34.321,45	54.037,84	45.691,21	63.957,99
Sawah/mina padi							
- Luas areal (ha)	2.974,85	3.000,8	3.040,5	3.064,97	3.127,80	3.190,39	1.351,2
- Produksi ikan mas (ton)	723,49	745,07	848,3	932,39	1.152,26	1.323,42	1.182,99
- Produksi ikan nila (ton)	129,01	131,48	212,5	219,35	270,96	445,09	788,65
- Nilai produksi (juta)	18.236,37	18.547,99	22.854,44	24.851,34	28.532,80	42.451,77	46.925.050
Perairan Umum							
- Luas areal (ha)	21.456	21.456	21.456	21.456	21.456	21.506	21.506
- Produksi (ton)	50,86	54,15	79,5	121,28	181,92	239,01	299.534
- Nilai produksi (juta)	243,71	259,46	357,43	2.482,72	3.755,70	5.482,15	10.255.866
Unit Pembenihan Rakyat							
- Jumlah (unit)	185	196	245	255	275	275	267
- Produksi usaha (juta ekor)	29,81	38,32	46,14	51,68	68,90	78.038,998	84.019.819
- Nilai produksi (juta)	3.813,06	4.821,62	5.890,56	6.610,80	12.890,50	16.830.69	12.602.972.850
Produksi ikan hias (ekor)	115.750	281.000	320.115	540.220	702.000	n.a.	n.a

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Karena termasuk daerah dataran tinggi maka potensi perikanan yang berkembang adalah perikanan air tawar. Produksi dan nilai produksi dari kolam air tenang dan sawah mina padi selalu meningkat. Jenis ikan yang diproduksi di kolam air tenang meliputi ikan nila, mas, lele, gurami, hias dan ikan lainnya.

Berdasarkan analisis MP3ET (2011) Kabupaten Temanggung sektor perikanan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan sektor sejenis di kabupaten/kota se Jawa Tengah (MP3ET, 2011). Di mana pertumbuhan subsektor perikanan terutama disumbangkan oleh budidaya ikan kolam dan budidaya mina padi yang meliputi ikan mas dan ikan nila.

## 6) Urusan Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana prasarana seperti pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.155.

Tabel 2.155.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Kecamatan	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	
1	Parakan	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bulu	0	1	0	0	0	0	0	1	1
5	Temanggung	1	1	1	0	0	0	0	0	3
6	Tlogomulyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Tembarak	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Selopampang	0	1	0	1	0	0	0	0	2
9	Kranggan	1	1	0	1	0	0	0	0	3
10	Pringsurat	1	1	1	2	0	1	0	0	6
11	Kaloran	0	4	0	1	0	0	0	0	5
12	Kandangan	0	4	0	1	0	0	0	0	5
13	Kedu	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Ngadirejo	1	0	1	0	0	0	0	0	2
15	Jumo	0	1	0	1	0	0	0	0	2
16	Gemawang	0	2	0	1	0	0	0	0	3
17	Candiroto	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Bejen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tretep	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Wonobojo	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Jumlah	6	22	3	8	0	1	0	3	40

Sumber : Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.Temanggung 2015

Di samping sarana prasarana perdagangan tersebut di atas, juga terdapat sarana dan prasarana perdagangan yang lain antara lain toko modern/swalayan, SPBU, dan SPBE. Toko modern di Kabupaten Temanggung ada sejumlah 33 buah. Untuk SPBU dan SPBE secara rinci dalam tabel 2.156.

Tabel 2.156.  
Nama dan Alamat SPBU – SPBE  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Uraian
<b>1</b>	<b>Nomor dan Alamat SPBU</b>
1.1	Nomor : 44.562.01, di Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo
1.2	Nomor : 44.562.02, di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat
1.3	Nomor : 44.562.03, di Desa Candimulyo Kecamatan Kedu
1.4	Nomor : 44.562.04, di Jalan Suwandi Suwardi Kecamatan Temanggung
1.5	Nomor : 44.562.05, di Jalan Raya Kedu Parakan Kecamatan Bulu
1.6	Nomor : 44.562.06, di Desa Bengkal Kecamatan Kranggan
1.7	Nomor : 44.562.07, di Desa Caturanom Kecamatan Parakan
1.8	Nomor : 44.562.08, di Desa Danupayan Kecamatan Bulu
1.9	Nomor : 44.562.09, di Desa Candiroti Kecamatan Candiroti
1.10	Nomor : 44.562.10, di Desa Manden Kecamatan Parakan
1.11	Nomor : 44.562.11, di Desa Kledung Kecamatan Kledung
1.12	Nomor : 44.562.12, di Jalan Tembus Kranggan Pringsurat Desa Badran
1.13	Nomor : 44.562.13, di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Manding
1.14	Nomor : 44.562.14, di Desa Traji Kecamatan Parakan
<b>2</b>	<b>Nama dan Alamat SPBE</b>
2.1	PT. Usaha Dua Sahabat, di Jalan Raya Kranggan-Pringsurat
2.2	PT. Mitra Manunggal Perkasa, di Jalan Raya Kedu-Parakan

Sumber : Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## 7) Urusan Perindustrian

Perkembangan sektor perindustrian di kabupaten dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis yaitu Industri Mikro dan Kecil, Menengah, dan Industri Besar dapat dilihat dalam tabel 2.157.

Tabel 2.157.  
Perkembangan Sektor Perindustrian  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

Kriteria	Tahun						
	2009	2010	2011	2011	2011	2014	2015
Industri Mikro dan Kecil							
- Unit kerja (unit)	15.151	15.195	15.696	15.707	15.731	15.725	15.848
- Tenaga Kerja (orang)	54.974	54.061	64.753	64.892	64.940	56.480	58.230
- Nilai produksi (juta rupiah)	230.250,77	169.590,00	710.580	862.352	862.585	862.965	880.224
Industri Menengah							
- Unit kerja (unit)	199	219	223	235	257	250	246
- Tenaga Kerja (orang)	5.242	5.448	5.586	5.675	5.786	4.425	4.230
Industri Besar							
- Unit kerja (unit)	17	20	23	28	30	38	38

Kriteria	Tahun						
	2009	2010	2011	2011	2011	2014	2015
- Tenaga Kerja (orang)	8.370	9.460	12.280	12.792	12.993	23.902	24.405
- Nilai produksi (juta rupiah)	456.000	278.600	1.000.160	2.013.000	2.815.257	2.138.079	2.180.841
Nilai Ekspor (\$ US)							
-Kayu olahan	66.347.926,6	36.354.681,6	143.410.272,5	108.406.133,6	150.927.864,90	149.986.530,34	140.632.388,06
-Non kayu olahan	n.a	n.a	n.a	6.603.021,04	353.088,33	n.a.	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.194 dalam rentang waktu antara 2009 sampai dengan 2015 nilai produksi industri mikro dan kecil mengalami peningkatan dari 230.250,77 juta rupiah menjadi 880.224 juta rupiah. Sedangkan industri besar nilai produksi meningkat dari 456.000 juta rupiah menjadi 2.180.841 juta rupiah.

Demikian pula perkembangan nilai ekspor mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari \$(US) 66.347.926,6,- pada tahun 2009 berkembang menjadi \$(US) 149.986.530,34 pada tahun 2014, walaupun menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar \$(US) 140.623.388,06. Fluktuasi nilai ekspor terjadi dikarenakan naik turunnya permintaan dari luar negeri, sebagai contoh pada tahun 2011 terjadi peningkatan nilai ekspor kayu olahan yang sangat besar khususnya ke Jepang untuk merehabilitasi bangunan pasca tsunami Jepang.

Sedangkan perkembangan Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung terdiri dari Industri Pangan, Industri Sandang, Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Industri Logam dan Elektronika, Kerajinan, Primer Hasil Hutan dan diukur dari jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja sebagaimana dalam tabel 2.158.

Tabel 2.158.  
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
	INDUSTRI PANGAN				
1	Pemotongan hewan	24	133	180	4.186
2	Pengolahan buah (dalam botol)	31	99	47,84	910
3	Pisang aroma	16	159	709,28	3.021,20
4	Jahe instan	4	15	20,80	314,08
5	Susu segar	1	23	2.789	1.716
6	Susu kedelai	5	15	728	52
7	Pembersihan kopi	954	3080	1.200	6.500
8	Tepung jagung	5	21	244,40	832
9	Tepung tapioca	16	76	294,32	780

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
10	Ransum pakan ternak	4	36	1.433,12	3.432
11	Roti dan sejenisnya	71	328	561,6	6.136
12	Gula arena	1.224	2.524	676	8.060
13	Glukosa	1	13	140,40	364
14	Sirup	1	5	21.994	187,2
15	Mie	1	8	280,80	660,40
16	Pembungkus teh	2	6	0	31,2
17	Kopi bubuk	145	335	62,40	4.680
18	Es	23	57	72,8	312
19	Kecap	7	37	497,12	1.248
20	Tempe	492	909	4.420	16.432
21	Tahu	109	468	4.971,2	13.728
22	Kedele goreng	4	16	24,96	119,60
23	Kacang telur	12	32	36,40	260
24	Kerupuk dan sejenisnya	1.709	5.995	9.271,6	30.992
25	Tape ketela	31	52	62,40	72,80
26	Kue basah	473	1.891	988	9.152
27	Makanan lain (jamur dan madu)	7	24	36,4	676
28	Air minum dalam kemasan	3	160	780.000	6.832,8
29	Rokok cerutu	1	48	5,72	1.768
30	Cengkeh rajangan	3	11	8,32	130
31	Pengeringan dan pengolahan tembakau	3.360	24.939	13.520	2.792,4
	INDUSTRI SANDANG				
1	Rajutan	173	237	15.700	260
2	Kasur dan bantal	19	42	832	81,12
3	Pakaian jadi	138	367	6.032	1.508
4	Batik	6	22	2.132	728
5	Pakaian kesenian	5	16	12.480	590,72
6	Training pack	10	35	12.480	296,40
7	Masker, kain pel, dan lain-lain	7	22	34.320	31,20
8	Pengawetan kulit	1	3	624	83,20
9	Barang dari kulit	2	6	644	78
10	Alas kaki/sepatu	2	7	700	20,80
	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN				
1	Ubi kayu	1	2.816	65.832	520.312
2	Panel kayu/Balken/papan	28	6.641	86.840	660.400
3	Moulding dan bahan bangunan	423	2.750	639.600	18.720
4	Percetakan	18	85	520.000	2.184
5	Foto copy	20	46	4.120	312
6	Cetak film	7	15	156	624
7	Pupuk alam	6	458	239,20	67.600
8	Sabun	3,06	9	35,36	7,28
9	Vulkanisir ban	5	13	884	104
10	Minyak atsiri	3	9	5,20	98,8
11	Kemasan plastic	1	60	728.000	894,40
12	Tas plastik	46	130	35.360	88,40
13	Daur ulang plastik	3	37	239,2	260
14	Batu bata	328	1.073	18.720.000	4.420
15	Genteng	575	1.820	15.600.000	7.540
16	Gips	9	40	6.670	218,4

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
17	Barang dari semen	9	33	28.080	728
18	Furnitur kayu	135	344	52.000	6.032
19	Furnitur cat duco	8	98	5.200	5.824
20	Furnitur bambu	4	16	124,8	93,60
	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA				
1	Teralis besi	12	46	915,2	1.060,8
2	Las	77	124	244,4	436,8
3	Pande besi	2	4	1.300	39,52
4	Mesin perajang tembakau	16	70	780	2.121,6
5	Alat perajang tembakau	18	48	811,2	52
6	Penetas telur	3	26	291,20	395,2
7	Furnitur logam	2	6	572	15,6
8	Daur ulang timah bekas aki	1	7	603,2	208
9	Pemeliharaan dan reparasi mobil	41	244	3.016	3.276
10	Pemeliharaan dan reparasi spd motor	47	72	91.520	3.224
11	Reparasi elektronika	15	29	10.920	83,20
12	Perakitan antenna	1	2	93,60	156
	KERAJINAN				
1	Bordir	4	12	8.008	85,28
2	Anyaman bambu/keranjang tembakau	3.595	10.264	1.940.120	15.600
3	Kerajinan bamboo	4	9	7.800	218,40
4	Kuda lumping	6	26	2.288	223,60
5	Anyaman lidi	153	458	9.464	332,80
6	Anyaman pelepah pisang	260	541	7.072	296,40
7	Anyaman mending	4	26	13.104	67,60
8	Kerajinan kayu/patung	18	30	59.072	135,2
9	Alat dapur dari bamboo	362	1.016	1.623.232	644,80
10	Bedug	2	10	93,60	395,20
11	Tangkal cangkul	6	15	3.120	31,20
12	Terompah kayu	38	98	17.000	81,12
13	Alat jemur bambu	15	41	10.244	104
14	Gerabah tanah	168	308	63.232	114,40
15	Relief tembaga	7	99	8.008	5.200
16	Gamelan tradisional	1	2	-	-
17	Alat musik	2	14	22.880	72,80
18	Alat olahraga	1	2	7.124	58,24
19	Mainan anak	3	38	31.720	2.028
20	Radio kayu dan alat fungsional	1	31	5.928	2.288
21	Sapu ijuk	279	640	47.923,2	780
	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN				
1	Laminating, bare core, veneer, dll	27	14.158	844.578,8	3.759.533,6

Sumber : Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kab. Temanggung 2015

## 8) Urusan Transmigrasi

### a) Jumlah Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang melaksanakan transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama lima tahun

terakhir cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel 2.159.

Tabel 2.159.  
Jumlah Transmigrasi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah transmigrasi (KK)	23	17	30	10	12	4	5

Sumber : Diisnakertrans Kab.Temanggung 2015

Faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut lebih disebabkan oleh kuota KK Transmigrasi untuk Kabupaten Temanggung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin berkurang dari tahun ke tahun.

#### 4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dimilikinya. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan bertumpu pada aspek-aspek kemampuan ekonomi daerah, penciptaan iklim berinvestasi, ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur pendukung, dan ketersediaan sumberdaya manusia bagi pengembangan usaha.

Adapun keberhasilan aspek daya saing daerah diukur dengan kemampuan ekonomi daerah dan fasilitas wilayah/infrastruktur.

##### a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

#### 1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

##### a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Adapun Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (ribuan) dapat dilihat sebagaimana tabel 2.160.

Tabel 2.160.  
Pendapatan per Kapita  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

No	Uraian (Rupiah)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan per Kapita	633.870	635.010	638.070	640.560	n.a.	n.a.

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Di Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 sebesar Rp. 640.560,-.

#### **b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.



## 1) Urusan Perhubungan

### a) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Perkembangan jumlah orang yang terangkut angkutan umum selama enam tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Data jumlah orang yang terangkut angkutan umum sebagaimana tercantum pada tabel 2.161.

Tabel 2.161.  
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

NO	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.031.216	1.030.869	1.025.669	1.002.072	971.667	970.442	969.224

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

### b) Jumlah orang melalui terminal

Perkembangan jumlah orang yang melalui terminal selama enam tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena orang cenderung naik kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dalam melakukan perjalanan sehingga tidak masuk terminal. Data jumlah orang yang melalui terminal tercantum pada tabel 2.162.

Tabel 2.162.  
Jumlah Orang yang Melalui terminal  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah orang yang melalui terminal	11.176.020	12.086.765	12.039.985	10.521.336	10.521.336	10.404.259

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

## 2) Urusan Penataan Ruang

### a) Ketaatan terhadap RTRW

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang

ada. Pelanggaran terhadap tata ruang sesuai RTRW Kabupaten Temanggung tersebut pada tabel 2.163.

Tabel 2.163.  
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

NO	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Jumlah pelanggaran (unit)	30	15	15	0	95	20	20

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2015.  
Keterangan: \*) Data Sementara

### b) Luas wilayah produktif

Dari total luas lahan Kabupaten Temanggung sejumlah 87.065 Ha terdapat 60.673 Ha (69,69%) berupa lahan produktif. Lahan produktif tersebut merupakan bagian dari wilayah budidaya seluas 83.783 Ha yang masih terdapat potensi pengembangan. Jika dilihat dari rasio luas wilayah produktif selama periode 2010 – 2014 menunjukkan angka 1 : 1,435.

Tabel 2.164.  
Rasio Luas Wilayah Produktif (Ha)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Wilayah Kabupaten	87,065	87,065	87,065	87,065	87,065	87,065
2	Luas Wilayah Lindung	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282
3	Luas Wilayah Budidaya	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783	83,783
4	Luas Wilayah Produktif	60,654	60,638	60,630	60,611	60,215	60,215
	Rasio Wilayah Produktif	1 : 1,435	1 : 1,436	1 : 1,436	1 : 1,436	1 : 1,445	1 : 1,445
5	Jumlah Luas Lahan Produktif yang dikembangkan	19	16	8	19	19	19

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung tahun 2015

Selanjutnya selama periode lima tahun terakhir terdapat pengembangan wilayah produktif menjadi kawasan budidaya berupa pemukiman dan lahan terbangun lainnya sejumlah 62 Ha. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.164.

### 3) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

#### a) Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya

Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan

asuransi jiwa dengan bentuk usaha menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Cabang perusahaan asuransi jiwa yang ada di Kabupaten Temanggung tahun 2013 ada 2 (dua) perusahaan yaitu Asuransi Jiwa Sraya dan Asuransi Bumi Putera.

**b) Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran**

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pada tahun 2013, rumah makan dengan kelas talam gangsa ada satu buah, kelas piring emas ada 5 buah, kelas piring perak ada 14 buah, kelas piring perunggu ada 4 buah dan yang belum diklasifikasi ada 20 buah. Tenaga kerja yang bekerja di rumah makan sejumlah 268 orang.

Tabel 2.165.  
Jumlah Restoran dan Rumah Makan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2014

No	Uraian	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Restoran	1	1	1	1	1	1
2.	Rumah makan	34	34	34	42	43	43
	1.Kelas Talam Gangsa	1	1	1	1	1	1
	2.Kelas Piring Emas	7	7	7	7		
	3.Kelas Piring Perak	12	12	12	12	14	14
	4.Kelas Piring Perunggu	1	1	1	1	4	4
	5.Belum diklasifikasi	14	14	14	22	20	20

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Penentuan kelas rumah makan dan restoran dilakukan oleh Pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan pada kriteria kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, ketersediaan pekerja khusus (koki) dan kriteria lainnya sehingga kelas restoran dan rumah makan berubah mulai tahun 2015.

**c) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel**

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari

luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut.

Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Adapun perkembangan penginapan / hotel / wisatawan dapat dilihat dari tabel 2.166.

Tabel 2.166.  
Perkembangan Penginapan/Hotel  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Hotel Bintang Satu (buah)	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Hotel Non Bintang (buah)	5	6	12	12	12	12
3.	Jumlah kamar penginapan/hotel (unit)	154	167	208	208	208	208
4.	Jumlah rata-rata penggunaan kamar (hari)	0,88	0,79	0,32	0,44	0,44	0,44
5.	Jumlah kamar penginapan/hotel yang terisi (unit)	31.441	14.477	32.291	34.322	25.476	34.322

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah hotel karena adanya pembangunan beberapa hotel baru di Kabupaten Temanggung. Hotel dengan klasifikasi bintang 1 (satu) ada 1 (satu) buah yaitu Hotel Indraloka, sedangkan hotel lainnya termasuk klasifikasi hotel melati.

#### 4) Urusan Lingkungan Hidup

##### a) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Data rumah tangga yang menggunakan air bersih per kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel 2.167.

Tabel 2.167.  
Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih  
per Kecamatan di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015

No	Sumber Air Bersih	Perpipaan Air Kran	Sumur Gali	Sumur Pompa	Mata Air	PDAM
1.	Kecamatan Parakan	2.436	1.500	53	669	4.375
2.	Kecamatan Kledung	4.146	-	2	-	56
3.	Kecamatan Bansari	4.035	1.978	12	64	-
4.	Kecamatan Bulu	2.993	1.123	152	12	696
5.	Kecamatan Temanggung	1.312	5.010	480	227	13.809
6.	Kecamatan Tlogomulyo	3.499	707	600	713	-
7.	Kecamatan Tembarak	3.605	1.009	15	-	986
8.	Kecamatan Selopampang	4.109	133	2	-	165
9.	Kecamatan Kranggan	3.600	2.895	112	19	2.086
10.	Kecamatan Pringsurat	3.368	1.997	682	40	3.610
11.	Kecamatan Kaloran	5.009	952	178	33	630
12.	Kecamatan Kandangan	3.903	4.647	140	476	112
13.	Kecamatan Kedu	2.235	7.827	1.878	8	2.186

No	Sumber Air Bersih	Perpipaaan Air Kran	Sumur Gali	Sumur Pompa	Mata Air	PDAM
14.	Kecamatan Ngadirejo	6.778	2.433	97	331	1.182
15.	Kecamatan Jumo	1.128	3.644	455	3	1.182
16.	Kecamatan Gemawang	7.833	332	229	-	10
17.	Kecamatan Candiroto	7.163	264	20	621	36
18.	Kecamatan Bejen	2.811	1.248	103	782	-
19.	Kecamatan Tretep	3.666	10	-	-	-
20.	Kecamatan Wonobojo	4.017	7	2	171	-

Sumber : DPU dan PDAM Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## b) Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nuftah

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Temanggung termasuk masih rendah meskipun meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pencemaran tanah selama lima tahun tidak ada namun pada tahun 2015 ada 1 kasus, sedangkan pencemaran udara dan air semakin meningkat, secara jelas dapat dilihat pada table 2.168.

Plasma nuftah dikelompokkan menjadi plasma nuftah dilindungi, plasma nuftah terancam punah dan plasma nuftah endemik. Jumlah plasma nuftah dilindungi ada 30 jenis dan plasma nuftah terancam punah ada 20 jenis.

Tabel 2.168.  
Kasus Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nuftah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kasus Pencemaran (kasus)							
1.	Pencemaran tanah	0	0	0	0	0	1
2.	Pencemaran air	2	2	1	0	0	3
3.	Pencemaran udara	0	5	2	5	1	5
Plasma Nuftah (jenis)							
1.	Plasma Nuftah Dilindungi						
	a.Hewan	14	14	14	14	16	16
	b.Tumbuhan	4	4	4	4	14	14
2.	Plasma Nuftah Terancam Punah						
	a.Hewan	7	7	7	7	16	16
	b.Tumbuhan	4	4	4	4	4	4
3.	Plasma Nuftah Endemik						
	a.Hewan	27	27	27	27	0	0
	b.Tumbuhan	14	14	14	14	0	0

Sumber :BLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2015

## 5) Urusan Energi, Sumber Daya Mineral

### a) Rasio ketersediaan daya listrik

Jumlah penggunaan daya listrik tahun 2009-2014 cenderung mengalami peningkatan. Ketersediaan daya listrik

terpasang di Kabupaten Temanggung tercantum dalam tabel 2.169.

Tabel 2.169.  
Penggunaan Daya Listrik Terpasang (KwH)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

Uraian	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013*	2014	2015*
PLN Temanggung	55.415.660	61.257.660	67.386.710	72.582.890	67.872.190	89.498.690	89.498.690
PLN Parakan	46.982.840	51.166.450	56.223.000	62.329.350	51.203.750	69.857.650	69.857.650
Total	102.398.500	112.424.110	123.609.710	134.912.240	119.075.940	132.737.444	132.737.444

Sumber : PLN Kabupaten Temanggung, 2015  
Keterangan: \*) Data Sementara

#### b) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Temanggung belum mencapai 100%, namun dibandingkan dengan tahun 2009 sudah ada peningkatan yang cukup tajam, dari 73,72% menjadi 95,33%.

Tabel 2.170.  
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	75,27	78,12	82,37	87,52	90,87	95,33	95,33

Sumber : PLN Kabupaten Temanggung Tahun 2015  
Keterangan: \*) Data Sementara

### 6) Urusan Komunikasi dan Informatika

#### a) Persentase Penduduk yang Menggunakan Telpon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi telepon rumah biasa.

Tabel 2.171.  
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009-2015

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Rumah tangga berlangganan telepon	9.571	7.550	7.385	7.442	7.622	7.717	7.717

2.	Jumlah rumah tangga	189.191	190.113	191.074	192.080	193.096	208.874	194.116
3.	Persentase rumah tangga menggunakan telepon	4,002	3,971	3,865	3,919	3,947	3,69	3,98

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2015, \*Data sementara

### c. Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menggambarkan kondisi iklim berinvestasi di daerah ditunjukkan dengan beberapa indikator yaitu angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, perkembangan perizinan, persentase desa berstatus swasembada, dan jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim berusaha.

#### 1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

##### a) Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak criminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Berbagai kategori tindak criminal adalah seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Adapun angka kriminalitas dapat dilihat dari tabel 2.172.

Dari tabel 2.172 tercantum bahwa jumlah tindak kriminal pada tahun 2015 sebanyak 245 kasus dengan perincian sebagai berikut: jumlah kasus narkoba sebanyak 13 kasus, pembunuhan sebanyak 0 kasus, kejahatan seksual sebanyak 10 kasus, penganiayaan sebanyak 22 kasus, pencurian sebanyak 59 kasus, penipuan sebanyak 49 kasus dan pemalsuan uang sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.172.  
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2009 – 2015

No	Jenis Kriminal	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	6	15	7	3	14	13
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	2	1	3	1	1	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0	3	9	3	3	6	11
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	34	37	58	37	13	35	24
5.	Jumlah kasus Pencurian	27	22	33	64	64	97	134
6.	Jumlah kasus	24	28	32	41	20	29	60

No	Jenis Kriminal	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penipuan							
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0	2	3
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	88	95	142	155	104	184	245
9.	Jumlah Penduduk	715.072	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	788.264
10	Angka Kriminalitas	1,32	1,96	2,11	2,11	1,41	2,49	3,11

Sumber : Kepolisian Resort Temanggung dan Satpol PP Tahun 2015

#### b) Jumlah demo

Jumlah demo/unjuk rasa adalah jumlah demo/unjuk rasa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Demo/unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Adapun dinamika jumlah demonstrasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.173. Pada tahun 2015 terdapat 7 kali demonstrasi, kondisi tersebut lebih banyak jika dibandingkan jumlah demonstrasi yang terjadi di tahun 2014.

Tabel 2.173.  
Jumlah Demonstrasi  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Politik	0	0	0	0	0	0
2	Ekonomi	0	0	0	12	2	0
3	Bidang lainnya	11	12	0	3	2	7
4	Kasus pemogokan kerja	1	0	0	0	0	0
5	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	11	12	0	15	4	7

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung Tahun 2015

#### c) Lama proses perijinan

Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Lama proses perijinan di Kabupaten Temanggung tahun 2014 sebagaimana tersebut pada tabel 2.174.

Tabel 2.174.  
Lama Perijinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)
1.	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	6
2.	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	6
3.	IUI (Izin Usaha Industri)	6
4.	TDI (Tanda Daftar Industri)	1
5.	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	12
6.	HO (Izin Gangguan)	12

Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung, 2014



#### d) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha dimaksud adalah perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di daerah. Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung ada lima buah.

#### e) Perkembangan perizinan

Kemudahan perizinan diukur antara lain melalui jumlah perizinan yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis perizinan. Perkembangan jumlah perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.175.

Tabel 2.175.  
Jumlah dan Jenis Perizinan yang Dikeluarkan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2011-2015

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN YANG KELUAR TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	IZIN PRINSIP	0	0	0	0	0
2	IZIN LOKASI	0	0	0	0	0
3	IZIN GANGGUAN (HO)	954	1.036	313	402	485
4	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	312	459	156	151	126
5	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	889	946	293	313	399
6	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	929	941	296	325	410
7	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	12	21	4	2	10
8	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	90	111	14	0	0
9	IZIN USAHA INDUSTRI PHHK (IUIPHHK)	14	12	2	0	7
10	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	11	18	2	31	2
11	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	2	2	0	1
12	SURAT IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (SIUJK)	99	43	29	109	52
13	IZIN TRAYEK (IT)	84	195	80	115	142
14	IZIN USAHA ANGKUTAN (IUA)	36	14	6	2	1
15	SURAT IZIN APOTIK (SIA)	0	0	2	13	11
16	IZIN BALAI PENGOBATAN (BP)	0	0	1	0	6

Sumber : KP3M Kabupaten Temanggung Tahun 2015

## 2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a) Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta

tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

- Desa Swakarsa; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.

Penilaian status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangan. Sehingga pengisian data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting karena menentukan status desa.

Tabel 2.176.  
Status Desa/Kelurahan  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	289	289	275	275	215
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	0	0	14	14	40
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	0	0	0	0	6
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289

Sumber : Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.176 dapat diketahui bahwa jumlah kriteria desa swakarya dan desa swasembada mengalami kenaikan.

Jumlah desa swakarya yang semula pada tahun 2014 sebanyak 14 desa, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 40 desa. Sedangkan untuk desa swasembada yang semula pada tahun 2014 tidak ada, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 6 desa. Untuk kriteria desa swadaya mengalami penurunan dari tahun 2014 sebanyak 275 desa menjadi 215 desa pada tahun 2015.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa beberapa desa di Kabupaten Temanggung mengalami kemajuan berdasarkan adanya perubahan kriteria desa yakni desa swadaya sebanyak 60 desa, desa swakarya sebanyak 26 desa dan desa swasembada sebanyak 6 desa.

**d. Fokus Sumber Daya Manusia**

**1) Urusan Ketenagakerjaan**

**a) Rasio lulusan S1/S2/S3**

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.177.  
Rasio Lulusan S1/S2/S3  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	15.274	11.621	11.861	12.006	n.a.	14.902
2.	Jumlah penduduk	721.679	727.184	733.418	739.873	731.061	788.264
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 47	1 : 63	1 : 62	1 : 6	-	1 : 53

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Dari tabel 2.177 jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2015 sebesar 14.902 atau 1.53 % dari jumlah penduduk Kabupaten Temanggung 788.264 jiwa.

**b) Rasio ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.178.  
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2011	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	183.494	181.734	179.726	176.077	165.550	173.743
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	53.110	54.145	56.145	58.575	49.657	58.791
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	236.604	235.879	235.871	234.652	215.207	189.842
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	485.075	491.305	497.547	505.223	515.854	555.730
5.	Rasio ketergantungan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : BPS dan Disdukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.178 menjelaskan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD 2013-2018 sampai Tahun 2015

Ketepatan dan keakuratan proses serta hasil evaluasi kinerja RKPD ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di tingkat kabupaten maupun perencanaan lingkup SKPD. Kondisi dokumen perencanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.179  
Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2014)	RPJMD Kabupaten Temanggung ditetapkan Tahun 2014 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2014 masih mengacu pada Program Indikatif. Sedangkan penyusunan RKPD Tahun 2015 sudah mengacu kepada sasaran dan arah kebijakan RPJMD 2013-2018.
2.	Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2015 sampai dengan Triwulan II.	Hasil evaluasi RKPD 2015 s/d Triwulan II belum sepenuhnya menggambarkan capaian akhir kinerja RKPD tahun berjalan, di samping itu terdapat beberapa SKPD yang belum melaporkan hasil pelaksanaan RKPD nya sesuai dengan format ketentuan yang berlaku dan masih terjadi keterlambatan pengiriman laporan. Hal ini mengakibatkan perhitungan capaian kinerja tingkat kabupaten sebagai akumulasi capaian SKPD juga mengalami keterlambatan.
3.	Renstra SKPD 2014-2018	Beberapa SKPD tidak mencantumkan target kinerja dan anggaran secara jelas.
4.	Renja SKPD 2015.	Banyak indikator dan satuan target antara renstra dengan renja SKPD tidak sama.
5.	Renja dengan DPA SKPD	Terdapat perbedaan nama program dan total anggaran pada beberapa kegiatan antara Renja SKPD dengan DPA, sehingga harus disesuaikan.

### **2.2.1 Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015**

a. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

- 1) Keselarasan program RPJMD 2013-2018 dengan RKPD 2015 sudah mencapai 100 %, artinya seluruh program lima tahunan yang ada pada RPJMD telah dijabarkan ke dalam program tahunan yang terdapat dalam RKPD 2015.
- 2) Keselarasan program dan kegiatan RKPD dengan APBD mencapai 192 program, sedangkan 2 Program dalam RKPD tidak muncul pada Program APBD, begitu juga sebaliknya 9 program di APBD tidak tertuang di dalam RKPD.
- 3) Ketidaksielarasan masih terjadi antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD, ditandai banyak kegiatan baru dalam Renja SKPD yang di luar Renstra. Kesesuaian kegiatan hanya 1148 yang sesuai sedangkan sebanyak 178 kegiatan di RKPD tidak muncul di RKPD dan sebaliknya 217 kegiatan muncul di APBD.

Selain hal tersebut diatas, terdapat kendala teknis dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2015 yang berbeda dengan RKPD tahun 2015 dikarenakan belum terlaksananya sinkronisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Informasi Penganggaran yang digunakan saat menyusun APBD.

### **2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Atas capaian RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 -2018**

#### **A. Urusan Wajib**

##### **1) Pendidikan**

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai 107 indikator RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

2.180

Tabel 2.180  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan  
Evaluasi Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pendidikan
















NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
1.	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	%	32.73	100	-	32.73	32.73	32.73		Dinas Pendidikan
2.	Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan	%	20	50	-	40.00	20	40.00		Dinas Pendidikan
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>										
3.	Persentase pendidik yang disiplin	%	100	100	99.95	99.60	99.95	99.95		Dinas Pendidikan
<b>Program manajemen pelayanan pendidikan</b>										
4.	Persentase angka kenakalan siswa	%	0	0	0.025	0	0	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program pendidikan anak usia dini</b>										
5.	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	67.63	69.13	67.13	67.63	67.63	97.83		Dinas Pendidikan
6.	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	32.44	32.56	32.41	32.44	32.44	99.63		Dinas Pendidikan
7.	Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)	%	48.67	48.76	48.57	48.67	48.67	99.82		Dinas Pendidikan
8.	Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	%	49.11	49.17	48.95	49.11	48.95	99.55		Dinas Pendidikan
9.	Rasio siswa per kelas TK	Rasio	21	21	20.99	21	21	100.00		Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
<b>Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</b>										
10.	Persentase APK SD Sederajat	%	103.61	103.70	103.80	103.80	103.80	100.00		Dinas Pendidikan
11.	Persentase APM SD Sederajat	%	95.48	95.57	95.46	95.48	95.48	99.91		Dinas Pendidikan
12.	Persentase APK SMP Sederajat	%	96.09	96.15	96.07	96.09	96.09	99.94		Dinas Pendidikan
13.	Persentase APM SMP Sederajat	%	83.72	83.81	83.69	83.72	83.72	99.89		Dinas Pendidikan
14.	Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	%	100.00	100.00	97.02	98.00	98.00	98.00		Dinas Pendidikan
15.	Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar	%	48.63	48.69	48.15	48.63	48.63	99.88		Dinas Pendidikan
16.	Rasio Siswa per Kelas SD/MI	Angka	21.10	21.16	21.08	21.10	21.10	99.72		Dinas Pendidikan
17.	Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	Angka	31.94	32.00	31.89	31.94	31.94	99.81		Dinas Pendidikan
18.	Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	71,90	74.42	68.13	70.65	70.65	94.93		Dinas Pendidikan
19.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	99.43	99.52	99.25	99.25	99.25	100.00		Dinas Pendidikan
20.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	99.31	99.40	99.25	99.25	99.25	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program pendidikan menengah</b>										
21.	Persentase APK Pendidikan Menengah	%	56.86	57.16	56.73	56.86	56.86	99.48		Dinas Pendidikan
22.	Persentase APM Pendidikan Menengah	%	39.85	40.15	40.36	40.36	40.36	100.00		Dinas Pendidikan
23.	Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah	%	65.75	66.02	72.97	72.97	72.97	100.00		Dinas Pendidikan
24.	Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah	%	51.09	50.85	50.63	51.09	51.09	100.00		Dinas Pendidikan
25.	Rasio Siswa per Kelas SMA/MA	Rasio	1:29		27.49	29	29	96.67		Dinas Pendidikan
26.	Rasio Siswa per Kelas SMK	Rasio	1 : 32	1 : 32	31.42	32	32	100.00		Dinas Pendidikan
27.	Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah	%	34,70	50.76	29.36	34.70	34.70	68.36		Dinas Pendidikan



NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
28.	Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan	%	75	80	75	75	75	93.75		Dinas Pendidikan
29.	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	44.05	44.29	446.90	439.05	446.90	100.00		Dinas Pendidikan
30.	Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun	Unit/10 000 penduduk usia sekolah	13,96	13,57	15.29	15.29	15.29	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program Pendidikan Non Formal</b>										
31.	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98.36	99.17	98.10	98.36	98.36	99.18		Dinas Pendidikan
32.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.13	7.19	7.10	7.13	7.13	99.17		Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan
33.	Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah	%	25	100	25	25	25	25.00		Dinas Pendidikan
<b>Program manajemen pelayanan pendidikan</b>										
34.	Persentase TK/RA Terakreditasi A	%	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	100.00		Dinas Pendidikan
35.	Persentase TK/RA Terakreditasi B	%	42.71	42.71	42.71	42.71	42.71	100.00		Dinas Pendidikan
36.	Persentase TK/RA Terakreditasi C	%	42.29	42.29	42.29	42.29	42.29	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program manajemen pelayanan pendidikan</b>										
37.	Persentase SD/MI Terakreditasi A	%	3.65	4.67	5.04	3.65	5.04	100.00		Dinas Pendidikan
38.	Persentase SD/MI Terakreditasi B	%	61.01	61.01	74.43	61.01	74.43	100.00		Dinas Pendidikan
39.	Persentase SD/MI Terakreditasi C	%	33.22	33.22	17.57	33.22	33.22	100.00		Dinas Pendidikan
40.	Persentase SMP/MTs Terakreditasi A	%	25.70	31.40	38.68	25.70	38.68	100.00		Dinas Pendidikan
41.	Persentase SMP/MTs Terakreditasi B	%	40.00	40.00	48.11	40	48.11	100.00		Dinas Pendidikan
42.	Persentase SMP/MTs Terakreditasi C	%	27.62	27.62	8.49	27.62	27.62	100.00		Dinas Pendidikan
43.	Persentase Angka Lulusan SD/MI	%	99.93	100.00	99.91	100.00	100.00	100.00		Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
44.	Persentase Angka Lulusan SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Dinas Pendidikan
45.	Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq$ 7,00	%	73.27	73.39	70.13	54.16	70.13	95.56		Dinas Pendidikan
46.	Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq$ 7,00	%	21.13	21.28	36.22	24.02	36.22	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>										
47.	Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA	%	94.84	94.87	94.86	94.84	94.86	99.99		Dinas Pendidikan
48.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.16	0.13	0.17	0.16	0.16	100.00		Dinas Pendidikan
49.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.41	0.34	0.55	0.51	0.51	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program manajemen pelayanan pendidikan</b>										
50.	Persentase SMA/MA Terakreditasi A	%	37.03	48.13	33.33	37.03	37.03	76.94		Dinas Pendidikan
51.	Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	100	100	100	100	100.00		Dinas Pendidikan
52.	Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan.	%	74.52	75.30	75.03	75.03	75.03	99.64		Dinas Pendidikan
53.	Persentase SMA/MA Terakreditasi A	%	37.03	48.13	33.33	37.03	37.03	76.94		Dinas Pendidikan
54.	Persentase SMA/MA Terakreditasi B	%	25.93	25.93	33.33	25.93	33.33	100.00		Dinas Pendidikan
55.	Persentase SMA/MA Terakreditasi C	%	22.22	22.22	13.33	22.22	22.22	100.00		Dinas Pendidikan
56.	Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A	%	22.23	31.77	15.38	22.23	22.23	69.97		Dinas Pendidikan
57.	Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B	%	47.62	47.62	47.69	47.62	47.69	100.00		Dinas Pendidikan
58.	Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C	%	19.05	19.05	15.38	19.05	19.05	100.00		Dinas Pendidikan
59.	Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK	%	100.00	100.00	99.94	100.00	100.00	100.00		Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
60.	Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq$ 7,00	%	57.63	58.08	73.00	42.77	73.00	100.00		Dinas Pendidikan
61.	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	1.60	1.54	2.08	1.60	1.60	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program pendidikan nonformal</b>										
62.	Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	92.56	92.56	82.89	91.41	91.41	98.76		Dinas Pendidikan
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>										
63.	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA	Rasio	1 : 14	1 : 14	1:14	1:14	1:14	100.00		Dinas Pendidikan
64.	Rasio Siswa per Pendidik SD/MI	Rasio	1 : 14	1 : 14	1:14	1:14	1:14	100.00		Dinas Pendidikan
65.	Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	100.00		Dinas Pendidikan
66.	Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA	Rasio	1 : 11	1 : 11	1:10	1:11	1:11	100.00		Dinas Pendidikan
67.	Rasio Siswa per Pendidik SMK	Rasio	1:14	1:13	1:15	1:14	1:15	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>										
68.	Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	42.89	45.22	49.67	49.67	49.67	100.00		Dinas Pendidikan
69.	Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	70,61	71.66	82.12	82.12	82.12	100.00		Dinas Pendidikan
70.	Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83.44	83.59	86.99	86.99	86.99	100.00		Dinas Pendidikan
71.	Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	91.60	91.75	94.25	94.25	94.25	100.00		Dinas Pendidikan
72.	Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	90.36	90.51	94.97	94.97	94.97	100.00		Dinas Pendidikan
73.	Cakupan ketersediaan guru SD/MI.	%	93.20	95.00	92.70	93.20	93.20	98.11		Dinas Pendidikan
74.	Cakupan ketersediaan	%	80.90	84.50	80.19	80.90	80.90	95.74		Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
	guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran.									
75.	Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	84.50	89.00	82.96	84.50	84.50	94.94		Dinas Pendidikan
76.	Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs.	%	76.50	82.50	74.53	76.50	76.50	92.73		Dinas Pendidikan
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>										
77.	Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.	%	69.40	74.50	67.71	69.40	69.40	93.15		Dinas Pendidikan
78.	Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI.	%	85.40	89.00	84.37	85.40	85.40	95.96		Dinas Pendidikan
79.	Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs	%	93.50	98.00	91.26	93.50	93.50	95.41		Dinas Pendidikan
80.	Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah.	%	95.92	95.92	97.78	97.78	97.78	100.00		Dinas Pendidikan
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>										
81.	Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik	%	3.43	3.73	7.19	7.19	7.19	100.00		Dinas Pendidikan
82.	Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	%	31.10	31.40	46.08	46.08	46.08	100.00		Dinas Pendidikan
83.	Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik	%	50.39	50.69	54.68	54.68	54.68	100.00		Dinas Pendidikan
84.	Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik	%	45.09	45.39	38.75	45.09	45.09	99.34		Dinas Pendidikan
85.	Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	%	45.09	45.39	36.29	45.09	45.09	99.34		Dinas Pendidikan
<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>										

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
87.	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181	181	153	181	181	100.00		Dinas Pendidikan
88.	Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	18	20	17	20	20	100.00		Dinas Pendidikan
89.	Rasio Pengawas Sekolah	Rasio	1 ; 17	1 ; 17	17	17	17	100.00		Dinas Pendidikan
90.	Besaran Pamong Belajar	Orang	4	6	2	4	4	66.67		Dinas Pendidikan
<b>Program Pendidikan anak usia dini</b>										
91.	Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	87.62	88.79	87.25	87.62	87.62	98.68		Dinas Pendidikan
92.	Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	86.24	87.47	85.83	86.24	86.24	98.59		Dinas Pendidikan
93.	Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	26.14	29.22	25.25	26.14	26.14	89.46		Dinas Pendidikan
94.	Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	86.24	88.75	86.08	86.24	86.24	97.17		Dinas Pendidikan
95.	Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	86.24	87.47	85.29	86.24	86.29	98.65		Dinas Pendidikan
<b>Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</b>										
96.	Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik	%	89.25	93.48	87.48	88.99	88.99	95.20		Dinas Pendidikan
97.	Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik	%	90.29	93.23	89.10	90.09	90.09	96.63		Dinas Pendidikan
98.	Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	65.24	70.49	63.83	65.40	65.40	92.78		Dinas Pendidikan
99.	Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	78.09	80.94	77.36	77.98	77.98	96.34		Dinas Pendidikan
100.	Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Dinas Pendidikan

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T RPJMD 2013- 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALIS ASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal</b>										
	dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil									
101.	Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	87.57	88.45	87.81	87.58	87.81	99.28		Dinas Pendidikan
<b>Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</b>										
102.	Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	75.71	81.42	74.53	75.77	75.77	93.06		Dinas Pendidikan
<b>Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</b>										
103.	Cakupan Ketersediaan Ruang Guru	%	99.26	100.00	98.38	98.80	98.80	98.80		Dinas Pendidikan
104.	Program pendidikan menengah									
105	Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik	%	98.15	100.00	97.33	98.15	98.15	98.15		Dinas Pendidikan
106	Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik	%	100.00	99.39	97.56	100.00	100.00	100.00		Dinas Pendidikan
107	Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	%	8.87	96.27	76.67	82.91	82.91	86.12		Dinas Pendidikan
108	Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	%	90.92	95.47	82.61	87.39	87.39	91.54		Dinas Pendidikan
<b>Program pendidikan nonformal</b>										
109.	Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	%	75,12	82.60	72.49	75.02	75.02	90.82		Dinas Pendidikan
110.	Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	%	78,40	85.45	76.06	78.41	78.41	91.76		Dinas Pendidikan

Sumber: Hasil evaluasi capaian indikator RPJMD 2013-2018, Bappeda-2015

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel 2.180 di atas, diketahui bahwa status capaian indikator RPJMD sampai tahun 2015 adalah :

- a. 53 (lima puluh tiga) indikator atau 49.53% telah tercapai, yaitu:
  1. Persentase angka kenakalan siswa,
  2. Rasio siswa per kelas TK,
  3. Persentase APK SD sederajat,
  4. Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun,
  5. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun,
  6. Persentase APK pendidikan menengah,
  7. Persentase APM pendidikan menengah,
  8. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah,
  9. Persentase partisipasi anak perempuan dalam pendidikan menengah,
  10. Rasio siswa per kelas SMK,
  11. Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun,
  12. Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per penduduk usia 16-18 tahun,
  13. Persentase TK/RA terakreditasi A,
  14. Persentase TK/RA terakreditasi B,
  15. Persentase TK/RA terakreditasi C,
  16. Persentase SD/MI terakreditasi A,
  17. Persentase SD/MI terakreditasi B,
  18. Persentase SD/MI terakreditasi C,
  19. Persentase SMP/MTs terakreditasi A,
  20. Persentase SMP/MTs terakreditasi B,
  21. Persentase SMP/MTs terakreditasi C,
  22. Persentase angka lulusan SD/MI,

23. Persentase angka lulusan SMP/MTs,
24. Persentase siswa SMP/MTs yang memperoleh rerata nilai ujian nasional  $\geq 7,00$ ,
25. Angka putus sekolah SD/MI,
26. Angka sutus sekolah SMP/MTs,
27. Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif,
28. Cakupan kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan,
29. Persentase SMA/MA terakreditasi B,
30. Persentase SMA/MA terakreditasi C,
31. Persentase program keahlian SMK terakreditasi B,
32. Persentase program keahlian SMK terakreditasi C,
33. Persentase angka lulusan SMA/MA/SMK,
34. Persentase siswa SMA/MA/SMK yang memperoleh rerata nilai ujian nasional  $\geq 7,00$ ,
35. Rasio siswa per pendidik TK/RA,
36. Rasio siswa per pendidik SD/MI,
37. Rasio siswa per pendidik SMP/MTs,
38. Rasio siswa per pendidik SMA/MA,
39. Rasio siswa per pendidik SMK,
40. Persentase pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik,
41. Persentase pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik,
42. Persentase pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik,
43. Persentase pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik,



44. Persentase pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik,
  45. Cakupan kualifikasi akademik pengawas sekolah/madrasah,
  46. Persentase pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik,
  47. Persentase pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik,
  48. Persentase pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik,
  49. Besaran pegawai administrasi sekolah,
  50. Besaran penilik pendidikan nonformal,
  51. Rasio pengawas sekolah,
  52. Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil,
  53. Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik.
- b. 44 (empat puluh empat) indikator atau 41.12% dengan status akan tercapai yaitu antara lain :
1. Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa,
  2. Persentase siswa yang memiliki buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tata krama atau nilai budaya daerah atau keteladanan,
  3. Persentase pendidik yang disiplin,
  4. Persentase APK pendidikan anak usia dini (usia 4-6 tahun),
  5. Persentase APK pendidikan anak usia dini (usia 0-6 tahun),
  6. Persentase angka partisipasi anak perempuan (usia 4-6 tahun),
  7. Persentase angka partisipasi anak perempuan (usia 0-6 tahun),
  8. Persentase APM SD sederajat,
  9. Persentase APK SMP sederajat,
  10. Persentase APM SMP sederajat,

11. Persentase angka melanjutkan ke SMP sederajat,
12. Persentase partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dasar,
13. Rasio siswa per kelas SD/MI,
14. Rasio siswa per kelas SMP/MTs,
15. Rasio siswa per kelas SMA/MA,
16. Persentase angka melek huruf usia  $\geq 15$  tahun,
17. Rata-rata lama sekolah,
18. Persentase siswa SD/MI yang memperoleh rerata nilai ujian nasional  $\geq 7,00$ ,
19. Persentase siswa baru SD/MI yang berasal dari TK/RA,
20. Persentase SMA/MA terakreditasi A,
21. Persentase program keahlian SMK terakreditasi A,
22. Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan,
23. Cakupan ketersediaan guru SD/MI,
24. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran,
25. Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik,
26. Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs,
27. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn,
28. Cakupan kualifikasi akademik kepala SD/MI,
29. Cakupan kualifikasi akademik kepala SMP/MTs,
30. Besaran pamong belajar,
31. Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik,
32. Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran,
33. Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan

- perlengkapannya,
34. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang,
  35. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang,
  36. Persentase Ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik,
  37. Persentase Ruang kelas SMP yang kondisinya Baik,
  38. Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana,
  39. Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana,
  40. Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs),
  41. Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs,
  42. Cakupan ketersediaan ruang guru,
  43. Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik,
  44. Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar.
- c. 10 (sepuluh) indikator atau sebanyak 9,35% dengan Status capaian perlu upaya keras yaitu antara lain :
1. Persentase siswa miskin penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan dasar,
  2. Persentase siswa miskin penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan menengah,
  3. Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan,
  4. Persentase layanan pendidikan kesetaraan dalam rangka menampung siswa putus sekolah pendidikan dasar dan








menengah,
















5. Angka putus sekolah SMA/MA/SMK,
6. Persentase pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik,
7. Persentase pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik,
8. Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana,
9. Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana,
10. Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya.

## 2) Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan Urusan






Kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai 59 (lima puluh sembilan) indikator sebagaimana tertuang pada Tabel 2.181.

NO.	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET RKPD 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d DAN 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 DAN 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>										
1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	95	94.3	94.3	94.3	99.26		Dinas Kesehatan
2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95	95	99.98	99.98	99.98	100.00		Dinas Kesehatan
3.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	90	87	100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
4.	Cakupan Pelayanan Nifas	%	95	95	99.98	99.98	99.98	100.00		Dinas Kesehatan
5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	perkilomil	100	101	127.16	127.16	127.16	100.00		Dinas Kesehatan
6.	Cakupan Kunjungan Bayi	%	99	95	98.92	98.92	98.92	99.92		Dinas Kesehatan
7.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	99	95	99.12	99.12	99.12	100.00		Dinas Kesehatan

8.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90	87	91.86	91.86	91.86	100.00		Dinas Kesehatan
9.	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	%	65	95	100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
10.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	permil	0.992	101	0.99	0.99	0.99	99.80		Dinas Kesehatan
11.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	6.8		11.17	11.17	11.17	100.00		Dinas Kesehatan
12.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	11		15.17	15.17	15.17	100.00		Dinas Kesehatan
13.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	13.8		16.35	16.35	16.35	100.00		Dinas Kesehatan
14.	Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB	%	80		83.4	83.4	83.4	100.00		Dinas Kesehatan
<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>										
15.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100		TAD	TAD	25	25.00		Dinas Kesehatan
16.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100		100	50.35	50.35	50.35		RSUD
17.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan									
18.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100		TAD	TAD		0.00		Dinas Kesehatan
19.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>										
20.	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	%	>87		86.6	86.6	86.6			Dinas Kesehatan
21.	Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	%	70		32	32	32	45.71		Dinas Kesehatan
22.	Cakupan Penemuan Kasus baru HIV/AIDS	%	<0,05		0.01	0.01	0.01			Dinas Kesehatan
23.	Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	%	70		TAD	TAD		0.00		Dinas Kesehatan

24.	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	70		39.9	39.9	39.9	57.00		Dinas Kesehatan
25.	Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	90		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
26.	CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)		< 1		0.01	0.01	0.03	100.00		Dinas Kesehatan
27.	Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk		<1		0.01	0.01	0.01	100.00		Dinas Kesehatan
28.	Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk	%	<20		0.05	0.05	0.05	100.00		Dinas Kesehatan
29.	CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<1		0.25	0.25	0.25	100.00		Dinas Kesehatan
30.	Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
31.	Cakupan Desa atau Kelurahan <i>Universal Child Immunisation (UCI)</i>	%	100		99.65	99.65	99.65	99.65		Dinas Kesehatan
32.	Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak	%	95		95.6	95.6	95.6	100.00		Dinas Kesehatan
33.	<i>Acute Flacid Paralysis (AFP)</i> Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	kasus	≥2 (4 kasus)		8	4	8	100.00		Dinas Kesehatan
34.	Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
35.	Cakupan Penderita diare Yang ditangani	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
<b>Perbaikan Gizi Masyarakat</b>										
36.	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	15.5		14.4	14.4	14.4	92.90		Dinas Kesehatan
37.	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5		0.53	0.53	0.53	94.34		
38.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin	%	100		15.09	15.09	15.09	15.09		Dinas Kesehatan
39.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan

Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)										
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
40.	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	90		98.1	98.1	98.1	100.00		Dinas Kesehatan
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)										
41.	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar	%	70		93.84	93.84	93.84	100.00		Dinas Kesehatan
42.	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	90		88.6	88.6	88.6	98.44		Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata										
43.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	Rasio	1/30.000		1/30.788	1/30.788	1/30.788	97.44		
44.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100		548,00	644.17	90	100.00		RSUD
Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD										
Cakupan Pelayanan RSUD										
45.	BOR	%	70		71.04	65	62.16	88.8		
46.	LOS	hari	6		3.9	4	4.21	70.17		
47.	TOI	hari	2		1.24	2	2.06	100.00		
48.	GDR	‰	36		30.68	37	30.68	85.22		
49.	NDR	‰	18		17.11	19	17.11	95.06		
50.	Kinerja Pelayanan BLUD	Strata	Sehat		Sehat	Sehat				
51.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	-	Lulus		Lulus	Lulus	Belum Lulus			RSUD
Pengembangan Lingkungan Sehat										
52.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	75		66	66	66	88.00		Dinas Kesehatan
53.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	75		61.6	61.6	61.6	82.13		Dinas Kesehatan
54.	Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban	%	80		76.9	76.9	76.9	96.13		Dinas Kesehatan
55.	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di	%	75		94.4	94.4	94.4	100.00		Dinas Kesehatan

	Perkotaan									
56.	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	%	60		73.6	73.6	73.6	100.00		Dinas Kesehatan
<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>										
57.	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>										
58.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100		100	100	100	100.00		Dinas Kesehatan
59.	Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	%	50		52.91	52.9	52.91	100.00		Dinas Kesehatan
60.	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	80		75.1	75.1	75.1	93.88		Dinas Kesehatan

Tabel 2.181  
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Status **capaian** indikator RPJMD urusan kesehatan sampai dengan tahun 2015 adalah :

a. 30 (tiga puluh) indikator atau 50.85 % telah tercapai, yaitu:

1. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan,
2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani,
3. Cakupan Pelayanan Nifas,
4. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1),
5. Cakupan Pelayanan Anak Balita,
6. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani,
7. Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB,
8. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten,
9. Cakupan Penemuan Penderita Diare,



10. CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk),
11. CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue),
12. Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani,
13. Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak,
14. Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun,
15. Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam,
16. Cakupan Penderita diare Yang ditangani,
17. Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan),
18. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan,
19. Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan,
20. Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar,
21. Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi,
22. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,
23. GDR,
24. NDR,
25. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan,
26. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan,
27. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar,
28. Cakupan Desa Siaga Aktif,

29. Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri,
  30. Cakupan Rumah Tangga Sehat.
- b. 22 (dua puluh dua) indikator atau 37,29 % dengan status akan tercapai yaitu antara lain :
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4,
  2. Cakupan Kunjungan Bayi,
  3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi,
  4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin,
  5. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD,
  6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin,
  7. Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate),
  8. Cakupan Penemuan Kasus baru HIV/AIDS,
  9. Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS,
  10. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk,
  11. Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk,
  12. Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI),
  13. Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan),
  14. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin,
  15. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas,
  16. BOR,

17. LOS,
  18. TOI,
  19. Kinerja Pelayanan BLUD,
  20. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan,
  21. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan,
  22. Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban.
- c. 7 (tujuh) indikator atau 11,86 % dengan status capaian perlu upaya keras yaitu antara lain :

1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup,
2. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup,
3. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup,
4. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup,
5. Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate),
6. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita,
7. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD.

Akreditasi RSUD sudah berakhir pada tahun 2015. Saat ini tengah mempersiapkan penilaian akreditasi tahun 2017 yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena bersamaan dengan kegiatan pembangunan tujuh lantai RSUD, sehingga masih perlu upaya keras untuk mendapatkan standarisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD.

### **3) Pekerjaan Umum**

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum




diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dishubkominfo, dan Bagian Pemerintahan Umum Setda. Ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 seperti tertuang dalam tabel 2.182

Tabel 2.182  
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>										
1.	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	%	82	73	77	77	77	93.90		DPU dan DISHUBK OMINFO
2.	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	%	82	73	70	70	70	85.40		DPU dan DISHUBK OMINFO
3.	Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana	%	82	73	70	70	70	85.40		DPU dan DISHUBK OMINFO
4.	Persentase Jalan yang Kondisi Baik	%	82	73	70	70	70	85.40		DPU
5.	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	%	90	81	84.21	84.21	84.21	93.56		DPU
6.	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkaran Kota Parakan	Hektar (Ha)	19	2	0	0	0	0.00		DPU/ Bagian Pemerintahan Umum
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>										
7.	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik	%	85	76	72	72	72	84.70		DPU
<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>										
8.	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	%	82	72	70	72	72	87.80		DPU
9.	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	%	6.19	5.24	4.9	5.2	5.2	84.00		DPU
<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>										
10.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40.7	40.1	8.18	40.1	40.1	98.53		DPU
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
11.	Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan	Unit	4	-	3	3	3	75.00		DPU/Pemerintahan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>										
	yang memadai									

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Indikator pada urusan Pekerjaan Umum ada 11 (sebelas), yaitu :

- a. Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat,
- b. Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman,
- c. Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana,
- d. Persentase Jalan yang Kondisi Baik,
- e. Persentase Jembatan yang Kondisi Baik,
- f. Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan,
- g. Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik,
- h. Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada,
- i. Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif,
- j. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan,
- k. Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai.

Status capaian indikator RPJMD sampai dengan

perkiraan capaian tahun 2015 adalah :

- a. 11 (sepuluh) indikator atau 90 % dengan status capaian akan tercapai, yaitu indikator :
  1. Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat,
  2. Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman,
  3. Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana,
  4. Persentase jalan yang kondisi baik,
  5. Persentase jembatan yang kondisi baik,
  6. Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik,
  7. Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada,
  8. Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif,
  9. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan,
  10. Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai.


#### **4) Perumahan**

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kecuali pada indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu, implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan pada indikator Cakupan Layanan Air Minum yang layak, dan Cakupan sanitasi pemukiman yang layak. Jumlah indikator kinerja urusan

Perumahan adalah 10 (sepuluh) dengan capaian dapat dilihat pada Tabel 2.183




Tabel 2.183  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>										
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	96.2	95.24	94,92	95,24	95.24	99.00		Dinas Sosial, DPU, Baper mades
2.	berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	Hektar (Ha)	19.91	28.81	32.1	28.8	28.8	69.13		DPU
3.	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	91.3	86.6	84.5	86.6	86.6	94.85		DPU
4.	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	78.9	75.51	74.5	75.5	75.5	95.69		DPU & DINKE S
5.	Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	%	8.2	7	6	7	7	85.37		DPU
6.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	%	76	40	28	40	40	52.63		DPU
<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>										
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80	40	20	50	50	62.50		DPU
8.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	80	73	42	61	61	76.25		DPU
9.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	95	87	71	82.4	82.4	86.73		DPU

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD			REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	
10.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95	87	83	90	90	94.73		DPU	

Sumber: Hasil evaluasi capaian RPJMD 2013-2018 s/d 2015, Bappeda, 2015

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah :

- a. 10 (sepuluh) indikator atau 100% dengan status capaian akan tercapai. Indikator tersebut antara lain :
  1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni,
  2. Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan,
  3. Cakupan Layanan Air Minum yang layak,
  4. Cakupan sanitasi pemukiman yang layak,
  5. Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/Kota,
  6. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum,
  7. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten,
  8. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*),
  9. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi,
  10. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter





pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

### 5) Penataan Ruang




Kinerja penyelenggaraan Urusan penataan ruang ini diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Lingkungan Hidup sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD 2014 dan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, dengan capaian seperti Tabel 2.184.

Tabel 2.184.  
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013 - 2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>										
1.	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	PERDA	3	2	1	1	1	33.30		BAPPE DA / DPU
2.	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci	%	100	100	0	100	100	100.00		BAPPE DA / DPU
3.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	100	100.00		KP3M
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>										
4.	Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100.00		DPU/BA PPEDA/ KP3M
5.	Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan	%	100	100	95	100	100	100.00		DPU/BA PPEDA/ KP3M/ SATPO

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013 - 2018	TARGET 2015	REALISASI RPKD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>										
	Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang									LPP
<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>										
6	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota	%	31.25	30	7.65	8.02	8.02	25.66		BLH/DPU
<b>Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar</b>										
7	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	%	17.6	16.7	0	16.74	16.74	95.11		DPU

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator RPJMD urusan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2015 adalah :

- a. 4 (empat) indikator atau 57,14% dengan status capaian telah tercapai dengan persentase capaian diatas 100 %. Indikator tersebut antara lain :
  1. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci,
  2. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang,
  3. Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya,
  4. Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang,






b. 3 (tiga) indikator atau 42,86% dengan status capaian akan tercapai dengan persentase capaian 30% s.d 70 %. Indikator tersebut antara lain :






1. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya,
2. Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian,
3. Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota.

### 6) Perencanaan Pembangunan




Capaian Kinerja urusan perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diwujudkan dalam 10 indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.185 berikut:

Tabel 2.185  
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	REALISASI		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 DAN 2015 (%)	STATUS	SKPD
				2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
1.	Besaran Penelitian dan Pengembangan	dokumen	4	0	1	1	25.00		Bappeda
2.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00		Bappeda
3.	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio	0.2	0.2	0.2	0.2	100.00		Bappeda
4.	Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0.019	0.0175	0.0175	0.0175	94.59		Bappeda
5.	Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik	Dokumen	14	14	15	29	100.00		Bappeda

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	REALISASI		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 DAN 2015 (%)	STATUS	SKPD
				2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
6.	Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	%	100	100	100	100	100.00		Bappeda
7.	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	%	100	89,04	90,4	90,4	90,40		Bappeda
8.	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	%	100	100	100	100	100.00		Bappeda
9.	Persentase program SKPD di Luar RPJMD	%	0	10	7	7	93.00		Bappeda
10.	Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD	%	0	0	5	5	95,00		Bappeda

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah :

a. 5 (lima) indikator atau 50 % dengan status capaian telah tercapai yaitu :

1. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu,
2. Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah,
3. Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik,
4. Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD,
5. Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD.

b. 5 (lima) indikator atau 50 % dengan status capaian akan tercapai yaitu :

1. Besaran Penelitian dan Pengembangan
2. Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Persentase program SKPD di Luar RPJMD;
4. Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD;
5. Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD.



**7) Perhubungan**

Kinerja Urusan Perhubungan Urusan perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam 8 indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.186




Tabel 2.186

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKP		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>										
1.	Persentase Kendaraan yang Diuji	%	95	92.3	102.7	61.57	102.7	100.00		DISHUBK OMINFO
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>										
2.	Persentase keselamatan angkutan umum	%	95	92.3	100	93	100	100.00		DISHUBK OMINFO
<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>										
3.	Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b)	Unit	1	1	1	1	1	100.00		DISHUBK OMINFO
4.	Tersedianya sub terminal (tipe c)	Unit	12	12	9	9	9	75.00		DISHUBK OMINFO
5.	Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	69	63	61	63	63	91.30		DISHUBK OMINFO
<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>										
6.	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan	%	90	80	78	78	78	86.66		DISHUBK OMINFO

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
	Jalan									
7.	Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	69	63	61	63	63	91.30		DISHUBK OMINFO
8.	Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek	%	100	100	100	100	100	100.00		DISHUBK OMINFO

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator RPJMD 2013-2018 sampai dengan tahun 2015 adalah :

- a. 4 (empat) indikator atau 50% dengan status capaian telah tercapai adalah :
  1. Persentase Kendaraan yang Diuji,
  2. Persentase keselamatan angkutan umum,
  3. Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b),
  4. Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek.
- b. 3 (tiga) indikator atau 37,5% dengan status capaian akan tercapai adalah :
  1. Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan,
  2. Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan,
  3. Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan.
- c. 1 (satu) indikator atau 12,5% dengan status capaian perlu upaya keras adalah Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe c).

Hal ini terjadi karena terdapat target pembangunan ada 12 terminal tipe c, akan tetapi sampai dengan tahun 2015 ini baru tercapai 2 terminal saja, sehingga sampai tahun 2018 perlu adanya pengalokasian dana tersebut.

## 8) Komunikasi dan informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika Urusan komunikasi dan Informatika diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Setda yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.187  
Urusan Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET RPKD 2015	REALISASI	REALISASI	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	STATUS CAPAIAN	SKPD
					2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	$\frac{8}{7/4 \times 100\%}$	10	12
Program pengembangan informasi dan komunikasi									
	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	rasio	100	35	35	35	35.00		DISHUBKOMINFO
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional	kali	6	3	3	3	50.00		DISHUBKOMINFO
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal	kali	10	4	8	8	80.00		DISHUBKOMINFO
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	31	4	24.5	24.5	79.03		DISHUBKOMINFO / Bagian Humas
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	10	4	32.5	32.5	100.00		DISHUBKOMINFO / Bagian Humas
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru	hari	10	4	2	2	6.45		Bagian Humas

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET RKPD 2015	REALISASI	REALISASI	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	STATUS CAPAIAN	SKPD
					2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/4x100%	10	12
<b>Program pengembangan informasi dan komunikasi</b>									
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	55	25	22	22	40.00		DISHUBKOMINFO
	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun	%	100	100	100	100	100.00		DPU
<b>Program pengembangan informasi dan komunikasi</b>									
	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog	%	100	-	0	0	0		Bappeda
	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital	%	100	100	100	100			Bappeda
<b>Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>									
<b>Program pengembangan SDM informasi dan komunikasi</b>									
	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	100	35	20	20	20.00		Bagian Santel dan PDE, Dishubkominfo dan Bappeda
<b>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>									
	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	100		35	35	35.00		DISHUBKOMINFO / Bagian Santel dan PDE

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai



berikut:

- a. 2 (dua) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu :
  1. Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun,
  2. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital.
- b. 10 (sepuluh) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu :
  1. Rasio Akses Internet di Ruang Publik,
  2. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional,
  3. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal,
  4. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang,
  5. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa,
  6. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru,
  7. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan,
  8. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog,
  9. Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government,
  10. Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi.




## **9) Lingkungan Hidup**

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, dan Bagian




Pemerintahan Umum Setda dalam 10 indikator seperti terlihat pada Tabel 2.188

Tabel 2.188  
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>										
1.	Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPS 3R)	%	14.5	7.5	4	15.35	15.35	93.60		DPU/BLH
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>										
2.	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung	%	15	13	11.76	12.14	12.14	80.93		DPU
3.	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)	%	87	83	79.37	48.43	79.37	91.23		DPU
4.	Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)	%	65	55	52.68	35.83	52.68	81.05		DPU
5.	Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	unit	1		0	0	0	0.00		DPU, Pemerintahan Umum, BLH
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>										
6.	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	100	60	20	20	20	33.00		BLH
7.	Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	100	70	60	60	60	85.71		BLH

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>										
8.	Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa	%	100	40	0	35	35	37.25		BLH
9.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100.00		BLH
10.	Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, Amdal	%	100	100	100	100	100	100.00		BLH

Keterangan simbol:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator RPJMD urusan Lingkungan Hidup sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah :

a. 2 (dua) indikator atau 20% dengan status telah tercapai yaitu :

1. Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti,
2. Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL.

b. 8 (delapan) indikator atau 80% dengan status capaian akan

tercapai adalah :

1. Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R),
2. Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung,
3. Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung),
4. Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung),
5. Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara,
6. Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air,
7. Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya,
8. Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara.

Hal tersebut karen biomassa masih dalam proses pelaksanaan. Sedangkan indikator Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara ini, pada tahun 2015 masih sebatas studi kalayakan, untuk proses pelaksanaan DED dan kegiatan fisik baru akan dilaksanakan pada tahun 2016, dan 2017.

## **10) Pertanahan**

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan Urusan

Pertanahan diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Temanggung yang mempunyai 2 (dua) indikator seperti terlihat pada table 2.189

Tabel 2.189  
Capaian Kinerja Pertanahan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI CAPAIAN 2014 DAN 2015	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	STATUS	KETERANGAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/4x100%		17	18
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah									
1	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	100	83.66	83.66	83.66	83.66	▶		Bagian Pemerintahan Umum Setda
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan									
2	Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	20	7,5	12,5	12,5	62,50	▶		Bagian Pemerintahan Umum Setda

Status capaian indikator RPJMD 2013-2018 urusan

Pertanahan sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah :

- a. 1 (satu) indikator atau 50 % dengan status capaian akan tercapai, yaitu indikator Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat
- b. 1 (satu) indikator atau 50 % dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### 11) Kependudukan dan Catatan Sipil

## Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan yang terdiri dari 5 indikator dengan status capaian seperti pada tabel 2.190

Tabel 2. 190 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD	TARGET RPKD 2015	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI CAPAIAN 2014 2015	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA RPJMD			KETERANGAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4x100%	16			17	18
	Program Penataan Administrasi Kependudukan												
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	100	65.08	11.74	10.16	11.74	11.74			√		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	37.63	22.84	84.68	98.16	98.16	100.00	√				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	67.01	51.56	51.06	56.79	56.79	84.75		√			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	100	100	42.51	1.75	42.51	42.51			√		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Penanganan Pengadu	%	100	100	100	100	100	100.00	√				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	an Masyara kat												atan Sipil
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Status capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil adalah:

- a. 2 (dua) indikator atau sebesar 40 % dengan status capaian telah tercapai yaitu :
  1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
  2. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- b. 1 (satu) indikator atau sebesar 20 % dengan status capaian akan tercapai yaitu Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- c. 2 (dua) indikator atau sebesar 40 % dengan status capaian perlu upaya keras yaitu:
  1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK),  
Masyarakat tidak langsung memperbaharui KK yang anggotanya mengalami perubahan (status, pendidikan, perwakilan, penambahan anggota keluarga).
  2. Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian.  
Selama ini kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian masih sangat sulit, padahal akta kematian sangat diperlukan untuk mengurus waris dari orang yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berusaha keras memenuhi target dimaksud dengan melakukan sosialisasi bersama dengan pihak – pihak terkait utamanya dalam hal pentingnya mempunyai akta kematian. Rendahnya kesadaran masyarakat terutama di pedesaan untuk membuat KK terutama apabila ada

anggota keluarga yang seharusnya sudah pisah KK (misalnya karena menikah).

## 12) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemberdayaan dan perlindungan anak diimplementasikan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 15 indikator. sebagaimana pada tabel 2.191

Tabel 2.191  
Urusan Pemberdayaan dan perlindungan anak

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJM Ds/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	KET	SKPD
					2014	2015					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan										
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	100.00	●	Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui	BKBPP
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di	%	100	100	100	80	100	100.00	●	Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum	BKBPP



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RPKD		REALISASI RPJM Ds/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	KET	SKPD
					2014	2015					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
	Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit									bisa diketahui	
	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	%	90	85	100	80	100	100.00	●	Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui	BKBPP
	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	80	70	53	80	80	100.00	●	Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui	BKBPP
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan	%	25	25	25	33	33	100.00	●	Kasus kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui	BKBPP
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban	%	98	98	100	100	100	100.00	●	Kasus perempuan dan anak	BKBPP

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJM Ds/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	KET	SKPD	
					2014	2015						
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	
	Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum										korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui	
	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	86	84	100	23.49	100	100.00	●	Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui, kesulitan dalam menemukan korban jika laporan banyak	BKBPP	
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	50	50	100	100	100	100.00	●	Kasus perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui	BKBPP	
	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasio	1 : 2600	1 : 2500	1 : 2500	0	1 : 2500	96.24	●	Kasus kekerasan rumah tangga tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui,	BKBPP	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RPKD		REALISASI RPJM Ds/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	KET	SKPD
					2014	2015					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
										data rumah tangga tahun 2015 belum tersedia	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak										
	Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	%	70	40	40	69.62	69.62	99.46			BKBPP
	Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Hak Sipil dan Kebebasan	%	95	75	75	85.56	85.56	90.06			BKBPP
	Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	%	80	70	70	100	100	100.00			BKBPP
	Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Kesehatan Dasar	%	80	70	70	78.84	78.84	98.55			BKBPP
	Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	%	85	75	75	56.75	75	88.24			BKBPP
	Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	%	70	60	60	100	100	100.00			BKBPP

Status capaian indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah :

- a. 11 (sebelas) indikator atau 73,33 % dengan status capaian telah tercapai, yaitu Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu, Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di dalam unit Pelayanan Terpadu, Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak di dalam unit Pelayanan Terpadu, Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat Penyidikan sampai dengan putusan Pengadilan atas kasus-kasus kekerasan, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat Layanan bantuan Hukum, Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Rasio Kekerasan dalam rumah tangga, Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dan Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan khusus,
- b. 4 (empat) indikator atau 26,67 % dengan status akan tercapai, yaitu Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender, Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Hak Sipil dan Kebebasan, Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Kesehatan Dasar dan Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan

Budaya.

### 13) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukkan dalam 13 indikator kinerja sebagaimana pada tabel 2.192

Tabel 2.192

#### Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD 2015	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI CAPAIAN 2014 DAN 2015	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	STATUS CAPAIAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/4x100%	10	12
I.	<b>Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga</b>									
1.	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga									
	a. Keluarga Pra Sejahtera	%	20.22	20,58	24	0	24	100.00		BKBPP
	b. Keluarga Sejahtera I	%	7.23	7,87	28.81	0	28.81	100.00		BKBPP
	c. Keluarga Sejahtera II	%	23.19	22,01	31.57	0	31.57	100.00		BKBPP
	d. Keluarga Sejahtera III	%	45.22	44,93	45.56	45.56	45.56	100.00		BKBPP
	e. Keluarga Sejahtera III plus	%	4.14	3,61	3.55	3.6	3.6	86.96		BKBPP
2.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	3,61	100	100	100	100.00		BKBPP
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	%	2.6	3	1.65	3.45	3.45	100.00		BKBPP
4.	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	84	83,4	79.03	89	89	100.00		BKBPP
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	5.05	5,5	9.98	9.86	9.96	51.22		BKBPP

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD	TARGET RKPD 2015	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI CAPAIAN 2014 DAN 2015	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	STATUS CAPAIAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/4x100%	10	12
I.	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga									
6.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81.25	81,1	80.06	71.7	80.06	98.54		BKBPP
7.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB	%	86	85,6	85.06	85.4	85.4	99.30		BKBPP
8.	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan	Rasio	1 : 2	1 : 4	1 : 6	1 : 6	1 : 6	0.33		BKBPP
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	100.00		BKBPP
	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3.55	3,33	2.86	2.69	2.69	75.77		BKBPP
	Terkendalnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0.6	0,64	0.83	0.86	0.86	100.00		BKBPP
	Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru		14.055	14.065	16.27	6.319	16.27	100.00		BKBPP
	Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	3	3	20.06	0	20.06	100.00		BKBPP

Dari 13 indikator sebanyak 9 indikator tercapai sangat tinggi


dengan rata-rata capaian antara 94 sd 100% yaitu Indikator Jumlah keluarga pra sejahtera, Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun, Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif, Cakupan anggota bina keluarga balita, Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB, Rasio Pembantu pembina keluarga Berencana perdesa/kelurahan, cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB baru dan Cakupan penyediaan alat dan kotrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

1 indikator dengan capaian tinggi adalah indikator prosentase penggunaan alat kontrasepsi pada pria dengan capaian sebesar 89,25%. 1 indikator dengan capaian sedang adalah terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 72,31%, sedangkan indikator dengan capaian rendah dan sangat rendah adalah Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 57,11% dan Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh KB perdesa atau kelurahan dengan capaian sebesar 20%.

#### 1) 14) Sosial




Kinerja Urusan Sosial ditunjukkan dalam 14 indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.192  
Urusan sosial

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>										
1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	18	17	17	17	94.44		Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RPKD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>Program pembinaan anak terlantar</b>										
2.	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1.28	1.28	0.96	0.96	0.96	75.00		Dinas Sosial
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>										
3.	Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	3.18	3.08	1.99	2.27	2.27	71.38		Dinas Sosial
<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>										
4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	5.06	2.71	2.67	3.31	3.31	65.42		Dinas Sosial
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>										
5.	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	3	1	0,35	0,48	0,48	16.00		Dinas Sosial
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>										
6.	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	100	100	100	100	100.00		Dinas Sosial
7.	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	24.34	12,34	8.65	4.34	12.99	53.37		Dinas Sosial
8.	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100	100	100	100	100	100.00		Dinas Sosial
9.	Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	100	100	83	100	100.00		Dinas Sosial, Bapemades, Bag.Perekonomian
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>										
10.	Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100	100	100	100	100	100.00		Dinas Sosial
11.	Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100	100	100	100	100	100.00		Dinas Sosial
12.	Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	25.95	24.22	0	0	0	0.00		Dinas Sosial
<b>Program tanggap darurat dan logistik</b>										
13.	Persentase Tertanganinya	%	100	100	100	50	100	100.00		DPU



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPd		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
14.	Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana	%	100	100	100	53	100	100.00		BPBD
<b>Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</b>										
15.	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	78	87.5	87.5	87.50		BPBD / Dinsos
16.	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	50	100	100.00		BPBD / DPU

Urusan Sosial diimplementasikan oleh Dinas Sosial, Bapermades, Bagian Perekonomian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai 16 (enam belas) indikator. Dari 16 indikator kinerja urusan sosial sebanyak 7 indikator telah tercapai, 7 indikator akan tercapai dan hanya 2 indikator perlu upaya keras.

Pada 7 indikator yang telah tercapai salah satunya yaitu cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial. Pada indikator ini Targetnya bersifat kualitatif sehingga jumlah PMKS pada tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui karena per kasus dan setiap ada kasus pasti ditangani. Sedangkan untuk 6 indikator lainnya termasuk indikator yang telah tercapai karena adanya dukungan dan bantuan kegiatan setiap tahunnya dari dinas sosial.

Untuk indikator yang memenuhi kriteria akan tercapai juga berjumlah 7 buah salah satunya yaitu persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Indikator ini baru akan tercapai karena jaminan hidupapabila dijumlahkan terdapat nama yang sama, misalnya 298 yg menerima, nama yg beda hanya 50 nama saja, yg lainnya sama.

Sedangkan indikator urusan sosial yang perlu usaha keras berjumlah dua buah yakni cakupan PMKS yang memperoleh

rehabilitasi sosial dan cakupan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (wksbm) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

## 2) Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 11 indikator kinerja.

Program daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Program peningkatan kesempatan kerja;
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Evaluasi terhadap target indikator urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.193  
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>										
1.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	80	80	100	100	100.00		Disnakertran
2.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	90	80	95	100	100	100.00		Disnakertran
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%		80	80			0.00		
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>										
4.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja	%	49	67	75	75	75	100.00		Disnakertran
5.	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94.14	95	95.75		94.14	98.32		Disnakertran
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.86	5	4.25		5.86	100.00		Disnakertran
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	85.38	79	82		85.38	100.00		Disnakertran
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>										
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	49	14	19.4	30	49	100.00		Disnakertran
9.	Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis	%	72	65.5	100	65	72	72.00		Disnakertran

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	75	100	100	90	90	90.00		Disnakertran
11.	Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan	%	9	73	82	25	25	30.49		Disnakertran

Urusan Ketenagakerjaan diimplementasikan hanya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai 11 (sebelas) indikator. 6 (enam) indikator mempunyai status capaian telah tercapai dan 5 (lima) indikator berstatus akan tercapai.

6 indikator yang berstatus telah tercapai yaitu:

1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
3. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan kerja,
4. Tingkat pengangguran terbuka;
5. Tingkat partisipasi angkatan kerja;
6. Besaran pemeriksaan perusahaan.

Sedangkan 5 indikator dengan status capaian akan tercapai, yaitu:

1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan;
2. Tingkat kesempatan kerja;
3. Cakupan pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek/program sejenis;
4. Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama;
5. Persentase pengujian peralatan diperusahaan.







### 3) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja dengan fokus sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Koperasi dan UMKM ini adalah:

1. Meningkatnya peran sektor jasa, kelembagaan koperasi dan UMKM;
2. Menguatnya kapasitas dan kapabilitas Pelaku.

Tabel 2.194

## Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</b>										
1.	prosentase jumlah koperasi aktif	%	90.70	87.60	83.67	83.8	83.8	92.39		DISPERIDAGKOP DAN UMKM
2.	Besaran jumlah anggota koperasi	org	179,500	165,500	321205	195.809	321205	100.00		DISPERINDAGKOP DAN UMKM
3.	persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	53.72	43.39	44.89	44.91	44.91	83.60		DISPERINDAGKOP DAN UMKM
<b>Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>										
4.	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	50	25	-	25	25	50.00		DISPERINDAGKOP DAN UMKM
5.	Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	451	204	78	219	219	48.56		DISPERINDAGKOP DAN UMKM
6.	Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	232	172	152	272	272	100.00		DISPERINDAGKOP DAN UMKM

Urusan Koperasi dan UMKM mempunyai 6 (enam) indikator. Status capaian indikatornya yakni 2 (dua) indikator telah tercapai yaitu besaran jumlah anggota koperasi serta besaran jumlah akses permodalan bagi UKM, dan 4 (empat) indikator dengan status akan tercapai yaitu prosentase jumlah koperasi aktif, persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi, cakupan meningkatnya ketertataan LKM yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan besaran jumlah UKM yang dibina. Untuk indikator cakupan meningkatnya ketertataan LKM yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan belum dapat tercapai secara maksimal karena masih menunggu peraturan dari pusat yang berkaitan dengan dana hibah (dana hibah depending).

#### 4) Penanaman Modal


Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang ditunjukkan dengan 13 indikator kinerja.

Program-program daerah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target sasaran yaitu program peningkatan pelayanan perizinan, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi serta program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Sedangkan fokus sasaran yang ingin dicapai dalam urusan

Penanaman Modal ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan meningkatnya investasi.

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	Target 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	Status	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>										
1.	Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur	%	100	100	25	25	25	25.00		KP3M
2.	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	95	95	95	95	95	100.00		KP3M
3.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100.00		KP3M
4.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	Hari	6	9	10	10	10	100.00		KP3M
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>										
5.	Laju Investasi	%	14	16,28	25	-62	-62	-429.66		KP3M
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>										
6.	Nilai Investasi	Rupiah	170,000,000,000	165 M	74,308,306,770	75,000,000,000	75,000,000,000	44.12		KP3M
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>										
7.	Besaran jumlah Investor	investor	1734	1074	176	105	176	10.15		KP3M
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>										
8.	Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Kali/tahun	33	5	5	4	9	27.27		KP3M
9.	Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	unit	32	32	32	32	32	100.00		KP3M
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	Target 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN 2014 DAN 2015 (%)	Status	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik	%	100	100	100	100	100	100.00		KP3M

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penanaman modal, dari 10 Indikator kinerja yang mempunyaistatus telah tercapai sejumlah 5 indikator, akan tercapai sejumlah 2 indikator dan perlu usaha keras sejumlah 3 indikator.

Indikator kinerja yang mempunyai status perlu usaha keras terjadi pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator laju investasi, nilai investasi serta besaran jumlah investor. Hal tersebut terjadi karena laju investasi digeser ke makro (karena tidak mungkin tercapai dan perhitungannya tidak bisa ditarget (didelete), banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron antara pusat dan daerah serta karena banyak aturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron antara pusat dan daerah, disamping itu kurang adanya insentif atau pengurangan pajak atau share ke pemda yang kurang kompetitif.

## 5) Kebudayaan

Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja. Urusan ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Evaluasi terhadap target indikator urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.195  
Urusan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pengembangan Nilai Keagamaan</b>										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPd		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
1.	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	100	77	94.5	94.5	94.50		
2.	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren	%	100	100	88	100	100	100.00		
3	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	100	75.7	98.68	98.68	98.68		
4.	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	100	100	85.7	100	100.00		
<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>										
5.	Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya	%	0.28	0.18	0.15	0.96	0.96	100.00		Dinbudparpora
6.	Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi		6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	100.00		Dinbudparpora
7.	Cakupan Fasilitas Cagar Budaya	%	2.12	2.12	2.09	2.12	2.12	100.00		Dinbudparpora
8.	Cakupan Promosi Cagar Budaya	%	0.65	0.31	0.02	0.02	0.02	3.08		Dinbudparpora
9.	Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100.00		Dinbudparpora
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>										
10.	Cakupan Kajian Seni	%	33.3	26.6	20	26.6	26.6	79.88		Dinbudparpora
11.	Cakupan Fasilitas Seni	%	85.7	57.1	58	85.7	85.7	100.00		Dinbudparpora
12.	Cakupan Gelar Seni	%	100	75	50	100	100	100.00		Dinbudparpora
13.	Cakupan Misi Kesenian	%	95	80	75	80	80	84.21		Dinbudparpora
14.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	87.5	62.5	50	87.5	87.5	100.00		Dinbudparpora
15.	Cakupan Tempat Kesenian	%	50	50	50	50	50	100.00		Dinbudparpora
16.	Cakupan Organisasi Kesenian	%	100	100	100	100	100	100.00		Dinbudparpora

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kebudayaan, dari 16 Indikator kinerja yang mempunyai status telah tercapai sejumlah 12 indikator dan yang akan tercapai sejumlah 4 indikator.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada urusan ini karena sebagian besar jumlah riil pemohon bantuan/mengajukan proposal untuk tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa diketahui

## 6) Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Evaluasi terhadap target indikator urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.196  
Urusan Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>										
1.	Besaran kegiatan kepemudaan	Kegiatan	13	10	9	10	10	76.92		Dinbudparpora
2.	Kegiatan olah raga	Kali	85	81	109	81	109	100.00		Dinbudparpora
3.	Besaran Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	90	75	117	245	245	100.00		Dinbudparpora
4.	Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Prestasi	8	6	4	5	5	62.50		Dinbudparpora
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>										
5.	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga	%	20.46	9.98	1.69	9.98	9.98	48.78		Dinbudparpora

Status capaian indikator urusan pemuda dan olah raga ini adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu Kegiatan olah raga dan besaran prestasi olahraga.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status akan tercapai, yaitu besaran kegiatan kepemudaan; cakupan bantuan prasarana olah raga bagi klub olahraga dan besaran prestasi kegiatan kepemudaan.

## 7) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja.

Tabel 2.197  
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	KET	SKPD
					2014	2015					



1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
	Program pendidikan politik masyarakat										
	Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100.00			Kantor KESBANG
	Persentase Partisipasi Pemilih	%	-	100	80	-	80	80.00			Kantor KESBANG
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat										
	Persentase Kasus Pekat yang Tertangani	%	100	100	-	81	81	81.00			Kantor KESBANG
	Program pengembangan wawasan kebangsaan										
	Penurunan Kasus SARA	%	100	100	-	83	83	83.00		Karena Temanggung cukup sensitif dengan isu SARA	Kantor KESBANG
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal										
	Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika	%	100	100	-	48	48	48.00			Kantor KESBANG
	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	91.02	100	100	100.00			Satuan Polisi Pamong Praja
	Angka Kriminalitas	angka	0,48	0,46	0,5	0,3	0,5	100.00			Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Penanganan demonstrasi	%	100	100	100	100	100	100.00			Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	kali	1	3	1	0,7	1	33.33			Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan										
	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,60	1,62	1,59	1,6	1,6	98.77			Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi adalah Prosentase peserta kegiatan politik masyarakat dengan capaian 100%, Indikator kinerja dengan capaian tinggi adalah Posentase partisipasi pemilih dengan capaian 85%.

Indikator kinerja prosentase kasus pekat yang tertangani dan Penurunan kasus SARA capaiannya adalah 0% dikarenakan Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 tidak terjadi kejadian seperti tersebut. Indikator kinerja Prosentase penanganan tindak penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten.

## 8) Otonomi daerah

Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah sampai dengan ditunjukkan dengan 45 indikator kinerja. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Sekretariat DPRD, Satpol PP dan Setda sebanyak 30 Indikator tercapai dengan predikat sangat tinggi dengan rata – rata capaian 91 sd 100%.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
1.	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	1.9	1.5	2.01	0.8	2.01	100.00		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
2.	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa	%	3	2.4	3.15	3.4	3.15	100.00		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>										
3.	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	34	37	44.29	43.98	44.29	100.00		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>										
4.	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	%	95	89	100	86	100	100.00		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
5.	Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong	%	90	86	78.29	86	86	95.56		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
6.	Persentase PNS Lulusan S1	%	58	49	49.36	50	50	86.21		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
7.	Persentase PNS Lulusan S2/ S3	%	5.1	4.1	4.04	4.1	4.1	80.39		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
8.	Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	%	55	52	53.60	75	75	100.00		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
<b>Program Administrasi Kepegawaian</b>										
9.	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100.00		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>										
10.	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus	%	100	100	100	60	60	60.00		Bagian Pemerintahan Desa Setda
11.	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	100	100	0.00	0.00		0.00		Bagian Pemerintahan Desa Setda
12.	Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	97	0.00	0.00		0.00		Bagian Pemerintahan Desa Setda
<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>										
13.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	%	100	100	45	65	65	65.00		Sekretariat DPRD
14.	Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan	%	100	100	100	45	100	100.00		Sekretariat DPRD
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	90	75	71.71	52.16	71.71	79.68		Inspektorat
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>										
16.	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	100	15	7.55	-	7.55	7.55		Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
17.	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	100	25	4.90	43	43	43.00		Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
<b>Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>										
18.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	B	B	B	-	B	100.00	√	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
19.	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kriteria	B	B	C	-				Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
20.	Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	95	80	51	51	51	53.68		Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>										
21.	Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	100	68	92	92	92.00		Bagian Pembangunan Setda
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD</b>										
22.	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100	98	100	100.00		Bagian Pembangunan Setda
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten</b>										
23.	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100	95	100	100.00	√ 	Bagian Pembangunan Setda
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>										
24.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	100	100	80	10	80	80.00		Bagian Hukum Setda
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
25.	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	25	70.00	6.70	70.00	100.00	√ 	DPPKAD

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMD s/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>										
26.	Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	89.00	7.00	89.00	89.00		Bagian Umum Setda
<b>Program Kerjasama Daerah</b>										
27.	Besaran kerjasama daerah	Dokumen	1	1	1	9	9	100.00		Bagian Pemerintahan Umum Setda
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>										
28.	Cakupan Pelaksanaan SPM	%	96.8	91,7	52.90	52.90	52.90	54.65		Bagian Pemerintahan Umum Setda
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>										
29.	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	100	100	100	100	100	100.00		Bagian Pemerintahan Umum Setda
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
30.	Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kecamatan	%	100	25	10	12.5	12.5	12.50		Bagian Pemerintahan Umum Setda
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>										
31.	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	100	100	100	70	100	100.00		Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Kecamatan
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
32.	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	87%	87%	0.87	1.01	1.01	100.00		DPPKAD
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>										
33.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		DPPKAD
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
34.	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	9	9	9	3.69	9	100.00		DPPKAD
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
35.	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD	%	80	68	68	67	68	85.00		DPPKAD

Indikator dengan tingkat capaian tinggi sebanyak 4 indikator yaitu Peningkatan nilai sistim akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dengan capaian sebesar 89,58%, Besaran ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan organisasi Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 89%, Cakupan pemberian bantuan kepada pondok pesantren dengan capaian sebesar 88% dan Prosentase jumlah Peraturan daerah yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total peraturan daerah dalam 1 (satu) tahun dengan capaian sebesar 80%.

Sebanyak 5 Indikator kinerja dengan capaian sedang adalah Cakupan pelaksanaan SPM sebesar 73,07%, Prosentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP) baru tercapai 72,86%, Cakupan pemberian bantuan tempat ibadah dengan capaian 77,44%, Cakupan pemberian bantuan kepada TPQ dengan capaian 75,7% dan Prosentase jumlah SKPD yang menyampaikan DURP dengan tepat waktu dengan capaian 68%.

Sedangkan capaian indikator kinerja dengan capaian rendah dan sangat rendah adalah Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda dan Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP. 2 indikator yaitu Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala desa akan diserahkan pelaksanaannya pada tahun 2015.

## 9) Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja.

Program daerah dalam urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian target sasaran adalah program peningkatan ketahanan pangan.

Fokus sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Ketahanan pangan ini adalah meningkatnya ketahanan pangan.

Evaluasi terhadap target indikator Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 2.198

### Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKP	REALISASI RPJMD	CAPAIAN RPJMD 2014 -	STATUS	SKPD
----	--------------------------	--------	------------------------	-------------	---------------	-----------------	----------------------	--------	------

					2014	2015	s/d 2015	2015 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>Program peningkatan ketahanan pangan</b>										
1.	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	kkal/kap/hr	2850	2980	3719.73	3124	3719.73	100.00		KKP
2.	Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	gr/kap/hr	74.00	75.99	134.08	100.15	134.08	100.00		KKP
3.	Peningkatan cadangan pangan masyarakat	unit	51	75	40	49	49	65.33		KKP
4.	Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	%	10	10	7.35	0	7.35	73.50		KKP
5.	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	60	85	100	100	100	100.00		KKP
6.	Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	%	90	91	89.2	89.5	89.5	98.35		KKP
7.	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	90	74	90	90	100.00		KKP
8.	Besaran Desa Mandiri Pangan	Desa	9	10	8	9	9	90.00		KKP
9.	Besaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	lokasi	4	5	6	6	6	100.00		KKP
10.	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	%	90	100	100	100	100	100.00		KKP

Urusan Ketahanan Pangan diimplementasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan yang mempunyai 10 (sepuluh) indikator. Status capaian indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah:

- a. 6 (enam) indikator atau 60 % dengan status telah tercapai yaitu indikator:
  1. Cakupan ketersediaan energi per kapita;
  2. Cakupan ketersediaan protein per kapita;
  3. Cakupan penanganan kerawanan pangan;
  4. Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
  5. Besaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
  6. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan

akses pangan.

b. 4 (empat) atau 40 % dengan status akan tercapai yaitu indikator:

1. Peningkatan cadangan pangan masyarakat;
2. Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah;
3. Persentase meningkatnya skor pola pangan harapan;
4. Besaran desa mandiri pangan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ketahanan pangan, terdapat 10 indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi dengan angka capaian 100% yaitu Cakupan ketersediaan energy perkapita, Cakupan ketersediaan protein perkapita, Prosentase penanganan kerawanan pangan, Meningkatnya skor pola pangan harapan, Besaran Desa Mandiri pangan, Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan. Sedangkan indikator kinerja peningkatan cadangan masyarakat tercapai 93%.

Indikator kinerja dengan capaian sedang adalah Prosentase penguatan cadangan pangan pemerintah sebesar 73,5%.

#### **10) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja.

Program-program daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain:

1. Program peningkatan ketahanan masyarakat desa;
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;
3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa;
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Fokus sasaran yang ingin dicapai dalam urusan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Evaluasi terhadap target indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pada tabel 2.199

Tabel 2.199  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPd		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa</b>										
1.	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	%	30	15	15	15	15	50.00		BAPERMADES
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan</b>										
2.	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif	%	100	100	100	100	100	100.00		BAPERMADES
<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>										
3.	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif ( BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan )	%	80	34	17	8.5	34	42.50		BAPERMADES
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa</b>										
4.	Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)	%	11	14.4	15.6	14.4	15.6	70.51		BAPERMADES
5.	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	%	37	19	14	19	19	51.35		BAPERMADES
6.	Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran	%	1.35	0.26	0.29	0.26	0.29	21.48		BAPERMADES
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan</b>										
7.	Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	%	20	20	20	20	20	100.00		BAPERMADES
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>										
8.	Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	100	87	83	87	87	87.00		BAPERMADES

Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna =Bru dilaksanakan fasilitasi untuk 8 kel/desa melalui teknologi tepat guna dan 1 kel/kec melalui posyantek, terkendala karena penerima bantuan hibah harus berbadan



hukum

Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran =Baru dilaksanakan 50% berupa fasilitasi bansos untuk 310 rumah dgn val data yg berasal dari data PPLS 2011, desabinaan, dan aspirasi masyarakat.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa diimplementasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai 8 (delapan) indikator. Status capaian indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2015 adalah:

- a. 2 (dua) indikator atau 25 % dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
  1. Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;
  2. Persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- b. 6 (enam) indikator atau 75 % dengan status akan tercapai, yaitu:
  1. Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa;
  2. Cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif (Bumdesa, Pasar Desa, UED SP dan Lumbung Pangan);
  3. Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat Guna;
  4. Prosentase menurunnya rumah tangga sasaran (angka kemiskinan);
  5. Cakupan bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga sasaran;
  6. Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sebanyak 8 indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi dengan prosentase rata-rata sebesar 100% yaitu Prosentase menurunnya Rumah tangga sasaran (angka kemiskinan), Prosentase perlindungan sosial terhadap rumah tangga sasaran, Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa, Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, Prosentase Partisipasi rumah tangga sasaran dalam

musyawarah perencanaan pembangunan desa, Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna, Cakupan bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga sasaran, dan Cakupan penyusunan profil Desa/kelurahan.

Indikator dengan capaian tinggi adalah Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 85%, dan indikator kinerja dengan capaian rendah adalah Cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan) yaitu sebesar 60%.


### 11) Statistik

Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja yaitu Besaran ketersediaan data statistik dengan capaian sebesar 100%. PDRB perkapita dengan capaian 99,68% dan Indeks ketimpangan Williamson/indeks ketimpangan regional dengan capaian 0,18.

Program-program daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian target sasaran yaitu program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah.

Fokus sasaran yang ingin dicapai urusan ini adalah meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah.

Evaluasi terhadap target indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 5.33.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKP		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>										
1.	Besaran ketersediaan data statistik	dokumen	9	8	8	8	8	88,89		Bappeda


### 12) Kearsipan

Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan indikator kinerja, yaitu Prosentase pengelolaan arsip secara baku dengan capaian sebesar 100% dan termasuk kategori predikat sangat tinggi.

Program daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi dalam rangka pencapaian target sasaran yaitu:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah;
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Fokus sasaran yang ingin dicapai urusan ini adalah Meningkatnya tertib pengelolaan kearsipan.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah</b>										
<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>										
<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>										
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	100	57/80	32	57/80	88,89		Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

Urusan Kearsipan diimplementasikan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan 1 indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku. Hal ini dikarenakan beberapa SKPD belum secara maksimal mengelola arsip secara baik walaupun telah dilaksanakan beberapa kali Pelatihan yang dilakukan oleh SKPD. Kantor Arsip dan perpustakaan akan berusaha keras terhadap pencapaian dimaksud dan akan dilakukan BinteK ulang terhadap pentingnya pengelolaan arsip secara baku.

### 13) Perpustakaan



Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten temanggung tahun 2013-2018. 2 indikator kinerja urusan perpustakaan tercapai sangat tinggi, yaitu Prosentase peminjam buku perpustakaan terhadap jumlah pengunjung dengan capaian sebesar 125,71%, Sedangkan Rasio pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk capaiannya sebesar 90,625 (tinggi).

Program-program daerah yang dilaksanakan oleh

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi dalam rangka pencapaian target sasaran yaitu Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpustakaan.

Fokus sasaran yang ingin dicapai urusan ini adalah Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan.

Evaluasi terhadap target indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	84	72	344.6 91/56 6.524	290.9 09/63 4.435	344.691/566. 524	60.84		Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi
2.	Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung	%	90	73	275.7 62/34 4.691	183.6 53/29 0.909	275.762/344. 691	80.00		Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

Urusan Perpustakaan diimplementasikan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang terdiri dari 2 (dua) indikator dengan status capaian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) indikator atau sebesar 50 % dengan status capaian akan tercapai yaitu indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk;
- b. 1 (satu) indikator atau sebesar 50 % dengan status capaian perlu upaya keras yaitu indikator Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung hal ini disebabkan oleh tidak semua pengunjung perpustakaan meminjam buku yang tersedia di perpustakaan, sebagian besar pengunjung perpustakaan hanya melakukan aktivitas membaca di ruang perpustakaan.

## **b. Urusan Pilihan**

### **1) Pertanian**

Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukkan dengan 36

indikator kinerja.

Tabel 2.200  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan</b>									
	Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang	Kelompok	1,300	850	750	850	850	65.38		Dintanbunhut
	Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama	Ha	1,300	550	400	550	550	42.31		Dintanbunhut
	Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan	Unit	1,272	1,122	1,291	1501	1501	100.00		Dintanbunhut
	Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan	%	70	64	62.50	47.50	62.50	89.29		Dinakan
	Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul	%	70	65	60	65	65	92.86		Dintanbunhut
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>									
	Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok	12	6	4	14	14	100.00		Dintanbunhut
	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>									
	Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit	%	85	75	92	75	92	100.00		Dintanbunhut
<b>III.</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>									
	Angka Kematian Ternak unggas	%	2	2	1.05	0.08	0.08	100.00		Dinakan
	Angka Kematian Ternak kecil	%	0.10	0.10	0.02	0.02	0.02	100.00		
	Angka Kematian Ternak besar	%	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	100.00		
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan</b>									
	Peningkatan produktifitas Padi	Ton/Ha	6.99	6,38	5.97	6.43	6.43	91.99		Dintanbunhut

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Peningkatan produktifitas Jagung	Ton/Ha	6.88	6,03	4.57	4.28	4.28	62.2	▲	Dintanbunhut
	Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Ton/Ha	27.61	26,02	30.27	24.26	24.26	87.87	▲	Dintanbunhut
	Peningkatan produktifitas Cabai	Ton/Ha	6.70	6.20	7.27	8.70	7.27	100.00	▶	Dintanbunhut
	Peningkatan produktifitas Kobis	Ton/Ha	27.05	25,49	23.74	24.50	23.74	87.76	▲	Dintanbunhut
	Peningkatan produktifitas Tembakau	Ton/Ha	0.79	0,69	0.55	0.58	0.58	73.42	▲	Dintanbunhut
	Peningkatan produktifitas Kopi Robusta	Ton/Ha	1.10	0,97	1.25	1.09	1.25	100.00	●	Dintanbunhut
	Peningkatan produktifitas Kopi Arabika	Ton/Ha	0.90	0,82	0.95	0.83	0.95	100.00	▲	Dintanbunhut
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan</b>									
	Peningkatan Produktivitas daging Sapi	Kg/ Ekor	176.65	166,46	165	165	165	93.41	▶	Dinakan
	Peningkatan Produktivitas daging Kambing	Kg/ Ekor	13.66	13,26	13.13	13	13.13	96.12	▶	Dinakan
	Peningkatan Produktivitas daging Domba	Kg/ Ekor	13.66	13,26	13.13	13	13.13	96.12	▶	Dinakan
	Peningkatan produksi telur ayam ras petelur	Butir	79,255,574	76.924.680	76.165.313	75.706.107	76165313	96.10	▶	Dinakan
	Peningkatan populasi sapi	Ekor	29,750	28,034	29115	29260	29260	98.35	▶	Dinakan
	Peningkatan populasi domba	Ekor	334,646	297,499	286058	286773	286773	85.69	▶	Dinakan
	Peningkatan populasi kambing	Ekor	64,388	61,575	70046	70081	70081	100.00	●	Dinakan
	Peningkatan populasi ayam buras	Ekor	1,675,736	1,665,721	1862390	1867045	1867045	100.00	●	Dinakan
<b>VI.</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b>									
	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan	kali/ tahun	10	5	5	3	5	50.00	▶	Bapeluh
	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh	orang/thn	3	3	3	2	3	100.00	●	Bapeluh
<b>VII.</b>	<b>Program Pemberdayaan Petani</b>									
	Rasio jumlah kelompok tani maju	%	8.05	8.05	8.05	4.00	8.05	99.98	●	Bapeluh
	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani	orang/thn	12,400	4,960	2480.00	2500.00	2500.00	20.16	▶	Bapeluh
	Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	88	46	35.99	23.00	35.99	40.95	▶	Bapeluh
	Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	unit/thn	70	70	10.00	13.00	13.00	18.57	▶	Bapeluh

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>VIII.</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan</b>									
	Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung	%	100	67	50	67.00	50.00	50.00		Dintanbunhut
	Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun	unit	469	319	298	316	316	67.38		Dintanbunhut
	Besaran jumlah jalan usaha tani	unit	410	260	263	337	337	82.20		Dintanbunhut
<b>IX.</b>	<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>									
	Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan	%	100	100	100	100	100	100.00		Dintanbunhut





Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian-Target hingga akhir periode RPJMD 12 kelompok, Peningkatan produktifitas Jagung-Dipengaruhi oleh faktor cuaca, target lebih tinggi, rata-rata produktivitas Jateng 4,8-5,5 ton/Ha, benih yang digunakan benih turunan bukan jagung unggul, masih tumpang sari dengan tanaman lain, Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, benih yang digunakan lebih banyak komposit dan lokal serta belum dibudidayakan secara intensif, Peningkatan produktifitas Ubi kayu-Dipengaruhi oleh faktor cuaca, target lebih tinggi dari produktivitas optimal 24-26 ton/Ha, ditanam tumpang sari, bukan blok, bukan daerah ubi kayu, Ubi kayu banyak diusahakan secara tumpang seri dengan komoditas lain, Temanggung bukan daerah sentra ubi kayu, umur panen tergantung harga pasar jika harga murah maka umur panen panjang, untuk meningkatkan daya saing daerah, Peningkatan produktifitas Kobis- Dipengaruhi oleh faktor cuaca, target terlalu tinggi, produktivitas optimal 24-25 ton/Ha, dikurangi sedikit, Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, Peningkatan produktifitas Tembakau- Dipengaruhi oleh faktor cuaca, target terlalu tinggi, produktivitas optimal 0,6-0,63 ton/Ha, tanaman mundur, masih bisa tercapai, Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, Peningkatan

produktifitas Kopi Robusta-Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, Peningkatan produktifitas Kopi Arabika-Pola tanam kopi arabika masih tumpang sari dengan komoditas lainserta belum dibudidaya secara intensif,Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung-Akumulasi-Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pertanian, sebanyak 34 indikator kinerja tingkat capaiannya sangat tinggi dan rata rata capaian masing - masing indikator sebesar 100%. Sedangkan 2 indikator kinerja predikat capaian tinggi yaitu Peningkatan produktifitas jagung dengan capaian sebesar 79% dan peningkatan produktivitas tembakau dengan capaian sebesar 83%.

## 2) Kehutanan

Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja.

Tabel 2.201  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>I. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>										
	Besaran Penanganan Lahan kritis	Ha	11,581	20,581	24.871	24.471	24.871	0.21		Dintanbunhut
<b>II. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>										
	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	%	100	50	25	50	50	50.00		Dintanbunhut
	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan									
	Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan	Kelompok	12	6	4	10	10	83.33		Dintanbunhut
<b>III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>										
	Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan	unit	370	220	164	281	281	75.95		Dintanbunhut

Besaran target penanganan lahan kritis terlalu tinggi, tahun ini hanya tertangani 350 Ha, karena tidak ada dukungan program dari Kemen LH dan Kehutanan melalui BP DAS SOP,





diturunkan uu 23 kewenangan daerah dibatasi / dialihkan ke provinsi, Berkurangnya dukungan dana APBN untuk penanganan lahan kritis, Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup-diturunkan uu 23 kewenangan daerah dibatasi / dialihkan ke provinsi, Terkendala UU No.23 tahun 2014 terkait kebijakan urusan kehutanan dialihkan ke provinsi dan pusat, Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan-diturunkan uu 23 kewenangan daerah dibatasi / dialihkan ke provinsi, Terkendala UU No.23 tahun 2014 terkait kebijakan urusan kehutanan dialihkan ke provinsi dan pusa, Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan-diturunkan uu 23 kewenangan daerah dibatasi / dialihkan ke provinsi, kab. Hanya diperbolehkan taman hutan rakyat, temanggung tidak ada, Berkurangnya dukungan dana APBN untuk pembuatan bangunan sipil teknis. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kehutanan, sebanyak 3 indikator kinerja tercapai sangat tinggi yaitu Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sebesar 100%, Besaran peningkatan kemitraan dalam pengelolaan hasil hutan sebesar 100% dan Besaran meningkatnya konservasi hutan dan lahan dengan capaian sebesar 96%.

Indikator Besaran penanganan lahan kritis tingkat capaiannya rendah yaitu sebesar 57%.

### 3) Pariwisata

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja.

Tabel 2.202  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	besaran Berkembangnya Kawasan wisata	unit	10	11	4	11	11	100.00		Disbudparpora
<b>I.</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Wisata</b>									
	Besaran lama tinggal wisatawan	jam	6	12	4	24	24	100.00		Disbudparpora

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	%	15	30	3.75	15	15	50.00		Disbudparpora
<b>II.</b>	<b>Program Pengembangan Produk Wisata</b>									
	Besaran meningkatnya Pengembangan Produk/event/atraksi Wisata	paket	6	9	6	7	7	77.78		Disbudparpora
	Besaran Meningkatnya Pengelolaan Wisata	unit	6	7	5	8	8	100.00		Disbudparpora
<b>III.</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>									
	Besaran Pengembangan Kemitraan Pariwisata	paket	7	11	5	7	7	63.64		Disbudparpora

Besaran lama tinggal wisatawan-Masih belum ada sinkronisasi cara menentukan target karena belum pernah melakukan pendataan Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pariwisata, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 4 indikator tercapai sangat tinggi dengan capaian rata rata 100% yaitu Besaran lama tinggal wisatawan, Besaran meningkatnya pengembangan produk/event/atraksi wisata, Besaran meningkatnya pengelolaan wisata dan Besaran pengembangan kemitraan Pariwisata.

Sedangkan 2 indikator tercapai sangat rendah yaitu Besaran berkembangnya kawasan wisata dengan capaian sebesar 44,44% dan Prosentase meningkatnya kunjungan wisatawan dengan capaian sebesar 37,5%. Hal tersebut dikarenakan banyak daerah wisata yang belum bertiket dan juga pengelolaan daerah wisata yang belum profesional karena sebagian besar daerah wisata dikelola oleh Desa.

#### 4) Perikanan

Kinerja pembangunan Urusan Perikanan ditunjukkan dengan 11 indikator kinerja.

Tabel 2.203  
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	12
<b>I. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>										
	Penggunaan induk ikan unggul	%	60	30	26.25	28	28	46.67		Dinakan
	Peningkatan produksi benih ikan	Ekor	113,482,800	83,732,000	76125335	20144386	76125335	67.08		Dinakan
	Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam)	Ekor	6,749.01	3,539.77	2855.2	701.22	2855.2	42.31		Dinakan
	Peningkatan produksi mina padi	Ekor	4,174.60	2,189.53	1788.5	909.14	1788.5	42.84		Dinakan
	Produktivitas benih ikan	ekor/m2	130	100	90	99.36	99.36	76.43		Dinakan
	Produktivitas ikan konsumsi	kg/m2	5.29	2.89	2.37	2.36	2.36	44.61		Dinakan
	Produktivitas mina padi	kg/Ha/tahun	1188.51	668.28	554.25	672.84	672.84	56.61		Dinakan
<b>II. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>										
	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	277	224	296.88	98.82	296.88	100.00		Dinakan

Capaian kinerja urusan Perikanan sangat tinggi dimana rata-rata capaiannya adalah 100% yang terdiri dari indikator Penggunaan induk ikan unggul, Peningkatan produksi benih ikan, Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam), Peningkatan produksi mina padi, Produktivitas benih ikan, Produktivitas ikan konsumsi, Produktivitas mina padi, Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan, Tingkat konsumsi ikan, Peningkatan luas lahan budidaya ikan dan Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum.

## 5) Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja.

Tabel 2.204  
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Saran dan Prasarana Lainnya</b>										
1	Besarnya sarana dan prasarana perdagangan	unit	5	1	2	1	3	60.00		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
<b>Program Pengelolaan Pasar Daerah</b>										
2	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	100	100	100	100	100.00		DISPERIN DAGKOP DAN

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										UMKM
<b>Program Peningkatan pengembangan ekspor</b>										
3	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	175,000,000.00	160,000,000.00	149,986,530	57,098,949.81	202,085,479.81	115		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
4	Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	3	6	6	6	100.00		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
<b>Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan</b>										
5	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	600	240	120	255	255	42.50		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
<b>Perlindungan Konsumen</b>										
6	Cakupan Meningkatkan Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	96	96	96	96	100.00		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
7	Cakupan Meningkatkan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	6	4	6	6	100.00		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
8	Cakupan meningkatkan alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	19,050	18,879	16239		16239	85.24		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
9	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	85	60	100	37	37	43.53		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM



Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perdagangan, sebanyak 9 indikator kinerja tingkat capaiannya sangat tinggi, dengan tingkat capaian 115% yaitu Indikator Capaian nilai ekspor produk daerah, adapun tingkat capaian yang 100% ada 4 adalah indikator cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, Cakupan promosi produk unggulan daerah, Cakupan meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya, Capaian meningkatnya jaminan keamanan produk yang beredar, adapun indikator yang tingkat capaiannya yang 85,24% adalah Cakupan meningkatnya alat Takar timbang dan kelengkapan yang ditera ulang, tingkat cakupan besaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan dengan tingkat capaian 60%, sedangkan tingkat capaian terendah ada 2 adalah tingkat cakupan prosentase penyelesaian sengketa konsumen dengan nilai 43,53% dan tingkat cakupan bina kelompok pedagang usaha informal dengan nilai 42.50%.

8 barudilaksanakan (menunggu jadwal tera ulang meteorologi magelang)

## 6) Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja.


Tabel 2.205  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Industri Kecil dan Menengah										
	Cakupan Meningkatkan prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55.60	55.24	55	69	69	100.00		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM
	Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99.75	99.68	100	99.7	99.7	100.00		DISPERIN DAGKOP DAN UMKM

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perindustrian, semua indikator tercapai sangat tinggi dengan rata-rata capaian 100% yaitu Indikator Cakupan meningkatnya agroindustri yang berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah dan Prosentase meningkatnya struktur industri berbahan baku lokal yang tangguh.

## 7) Transmigrasi

Hanya ada 1 indikator Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi yaitu Prosentase penempatan transmigran dengan capaian sangat rendah yaitu sebesar 20%. Hal ini dikarenakan kuota transmigran ditetapkan oleh Pusat.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD 2013-2018	TARGET 2015	REALISASI RKPD		REALISASI RPJMDs/d 2015	CAPAIAN RPJMD 2014 - 2015 (%)	STATUS	SKPD
					2014	2015				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									
	Persentase Penempatan Transmigran	%	80	80	16	10	16	20.00		Disnakertran

## C. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015, **permasalahan pembangunan daerah** Kabupaten Temanggung yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan adalah :

### 1. Urusan Pendidikan

- a. Belum semua penduduk usia PAUD memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD (usia 4-6 tahun) yang baru sebesar 67,63% pada tahun 2015, padahal APK PAUD Nasional (usia 3-6 tahun) telah mencapai 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas. Meskipun capaian APK SD/Sederajat pada tahun 2015 telah di atas 100% yaitu 103,86%, masih ada kesenjangan yang cukup signifikan dengan APM SD/Sederajat yang sebesar 95,49%. Demikian pula pada jenjang SMP/Sederajat masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara APK dengan APM. APK SMP/Sederajat pada tahun 2015 sebesar 96,11%, sedangkan APM SMP/Sederajat sebesar 83,74%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun dipengaruhi pula oleh kemampuan ekonomi keluarga.
- c. Belum seluruh penduduk usia 16-18 tahun memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 56,86% pada tahun 2015, padahal APK SMA/MA/SMK pada tahun 2014 telah mencapai 80%. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantong-kantong putus sekolah. Saat ini 5 (25%) kecamatan yaitu Tlogomulyo, Bejen, Tretep, Wonobojo, dan Kledung belum memiliki SMA/MA/SMK. Dari sisi

tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dipengaruhi pula oleh kemampuan ekonomi keluarga.

- d. Belum maksimalnya relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA. Secara Nasional sebanyak 9,10% lulusan SMA menganggur dan 7,21% lulusan SMK menganggur pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.
- e. Belum maksimalnya peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan masyarakat (pendidikan orang dewasa). Banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja.
- f. Belum meratanya pengentasan buta aksara. Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk buta aksara secara signifikan, masih menyisakan masalah dalam hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata. Terbatasnya kemampuan insan penyelenggara program buta aksara, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan buta aksara.
- g. Kurangnya kualitas, kompetensi, profesionalisme, dan ketersediaan guru. Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Permasalahan ketersediaan guru sebenarnya adalah pada status guru non PNS yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data guru non PNS tahun 2015 pada SD Negeri sebesar 30,80%, pada SMP Negeri 14,22%, pada SMA Negeri 20,14%, dan pada SMK Negeri sebesar 27,61%.

## **2. Urusan Kesehatan**

- a. Meningkatnya penyakit tidak menular dan belum teratasinya penyakit menular;
- b. Belum semua puskesmas terakreditasi;
- c. Belum semua puskesmas memiliki SDM sesuai Permenkes no 75 Tahun 2015 baik jumlah maupun kompetensinya.

- d. Masih kurangnya jumlah dan jenis dokter spesialis tetap dan dokter spesialis bagian besar (penyakit dalam, bedah, dan anak) sesuai standar Rumah sakit kelas B, sehingga mengakibatkan pelayanan spesialis pada pasien terbatas dan pelayanan PONEK dilaksanakan dengan posisi dokter spesialis on call belum bisa on site.
- e. Billing system belum berfungsi secara optimal mengakibatkan terhambatnya transaksi pembayaran dan informasi pasien.

### **3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- a. Kurangnya ketersediaan SDM aparatur desa yang potensial dan memiliki kemampuan;
- b. Kurangnya dukungan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- c. Belum diterbitkannya aturan pelaksana di tingkat pusat mengakibatkan produk perundangan daerah belum bisa diterbitkan sehingga kegiatan belum dilaksanakan secara optimal (kegiatan Pilkades khususnya pergantian antar waktu, pengisian perangkat desa, SOTK Desa dan kewenangan desa);
- d. Dengan adanya aturan yang baru yang disesuaikan dengan perundang – undangan yang baru, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya misalnya tentang pelaksanaan APBDes, Pengadaan barang dan jasa di Desa dan Penataan Perangkat Desa;
- e. Aturan tentang pengadaan tanah desa yang mengharuskan tanah yang akan dibeli berada didalam desa berakibat beberapa desa tertunda dalam pengadaan tanah desa.

### **4. Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja, WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) dan penempatan yang ada.
- b. Belum adanya kajian yang komprehensif untuk pengembangan program pelatihan berbasis 3 in 1 (melatih, mensertifikasi dan memfasilitasi)
- c. Pengembangan peralatan pelatihan ketrampilan kerja belum sesuai kemajuan di dunia industri.
- d. Belum adanya ketentuan tentang sarana dari pemerintah Kabupaten terhadap LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) yang ada.

### **5. Urusan Transmigrasi**

- a. Lahan transmigrasi tidak sesuai dengan MoU, yang seharusnya adalah tanah pekarangan seluas 0,25 Ha yang diperoleh oleh calon transmigran.



- b. Lahan transmigrasi bersengketa dengan PT Perkebunan setempat.
- c. Lokasi lahan jauh dengan desa dan merupakan lahan pasang surut.

#### **6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

- a. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan Iptek dalam meningkatkan daya saing daerah;
- b. Masih ada ketidaksesuaian dokumen antara kegiatan yang tertuang di dalam dokumen RKPD dan Penetapan APBD;

#### **7. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- a. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- b. Belum optimalnya strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya;

#### **8. Urusan Perpustakaan**

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat,
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka dalam memenuhi kebutuhan pembaca,
- c. Sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola layanan perpustakaan belum memenuhi standar kebutuhan;

#### **9. Urusan Kearsipan**

- a. Masih kurangnya tenaga kearsipan secara profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Belum semua SKPD melaksanakan pengelolaan arsip secara baku
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan/penyimpanan arsip/dokumentasi yang memadai.

#### **10. Urusan Sosial**

- a. Penanganan anak nakal yang dikirim ke Barehsos (balai rehabilitasi sosial) sebagian besar tidak menyelesaikan jangka waktu pembinaan/rehabilitasi sosialnya.
- b. Alih fungsi panti yang semula untuk penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di barehsos Wanodyatama Kendal beralih untuk penanganan Lanjut Usia Terlantar (LUT)
- c. Adanya perubahan masa pembinaan di PSPA (Panti Sosial Petirahan Anak) Bambu Apus Jakarta (dahulu 4 bulan sekarang 6 bulan) menyebabkan berkurangnya intensitas pengiriman dan jumlah peserta didik.

#### **11. Urusan Pertanian**

- a. Ketersediaan dan permintaan/kebutuhan pasar komoditas pertanian (misalnya gabah, cabai, bawang merah, tembakau dan lain-lain) yang tidak seimbang menyebabkan fluktuasi harga
- b. Menurunnya minat tenaga kerja di bidang pertanian disebabkan harga komoditas pertanian kurang kompetitif dan menjamurnya industri kayu lapis.
- c. Sebagian besar petani kopi tidak mentaati anjuran petik merah karena selisih harga yang tidak signifikan antara kopi petik merah dengan yang tidak.
- d. Kualitas produk tembakau belum optimal sesuai yang diharapkan karena petani masih banyak yang mencampurkan produk tembakau lokal dengan tembakau import.
- e. Infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jalan usaha tani) dan alat mesin pertanian belum merata di semua daerah.
- f. Jumlah ternak/sapi potong populasinya masih rendah walaupun potensinya besar
- g. Sarana prasarana belum menunjang optimalisasi balai penyuluhan.
- h. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Tenaga Penyuluh) baik kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten Temanggung
- i. Target/sasaran program/kegiatan harus lebih diperjelas sehingga tidak terjadi salah sasaran
- j. Penanganan lahan kritis masih perlu ditingkatkan
- k. Masih kurangnya kesadaran petani dalam berkelompok.

## **12. Urusan Perikanan**

Produksi ikan nila masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten temanggung sehingga harus impor dari daerah lain.

## **13. Urusan Ketahanan Pangan**

- a. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah apabila tidak diantisipasi dengan baik berpotensi menimbulkan kerawanan pangan (contoh: masa panen-masa tanam, daerah sentra-non sentra).
- b. Fluktuasi harga pada beberapa komoditas cukup tajam (pada tahun 2015 pada harga bawang merah dan cabai keriting).
- c. Skor PPH 2015 belum mencapai target yang diharapkan utamanya untuk tingkat konsumsi pangan hewani yang harganya relatif mahal dan cenderung semakin naik.
- d. Potensi pangan lokal serta produk olahannya belum optimal dimanfaatkan melalui gerakan secara menyeluruh.
- e. Perlu ditingkatkannya perhatian khusus pada masalah keamanan pangan, utamanya keamanan pangan segar seperti residu

pestisida/obat-obatan pada sayur dan buah, kandungan berbahaya pada ikan, yang selama ini belum tersentuh.

- f. Keterpaduan program antar SKPD terkait urusan ketahanan pangan belum optimal.
- g. Adanya bahan pangan yang kurang memenuhi aspek keamanan pangan;

#### **14. Urusan Penanaman Modal**

- a. Masih panjang dan lama waktu yang dibutuhkan bagi calon investor dalam mengurus perijinan penanaman modal sehingga menyebabkan biaya tinggi.
- b. Belum sinkronnya peraturan di daerah dan peraturan di pusat dimana aturan di pusat relatif sudah mempermudah investasi akan tetapi peraturan di daerah justru membuat calon investor batal dan mengalihkan investasinya ke Kabupaten/Kota lain.
- c. Payung hukum di daerah justru masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan sehingga aturan yang ada belum bisa memberikan kepastian dan menjadi tidak jelas.
- d. Belum adanya komitmen dan pemahaman dari SKPD terkait perijinan akan pentingnya investasi dalam meningkatkan laju ekonomi daerah.
- e. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi yang langsung bisa di akses calon investor tentang peluang dan potensi investasi di Kabupaten Temanggung termasuk penyiapan lahan;
- f. Kurang adanya sosialisasi aturan-aturan perizinan baik dari pusat dan daerah kepada masyarakat tentang perizinan dan penanaman modal;
- g. Kurang adanya infrastruktur yang mendukung bagi masuknya investasi.
- h. Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2015 relatif lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada inflasi, namun hal tersebut tetap menyisakan masalah yaitu rendahnya capaian target investasi dan angka kemiskinan yang masih 2 (dua) digit.

#### **15. Urusan Koperasi Dan UMKM**

- a. Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan pergerakan perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;
- b. Belum optimalnya peran kelembagaan desa, masih minimnya BUMdes,
- c. Masyarakat masih kurang mampu mengidentifikasi atau menentukan dan memahami kebutuhan dirinya dan belum mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya,

#### **16. Urusan Pariwisata**

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia para pelaku pariwisata masih rendah;
- c. Kurangnya komunikasi dan publisitas;
- d. Investasi yang belum berkembang di daerah;
- e. Strategi Promosi dalam pemasaran pariwisata belum optimal;
- f. Kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup dan daerah.

#### **17. Urusan Kebudayaan**

- a. Belum optimalnya pelestarian produk budaya (kesadaran masyarakat terhadap nilai dan peninggalan sejarah dan benda cagar budaya/BCB masih sangat kurang)
- b. Fasilitas bidang kebudayaan belum merata/belum sebanding dengan potensi yang ada
- c. Belum tersosialisasikannya kesenian unggulan daerah
- d. Pengembangan, ekskavasi dan pengelolaan situs liyangan belum bisa maksimal

#### **18. Urusan Pemuda Dan Olahraga**

- a. Masih sedikitnya prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang menangani kegiatan kepemudaan dan olahraga belum optimal karena adanya tumpang tindih tupoksi;
- c. Belum adanya jaminan kesejahteraan bagi atlet maupun mantan atlet di kabupaten Temanggung;
- d. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan prestasi kepemudaan dan olahraga.

#### **19. Urusan Otonomi Daerah**

- a. Kurangnya pemahaman obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga menghambat proses perbaikan penanganan administrasi SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut.
- b. Analisa Beban Kerja (ABK) yang minimal dilakukan review setiap 2 tahun sekali, sampai saat ini kegiatan ABK dilakukan terakhir kali pada tahun 2012.
- c. Analisa Jabatan (Anjab) sampai saat ini baru dilakukan pada pejabat struktural, sedangkan analisa jabatan pada staf belum dilaksanakan.
- d. Jabatan staf fungsional umum belum diberi nama-nama jabatan. Peraturan Bupati tentang nomenklatur jabatan telah diserahkan kepada BKD untuk ditindaklanjuti.
- e. Belum diketahuinya potensi Pendapatan Asli Daerah;
- f. Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi;

- g. Pengelolaan barang milik daerah belum optimal;
- h. Tidak tercapainya target kegiatan pengangkatan PNS, karena beberapa persyaratan pengangkatan masih belum tercukupi, antara lain STTPL diklat prajabatan belum terbit, Penilaian Prestasi Kerja pegawai masih dalam proses penetapan.
- i. Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan karir PNS, dari 2 paket pelaksanaan PCAP belum dilaksanakan karena ada perpanjangan batas usia pensiun (BUP) sehingga tidak ada jabatan eselon II yang kosong, PCAP dilaksanakan untuk pengisian jabatan eselon II.
- j. Jumlah pengiriman raperda dari eksekutif belum sesuai dengan target program Badan Pembentukan Perda DPRD yang telah diseapakati bersama;
- k. Hasil evaluasi/klarifikasi dari Gubernur/Kementrian memerlukan waktu cukup lama sampai dengan penerimaan di DPRD.

## **20. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri**

- a. Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi,
- b. Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan politik,
- c. Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula;
- d. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah;

## **21. Urusan Lingkungan Hidup**

- a. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam hal proses pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, disisi lain semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengolahan persampahan, terutama wilayah Kabupaten Temanggung bagian utara belum tersedia TPA (Tempat pemrosesan Akhir)
- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair ke air.

## **22. Urusan Keluarga Berencana**

- a. Anggaran penggerakan untuk kader utamanya kader KB di desa terbatas;
- b. Banyaknya pegawai yang pensiun 2016-2017 belum diganti;

- c. Permintaan data pra sejatera sampai Keluarga Sejahtera I sudah tidak ditangani oleh KBPP namun permintaan data dan validasi masih di KBPP;

### **23. Urusan Pekerjaan Umum**

- a. Belum optimalnya proses pelaksanaan pekerjaan dari waktu pelelangan sampai dengan pelaksanaan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum.

### **24. Urusan Penataan Ruang**

- a. Semakin tumbuhnya sektor industri yang bisa mengakibatkan banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- b. Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang belum diiringi dengan kesadaran ketaatan pemanfaatan ruang.

### **25. Urusan Perumahan**

- a. Masih adanya kawasan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh
- b. Kurangnya sarana prasarana lingkungan pemukiman seperti MCK (Mandi Cuci kakus), SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), air bersih dan jalan lingkungan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi masih cukup tinggi.
- d. Masih rendahnya cakupan pelayan bencana kebakaran di wilayah kabupaten Temanggung.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

### **26. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan

### **27. Urusan Perhubungan**

- a. Semakin bertambahnya kendaraan wajib uji yang menyebabkan lahan wajib uji kendaraan berkurang.
- b. Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas ruang jalan yang mencukupi sehingga menyebabkan semakin buruknya kinerja ruas jalan maupun persimpangan.
- c. Berbagai permasalahan muncul di bidang angkutan umum mulai dari kualitas pelayanan yang buruk, perilaku pegemudi yang kurang baik, pelayan administrasi perijinan, dan lain-lain perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

### **28. Urusan Komunikasi dan Informasi (Kominfo)**

- a. Kendala dalam hal pembuatan regulasi perijinan pos karena muncul Peraturan Menteri baru yang menarik kewenangan perijinan kabupaten maupun propinsi ke pusat.
- b. Penarikan retribusi menara telekomunikasi dilakukan oleh KP3M sedangkan monitoring (pengawasan dan pengendalian) dilakukan oleh Dishubkominfo.
- c. Peralatan jaringan yang berada di SKPD riskan dengan kerusakan force majeure.
- d. Belum adanya regulasi implementasi teknologi informasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- e. Belum terintegrasinya aplikasi sistem informasi pemerintah daerah secara keseluruhan.
- f. Masih minimnya wawasan tentang keamanan informasi di SKPD Kabupaten Temanggung.
- g. Sumber Daya Manusia pengelola bidang teknologi informasi butuh pengembangan wawasan, diharapkan bisa swakelola melaksanakan tupoksi Bidang Teknologi Informasi tanpa bergantung pada pihak ketiga.
- h. Pelaksanaan kegiatan distribusi berita berupa Press Release tidak semuanya bisa diterbitkan di media massa. Hal ini dikarenakan setiap media massa mempunyai kebijakan sendiri dalam pelaksanaan penerbitan suatu berita.
- i. SMS Gateway kabupaten Temanggung yang telah diluncurkan sejak tahun 2015 telah mendapat respon yang sangat bagus dari masyarakat (banyak aduan, permintaan, saran/masukan dan pemberian informasi), akan tetapi respon dari admin SKPD masih minim dalam menjawab semua sms yang masuk ke masing-masing SKPD.
- j. Perlunya peningkatan SDM di bagian humas, baik untuk tenaga photographer, pembuat berita dan pembuat design grafis.

## **29. Urusan Kependudukan**

- a. Dalam pengelompokan umur, data Dindikcapil / Kemendagri tidak sama dengan permintaan dari SKPD (Bappeda dan lainnya), karena interval pengelompokan umur berbeda sehingga Dindikcapil kesulitan dalam memberikan data yang diminta.
- b. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dirasa belum valid karena data mengambil dari data kartu keluarga (KK), sedangkan data pada KK yang terbit per 5 tahun tidak selalu diperbaharui oleh masyarakat. Misalnya pada KK yang terbit 5 tahun lalu data anak dengan tingkat pendidikan SD, akan tetapi data tidak diubah sehingga walaupun anak sudah SMA masih saja terekam sebagai SD.

#### **D. Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor lain yang diperlukan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Berikut adalah isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu:

##### **1. Urusan Pendidikan**

- a. Penyediaan pelayanan PAUD yang berkualitas, melalui peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin; peningkatan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; pemenuhan standar pelayanan PAUD; peningkatan koordinasi antar sektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif.
- b. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, dilakukan dengan cara menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk membiayai pengeluaran yang tidak diakomodasi BOS Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu.
- c. Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, dilakukan dengan cara menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan; menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk membiayai pengeluaran yang tidak diakomodasi BOS Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta memberikan serta memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu; menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah; meningkatkan peran masyarakat/swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dilakukan dengan cara menyalurkan ketersediaan bidang studi SMK dengan kebutuhan



- dunia kerja; mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; memperbanyak tempat uji kompetensi siswa SMK.
- e. Peningkatan keterampilan kerja, penguatan pendidikan masyarakat, dan pengentasan buta aksara antara lain dilakukan dengan cara menyelenggarakan pendidikan keaksaraan; menyelenggarakan proses akreditasi terhadap lembaga pelatihan dan kursus; menyelaraskan pengembangan lembaga pelatihan dan kursus dengan kebutuhan dunia kerja.
  - f. Peningkatan kualitas, kompetensi, profesionalisme, dan ketersediaan guru dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualifikasi akademik guru; memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan; menyediakan tempat yang memadai untuk penguatan kompetensi guru; pengangkatan guru non PNS yang memenuhi persyaratan menjadi guru PNS.

## **2. Urusan Kesehatan**

- a. Rasio dokter dan tenaga paramedic terhadap jumlah pasien tidak seimbang;
- b. Masih adanya persepsi negatif atas pelayanan kesehatan di RSUD kabupaten Temanggung;
- c. Sarana dan Prasarana kesehatan belum memenuhi standar;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan;
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Bekerjanya Sistem Informasi Rumah Sakit dalam RSUD Kabupaten Temanggung sehingga resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran Rumah Sakit.

## **3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa memiliki pelimpahan kewenangan maka semua kegiatan harus menyesuaikan. Dalam hal ini kewenangan yang telah dilimpahkan ke desa menjadi bagian mutlak yang harus dilaksanakan oleh desa dan tidak boleh diambil oleh Pemerintahan Kabupaten.
- b. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang disalurkan untuk kegiatan Desa, maka perlu diperkuat dengan

kegiatan fasilitasi baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

- c. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Desa, sampai dengan 2 tahun berjalannya Perundang-undangan ini masih banyak turunan aturan berupa Peraturan Menteri baik Kemendagri maupun Kemendes yang belum berjalan. Sehingga di daerah belum bisa melaksanakan kegiatan secara optimal.

#### **4. Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Kurang siapnya mental pencari kerja lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja;
- b. Lowongan kerja perusahaan lebih menasar pada fresh graduate dan batasan usia lowongan kerja maksimal 35 tahun sehingga sangat menyulitkan pencari kerja korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang mayoritas berusia lebih dari 40 tahun
- c. Belum adanya kerjasama penyaluran pekerjaan setelah mengikuti kursus;
- d. Perbaikan website dan pelatihan bagi personel pengelola website;
- e. Terintegrasinya informasi ketenagakerjaan dalam satu web/aplikasi
- f. Bonus demografi/besarnya penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan dampak berdampak negatif jika tidak berkualitas antara lain pengangguran semakin banyak, kemiskinan membesar, sempitnya lapangan pekerjaan, pendidikan rendah sehingga SDM rendah, kualitas kesehatan dapat menurun yang berakibat perekonomian menurun.

#### **5. Urusan Transmigrasi**

- a. Lahan transmigrasi tidak sesuai dengan MoU, yang seharusnya adalah tanah pekarangan seluas 0,25 Ha yang diperoleh oleh calon transmigran.
- b. Lahan transmigrasi bersengketa dengan PT Perkebunan setempat.
- c. Lokasi lahan jauh dengan desa dan merupakan lahan pasang surut.

#### **6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

- a. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan Iptek dalam meningkatkan daya saing daerah;
- b. Masih ada ketidaksesuaian dokumen antara kegiatan yang tertuang di dalam dokumen RKPD dan Penetapan APBD;

#### **7. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- a. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,

- b. Belum optimalnya strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya;

#### **8. Urusan Perpustakaan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umum Kabupaten Temanggung
- b. Belum berkembangnya perpustakaan desa sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan;
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat,
- d. Terbatasnya kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka dalam memenuhi kebutuhan pembaca,
- e. Sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola layanan perpustakaan belum memenuhi standar kebutuhan;

#### **9. Urusan Kearsipan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan dokumentasi karena belum ada tenaga yang profesional di bidangnya;

#### **10. Urusan Sosial**

- a. Optimalisasi peran dan peningkatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- b. Optimalisasi pelaksanaan KUBE yang berkelanjutan
- c. Memfokuskan kepada pencegahan dan kesiapsiagaan, melalui pemasangan Early Warning System, mitigasi bencana terutama daerah rawan bencana longsor dan kekeringan

#### **11. Urusan Pertanian**

- a. Masih belum optimalnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
- b. Perubahan Musim dan Gangguan Hama Penyakit Tanaman
- c. Belum optimalnya penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
- d. Pengelolaan kawasan lindung dan di luar kawasan lindung pada daerah aliran sungai (DAS) belum optimal, terindikasi masih luasnya lahan kritis.
- e. Lemahnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan kehutanan disebabkan tidak adanya kewenangan pengelolaan hutan daerah.
- f. Rendahnya produktivitas sumber daya hutan.
- g. Potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum dikembangkan secara optimal.
- h. Perlindungan dan penumbuhan sumber mata air.
- i. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

- j. Rendahnya pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan sehingga masih bersifat tradisional dan kurang memperhatikan kaidah budi daya berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- k. Pola pikir petani tembakau yang masih konservatif terkait dengan masalah konservasi;
- l. Ketersediaan bahan organik di areal tembakau sudah sangat kritis.

#### **12. Urusan Perikanan**

- a. Produksi ikan nila masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten temanggung sehingga harus impor dari daerah lain.

#### **13. Urusan Ketahanan Pangan**

- a. Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menuntut daya saing produk, termasuk produk pangan baik segar maupun olahan;
- b. Isu lingkungan perlu mendapat perhatian misal : iklim ekstrim dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan, pangan dari habitat tercemar perlu diwaspadai, akumulasi logam berat/zat berbahaya lain pada ikan dari perairan tercemar, keamanan pangan pada produk pangan transgenic dan lain-lain;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran menyebabkan daya beli pangan berkualitas belum memenuhi standar harapan.

#### **14. Urusan Penanaman Modal**

- a. Adanya dorongan dari peraturan perundangan maupun dari masyarakat agar pelayanan masyarakat menjadi satu pintu;
- b. Adanya deregulasi dari pemerintah pusat atas aturan-aturan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat dalam hal percepatan investasi;
- c. Kompetisi antar daerah (kabupaten/kota dalam hal menarik investor dengan adanya kemudahan ijin, insentif pajak maupun kemudahan lahan;
- d. Pelayanan di bidang penanaman modal kadang terhambat dengan lokasi usaha yang direncanakan calon investor karena tidak sesuai dengan RTRW.
- e. Rendahnya angka capaian investasi di kabupaten Temanggung

#### **15. Urusan Koperasi Dan UMKM**

- a. Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan pergerakan perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;
- b. Belum optimalnya peran kelembagaan desa, masih minimnya BUMdes,

- c. Masyarakat masih kurang mampu mengidentifikasi atau menentukan dan memahami kebutuhan dirinya dan belum mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada dirinya,

#### **16. Urusan Perdagangan**

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dimana disebutkan bahwa tiap-tiap daerah diberi kewenangan untuk membentuk UPT Metrologi . Sebagai tindak lanjut ke depan dalam rangka terbentuknya UPT Metrologi akan dikirimkan personil untuk dididik sebagai penera/pengamat tera di Balai Diklat Direktorat Metrologi Bandung.

#### **17. Urusan Pariwisata**

- a. Belum optimalnya sinergitas program pembangunan pariwisata lintas sektor;
- b. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
- c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- d. Belum adanya investor yang berminat untuk melakukan investasi di bidang pariwisata di Kabupaten Temanggung;

#### **18. Urusan Kebudayaan**

- a. Menurunnya nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan pada masyarakat;
- b. Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan benda-benda budaya dan cagar budaya;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional

#### **19. Urusan Pemuda Dan Olahraga**

- a. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kapasitas anggotanya, khususnya dalam memberikan kemandirian dan kecakapan hidup;
- b. Masih terbatasnya sumberdaya manusia dalam pemasyarakatan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- c. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan pemuda;
- d. Kurangnya fasilitasi, penghargaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta peran swasta dalam pengembangan pemuda dan olahraga

#### **20. Urusan Otonomi Daerah**

- a. Program kerja pengawasan lebih mengutamakan pengawasan tematik atas dasar isu-isu yang berkembang saat ini. Pengawasan reguler

- untuk sasaran yang ditujukan peningkatan pengelolaan keuangan dan dukungan mempertahankan opini BPK-RI;
- b. Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan;
  - c. RKA yang dibuat SKPD masih sering ada yang belum sesuai dengan PPAS;
  - d. Upaya mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Temanggung;
  - e. Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan dan beberapa kepemilikan asset belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
  - f. Dengan software SIAK Akrual yg baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dalam implementasinya;
  - g. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
  - h. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan struktur organisasi di tingkat Pemerintahan Daerah. Akan tetapi sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut belum keluar, sehingga Pemerintah Daerah hanya bisa melakukan pemetaan terhadap tipologi-tipologi Dinas/Badan/Kantor. Pemetaan tersebut dilakukan dengan cara mengisi indikator-indikator pada aplikasi yang telah ditentukan oleh Kemendagri. Batas maksimal pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 dimaksud adalah 2 tahun dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Oktober 2016.
  - i. Tentang perubahan Peraturan Kepegawaian dengan terbitnya Undang-Undang ASN;
  - j. Reformasi Birokrasi bidang SMD Aparatur.

## **21. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri**

- a. Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi,
- b. Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan politik,
- c. Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula;
- d. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah;

## **22. Urusan Lingkungan Hidup**

- a. Meningkatnya beban pencemaran dari domestik (pencemaran dari limbah rumah tangga), industri dan kegiatan usaha lain baik berskala

- besar, menengah, maupun kecil;
- b. Meningkatnya volume timbunan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk;
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan;
  - d. Promosi Program 3 R (Reuse, Recycle, Reduce) dan Bank Sampah ke masyarakat untuk menciptakan Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu (TPST) 3R, sehingga sampah bisa tereduksi di sumbernya dan memperpanjang umur TPA;
  - e. Peningkatan kualitas lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah pada tempat sesuai jenisnya;
  - f. Untuk meminimalisir dampak TPA ke lingkungan maka diperlukan pengoperasian TPA sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu dengan metode control landfill dan juga pengolahan air limbah sampah (leachet) semaksimal mungkin sudah sesuai baku mutu.

### **23. Urusan Keluarga Berencana**

- a. Anggaran penggerakan untuk kader utamanya kader KB di desa terbatas;
- b. Banyaknya pegawai yang pensiun 2016-2017 belum diganti;
- c. Permintaan data pra sejatera sampai Keluarga Sejahtera I sudah tidak ditangani oleh KBPP namun permintaan data dan validasi masih di KBPP;

### **24. Urusan Pekerjaan Umum**

- a. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan diarahkan pada penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri;
- b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan harus didukung sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya
- c. Pembangunan jalan dan jembatan mempunyai peranan penting mengingat sebagian masyarakat tinggal di daerah pedesaan, kebijakan pembangunan ke depan harus berbasis pada penyediaan

infrastruktur pedesaan seperti peningkatan kualitas pada jalur perekonomian antar desa dan antar desa – kota se kecamatan.

#### **25. Urusan Penataan Ruang**

- a. Semakin tumbuhnya sektor industri yang bisa mengakibatkan banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- b. Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang belum diiringi dengan kesadaran ketaatan pemanfaatan ruang.

#### **26. Urusan Perumahan**

- a. Masih adanya kawasan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh
- b. Kurangnya sarana prasarana lingkungan pemukiman seperti MCK (Mandi Cuci kakus), SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), air bersih dan jalan lingkungan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi masih cukup tinggi.
- d. Masih rendahnya cakupan pelayan bencana kebakaran di wilayah kabupaten Temanggung.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

#### **27. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

- a. Perlunya regulasi tentang pengelolaan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan;
- b. Perubahan peruntukan lahan pertanian ke pertambangan penambangan batu alam tanpa melakukan prosedur perijinan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengusaha tambang bahan penambangan batu alam tentang peraturan perundangan dan upaya pemulihan bekas areal penambangan;
- d. Belum terpadunya koordinasi antar instansi terkait penerapan peraturan pengelolaan pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan.

#### **28. Urusan Perhubungan**

- a. Terminal Type B (Madureso) menjadi asset provinsi mulai tahun 2016 nanti.
- b. Terminal Parakan belum ada penggantinya.
- c. Berkurangnya anggaran DAK dan Ban-Gub 2016 (tidak turun) menyebabkan fasilitas perlengkapan jalan dan renovasi terminal type C belum terpenuhi akibatnya berpengaruh pada capaian kinerja.
- d. Pembinaan bengkel kendaraan dan karoseri sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tentang Kendaraan ( Kelaikan, Keselamatan Jalan )



- e. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 tentang Penyelenggaraan Analisis dampak lalu lintas maka setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas wajib untuk dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan criteria minimal analisis dampak Lalu Lintas yang dipersyaratkan dan diatur dalam lampiran Keputusan Menteri dimaksud.
- f. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana point 1 (satu) diatas diberikan berdasarkan status jalan (Nasional oleh Menteri Perhubungan, Provinsi oleh Gubernur, Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota) dipertegas dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan pemberi persetujuan Andalalin diberikan berdasarkan status jalan.
- g. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek maka perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

**29. Urusan Komunikasi dan Informasi (Kominfo)**

- a. Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan pembagian urusan, maka bidang Kominfo menjadi dinas tersendiri terpisah dari Dinas Perhubungan. Sub urusan POS dan Telekomunikasi menjadi kewenangan pusat tetapi selama tidak bertentangan dengan pusat dapat dijalankan di daerah.
- b. Isu strategis yang ada pada Bagian Humas saat ini adalah akan dibangunnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) TV Temanggung yang akan mulai dibangun pada tahun 2016 ini. Dengan adanya LPPL TV Temanggung diharapkan akan mampu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif kepada masyarakat, di tengah gempuran arus informasi yang sangat deras saat ini. LPPL TV juga diharapkan menjadi jembatan yang strategis antara Pemerintah dengan masyarakat sehingga akan terjalin suatu hubungan yang harmonis.
- c. Penyempurnaan Pusat Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Mengoptimalkan implementasi e-Government sesuai dengan visi dan misi pimpinan daerah.

### **30. Urusan Kependudukan**

- a. Perekaman data kependudukan saat ini hanya bagi warga yang berumur 17 tahun ke atas/sudah kawin;
- b. Masih banyak warga yang memandang bahwa akta kelahiran hanya dipergunakan untuk persyaratan sekolah dan atau mencari pekerjaan;
- c. Sebagian warga masyarakat berpendapat bahwa akta kematian hanya dipergunakan pada golongan non pribumi, sedangkan pribumi hanya mengurus dengan surat kematian dari desa/kelurahan.

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada :

- Sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Sektor-sektor yang potensial untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- Sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja.

#### **1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Nilai Investasi serta Tenaga Kerja.

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari

besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 3.1.  
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %
2010	5.069.020,30	12,58	2.409.386,40	4,31
2011	5.603.983,71	10,55	2.521.439,02	4,65
2012	6.198.351,81	10,61	2.648.488,46	5,04
2013	6.915.876,33	11,58	2.781.320,87	5,02
2014	7.679.241,74	11,04	2.917.973,80	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Pada tahun 2014 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Temanggung secara agregat sebesar 7.679.241,74 juta rupiah. Dengan angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 6.915.876,33 juta rupiah sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 11,04 persen. Pertumbuhan PDRB Atas dasar harga berlaku sebesar 11,04 persen belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB Atas dasar harga konstan tahun 2010. Berdasarkan PDRB Atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2014 sebesar 4,91 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,02 persen.

Dari Tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku adalah tahun 2010 yang mencapai 12,58 persen, sedangkan pertumbuhan terendah 10,55 persen terjadi pada tahun 2011. Sedangkan untuk PDRB Atas dasar harga konstan tampak bahwa pertumbuhan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung turun 0,02 persen dari tahun sebelumnya dan di tahun 2014 pertumbuhannya kembali turun menjadi 4,91 persen. Prediksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 diperkirakan 5,17 persen sedangkan Tahun 2016 diperkirakan 5,18 persen dan pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,20 persen.

Tabel 3.2.  
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah  
dan Nasional Tahun 2010 – 2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2010	4,31	5,84	6,10
2011	4,65	6,01	6,46
2012	5,04	6,34	6,23
2013	5,02	5,81	5,78
2014	4,91	5,42*)	5,02*)

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,42 persen. Demikian juga bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih lebih rendah. Hal ini terjadi karena perekonomian Kabupaten Temanggung adalah perekonomian agraris. Sehingga jika kontribusi produksi pertanian turun secara signifikan maka dimungkinkan pertumbuhannya juga akan mempunyai kecenderungan untuk turun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 3.3.  
Pertumbuhan Ekonomi per Sektor  
Tahun 2010 – 2014 (persen)

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	3,66	0,70	5,11	2,48	2,49
2. Pertambangan dan Penggalian	-5,76	-6,58	-9,44	2,09	3,39
3. Industri Pengolahan	3,78	6,28	4,36	6,36	5,19
4. Listrik dan Air Bersih	8,86	5,76	9,14	7,42	4,87
5. Bangunan	2,80	5,31	8,21	5,23	5,43
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	3,74	4,74	4,50	7,03	7,58
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,20	9,72	4,92	5,61	5,68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush	4,10	7,37	5,75	9,75	7,51
9. Jasa-jasa	7,29	8,18	5,61	4,41	5,00
Pertumbuhan PDRB	4,31	4,65	5,04	5,02	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Pada tabel 3.3 diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 semua sektor tumbuh positif. Dari sembilan sektor yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, ada enam sektor yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Temanggung yang sebesar 4,91 persen, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang mencapai 7,58 persen, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang sebesar 7,51 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 5,68 persen, sektor Bangunan 5,43 persen, sektor Industri Pengolahan 5,19 persen dan sektor Jasa-jasa yang sebesar 5,00 persen. Tiga sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten adalah sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 4,87 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian 3,39 persen dan sektor Pertanian yang tumbuh 2,49 persen.

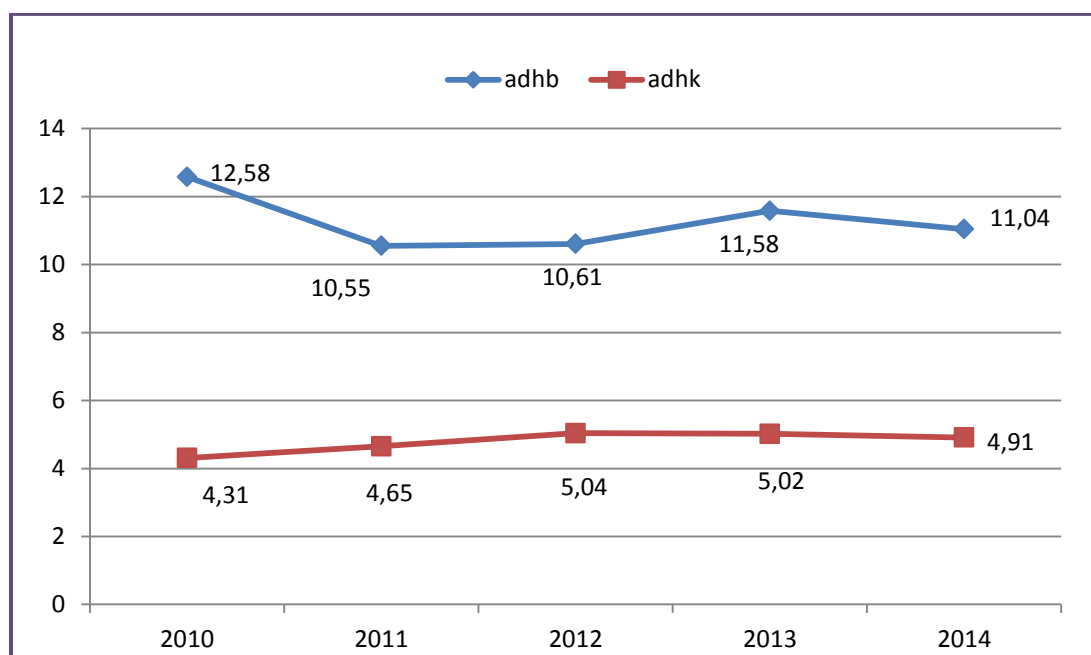
Sektor Pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 2,49 persen dan pertumbuhannya hampir sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 2,48 persen. Di tahun 2014 semua sub sektor dalam sektor Pertanian mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub sektor Peternakan dan hasil-hasilnya yang tumbuh sebesar 4,97 persen sedangkan pertumbuhan terendah dialami oleh sub sektor Perikanan yang hanya tumbuh sebesar 1,69 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan yang tumbuh sebesar 2,03 persen disusul kemudian sub sektor Kehutanan dan Tanaman Perkebunan masing-masing tumbuh sebesar 2,02 persen dan 1,80 persen.

Tabel 3.4.  
Pertumbuhan Sektor dan Sub Sektor Tahun 2014

No	SEKTOR/SUBSEKTOR	adhb	adhk
<b>1</b>	<b>Pertanian</b>	6,39	2,49
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	6,17	2,03
	1.2 Tanaman Perkebunan	5,94	1,80
	1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	7,72	4,97
	1.4 Kehutanan	6,37	2,02
	1.5 Perikanan	6,12	1,69
<b>2</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	11,46	3,39
<b>3</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	5,19	NA
<b>4</b>	<b>Listrik dan Air Bersih</b>	11,18	4,87
	4.1 Listrik	-	-
	4.2 Air Minum	-	-
<b>5</b>	<b>Bangunan/Konstruksi</b>	12,35	5,43
<b>6</b>	<b>Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan</b>	13,61	7,58
	6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	12,98	7,80
	6.2 Hotel	12,23	5,86
	6.3 Rumah Makan	16,46	6,68
<b>7</b>	<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	-	-
	7.1 Pengangkutan	13,35	2,54
	7.1.1 Angkutan Jalan Raya	-	-
	7.2 Komunikasi	15,26	13,45
	7.2.1 Pos dan Giro	-	-

No	SEKTOR/SUBSEKTOR	adhb	adhk
	7.2.2 Telekomunikasi	-	-
<b>8</b>	<b>Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	14,63	7,51
	8.1 Bank	-	-
	8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
	8.2.1 Asuransi	-	-
	8.2.2 Koperasi Simpan Pinjam	-	-
	8.2.3 Pegadaian	-	-
	8.3 Sewa Bangunan	-	-
	8.4 Jasa Perusahaan	-	-
<b>9</b>	<b>Jasa-jasa</b>	11,56	5,00
	9.1 Jasa Pemerintahan	10,96	4,68
	9.2 Jasa Sosial Kemasyarakatan	12,67	6,45
	9.3 Jasa Hiburan	11,89	7,26
	9.4 Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	16,91	5,76

Grafik 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2009 hingga 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung selalu tumbuh positif di atas 4 persen. Pertumbuhan paling tinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu mencapai 5,04 persen, dan pada tahun 2013 sedikit melambat dengan laju sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung kembali melambat yaitu hanya sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak

langsung terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

#### **b. Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi sektoral terhadap PDRB secara keseluruhan. Distribusi sektoral ini juga menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di suatu daerah.

Angka agregat PDRB terbentuk dari berbagai kegiatan sektor ekonomi, mengikuti perjalanan waktu dan adanya perubahan faktor internal maupun eksternal. Perubahan teknologi, keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perubahan orientasi kebijakan pemerintah maupun perubahan ekonomi nasional dan internasional akan sangat berpengaruh terhadap kinerja tiap sektor ekonomi. Akibatnya, perkembangan output tiap sektor akan berbeda satu dengan yang lainnya sehingga distribusi sektor ekonomi dalam komposisi PDRB juga mengalami pergeseran.

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Temanggung, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB. Hal ini dapat dilihat pada persentase distribusi PDRB menurut sektor baik menurut harga berlaku maupun harga konstan, dimana sektor Pertanian menyumbang di atas 30 persen dari nilai total PDRB dan sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 18 persen. Tabel Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014 (persen) dapat dilihat pada tabel 3.4.

Pada tahun 2014, sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor Pertanian sebesar 30,69 persen. Sehingga jika produksi Pertanian mengalami kenaikan secara signifikan maka dimungkinkan besaran PDRB juga akan mengalami kenaikan demikian juga apabila produksi sektor Pertanian mengalami penurunan maka besaran PDRB mempunyai kecenderungan untuk turun. Di tahun 2014 peranan sektor Pertanian yang sebesar 30,69 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2013 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,03 persen. Perhatian yang besar pada sektor Pertanian ini sangat diperlukan demi kesejahteraan dan



kemakmuran, serta terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.5  
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (persen)

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	33,11	32,75	32,57	32,03	30,69
2. Pertambangan dan Penggalian	1,05	0,96	0,86	0,85	0,85
3. Industri Pengolahan	17,68	17,26	17,61	17,80	18,34
4. Listrik dan Air Bersih	1,05	1,05	1,06	1,09	1,09
5. Bangunan	5,60	5,52	5,60	5,61	5,67
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	16,64	16,63	16,63	16,78	17,17
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,23	5,28	5,16	5,20	5,33
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush.	4,11	4,23	4,19	4,38	4,52
9. Jasa-Jasa	15,53	16,32	16,32	16,26	16,34
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor Industri Pengolahan 18,34 persen dan diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan dengan memberikan andil sebesar 17,17 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 0,85 persen.

Dari tabel 3.4 struktur ekonomi Kabupaten Temanggung di atas terlihat bahwa ke sembilan sektor selama lima tahun terakhir memperlihatkan peranannya dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Namun selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa kontribusi sektor Pertanian memiliki kecenderungan menurun, sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan yang relatif kecil.

Sektor yang mengalami kenaikan cukup signifikan dalam kontribusi PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2014 adalah sektor Industri Pengolahan dengan kenaikan kontribusi sebesar 0,54 persen dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, masih dalam posisi yang sama.

Menurut harga konstan, andil terbesar pada PDRB tahun 2014 adalah sektor Pertanian sebesar 28,46 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memberikan sumbangan sebesar 29,13 persen. Andil terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yang memberikan sumbangan sebesar 20,26 persen. Sektor berikutnya

adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang memberikan sumbangan sebesar 17,78 persen mengalami peningkatan 0,44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memberikan andil sebesar 17,34 persen. Andil terkecil diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi 0,65 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung Atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6  
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 - 2014 (persen)

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	31,00	29,83	29,85	29,13	28,46
2. Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,79	0,68	0,66	0,65
3. Industri Pengolahan	19,78	20,09	19,96	20,21	20,26
4. Listrik dan Air Bersih	0,95	0,96	1,00	1,03	1,03
5. Bangunan	5,24	5,27	5,43	5,44	5,47
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	17,08	17,10	17,01	17,34	17,78
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,71	5,98	5,98	6,01	6,05
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush.	3,94	4,04	4,06	4,25	4,35
9. Jasa-jasa	15,41	15,94	16,03	15,93	15,95
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

Bila kesembilan sektor tersebut dibagi menurut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier, dengan rincian sebagai berikut : Kelompok Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian), Kelompok Sekunder (Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik dan Air Bersih, Sektor Bangunan) dan Kelompok Tersier (Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-jasa), maka tabel di bawah ini memperlihatkan distribusi persentase menurut kelompok sektor PDRB .

Tabel 3.7.  
Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 – 2014

Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>					
Kelompok Primer	34,16	33,71	33,43	32,88	31,54
Kelompok Sekunder	24,33	23,83	24,27	24,50	25,10
Kelompok Tersier	41,51	42,46	42,30	42,62	43,36
PDRB	100	100	100	100	100
<b>Atas Dasar Harga Konstan</b>					
Kelompok Primer	31,89	30,62	30,53	29,79	29,11
Kelompok Sekunder	25,97	26,32	26,39	26,68	26,76
Kelompok Tersier	42,14	43,06	43,08	43,53	44,13
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015

Jika dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun 2013 baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tidak banyak terjadi pergeseran kontribusi. Berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan pada kelompok primer terjadi penurunan kontribusi. Untuk harga berlaku kontribusi kelompok ini turun sebesar 1,34 persen, dan untuk harga konstan turun sebesar 0,68 persen. Sedangkan kelompok tersier dan kelompok sekunder kontribusinya mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku kelompok sekunder meningkat sebesar 0,60 persen dan kelompok tersier meningkat sebesar 0,74 persen. Sedangkan berdasarkan harga konstan kelompok sekunder meningkat sebesar 0,08 persen dan kelompok tersier meningkat sebesar 0,60 persen.

### c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.  
PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya  
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas dasar Harga Konstan	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	7.064.501,89	11,55	3.357.870,71	3,35
2011	7.738.502,63	9,54	3.481.837,83	3,69
2012	8.482.526,56	9,61	3.624.491,54	4,10
2013	9.381.988,23	10,60	3.773.103,86	4,10
2014	10.392.591,49	10,77	3.948.997,92	4,66

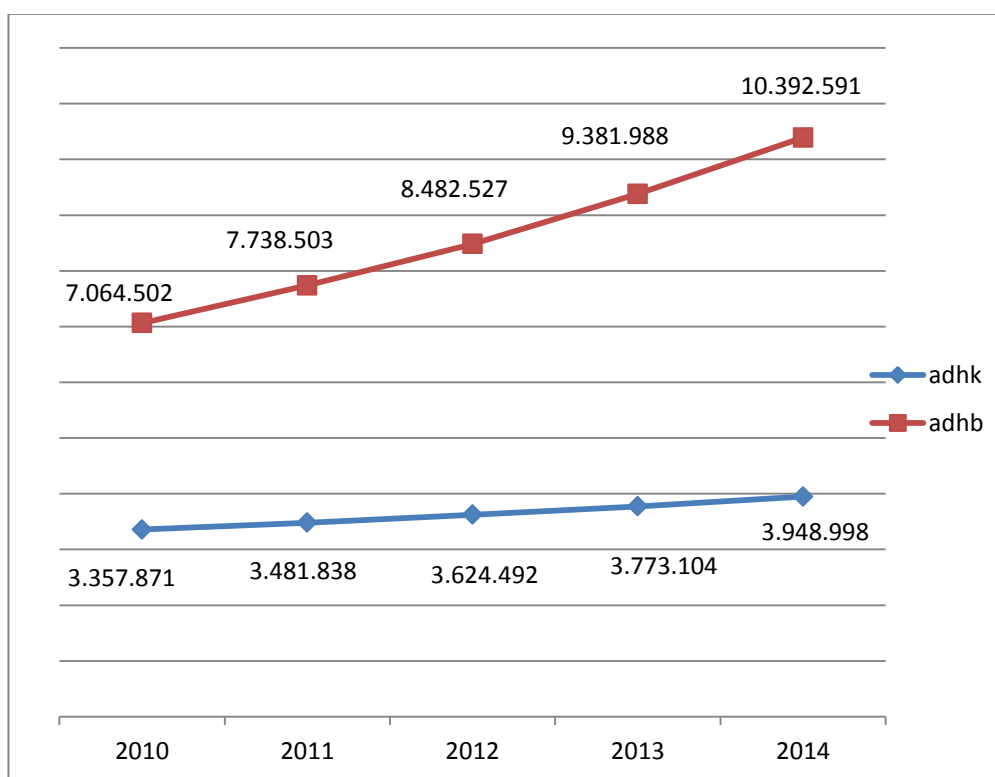
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015

Menurut harga berlaku kenaikan harga dan output dari berbagai barang dan jasa dari beberapa sektor ekonomi telah meningkatkan PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama ini selalu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 PDRB perkapita Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 10.392.591,49 rupiah. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,77 persen dibandingkan PDRB perkapita tahun 2013 yang sebesar 9.381.988,23 rupiah. Sedangkan menurut harga konstan, besarnya PDRB perkapita tahun 2014 tumbuh sebesar 4,66 persen sehingga

mencapai 3.948.997,92 rupiah meningkat dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 3.773.103,86 rupiah.

Jika memperhatikan tabel dan grafik perkembangan PDRB perkapita dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita selalu naik yang menandakan bahwa kemakmuran penduduk Kabupaten Temanggung semakin meningkat. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Grafik 3.2 di bawah ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

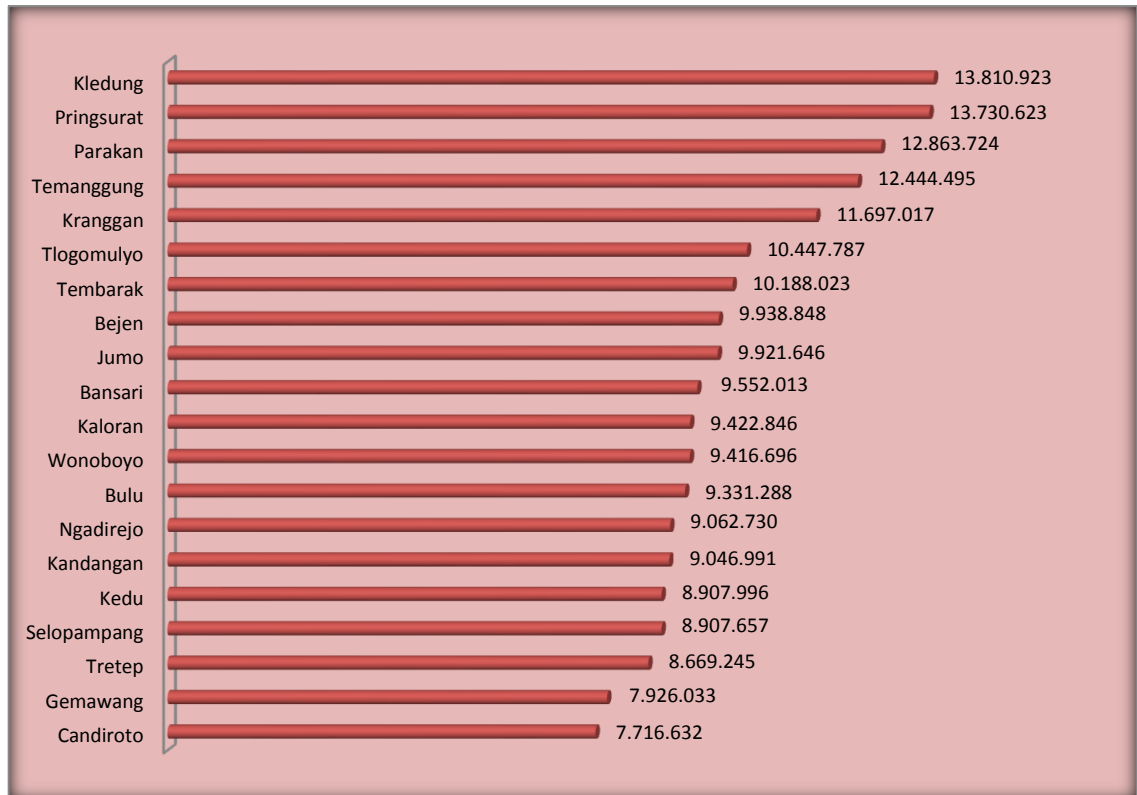
Grafik 3.2  
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015

Pada tahun 2014 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, kecamatan dengan PDRB perkapita terbesar dicapai oleh Kecamatan Kledung dengan besaran 13.810.922,87 rupiah, sedangkan kecamatan dengan PDRB perkapita terendah adalah Kecamatan Candiroto yaitu sebesar 7.716.631,90 rupiah.

**Grafik 3.3**  
Peringkat PDRB perkapita Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (data diolah)

Ada enam kecamatan yang nilai PDRB perkapitanya berada di atas PDRB perkapita kabupaten atau diatas 10.392.591,49 rupiah. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kledung, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Parakan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Tlogomulyo.

Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2014 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan yang positif, dengan variasi besaran pertumbuhan dari yang tertinggi sebesar 14,33 persen sampai yang terendah 9,07 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Kranggan sedangkan yang terendah dialami oleh Kecamatan Tlogomulyo. Secara keseluruhan se-Kabupaten Temanggung, pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2014 berada pada angka 11,04 persen.

#### **d. Indeks Perkembangan PDRB**

PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai 7.679.241,74 juta rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 2.917.973,80 juta rupiah. Nilai indeks perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 461,83 persen dan atas dasar harga konstan tercatat 175,49 persen. Nilai Indeks Perkembangan menggambarkan perkembangan secara agregat PDRB tahun berjalan terhadap tahun dasar 2000.

Hal ini berarti selama kurun waktu empat belas tahun terakhir nilai PDRB atas dasar harga berlaku secara agregat telah meningkat sebesar 461,83 persen atau meningkat 4,61 kali lipat PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000. Demikian juga nilai PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu empat belas tahun terakhir telah meningkat 175,49 persen atau meningkat 1,75 kali lipat nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk diketahui bahwa PDRB tahun 2000 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sebesar 1.662.794,54 juta rupiah.

Tabel 3.9.  
Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010– 2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)	Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2010	5.069.020,30	304,85	2.409.386,40	144,90
2011	5.603.983,71	337,02	2.521.439,02	151,64
2012	6.198.351,81	372,77	2.648.488,46	159,28
2013	6.915.876,33	415,92	2.781.320,87	167,27
2014	7.679.241,74	461,83	2.917.973,80	175,49

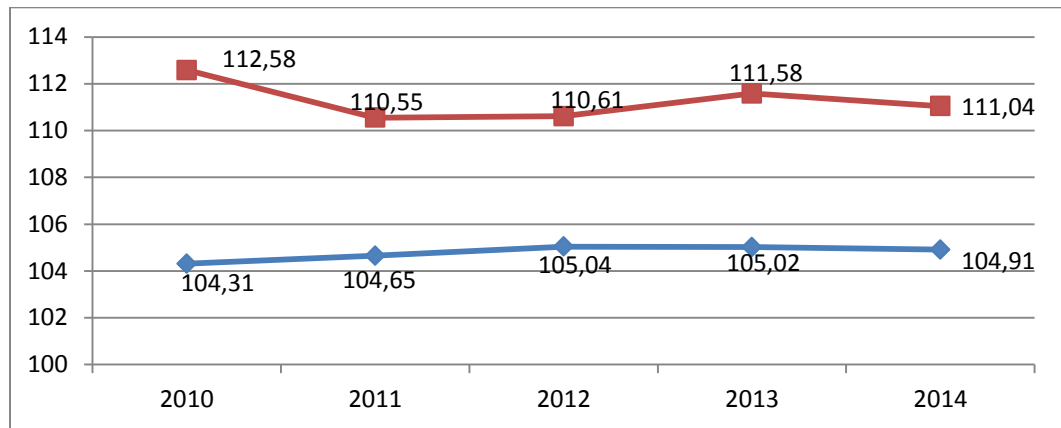
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2015

#### e. Indeks Berantai

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan per tahun baik secara agregat maupun per sektor yaitu dengan membuat tabel turunan yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Secara umum nilai indeks berantai diperoleh dari perbandingan nilai PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Bila nilai indeks berantai ini dikurangi 100 akan diperoleh juga laju pertumbuhan

Dari hasil pengolahan PDRB tahun 2014 indeks berantai yang terjadi di Kabupaten Temanggung adalah sebesar 111,04 persen adhb dan 104,91 persen ADHK. Indeks berantai tertinggi atas dasar harga berlaku menurut sektoral dicapai oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 114,63 persen dan terkecil adalah sektor Pertanian sebesar 106,39 persen. Sedangkan menurut harga konstan indeks berantai terkecil adalah sektor Pertanian sebesar 102,49 persen dan tertinggi adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yakni sebesar 107,58 persen.

Grafik 3.4  
Indeks Berantai PDRB Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

## f. Perkembangan PDRB Sektoral

### 1) Sektor Pertanian

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam memberikan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Temanggung, terbukti dari cerminan persentase distribusi pertanian yang paling besar. Sektor pertanian yang terdiri dari beberapa sub sektor, yakni sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan sub sektor perikanan. Pada tahun 2014 besarnya sumbangan sektor Pertanian dalam PDRB sebesar 30,69 persen adhb dan 28,46 persen ADHK. Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2014 sebesar 6,39 persen adhb dan 2,49 persen ADHK.

Sub sektor tanaman bahan makanan memberikan andil sebesar 20,68 persen adhb dan 18,90 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan tahun 2014 adhb mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2013 sedangkan ADHK mengalami kenaikan. Berdasarkan harga berlaku pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen, sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 9,16 persen. Sedangkan menurut ADHK pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan 1,46 persen, pada tahun 2014 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,03 persen.

Sub sektor tanaman perkebunan memberikan andil sebesar 4,01 persen adhb dan 3,90 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan tahun 2014 menurut harga konstan lebih rendah bila dibanding tahun 2013. Jika pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan 4,59 persen, di tahun 2014 sub sektor ini pertumbuhannya sebesar 1,80 persen. Jika dilihat menurut harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 5,94 persen, lebih rendah

dibandingkan tahun 2013 yang pertumbuhannya sebesar 10,98 persen.

Sub sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya memberikan andil sebesar 4,97 persen adhb dan 4,93 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor ini berdasarkan adhb mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013. Jika pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,57 persen maka pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,72 persen. Demikian juga menurut ADHK pertumbuhannya mengalami penurunan dari 5,17 persen pada tahun 2013 menjadi 4,97 persen di tahun 2014. Tabel 3.13, 3.14, dan 3.15 menyajikan data populasi beberapa jenis peternakan dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Sub sektor Kehutanan memberikan andil sebesar 0,66 persen adhb dan 0,39 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor ini menurut adhb mengalami penurunan bila dibanding tahun 2013. Jika pada tahun 2013 sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 13,93 persen pada tahun 2014 turun menjadi 6,37 persen. Namun bila dilihat menurut ADHK pertumbuhan sektor ini mengalami peningkatan, pada tahun 2013 pertumbuhannya tercatat sebesar 0,28 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 2,02 persen.

Sub sektor Perikanan memberikan andil sebesar 0,37 persen adhb dan 0,34 persen ADHK. Pertumbuhan sub sektor ini pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,12 persen adhb dan 1,69 persen ADHK. Sedangkan di tahun 2013 sub sektor ini pertumbuhannya sebesar 7,25 persen adhb dan 1,13 persen ADHK.

## **2) Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Sektor Penggalian memberikan andil sebesar 0,85 persen adhb dan 0,65 persen ADHK. Sektor ini pertumbuhannya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,92 persen adhb dan 2,09 persen ADHK, tumbuh meningkat menjadi 11,46 persen adhb dan 3,39 persen ADHK.

## **3) Sektor Industri Pengolahan**

Pada tahun 2014 sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 18,34 persen atas dasar harga berlaku, peranan sektor ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 17,80 persen. Pada tahun 2014 sektor ini tumbuh sebesar 5,19 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36 persen.



#### **4) Sektor Listrik dan Air Bersih**

Kontribusi sektor Listrik dan Air Minum terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2014 sebesar 1,09 persen adhb dan 1,03 persen ADHK. Sedangkan untuk laju pertumbuhannya pada tahun 2014 sebesar 11,18 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang besarnya mencapai 14,69 persen adhb. Demikian pula bila dilihat menurut ADHK laju pertumbuhan sektor ini menurun dari 7,42 persen pada tahun 2013 menjadi 4,87 persen di tahun 2014.

#### **5) Sektor Bangunan/Konstruksi**

Sektor Bangunan pada tahun 2014 pertumbuhannya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2013 pertumbuhan sektor ini sebesar 11,67 persen adhb dan 5,23 persen ADHK, sedangkan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 12,35 persen adhb dan 5,43 persen ADHK.

Kontribusi sektor Bangunan pada tahun 2014 sebesar 5,67 persen adhb dan 5,47 persen ADHK, mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen menurut adhb dan 0,03 persen ADHK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,61 persen adhb dan 5,44 persen ADHK.

#### **6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan**

Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan merupakan sektor yang cukup potensial karena kontribusi yang diberikan sektor ini menduduki peringkat ketiga setelah sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB sebesar 17,17 persen adhb dan 17,78 persen ADHK. Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan tahun 2014 adalah 13,61 persen adhb dan 7,58 persen ADHK.

#### **7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi**

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 5,33 persen adhb dan 6,05 persen ADHK terhadap total PDRB, namun walaupun demikian sektor ini berperan cukup penting dalam kelancaran kegiatan perekonomian Kabupaten Temanggung untuk kelancaran distribusi barang dan jasa produsen ke konsumen.

Sub sektor pengangkutan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhannya positif yaitu masing-masing sebesar 13,35 persen adhb dan 2,54 persen ADHK. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 4,06 persen adhb dan 4,18 persen ADHK.

Sub sektor komunikasi pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,27 persen adhb dan 1,87 persen ADHK.

Sedangkan untuk pertumbuhannya sub sektor ini mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 15,26 persen adhb dan 13,45 persen ADHK.

#### **8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2014 sebesar 14,63 persen adhb dan 7,51 persen ADHK, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena pada tahun 2013 tercatat sebesar 16,91 persen adhb dan 9,75 persen ADHK.

Kontribusi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini tercatat 4,38 persen adhb dan 4,25 persen ADHK meningkat menjadi sebesar 4,52 persen adhb dan 4,35 persen ADHK di tahun 2014.

#### **9) Sektor Jasa-Jasa**

Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2014 sebesar 14,63 persen adhb dan 7,51 persen ADHK, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena pada tahun 2013 tercatat sebesar 16,91 persen adhb dan 9,75 persen ADHK.

Kontribusi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini tercatat 4,38 persen adhb dan 4,25 persen ADHK meningkat menjadi sebesar 4,52 persen adhb dan 4,35 persen ADHK di tahun 2014.

#### **g. Inflasi dan Indeks Harga Implisit**

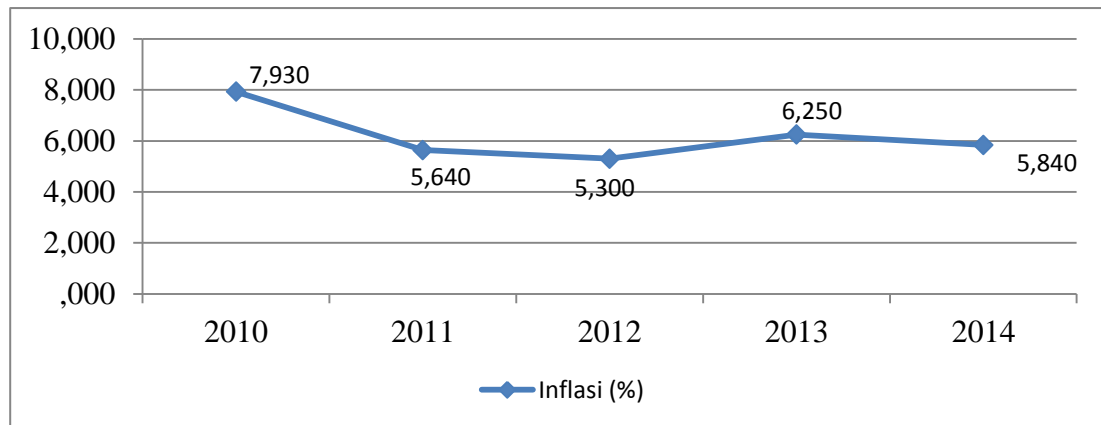
Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya, hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, pertama metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi, yang dihitung baik setiap bulan maupun setiap tahun, seperti yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat

Statistik Kabupaten Temanggung. Kedua, inflasi dihitung dengan memakai indeks implisit PDRB.

Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya pun berlainan. Untuk penghitungan inflasi dengan metode implisit dari PDRB dilakukan dengan rumus membagi indeks implisit tahun t dengan indeks implisit tahun t-1 dikurangi satu dikalikan seratus persen.

Grafik 3.5  
Inflasi PDRB Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 – 2014



Dari hasil pengolahan indeks implisit PDRB, selama kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Temanggung terus mengalami inflasi dengan pergerakan yang cukup berfluktuasi pada kisaran 5,30 persen sampai 7,93 persen, seperti terlihat pada grafik 4.5 diatas. Pada tahun 2010 inflasi tahunan tercatat sebesar 7,93 persen, kemudian turun menjadi 5,64 persen pada tahun 2011 kemudian turun lagi menjadi 5,30 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 inflasi kembali naik menjadi sebesar 6,25 persen, lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2014 yang sebesar 5,84 persen. Adanya inflasi yang besarnya masih satu digit selama kurun waktu tersebut menandakan perekonomian Kabupaten Temanggung bergerak secara dinamis dan memberikan ekspektasi yang mengembirakan bagi pelaku ekonomi, namun tidak memberatkan bagi para konsumen.

Nilai Inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen. Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Temanggung selama tahun 2014 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2014 secara tahunan (year on year) angka inflasi Kota Temanggung tercatat sebesar 7,81 persen, sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yang mengalami inflasi 7,01 persen. Angka inflasi kota Temanggung tahun 2014 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yang sebesar 8,22 persen dan juga inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen.

Inflasi nasional ini jauh melampaui angka target inflasi yang tercantum dalam APBNP 2014 yang sebesar 5,3 persen.

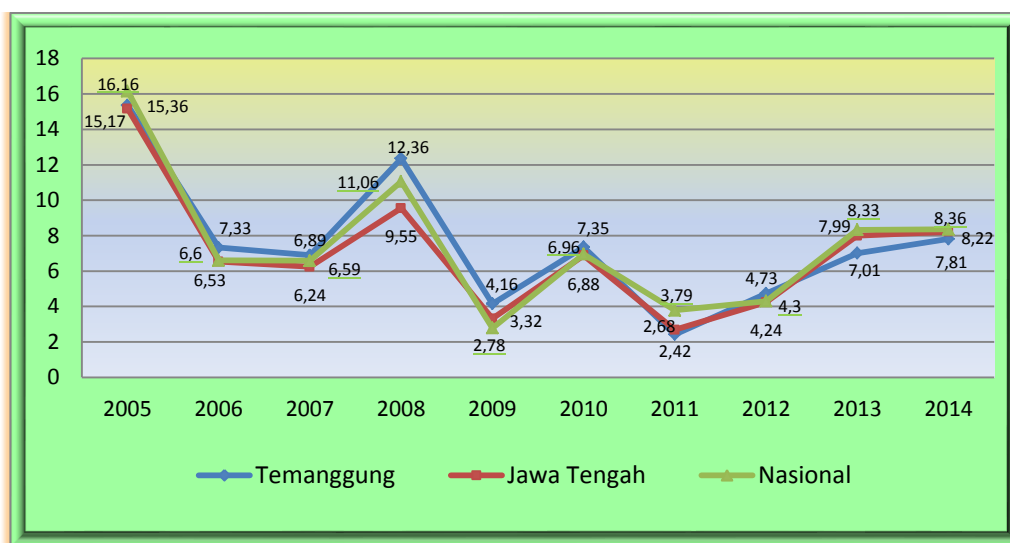
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir untuk lingkup Kota Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10  
Perkembangan Laju Inflasi  
Kota Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2005-2014

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2005	15,36	15,17	16,16
2006	7,33	6,60	6,53
2007	6,89	6,24	6,59
2008	12,36	9,55	11,06
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,30
2013	7,01	7,99	8,33
2014	7,81	8,22	8,36

BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Grafik 3.6  
Inflasi Kota Temanggung Tahun 2005-2014



Jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2005-2014 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Inflasi terkecil terjadi pada tahun 2011 dengan inflasi 2,42 persen, sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai angka 15,36 persen. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun

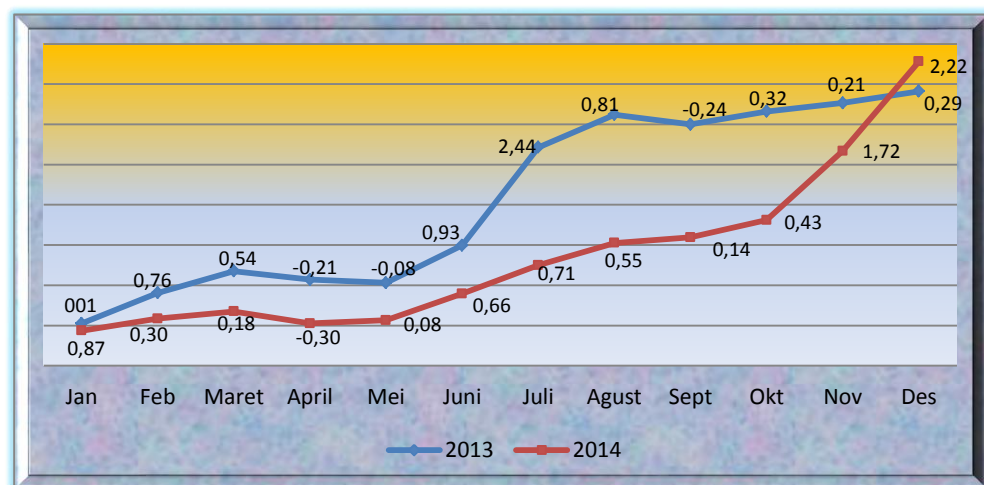
kenaikan biaya untuk pekerja.

Pada tahun 2005 dan 2008 angka inflasi Kota Temanggung mencapai dua digit masing-masing 15,36 persen dan 12,36 persen. Pemicu terjadinya inflasi yang cukup tinggi di tahun 2005 tersebut adalah adanya kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM sampai dua kali yang secara otomatis menyebabkan kenaikan biaya produksi pada unit-unit produksi yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa atau terjadi inflasi pada tahun tersebut cukup tinggi yaitu menjadi sebesar 15,36 persen dan merupakan angka inflasi tertinggi dalam dasa warsa ini. Demikian juga yang terjadi pada tahun 2008, angka inflasi melampaui angka dua digit utamanya disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ditahun tersebut.

Tabel 3.11  
Laju Inflasi Kota Temanggung Per Bulan  
Dirinci Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014

Bulan	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Penddkn Rekreasi & OR	Transpor, Kom dan Js Keu
Januari	0,87	1,59	1,19	0,98	0,53	0,31	0,00	0,09
Pebruari	0,30	1,22	-0,36	0,00	0,48	0,16	0,20	0,32
Maret	0,18	0,21	0,32	0,07	0,25	0,44	0,14	0,00
April	-0,30	-2,00	0,00	0,61	-0,01	0,34	0,08	-0,02
Mei	0,08	-0,67	0,15	0,56	0,80	0,41	0,01	-0,01
Juni	0,66	2,09	0,57	0,15	0,18	0,56	0,15	0,00
Juli	0,71	1,25	0,48	0,21	1,73	1,08	0,84	0,38
Agustus	0,55	0,46	0,85	0,25	-0,23	0,61	2,34	-0,02
September	0,14	-0,28	0,29	0,69	0,00	0,21	-0,29	-0,01
Oktober	0,43	0,39	0,85	0,61	-0,02	0,63	0,17	-0,06
Nopember	1,72	3,77	0,19	0,21	0,21	0,28	0,23	4,92
Desember	2,22	3,56	1,42	0,93	-0,06	0,19	0,07	5,85

BPS Kabupaten Temanggung, 2015



BPS Kabupaten Temanggung, 2015

Grafik 3.7  
Laju Inflasi Kota Temanggung Tahun 2013-2014

Beda dengan perkembangan harga barang dan jasa tahun 2013 dengan deflasi di tiga bulan yaitu bulan April, Mei dan September, ditahun 2014 hanya satu bulan yang mengalami deflasi yaitu pada bulan April, bulan yang lain mengalami inflasi atau terjadi kenaikan harga. Dibuka dengan inflasi sebesar 0,87 persen dibulan Januari kondisi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kota Temanggung sampai dengan bulan Maret cenderung terus naik walaupun kenaikannya melambat. Pada bulan keempat atau bulan April terjadi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa yang disebabkan persediaan atau stok barang terutama dari kelompok bahan makanan cukup memadai. Selanjutnya pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014 harga-harga terus menerus mengalami kenaikan dengan besaran inflasi yang cukup bervariasi. Bertepatan dengan bulan dengan permintaan akan barang dan jasa meningkat yaitu bulan puasa dan lebaran yang jatuh pada bulan Juli dan Agustus besaran inflasi cukup terkendali tidak sampai pada angka 1 persen tetapi masing-masing hanya 0,71 persen dan 0,55 persen dikarenakan persediaan barang cukup memadai. Sampai dengan puncaknya adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga barang yang masuk dalam kelompok barang *administered price* yaitu bahan bakar minyak (BBM) per 18 November 2014 berdampak pada inflasi pada bulan Desember yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,22 persen yang merupakan inflasi tertinggi sepanjang tahun 2014.

#### **h. Pengeluaran Riil Perkapita**

Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat sepanjang 2009-2013 yang ditunjukkan dengan kenaikan pengeluaran riil perkapita. Pada tahun 2009, pengeluaran riil perkapita sebesar 633.87 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 640.56 ribu rupiah pada tahun 2013. Dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke 26 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Dalam regional eks karisidenan Kedu, kemampuan daya beli Kabupaten Temanggung sangat jauh dibandingkan Kota Magelang dan masih dibawah kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen.

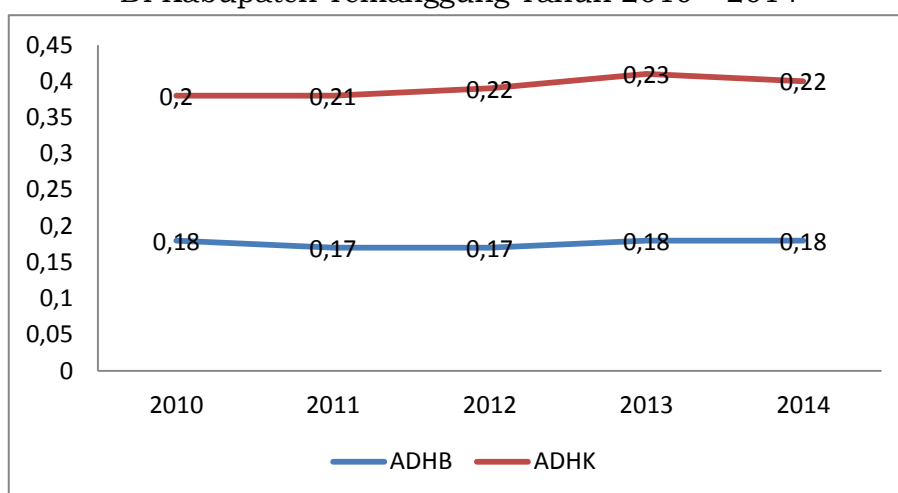
### i. Indeks Ketimpangan Antar Wilayah/Pembangunan Regional

Pembangunan yang dilakukan belum tentu dirasakan secara merata di semua wilayah administrasi yang dimiliki Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan secara alami pembangunan akan menghasilkan ketimpangan ekonomi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut. Untuk melihat ketimpangan PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Temanggung maka dihitunglah *Indeks Williamson*.

Pada tahun 2010 *Indeks Williamson* di lihat dari atas dasar harga berlaku Kabupaten Temanggung sebesar 0,18 kemudian turun menjadi 0,17 pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung berada di posisi yang sama dan naik kembali pada tahun-tahun berikutnya, sampai pada tahun 2012 *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung menjadi 0,18. Namun pada tahun 2014 *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 0,18. *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Dari hasil angka *Indeks Williamson* tersebut maka dapat diketahui bahwa ketimpangan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung berada pada ketimpangan yang rendah atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemerataan pendapatannya cukup tinggi karena nilai *Indeks Williamson* Kabupaten Temanggung  $< 0,3$ .

Sementara trend perkembangan ketimpangan pendapatan yang dicerminkan dalam *Indeks Williamson* di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.8  
Perkembangan Indeks Williamson Antar Kecamatan  
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2010 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (data diolah)

#### **j. Ketimpangan Individu Masyarakat**

Selain ketimpangan regional, pembangunan yang dilakukan belum tentu dirasakan dalam proporsi yang sama oleh setiap individu masyarakat di Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan tersebut digunakan alat ukur yaitu *Indeks Gini*. Indeks Gini Kabupaten Temanggung dihitung berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu pengeluaran perkapita penduduk pada tahun 2012.

Indeks Gini Kabupaten Temanggung tahun 2012 nilainya 0,35 semakin mengecil dibandingkan dengan indeks gini tahun 2011 yang nilainya 0,38 atau dengan kata lain ketimpangannya semakin mengecil. Sesuai kriteria UNDP Kabupaten Temanggung ketimpangannya termasuk sedang karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5. Namun angka tersebut di atas juga menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

#### **k. Investasi**

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Tabel 3.12  
Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)
2010	283	25,316	283	25,316
2011	247	10,953	247	10,953
2012	503	123,457	503	123,457
2013	224	99,810	224	99,810
2014	171	67,229	171	67,229
Jumlah	1.428	326,765	1.428	326,765

Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung, 2015

Dari tabel 3.11. tampak bahwa realisasi nilai investasi adalah sama besar dengan persetujuan investasinya. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah investor sebanyak 503 dengan nilai investasi sebesar 123,457 milyar, namun dua tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan.

#### **1. Keuangan Daerah**

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dimana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Memperhatikan komposisi pendapatan daerah dari tahun ke



tahun, Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu indikator kemandirian daerah, mempunyai kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah. Dengan demikian Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Sampai dengan Tahun 2014, pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal dimana diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan atau penerimaan daerah di APBD. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.13  
Derajat Desentralisasi Fiskal  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014

TAHUN	PAD	PENERIMAAN	%
2010	55,211,017,361	675,659,734,845	8.17
2011	63,343,494,510	823,479,890,034	7.69
2012	78,514,689,212	966,815,573,681	8.12
2013	102.080.197.194	1.053.845.571.760	9,69
2014	160.726.943.432	1.226.139.568.046	13,11
Rata-rata	91.975.268.342	949.188.067.673	9,36

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode 2010-2014 adalah sebesar 9,36 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan masih kecil. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui:

- Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah.
- Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi. serta memberikan penghargaan dan sanksi.

- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan retribusi yang dilakukan pihak lain.
- Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.
- Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif, termasuk dengan pemerintah desa.

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Indeks Kinerja Keuangan (IKK). Indeks ini merupakan cerminan dari kinerja keuangan daerah baik secara makro maupun mikro yang terukur dan komprehensif. Indeks Kinerja Keuangan meliputi beberapa indikator, yaitu:

#### 1) Ketergantungan Fiskal (KF)

Merupakan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah dikurang belanja pegawai dalam total pendapatan anggaran daerah di APBD.

Tabel 3.14  
Ketergantungan Fiskal  
Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014

TAHUN	DAU	BLJ. PEGAWAI	SISA	PENDAPATAN	%
2010	438,090,923,000	361,708,359,783	76,382,563,217	675,659,734,845	11.30
2011	482,937,812,000	398,449,414,257	84,488,397,743	823,479,890,034	10.26
2012	584,158,278,000	435,422,407,342	148,735,870,658	966,815,573,681	15.38
2013	651.171.674.000	573.983.834.062	77.187.839.938	1.053.845.571.860	73,24
2014	708.764.753.000	609.072.551.329	99.692.201.671	1.226.139.568.046	81,31
<b>Rata-rata</b>	573.024.688.000	475.727.313.355	97.297.374.645	949.188.067.693	38,30

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah)

Memperhatikan table di atas, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pendapatan utama yang diterima Kabupaten Temanggung tidak semua digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Hal tersebut Nampak pada angka indeks yang rata-rata adalah sebesar 38,30 persen. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian DAU dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

#### 2) Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD berdasarkan Kapasitas Penciptaan Pendapatan di daerah. Proporsi PAD disini tidak dinyatakan terhadap total nilai APBD namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB Kabupaten.

Tabel 3.15  
 Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2014

TAHUN	PAD	PDRB	%
2010	55.211.017.361	5.069.020.300.000	1,09
2011	63.343.494.510	5.603.983.710.000	1,13
2012	78.514.689.212	6.198.351.810.000	1,27
2013	102.080.197.194	6.915.876.330.000	1,48
2014	160.726.943.432	7.679.241.740.000	2,09
Rata-rata	91.975.268.342	6.293.294.778.000	1,41

Sumber : Realisasi APBD dan PDRB Kab. Temanggung (data diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan kenaikan pendapatan masih cukup rendah yaitu berada di angka 1,41 persen. Sebuah angka yang menjadi pemacu untuk dapat terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah. Kinerja penciptaan pendapatan ini sangat tergantung pula pada kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun-ketahun selalu mengalami kenaikan.

### 3) Proporsi Belanja Modal (PBM)

Merupakan indikator yang menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang sehingga memberikan efek *multiplier* yang lebih besar terhadap perekonomian. PBM dirumuskan sebagai persentase belanja modal dengan total belanja pada APBD. Proporsi belanja modal menggambarkan besarnya persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama periode 2010-2014 alokasi belanja modal mengalami fluktuasi sehingga tidak mempunyai trend khusus baik meningkat atau menurun. Untuk hal ini juga sering dipengaruhi oleh kebijakan posting anggaran terkait dengan pengakuan/pencatatan asset pada akhir tahun kegiatan.

### 4) Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)

Merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, dimana dinyatakan sebagai persentase total belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten.

Tabel 3.16  
 Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2010-2014

TAHUN	BELANJA	PDRB	%
2010	662.203.879.316	5.069.020.300.000	13,064
2011	816.160.548.955	5.603.983.710.000	14,564
2012	956.324.159.986	6.198.351.810.000	15,429
2013	950.367.588.673	7.679.241.740.000	12,376
2014	1.125.725.739.432	6.293.294.778.000	17,888
Rata-rata	902.156.383.272	6.168.778.467.600	14,664

Sumber : Realisasi APBD dan PDRB Kab. Temanggung (data diolah)

Kontribusi sektor pemerintah dalam mengerakkan pembangunan daerah relatif stabil berada di kisaran angka rata-rata 14,664 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja sektor pemerintah relative stabil setiap tahunnya. Angka IKK yang relatif stabil menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Temanggung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Hal ini dapat diartikan sebagai kestabilan kinerja keuangan daerah namun dapat juga diartikan sebagai belum optimalnya upaya daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan sehingga belanja pembangunan cenderung juga mengalami kestabilan ketersediaan alokasi anggaran.

## **2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016**

Harapan akan kondisi perekonomian yang lebih baik di Tahun 2015 dan 2016 merupakan sebuah harapan yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Tantangan terbesar pada tahun 2015 dan 2016 adalah tantangan internal dan eksternal. Tantangan eksternal antara lain adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat, misalnya pengurangan subsidi BBM, kenaikan tarif dasar listrik, ketentuan perundang-undangan yang belum komprehensif dan lain sebagainya.

Sedangkan tantangan internal yang akan dihadapi diantaranya adalah :

- Ketimpangan pendapatan antar individu dan antar wilayah yang masih besar.
- Masih rendahnya daya beli dan kurangnya aksesibilitas pangan masyarakat miskin masih yang dibuktikan dengan masih besarnya angka kemiskinan.
- Masih kurangnya infrastruktur yang memadai, yang dapat menjadi kendala bagi masuknya investasi sehingga diperlukan penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas yang merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yaang lebih tinggi dan berkelanjutan.
- Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Temanggung masih rendah sehingga perlu peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*Public-Private Partnership*; PPP) maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR). PPP dan CSR merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
- Masih sedikitnya UMKM yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal, nasional maupun internasional sertanya kurangnya kemitraan dalam

bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara usahawan besar, menengah, dan kecil sehingga terwujud peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional.

- Masih rendahnya produktivitas sektor pertanian, hal ini dibuktikan dari sumbangan PDRB pertanian sebesar 32,03 persen (2013) dengan jumlah tenaga kerja sebesar 53 persen.
- Pengembangan pariwisata, industri potensial dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal yang masih harus ditingkatkan.
- Masih perlu peningkatan kualitas serta pengembangan sistem dan kelembagaan pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*, misalnya dengan peningkatan status atau membentuk lembaga, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyusunan sistem informasi, integrasi data dan sebagainya. Sistem dan Kelembagaan yang kuat, efektif, transparan, akuntabel serta terpercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dan prospek perekonomian sebagaimana tersebut di atas harus dihadapi dengan semakin meningkatkan mengefektifkan semua capaian makro ekonomi, khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan laju inflasi. Guna mengefektifkan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka perlu didorong sektor-sektor yang mempunyai dampak pengganda yang besar.

## **B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung adalah:

- Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah.
- Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan.

- Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah.
- Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

### **1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Sampai dengan tahun 2016, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing komponen pendapatan daerah. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena adanya peningkatan pendapatan daerah yang diprediksikan sebesar Rp.1.963.308.888.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.184.111.316.000,00 Dana Perimbangan sebesar Rp.1.312.606.725.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.471.590.847.000,00.

Proyeksi PAD dilakukan dengan memperhatikan trend dari masing-masing sumber pendapatan, dimana proyeksi kenaikan terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah sedangkan yang terkecil berasal dari peningkatan pajak daerah.

Namun demikian, kerangka pendapatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dari pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan.

Tabel 3.16.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi APBD 2015	APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>91.966.542.000</b>	<b>160.726.943.432</b>	<b>211.758.941.729</b>	<b>203.456.549.000</b>	<b>184.111.316.000</b>
1.1.1	Pajak Daerah	23.826.100.000	29.622.602.704	31.523.943.062	27.640.000.000	27.640.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	14.656.229.000	20.299.495.547	13.072.440.950	52.147.552.500	13.410.490.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.831.063.000	11.246.688.910	13.060.829.257	13.060.826.000	13.060.826.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.653.150.000	99.558.156.271	154.101.728.460	110.608.170.500	130.000.000.000
1.2	<b>Dana perimbangan</b>	<b>749.673.444.000</b>	<b>808.979.527.761</b>	<b>849.969.443.934</b>	<b>1.152.281.280.840</b>	<b>1.312.606.725.000</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	51.843.530.000	43.511.964.761	45.507.112.934	40.343.859.000	40.343.859.000
1.2.2	Dana alokasi umum	651.171.674.000	708.764.753.000	731.733.741.000	807.995.010.000	848.394.760.500
1.2.3	Dana alokasi khusus	46.658.240.000	56.702.810.000	72.728.590.000	303.942.411.840	423.868.105.500
1.2.4	Dana intensif daerah	-	-	-	-	-
1.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>197.532.452.000</b>	<b>294.319.211.000</b>	<b>407.015.374.242</b>	<b>357.866.847.000</b>	<b>466.650.847.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.051.910.000	725.668.600	9.296.687.923	616.150.000	616.150.000
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	31.916.581.000	58.804.804.253	83.195.805.819	103.893.087.000	108.893.087.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	136.253.400.000	163.166.074.000	183.164.016.500	40.789.358.000	40.789.358.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	28.310.561.000	33.736.550.000	58.935.212.000	50.072.500.000	158.796.500.000
1.3.6	Dana Desa	-	-	72.423.652.000	162.945.752.000	162.495.752.000
<b>Jumlah pendapatan daerah</b>		<b>1.039.172.438.000</b>	<b>1.226.139.568.046</b>	<b>1.468.743.759.905</b>	<b>1.713.604.676.840</b>	<b>1.968.308.888.000</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung



## **2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2017**

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Temanggung di tahun 2015 maka kebijakan keuangan daerah yang diambil adalah sebagai berikut:

### **a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Secara khusus, terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;
- Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat tergantung dari besaran yang akan dibagikan ke daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;
- Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;

## **b. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 adalah :

- 
- Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah;
- Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan;
- Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah;
- Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

Tingginya belanja tidak langsung bukan menggambarkan rendahnya belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil secara riil diperuntukkan bagi masyarakat maupun desa dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 secara lengkap terinci pada tabel 3.17.

Tabel 3.17  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi APBD Tahun 2015	APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
2.1	<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>713.737.922.696</b>	<b>854.402.754.330</b>	<b>896.578.901.674</b>	<b>1.055.593.920.395</b>	<b>939.146.317.395</b>
2.1.1	Belanja pegawai	573.983.834.062	710.410.332.635	672.248.809.793	755.074.502.000	598.522.000.000
2.1.2	Belanja bunga	1.352.611.525	1.006.766.714	4.424.201.466	6.291.666.000	
2.1.4	Belanja hibah	58.141.919.542	70.509.291.100	48.055.711.613	17.202.475.000	340.624.317.395
2.1.5	Belanja bantuan social	30.471.682.540	17.601.444.713	16.220.719.040	14.016.000.000	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	4.316.725.502	4.507.625.240	3.981.017.942	4.612.500.000	
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa	45.249.304.525	39.677.734.025	151.539.286.820	250.483.777.395	
2.1.8	Belanja tidak terduga	221.845.000	416.416.000	109.155.000	500.000.000	
2.2	<b>Belanja langsung</b>	<b>287.129.995.668</b>	<b>512.727.242.181</b>	<b>608.414.586.981</b>	<b>805.504.894.080</b>	<b>1.127.319.728.041</b>
2.2.1	Belanja pegawai	36.481.877.690	43.096.586.840	39.339.329.402	50.659.203.650	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	146.842.608.704	188.606.981.218	248.736.763.470	266.077.233.006	
2.2.3	Belanja modal	103.805.509.274	198.451.766.079	320.338.494.109	384.973.674.500	
<b>Total Jumlah Belanja</b>		<b>1.000.867.918.364</b>	<b>1.170.880.302.872</b>	<b>1.504.993.488.655</b>	<b>1.861.098.814.475</b>	<b>2.066.465.025.456</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung

### **c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

##### **a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)**

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran 2017 adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

##### **b) Penerimaan pinjaman daerah**

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.

##### **c) Penerimaan pembiayaan yang lain**

Dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

#### **2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**a) Penyertaan modal pemerintah daerah**

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah akan disesuaikan sesuai dengan roadmap penyertaan modal daerah.

**b) Pembentukan dana cadangan**

Mulai tahun 2016 akan dibentuk dana cadangan untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Temanggung tahun 2018. Jumlah dana cadangan yang akan dibentuk adalah Rp 15.000.000.000,00 dan dibagi dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2016 dan tahun 2017.

**c) Pembayaran pokok hutang**

Pada tahun 2017 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah untuk pembangunan Pasar Legi Parakan dan PT Bank Jateng untuk pembangunan RSUD 7 lantai.

**d) Pengeluaran pembiayaan yang lain**

Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 secara jelas tercantum pada tabel 3.18.

Tabel 3.18  
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Perubahan APBD Tahun 2015	APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
3.1	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>59.438.956.293</b>	<b>146.196.105.574</b>	<b>297.828.147.120</b>	<b>202.404.269.270</b>	<b>296.562.958.936</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	41.776.547.255	102.999.147.464	192.382.144.363	167.534.146.070	60.000.000.000
3.1.2	Pencairan dana cadangan	12.867.002.883	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	37.579.771.350	99.516.704.450	30.870.123.200	79.606.137.456
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	243.081.070	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan perhitungan pihak ketiga	4.552.325.085	5.506.593.762	5.529.298.307	4.000.000.000	8.000.000.000
3.2	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>9.444.155.394</b>	<b>9.073.226.385</b>	<b>28.529.298.307</b>	<b>54.910.131.635</b>	<b>49.450.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	4.553.609.000	4.500.000.000	5.000.000.000	9.950.000.000	9.950.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	18.000.000.000	29.447.668.800	24.000.000.000
3.2.5	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	4.910.546.394	4.573.226.385	5.529.298.307	8.012.462.835	8.000.000.000
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		<b>49.994.800.899</b>	<b>137.122.879.189</b>	<b>124.479.112.934</b>	<b>147.494.137.635</b>	<b>98.156.137.456</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung

Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Temanggung tahun 2011-2014 sebagaimana tersebut pada tabel 3.20.

Tabel 3.20  
Alokasi Dana DAK Kabupaten Temanggung  
Tahun 2011-2014

NO	BIDANG	SKPD	TAHUN	DAK (Rp.)	PENDAMPINGAN (Rp.)	
1	<b>PENDIDIKAN</b>					
	a	PENDIDIKAN SD	Dinas Pendidikan	2011	20.321.700.000	-
				2012	45.365.509.680	4.542.695.520
				2013	8.696.360.000	916.638.000
				2014	8.185.610.000	1.743.714.000
	b	PENDIDIKAN SMP	Dinas Pendidikan	2011	4.736.100.000	-
				2012	4.118.550.000	410.450.000
				2013	5.367.250.000	536.450.000
				2014	5.594.160.000	-
	c	PENDIDIKAN SMA	Dinas Pendidikan	2011	-	-
				2012	-	-
				2013	1.369.140.000	140.960.000
				2014	3.011.030.000	1.427.500.000
	d	PENDIDIKAN SMK	Dinas Pendidikan	2011	-	-
2012				-	-	
2013				4.689.730.000	463.870.000	
2014				6.671.410.000	-	
	<b>JUMLAH DAK BIDANG PENDIDIKAN</b>		2011	<b>25.057.800.000</b>	<b>2.505.780.000</b>	
		2012	<b>49.484.059.680</b>	<b>4.953.145.520</b>		
		2013	<b>20.122.480.000</b>	<b>2.057.918.000</b>		
		2014	<b>23.462.210.000</b>	<b>3.171.214.000</b>		
2	<b>KESEHATAN</b>					
	a	PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	2011	2.455.100.000	245.510.000
				2012	3.106.620.000	310.662.000
				2013	2.610.870.000	261.087.000
				2014	2.968.640.000	-
	b	PELAYANAN FARMASI	Dinas Kesehatan	2011	3.708.400.000	370.866.000
				2012	3.057.180.000	305.718.000
				2013	1.953.060.000	198.306.000
				2014	2.329.580.000	-

NO	BIDANG	SKPD	TAHUN	DAK (Rp.)	PENDAMPINGAN (Rp.)	
	c PELAYANAN RUJUKAN	RSUD Djojonegoro	2011	-	-	
			2012	-	-	
			2013	1.546.500.000	3.775.050.000	
			2014	1.412.630.000	29.730.000	
	d BIAYA PENUNJANG	Dinas Kesehatan	2011	-	-	
			2012	-	154.510.000	
			2013	-	-	
			2014	-	750.000.000	
	<b>JUMLAH DAK BIDANG KESEHATAN</b>			2011	<b>6.163.500.000</b>	<b>616.376.000</b>
				2012	<b>6.163.800.000</b>	<b>770.890.000</b>
				2013	<b>6.110.430.000</b>	<b>4.234.443.000</b>
				2014	<b>6.710.850.000</b>	<b>779.730.000</b>
	<b>3</b>	<b>INFRASTRUKTUR JALAN</b>				
	DPU	2011	5.550.600.000	555.060.000		
		2012	15.066.800.000	1.510.300.000		
		2013	4.644.120.000	480.000.000		
		2014	6.068.710.000	467.000.000		
<b>4</b>	<b>INFRASTRUKTUR IRIGASI</b>					
	DPU	2011	6.163.700.000	616.370.000		
		2012	3.896.150.000	443.320.000		
		2013	2.754.020.000	275.042.000		
		2014	3.335.190.000	314.905.000		
<b>5</b>	<b>INFRASTRUKTUR AIR MINUM</b>					
	DPU	2011	900.300.000	90.030.000		
		2012	711.010.000	71.101.000		
		2013	1.105.270.000	110.527.000		
		2014	1.383.770.000	125.695.200		
<b>6</b>	<b>INFRASTRUKTUR SANITASI</b>					
	DPU	2011	846.600.000	84.660.000		
		2012	769.290.000	161.970.000		
		2013	685.026.400	391.444.600		
		2014	2.055.190.000	68.870.000		
<b>7</b>	<b>PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
	DPU	2011	-	-		
		2012	1.530.050.000	153.005.000		
		2013	-	-		
		2014	-	-		



NO	BIDANG	SKPD	TAHUN	DAK (Rp.)	PENDAMPINGAN (Rp.)
8	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
		Dinas Peternakan dan Perikanan	2011	2.336.500.000	343.733.900
			2012	1.828.010.000	243.110.000
			2013	2.010.680.000	252.947.000
			2014	2.411.010.000	381.600.000
9	<b>PERTANIAN</b>				
		Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	2011	5.187.100.000	524.288.003
			2012	4.236.620.000	423.662.000
			2013	4.642.800.000	464.280.000
			2014	5.304.230.000	615.000.000
10	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				
		Badan Lingkungan Hidup	2011	935.500.000	93.550.000
			2012	1.092.840.000	109.284.000
			2013	1.308.370.000	169.711.000
			2014	1.420.980.000	180.000.000
11	<b>KELUARGA BERENCANA</b>				
		Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2011	1.035.700.000	583.807.300
			2012	960.680.000	124.284.000
			2013	1.387.627.188	127.279.250
			2014	1.156.370.000	179.519.000
12	<b>KEHUTANAN</b>				
		Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	2011	1.011.700.000	314.406.000
			2012	1.183.780.000	196.600.500
			2013	1.147.440.000	164.670.000
			2014	1.012.640.000	115.000.000
13	<b>PERDAGANGAN</b>				
		Disperindagkop	2011	-	-
			2012	-	-
			2013	-	-
			2014	1.881.980.000	-
14	<b>KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT</b>				
		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	2011	243.600.000	24.350.000
			2012	339.930.000	45.738.000
			2013	446.390.000	68.000.000
			2014	499.680.000	70.000.000
15	<b>PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN</b>				
		DPU	2011	1.614.200.000	161.420.000
			2012	-	-
			2013	-	-

NO	BIDANG	SKPD	TAHUN	DAK ( Rp.)	PENDAMPINGAN ( Rp.)
			2014	-	-
<b>JUMLAH SEMUA BIDANG</b>			2011	<b>55.432.600.000</b>	<b>6.352.411.203</b>
			2012	<b>87.263.019.680</b>	<b>9.206.410.020</b>
			2013	<b>46.364.653.588</b>	<b>8.796.261.850</b>
			2014	<b>56.702.810.000</b>	<b>6.468.533.200</b>

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

##### **1. Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dalam dokumen RPJMD 2013-2018 adalah “Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih”

Makna yang termuat dalam visi Kabupaten Temanggung dijabarkan sebagai berikut :

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Bermasyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan agamis. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

a. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;

Dalam menjabarkan Visi Daerah, Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Temanggung karena Sektor Pertanian diharapkan dapat menjadi sektor tumpuan kehidupan masyarakat. Sektor Pertanian yang dimaksud adalah meliputi sub sektor pertanian, sub sektor perikanan, dan sub sektor kehutanan.

Pengembangan pertanian yang moderen didukung oleh pengembangan di sektor perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, berupa pengembangan agribisnis, agroindustri, dan agrowisata.

Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri merupakan bentuk integrasi pengembangan pertanian (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan) dengan pengembangan industri pertanian dari hulu sampai dan hilir yang didukung dengan pengembangan sektor-sektor jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian. Sedangkan pengembangan Agrowisata merupakan upaya pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah diarahkan pula pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mampu bersaing secara kompetitif. Pengembangan potensi lokal tersebut adalah juga dalam rangka menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, dikarenakan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif tersebut memiliki multiplier effect yang cukup tinggi terhadap sektor yang lain.

Kebijakan pembangunan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dan juga didukung oleh pengembangan di sektor koperasi dan UMKM.

- b. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

Visi Daerah juga mengamanatkan harapan terwujudnya masyarakat yang agamis, berbudaya, dan sejahtera baik di perdesaan maupun perkotaan. Kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tersebut juga meliputi kesejahteraan sosial, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha baik di daerah maupun di lain daerah, terciptanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatnya peran pemuda, dan berkembangnya olahraga di Kabupaten Temanggung.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diharapkan juga tetap melibatkan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu hal yang disentuh melalui misi ini.

Upaya untuk menjaga budaya dan kebudayaan juga merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Budaya dan Kebudayaan yang terjaga diharapkan mampu tercipta karakter khusus di masyarakat Kabupaten Temanggung yaitu masyarakat yang berbudaya.

Seluruh harapan yang ada tersebut akan sangat terdukung jika tercipta pula kehidupan masyarakat yang agamis, diantaranya dengan adanya peningkatan keimanan umat beragama, tersedianya sarana dan prasarana keagamaan, dan toleransi antar umat beragama

- c. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;

Upaya untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berwawasan lingkungan, baik dipedesaan dan perkotaan, didukung oleh pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sarana perhubungan, pengembangan sanitasi lingkungan, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah, dan pengembangan perumahan dan kawasan perumahan itu sendiri.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan mempunyai makna bahwa segala pembangunan yang dilaksanakan saat ini dan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia saat ini diharapkan tidak mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang untuk melakukan pembangunan yang juga memanfaatkan sumberdaya di masa datang.

- d. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;

Pendidikan merupakan satu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan, dan selalu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Pendidikan yang baik dan dapat diakses oleh semua masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik yang bermuara pada peningkatan kapasitas intelektual masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih luas maupun meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pendidikan yang dikembangkan juga tidak terlepas dari kearifan lokal di Kabupaten Temanggung, sehingga akan diberikan sebuah materi pendidikan berupa pendidikan budi pekerti, pendidikan budaya jawa, dan pendidikan lain yang mengacu pada kearifan lokal yang ada.

- e. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga merupakan satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah. Kegiatan pembangunan niscaya tidak akan terlaksana dengan maksimal andaikata tidak didukung oleh kualitas kehidupan masyarakat yang baik.

Pemerataan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal utama yang diperhatikan di misi ini, dengan harapan bahwa pemerataan akses tersebut juga didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan.

Satu hal lain yang ingin diwujudkan adalah bahwa kesehatan akan mampu menjadi budaya di masyarakat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan lingkungan. Sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk membudayakan hidup sehat dilingkungan masing-masing.

- f. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik, atau dalam kata lain Good Government and Clean Governance maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM Aparatur, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan

perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dilakukan.

Upaya tersebut diatas sekaligus menjadi rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2013-2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: “BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”. Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

### **3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan**

Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Penjabaran ke dalam Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas dalam pelaksanaan Visi dan Misi Daerah, sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Keterkaitan Antara Visi , Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan  
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian</li> <li>2.Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3.Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.</li> <li>4.Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah</li> <li>5.Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Perikanan</li> <li>6.Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah</li> <li>7.Meningkatkan Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>8.Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah</li> <li>9.Meningkatkan Peran Sektor Pendukung Pengembangan Agribisnis, Agroindustri, dan Agrowisata</li> <li>10. Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian</li> <li>2. Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan</li> <li>3. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian</li> <li>4. Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian, perkebiunan dan peternakan</li> <li>5. Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan</li> <li>6. Meningkatnya produktivitas ternak</li> <li>7. Meningkatnya Penyelenggaraan Penyuluhan</li> <li>8. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan</li> <li>9. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan</li> <li>10. Meningkatnya Penerapan Teknologi Perikanan</li> <li>11. Meningkatnya Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan</li> <li>12. Meningkatnya ketahanan pangan</li> <li>13. Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah</li> <li>14. Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/perkebunan</li> <li>2. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan</li> <li>3. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran</li> <li>4. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit</li> <li>5. Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi budidaya tanaman pertanian dan perkebunan</li> <li>6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan</li> <li>7. Meningkatkan Kualitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan</li> <li>8. Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Insfrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)</li> <li>9. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitas yang sudah terbentuk</li> <li>10.Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan</li> <li>11.Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan</li> <li>12. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan</li> <li>13.Mengembangkan Kawasan Agrowisata</li> </ol>



MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		15. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan 16. Meningkatkan Daya Saing Produk 17. Meningkatkan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen) 18. Meningkatkan Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM 19. Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM 20. Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	14. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata dan kemitraan pariwisata 15. Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya 16. Meningkatkan Struktur Industri yang menggunakan bahan Baku Lokal 17. Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan 18. Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal 19. Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar 20. Meningkatkan Kualitas kelembagaan koperasi 21. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan keunggulan kompetitif yang dimiliki UMKM/UKM 22. Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah 23. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Misi 2 :  Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	1. Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan 2. Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran 3. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana 4. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan 6. Meningkatkan Kualitas	1. Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) 2. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran 4. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana 5. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 6. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran 7. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	1. Meningkatkan penanganan pada PMKS dan peningkatan penanganan RTLH 2. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS 3. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran 4. Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam 5. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan 6. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja 7. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Penyelenggaraan Transmigrasi</p> <p>7. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>8. Meningkatkan kesetaraan gender</p> <p>9. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga</p> <p>10. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan</p> <p>11. Mengembangkan dan Melestarikan Kebudayaan Daerah</p> <p>12. Meningkatkan Sarana Budaya dan Kebudayaan</p> <p>13. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban</p> <p>14. Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan</p> <p>15. Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran</p> <p>16. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana</p> <p>17. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>18. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>19. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi</p> <p>20. Meningkatkan Pemberdayaan</p>	<p>8. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>9. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi</p> <p>10. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>11. Meningkatnya kesetaraan gender</p> <p>12. Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak</p> <p>13. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>14. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>15. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga</p> <p>16. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan</p> <p>17. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah</p> <p>18. Meningkatnya Promosi Seni dan Cagar Budaya</p> <p>19. Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan</p> <p>20. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>21. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan</p> <p>22. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )</p> <p>23. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</p> <p>24. Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran</p> <p>25. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana</p> <p>26. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>27. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan</p>	<p>masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat</p> <p>9. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran</p> <p>10. Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi</p> <p>11. Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender</p> <p>12. Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak</p> <p>13. Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan</p> <p>14. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>15. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga</p> <p>16. Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan</p> <p>17. Meningkatkan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi</p> <p>18. Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian</p> <p>19. Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan</p> <p>20. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat</p> <p>21. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat</p> <p>22. Meningkatkan penanganan pada PMKS dan peningkatan penanganan RTLH</p> <p>23. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS</p> <p>24. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran</p> <p>25. Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam</p> <p>26. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>21.Meningkatkan kesetaraan gender</p> <p>22.Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olagra</p> <p>23.Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan</p> <p>24.Mengembangkan dan Melestarikan Kebudayaan Daerah</p> <p>25.Meningkatkan Sarana Budaya dan Kebudayaan</p>	<p>Menurunkan Tingkat Pengangguran</p> <p>28.Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga</p> <p>29.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>30.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi</p> <p>31.Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>32.Meningkatnya kesetaraan gender</p> <p>33.Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak</p> <p>34.Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>35.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>36.Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga</p> <p>37.Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan</p> <p>38.Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah</p> <p>39.Meningkatnya Promosi Seni dan Cagar Budaya</p> <p>40.Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan</p> <p>41.Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>masyarakat, dan berbasis kewirausahaan</p> <p>27.Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja</p> <p>28.Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja</p> <p>29.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat</p> <p>30.Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran</p> <p>31.Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi</p> <p>32.Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender</p> <p>33.Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak</p> <p>34.Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan</p> <p>35.Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>36.Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga</p> <p>37.Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan</p> <p>38.Meningkatkan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi</p> <p>39.Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian</p> <p>40.Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan</p> <p>41.Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat</p>
<p>Misi 3:</p> <p>Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan</p>	<p>1.Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian</p> <p>2.Meningkatnya sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai</p> <p>3.Meningkatkan Infrastruktur</p>	<p>1. Meningkatkan sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana Infrastruktur Sumber Daya Air</p> <p>3. Meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui ketersediaan bangunan instansi pemerintah</p>	<p>1. Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurai kemacetan</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	<p>Sumber Daya Air untuk peningkatan perekonomian</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan pemerintahan</p> <p>5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau</p> <p>6. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana</p> <p>7. Mewujudkan Penataan Ruang yang Memperhatikan Keberlanjutan Sumber Daya Wilayah</p> <p>8. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan</p> <p>9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup</p> <p>10. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Transportasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah</p>	<p>4. Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni</p> <p>5. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana</p> <p>6. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya</p> <p>7. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan</p> <p>8. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>9. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral</p> <p>10. Meningkatnya Transportasi Masyarakat yang Memadai</p>	<p>drainase</p> <p>4. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran</p> <p>5. Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)</p> <p>6. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</p> <p>7. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah</p> <p>8. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan</p> <p>9. Meningkatkan Transportasi Masyarakat yang Memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan, meningkatnya tipe terminal, dan pengembangan rute baru angkutan umum</p>
Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal	<p>1. Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan</p> <p>2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat atas Pelayanan Pendidikan</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan</p>	<p>1. Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan</p> <p>2. Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>3. Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar</p> <p>4. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan</p>	<p>1. Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penengangan kenakalan siswa didik</p> <p>2. Meningkatkan aksebilitas pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	<p>4. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan</p>	<p>Menengah</p> <p>5. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Non Formal</p> <p>6. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>7. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar</p> <p>8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah</p> <p>9. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal</p> <p>10. Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik</p> <p>11. Meningkatnya Kualifikasi Akademik Pendidik</p> <p>12. Meningkatnya Profesionalisme Pendidik</p> <p>13. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kependidikan</p> <p>14. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>15. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar</p> <p>16. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah</p> <p>17. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal</p>	<p>3. Meningkatkan akseibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa</p> <p>4. Meningkatkan akseibilitas pendidikan menengah melalui pengembangan pelayanan pendidikan menengah dan pemberian beasiswa serta penyediaan unit sekolah menengah</p> <p>5. Meningkatkan akseibilitas pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pelaksanaan akreditasi sekolah TK/RA</p> <p>7. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs, dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SD/MI dan SMP/MtS</p> <p>8. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SMA/MA dan akreditasi program keahlian SMK , dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SMA/MA</p> <p>9. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui peningkatan angka kelulusan pendidikan kesetaraan</p> <p>10. Meningkatkan pemenuhan kekurangan tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP,MTs, dan SMA/MA/SMK</p> <p>11. Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah</p> <p>12. Meningkatkan profesionalisme pendidik yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik bagi guru di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK</p> <p>13. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar</p> <p>14. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (TK/RA) sesuai dengan kebutuhan</p> <p>15. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sesuai dengan kebutuhan</p> <p>16. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) sesuai dengan kebutuhan</p> <p>17. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal (penyelenggara pendidikan kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>Misi 5 :</p> <p>Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Termasuk Potensi KLB (Kejadian Luar Biasa) dan Bencana</li> <li>3. Meningkatkan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>4. Menjamin Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar</li> <li>5. Menjamin Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu</li> <li>2. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</li> <li>3. Meningkatnya Gizi Masyarakat</li> <li>4. Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>5. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>6. Meningkatnya Lingkungan Sehat</li> <li>7. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga</li> <li>8. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten</li> <li>2. Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi KLB</li> <li>3. Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin</li> <li>4. Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan</li> <li>5. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan di semua tingkatan</li> <li>6. Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga</li> <li>7. Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga</li> <li>8. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana</li> </ol>
<p>Misi 6 :</p> <p>Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah</li> <li>2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan</li> <li>3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme</li> <li>4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</li> <li>5. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan</li> <li>6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah</li> <li>2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan</li> <li>3. Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur</li> <li>4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>5. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>7. Meningkatnya Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif</li> <li>2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan</li> <li>3. Meningkatkan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai, pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan 12 structural yang kosong</li> <li>4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan</li> <li>5. Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa</li> <li>6. Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan</li> </ol>

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</p> <p>7. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan</p> <p>8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</p> <p>9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya</p> <p>10. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan</p> <p>11. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah</p> <p>12. Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi</p>	<p>8. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan</p> <p>9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya</p> <p>10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>11. Meningkatkan Investasi</p> <p>12. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan</p> <p>13. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah</p> <p>14. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah</p> <p>7. Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan pengelolaan aset yang dimiliki daerah</p> <p>8. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku</p> <p>9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya</p> <p>10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>11. Meningkatkan Investasi melalui pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai</p> <p>12. Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat yang disertai peningkatan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya</p> <p>13. Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada</p> <p>14. Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah daerah dan pemerintah desa</p>

## **B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung**

Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD tahun 2013-2018 dan merupakan keberlanjutan dari fokus pembangunan tahun 2016. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2017 diarahkan untuk **VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda prioritas nasional pada tahun 2017 yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.



Selain mendukung kebijakan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 juga selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dimana Arah Prioritas pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Sedangkan isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah:

1. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
3. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
8. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga;
9. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
10. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
12. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah;
13. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
14. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan *e-Government*;

15. Belum optimalnya pelayanan publik.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu Strategis selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013-2018.

Sedangkan arah kebijakan RKPD tahun 2017 merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD yang diarahkan pada :

1. Pembangunan di Urusan Pertanian;
2. Pembangunan di Urusan Perikanan;
3. Pembangunan di Urusan Lingkungan Hidup
4. Pembangunan di Urusan Pertanahan
5. Pembangunan di Urusan Pariwisata;
6. Pembangunan di Urusan Perumahan rakyat ;
7. Pembangunan di Urusan Pariwisata;
8. Pembangunan di Urusan Kehutanan;
9. Pembangunan di Urusan Komunikasi dan Informatika; dan
10. Pembangunan di Urusan Kebudayaan;
11. Pembangunan di Urusan Pekerjaan Umum

Adapun strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel. 4.2.  
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas  
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
<b>Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian	1	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/ perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan
2	Peningkatan Penerapan Teknologi, inovasi Peternakan	2	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ <b>peternakan</b>	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ <b>peternakan</b>

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
3	Peningkatan Nilai Tambah hasil produksi pertanian	3	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
4	Peningkatan Kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	4	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
5	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	5	Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi budidaya tanaman pertanian dan perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan
6	Peningkatan produktivitas ternak	6	Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan
7	Peningkatan Kualitas kelembagaan petani dan SDM Penyuluhan	7	Meningkatkan Kualitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	8	Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan
9	Peningkatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	9	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitas yang sudah terbentuk	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	10	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
11	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan	11	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Diversifikasi Produk Perikanan		didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
12	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	12	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan
13	Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata	13	Mengembangkan Kawasan Agrowisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata
		14	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata dan kemitraan pariwisata		
	Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah		Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah
	Peningkatan Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh		Meningkatkan Struktur Industri yang menggunakan bahan Baku Lokal	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah
14	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	15	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Program Pengelolaan Pasar Daerah
15	Peningkatan Daya Saing Produk	16	Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
				Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan
16	Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	17	Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar	Perlindungan Konsumen	Perlindungan Konsumen
17	Peningkatan Peran Sektor Jasa, Kelembagaan	18	Meningkatkan Kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Koperasi dan UMKM				
18	Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	19	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan keunggulan kompetitif yang dimiliki UMKM/UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
19	Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	20	Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
20	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	21	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
				Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi sumber Sumber Daya Hutan

**Misi 2: Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera**

1	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	1	Meningkatkan penanganan pada PMKS dan peningkatan penanganan RTLH	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program pembinaan anak terlantar	Program pembinaan anak terlantar
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
2	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3	Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	3	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin
4	Peningkatan Pencegahan,	4	Meningkatkan upaya penanganan terhadap	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Program pencegahan dan kesiapsiagaan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Penanggulangan, dan Penanganan Bencana		bencana alam	Program tanggap darurat dan logistik	Program tanggap darurat dan logistik
				Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	5	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran	6	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	7	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	9	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
10	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10	Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
11	Peningkatan kesetaraan gender	11	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
12	Peningkatan Kualitas Kabupaten Layak Anak	12	Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak		
13	Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	13	Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	14	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
15	Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga	15	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
16	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	16	Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan
17	Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	17	Meningkatkan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18	Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya	18	Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
19	Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan	19	Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
20	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	20	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik	Program pendidikan politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan
21	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	21	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
<b>Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Peningkatan aksesibilitas Infrastruktur bagi pengembangan ekonomi	1	Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2	Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurangi kemacetan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2	peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	3	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
				Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong	Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
3	Peningkatan kualitas bangunan instansi pemerintah	4	Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Peningkatan Rumah Sehat dan Layak Huni	5	Meningkatkan Rumah yang sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum pemukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan



STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
5	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	6	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6	Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	7	Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
				Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar
7	peningkatan Pengelolaan Persampahan	8	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	9	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
9	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	10	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
10	Peningkatan Transportasi Masyarakat yang Memadai	11	Meningkatkan Transportasi Masyarakat yang Memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan, meningkatnya tipe terminal, dan pengembangan rute baru angkutan umum	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
<b>Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal</b>					
1	Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan	1	Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penengangan kenakalan siswa didik	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal
				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
2	Peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini	2	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)	Program pendidikan anak usia dini	Program pendidikan anak usia dini
3	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar	3	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
4	Peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah	4	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah melalui pengembangan pelayanan pendidikan menengah dan pemberian beasiswa serta penyediaan unit sekolah menengah	Program pendidikan menengah	Program pendidikan menengah
5	Peningkatan aksesibilitas pendidikan nonformal	5	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal
6	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini	6	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pelaksanaan akreditasi sekolah TK/RA	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
7	Peningkatan kualitas pendidikan dasar	7	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SD/MI dan SMP /MTs, dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SD/MI dan SMP/MTs	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Manajemen Pelayanan Pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
8	Peningkatan kualitas pendidikan menengah	8	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SMA/MA dan akreditasi program keahlian SMK, dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SMA/MA	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
				Program pendidikan menengah	Program pendidikan menengah
9	Peningkatan kualitas pendidikan nonformal	9	Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui peningkatan angka kelulusan pendidikan kesetaraan	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
10	Pemenuhan kebutuhan pendidik	10	Meningkatkan pemenuhan kekurangan tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP,MTs, dan SMA/MA/SMK	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
11	Peningkatan kualifikasi akademik pendidik	11	Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
12	Peningkatan profesionalisme pendidik	12	Meningkatkan profesionalisme pendidik yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik bagi guru di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
13	Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan	13	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
14	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	14	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (TK/RA) sesuai dengan kebutuhan	Program Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan anak usia dini
15	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	15	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sesuai dengan kebutuhan	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
16	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah	16	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) sesuai dengan kebutuhan	Program pendidikan menengah	Program pendidikan menengah
17	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	17	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal (penyelenggara pendidikan kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal

**Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat**

1	Peningkatan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu	1	Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
2	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi KLB	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3	Peningkatan Gizi Masyarakat	3	Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin	Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat
4	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
5	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan	5	Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan di semua tingkatan	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
				Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD
6	Peningkatan Lingkungan Sehat	6	Meningkatkan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
			melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
7	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga	7	Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
				Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
8	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana	8	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
				Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
				Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Program Pelayanan Kontrasepsi

**Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**

1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	2	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
3	Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	3	Meningkatkan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai, pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan struktural yang kosong	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Administrasi Kepegawaian	Program Administrasi Kepegawaian
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
				Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
				Program Kerjasama Daerah	Program Kerjasama Daerah
5	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5	Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6	Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
7	Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah	7	Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2017
	Daerah		pengelolaan asset yang dimiliki daerah		
8	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kearsipan	8	Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
10	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	10	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
11	Peningkatan Investasi	11	Meningkatkan Investasi melalui pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
12	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	12	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat yang disertai peningkatan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
13	Peningkatan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	13	Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
14	Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	14	Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada	program pengembangan informasi dan komunikasi	program pengembangan informasi dan komunikasi
15	Peningkatan Pengelolaan e-Government	15	Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah daerah dan pemerintah desa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018



Tabel 4.3  
Matrik Prioritas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017  
Sesuai Dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan</b>					
1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan	Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang	Kelompok	1140	Dintanbunhut
		Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama	Ha	1000	Dintanbunhut
		Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan	Unit	1.222	Dintanbunhut
		Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan	%	68	Dinakan
2	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul	%	70	Dintanbunhut
		Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok	10	Dintanbunhut
		Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit	%	80	Dintanbunhut
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka Kematian Ternak unggas	%	2	Dinakan
		Angka Kematian Ternak kecil	%	0,10	Dinakan
		Angka Kematian Ternak besar	%	0,10	Dinakan
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Peningkatan produktifitas Padi	Ton/Ha	6,78	Dintanbunhut
		Peningkatan produktifitas Jagung	Ton/Ha	6,58	Dintanbunhut
		Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Ton/Ha	27,07	Dintanbunhut
		Peningkatan produktifitas Cabai	Ton/Ha	6,50	Dintanbunhut
		Peningkatan produktifitas Kobis	Ton/Ha	26,52	Dintanbunhut
		Peningkatan produktifitas Tembakau	Ton/Ha	0,75	Dintanbunhut
		Peningkatan produktifitas Kopi Robusta	Ton/Ha	1,00	Dintanbunhut
5	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan	Peningkatan Produktivitas daging Sapi	Kg/Ekor	173,19	Dinakan
		Peningkatan Produktivitas daging Kambing	Kg/Ekor	13,53	Dinakan
		Peningkatan Produktivitas daging Domba	Kg/Ekor	13,53	Dinakan
		Peningkatan produksi telur ayam ras petelur	Butir	78.470.866	Dinakan
		Peningkatan populasi sapi	Ekor	29.167	Dinakan
		Peningkatan populasi domba	Ekor	321.775	Dinakan
		Peningkatan populasi kambing	Ekor	63.436	Dinakan
		Peningkatan populasi ayam buras	Ekor	1.672.391	Dinakan
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan	kali/tahun	10	Bappeluh
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh	orang/thn	3	Bappeluh
		Rasio jumlah kelompok tani maju	%	8,05	Bappeluh

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Kehutanan	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani	orang/thn	9.920	Bappeluh
		Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	72.32	Bappeluh
		Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	unit/thn	55	Bappeluh
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung	%	100	Dintanbunhut
		Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun	unit	419	Dintanbunhut
		Besaran jumlah jalan usaha tani	unit	360	Dintanbunhut
8	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan	%	100	Dintanbunhut
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Penggunaan induk ikan unggul	%	50	Dinakan
		Peningkatan produksi benih ikan	Ekor	102.236.750	Dinakan
10	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam)	Ton	5442.75	Dinakan
		Peningkatan produksi mina padi	Ton	3366.62	Dinakan
		Produktivitas benih ikan	ekor/m2	120	Dinakan
		Produktivitas ikan konsumsi	kg/m2	4,33	Dinakan
		Produktivitas mina padi	kg/Ha/th	980,97	Dinakan
11	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	258	Dinakan
		Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	16,53	Dinakan
		Peningkatan luas lahan budidaya ikan	Ha	123,83	Dinakan
		Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	Ton	585.34	Dinakan
12	Program peningkatan ketahanan pangan	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kap/hr	2940	KKP
		Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	gr/kap/hr	75,5	KKP
		Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Unit	67	KKP
		Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	%	10	KKP
		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	75	KKP
		Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	%	90,85	KKP
		Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	85	KKP
		Besaran Desa Mandiri Pangan	Desa	10	KKP
		Besaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	lokasi	5	KKP
13	Perlindungan	Persentase Ketersediaan Informasi	%	100	Disperindagkop

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Konsumen	Pasokan, Harga, dan Akses Pangan			dan UMKM
14	Program Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,51	Disperindagkop dan UMKM
		Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,72	Disperindagkop dan UMKM
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	Disperindagkop dan UMKM
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	170.000.000	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	480	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	Disperindagkop dan UMKM
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	18.993	Disperindagkop dan UMKM
		Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	80	Disperindagkop dan UMKM
17	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Prosentase jumlah koperasi aktif	%	89,67	Disperindagkop dan UMKM
		Besaran jumlah anggota koperasi	org	174.500	Disperindagkop dan UMKM
		Persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	48,55	Disperindagkop dan UMKM
18	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	Disperindagkop dan UMKM
		Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	364	Disperindagkop dan UMKM
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	212	Disperindagkop dan UMKM
		Besaran <b>Penurunan/Penanganan</b> Lahan kritis	Ha	14.581	BLH
		Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	%	100	BLH
		Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan	Kelompok	10	Dintanbunhut
		Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan	unit	292,97	Dintanbunhut

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</b>					
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1,28	Dinas Sosial
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	100	Dinas Sosial
		Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	4,78	Dinas Sosial
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	2,25	Dinas Sosial
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	20,34	Dinas Sosial
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	100	Dinas Sosial
		Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100	Dinas Sosial
		Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100	Dinas Sosial
		Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan	%	25,61	Dinas Sosial
		Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	Dinas Sosial
4	Program Pencegahan Dan Kesiap siagaan	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun	%	100	DPU
5	Program Tanggap Darurat Dan Logistik	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana	%	100	DPU
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	BPBD
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	BPBD

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80	Dinakertran
		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	90	Dinakertran
		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%	80	Dinakertran
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja	%	72	Dinakertran
		Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,5	Dinakertran
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	Dinakertran
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	81	Dinakertran
8	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	18	Dinakertran
		Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis	%	90	Dinakertran
		Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100	Dinakertran
		Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan	%	78	Dinakertran
9	Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	%	25	Bapermades
		Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif	%	100	Bapermades
		Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan)	%	65	Bapermades
		Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)	%	12,2	Bapermades
		Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	%	28	Bapermades
		Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran	%	0,26	Bapermades
		Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	%	20	Bapermades
		Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	100	Bapermades
		Persentase Penempatan Transmigran	%	80	
10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	BKBPP
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	BKBPP

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	%	85	BKBPP
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	75	BKBPP
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan	%	25	BKBPP
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	%	98	BKBPP
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	86	BKBPP
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	50	BKBPP
		Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasio	1 : 2600	BKBPP
		Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	%	50	BKBPP
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Hak Sipil dan Kebebasan	%	85	BKBPP
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	%	75	BKBPP
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Kesehatan Dasar	%	75	BKBPP
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	%	80	BKBPP
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	%	65	BKBPP
11	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Besaran kegiatan kepemudaan	Kegiatan	12	Dinbudparpora
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga	%	16,47	Dinbudparpora
		Kegiatan olah raga	Kali	82	Dinbudparpora
		Besaran Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	85	Dinbudparpora
		Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Prestasi	7	Dinbudparpora
13	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	Dinbudparpora
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada	%	100	Dinbudparpora

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pondok Pesantren			
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	Dinbudparpora
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	Dinbudparpora
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya	%	0,25	Dinbudparpora
		Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi	0	6,38	Dinbudparpora
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Kajian Seni	%	33,3	Dinbudparpora
		Cakupan Fasilitas Seni	%	71,4	Dinbudparpora
		Cakupan Gelar Seni	%	100	Dinbudparpora
		Cakupan Misi Kesenian	%	90	Dinbudparpora
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	75	Dinbudparpora
		Cakupan Tempat Kesenian	%	50	Dinbudparpora
		Cakupan Organisasi Kesenian	%	100	Dinbudparpora
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Fasilitas Cagar Budaya	%	2,12	Dinbudparpora
		Cakupan Promosi Cagar Budaya	%	0,53	Dinbudparpora
		Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan	%	100	Dinbudparpora
17	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat	%	100	Kantor KESBANG
		Persentase Kasus Pekat yang Tertangani	%	100	Kantor KESBANG
		Persentase Partisipasi Pemilih	%	-	Kantor KESBANG
		Penurunan Kasus SARA	%	100	Kantor KESBANG
		Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika	%	100	Kantor KESBANG
18	Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	Satpol PP
		Angka Kriminalitas	angka	0,47	Satpol PP
		Cakupan Penanganan demonstrasi	%	100	Satpol PP
19	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak krimina	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	kali	2	Satpol PP
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,62	Satpol PP
<b>Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan</b>					
1	Program Pemba ngunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	%	79	DPU dan dishubkominfo
2	Program penge mbangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	%	5,87	DPU
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40,5	DPU
3	Program Peningkatan	Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	Unit	1	DPU

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Sarana& Prasarana Aparatur				
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,88	Dinas Sosial, DPU, Bapermades
		berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	Hektar (Ha)	22,3	
		Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	88,1	
		Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	90,2	DPU & DINKES
		Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	%	8	DPU
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	%	64	DPU
5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80	DPU
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	80	DPU
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	93	DPU
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90	DPU
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	PERDA	3	Bappeda & DPU
		Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci	%	100	Bappeda
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang	%	100	KP3M
		Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya	%	100	Bappeda
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang	%	100	DPU/BAPPEDA/ KP3M/ SATPOL PP
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota	%	30,5	BLH/DPU
		Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	%	17,3	DPU
		Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R)	%	11,2	DPU
9	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung	%	14	DPU
10	Program Pengembangan Kinerja	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan	%	86	DPU



No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Persampahan	Temanggung)			
		Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)	%	60	DPU
		Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	unit	1	DPU, Pemerintahan Umum, BLH
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	100	BLH
12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	100	BLH
		Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya	%	80	BLH
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	BLH
		Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL	%	100	BLH
		terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan	unit	7	DPU
13	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Kendaraan yang Diuji	%	94,3	Dishubkominfo
		Persentase keselamatan angkutan umum	%	94,3	Dishubkominfo
		Tersedianya Fasilitas Terminal (tipeb)	Unit	1	Dishubkominfo
		Tersedianya sub terminal (tipe c)	Unit	12	Dishubkominfo
14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	67	Dishubkominfo
15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	80	Dishubkominfo
		Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	67	Dishubkominfo
		Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek	%	100	Dishubkominfo

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal</b>					
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	%	86.33	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan	%	40	Dinas Pendidikan
		Persentase pendidik yang disiplin	%	100	Dinas Pendidikan
		Persentase angka kenakalan siswa	%	0	Dinas Pendidikan
2	Program pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	68.63	Dinas Pendidikan
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	32.52	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)	%	48.73	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	%	49.15	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per kelas TK	Rasio	21	Dinas Pendidikan
3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase APK SD Sederajat	%	103.67	Dinas Pendidikan
		Persentase APM SD Sederajat	%	95.54	Dinas Pendidikan
		Persentase APK SMP Sederajat	%	96.15	Dinas Pendidikan
		Persentase APM SMP Sederajat	%	83.78	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	%	100,00	Dinas Pendidikan
		Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar	%	48.67	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Kelas SD/MI	Angka	21.14	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	Angka	31.98	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	74,42	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	99.49	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	99.37	Dinas Pendidikan
4	Program pendidikan menengah	Persentase APK Pendidikan Menengah	%	57.06	Dinas Pendidikan
		Persentase APM Pendidikan Menengah	%	40.05	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah	%	65.93	Dinas Pendidikan
		Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan	%	50.93	Dinas Pendidikan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menengah			
		Rasio Siswa per Kelas SMA/MA	Rasio	1:30	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Kelas SMK	Rasio	1 : 32	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah	%	45,41	Dinas Pendidikan
		Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan	%	80	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	44.21	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun	Unit/10 000 penduduk usia sekolah	13,75	Dinas Pendidikan
5	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf Usia $\geq$ 15 tahun	%	98.7	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.17	BPS, Dinas Pendidikan
6	Program pendidikan nonformal	Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah	%	50	Dinas Pendidikan
7	Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase TK/RA Terakreditasi A	%	5.83	Dinas Pendidikan
		Persentase TK/RA Terakreditasi B	%	42,71	Dinas Pendidikan
		Persentase TK/RA Terakreditasi C	%	42,29	Dinas Pendidikan
		Persentase SD/MI Terakreditasi A	%	4.33	Dinas Pendidikan
		Persentase SD/MI Terakreditasi B	%	61.01	Dinas Pendidikan
		Persentase SD/MI Terakreditasi C	%	33.22	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi A	%	29.5	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi B	%	40	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi C	%	27.62	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Lulusan SD/MI	%	99.97	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Lulusan SMP/MTs	%	100	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq$ 7,00	%	73.35	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq$ 7,00	%	21.23	Dinas Pendidikan
8	Program Wajib	Persentase Siswa Baru SD/MI yang	%	94.86	Dinas

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	berasal dari TK/RA			Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.14	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.39	Dinas Pendidikan
9	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	Dinas Pendidikan
		Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan.	%	75.04	Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/MA Terakreditasi A	%	44.43	Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/MA Terakreditasi B	%	25.93	Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/MA Terakreditasi C	%	22.22	Dinas Pendidikan
		Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A	%	28.59	Dinas Pendidikan
		Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B	%	47.62	Dinas Pendidikan
		Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C	%	19.05	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK	%	100,00	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq 7,00$	%	57.93	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	1.56	Dinas Pendidikan
10	Program Pendidikan Nonformal	Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	92.56	Dinas Pendidikan
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA	Rasio	1 : 14	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Pendidik SD/MI	Rasio	1 : 14	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs	Rasio	1:15	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA	Rasio	1 : 11	Dinas Pendidikan
		Rasio Siswa per Pendidik SMK	Rasio	1:14	Dinas Pendidikan
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	44.33	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	71.16	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83.54	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	91.7	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SMK yang	%	90.46	Dinas

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		memenuhi standar kualifikasi akademik			Pendidikan
		Cakupan ketersediaan guru SD/MI.	%	94.4	Dinas Pendidikan
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran.	%	83.3	Dinas Pendidikan
		Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	87.5	Dinas Pendidikan
		Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs.	%	80.5	Dinas Pendidikan
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.	%	72.8	Dinas Pendidikan
		Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI.	%	87.8	Dinas Pendidikan
		Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs	%	96.5	Dinas Pendidikan
		Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah.	%	95.92	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik	%	3.63	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	%	31.3	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik	%	50.59	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik	%	45.29	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	%	45.29	Dinas Pendidikan
		Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181	Dinas Pendidikan
		Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	18	Dinas Pendidikan
		Rasio Pengawas Sekolah	Rasio	1 : 17	Dinas Pendidikan
		Besaran Pamong Belajar	Orang	5	Dinas Pendidikan
13	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	88.4	Dinas Pendidikan
		Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	87.06	Dinas Pendidikan
		Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	28.19	Dinas Pendidikan
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	87.06	Dinas Pendidikan
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	87.06	Dinas Pendidikan
		Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik	%	92.07	Dinas Pendidikan
		Persentase Ruang Kelas SMP yang	%	92.25	Dinas Pendidikan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Kondisinya Baik			Pendidikan
		Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	68.74	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	79.99	Dinas Pendidikan
		Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100,00	Dinas Pendidikan
		Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	88.16	Dinas Pendidikan
		Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	79.52	Dinas Pendidikan
		Cakupan Ketersediaan Ruang Guru	%	99.85	Dinas Pendidikan
14	Program pendidikan menengah	Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik	%	99.71	Dinas Pendidikan
		Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik	%	99,39	Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	%	96,27	Dinas Pendidikan
		Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	%	95,47	Dinas Pendidikan
		Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	%	79,81	Dinas Pendidikan
		Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	%	83,10	Dinas Pendidikan
<b>MISI 5 : Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</b>					
1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yg Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95	Dinas Kesehatan
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	90	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	95	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	perkilo mil	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	98	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	99	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatal dengan	%	65	Dinas

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Komplikasi yang Ditangani			Kesehatan
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	permil	0,989	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	7	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	12	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	14	Dinas Kesehatan
		Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB	%	80	Dinas Kesehatan
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	RSUD
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	%	100	RSUD
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	%	>87	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	%	70	Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa	%	< 0,05	Dinas Kesehatan
		Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	%	67.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	70	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	90	Dinas Kesehatan
		CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)	0	< 1	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	0	<1	Dinas Kesehatan
		Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk	%	<20	Dinas Kesehatan
		CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<1	Dinas Kesehatan
		Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	100	Dinas Kesehatan
		Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak	%	95	Dinas Kesehatan
		Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	kasus	≥2 (4 kasus)	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penderita diare yg ditangani	%	100	Dinas Kesehatan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
4	<i>Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	15.5	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	Dinas Kesehatan
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	90	Dinas Kesehatan
6	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar	%	68.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	85	Dinas Kesehatan
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	Rasio	1/31.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan RSUD:	0		RSUD
		BOR	%	66	RSUD
		LOS	hari	5	RSUD
		TOI	hari	2	RSUD
		GDR	%	36	RSUD
		NDR	%	18	RSUD
		Kinerja Pelayanan BLUD	Strata	Sehat	RSUD
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	-	Lulus	RSUD
7	Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	72.5	Dinas Kesehatan
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	72.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban	%	80	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	%	72.5	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	%	58	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	%	100	Dinas Kesehatan
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	BKBPP
		Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	%	48	BKBPP
		Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	80	BKBPP
9	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	0		BKBPP
		a. Keluarga Pra Sejahtera	%	20,26	BKBPP
		b. Keluarga Sejahtera I	%	7,24	BKBPP



No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		c. Keluarga Sejahtera II	%	23,17	BKBPP
		d. Keluarga Sejahtera III	%	45,21	BKBPP
		e. Keluarga Sejahtera III plus	%	4,12	BKBPP
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	BKBPP
10	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	%	2,7	BKBPP
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	83,8	BKBPP
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	5,1	BKBPP
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,19	BKBPP
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB	%	85,8	BKBPP
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan	Rasio	1 : 4	BKBPP
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	Rasio	1 : 1	BKBPP
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,54	BKBPP
		Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,62	BKBPP
		Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	0	14.057	BKBPP
		Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	3	BKBPP
<b>MISI 6 :Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>					
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Besaran Penelitian dan Pengembangan	dokumen	1	Bappeda
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	Bappeda
		Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio	0,19	Bappeda
		Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0,018	Bappeda
		Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik	Dokumen	5	Bappeda
		Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	%	100	Bappeda
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	%	100	Bappeda
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra	%	100	Bappeda

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		SKPD			
		Persentase program SKPD di Luar RPJMD	%	0	Bappeda
		Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD	%	0	Bappeda
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	96,13	Bagian Pemerintahan Umum Setda
		Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	17,5	Bagian Pemerintahan Umum Setda
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	1,8	BKD
		Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	%	2,8	BKD
		Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	35	BKD
		Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	%	93	BKD
		Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong	%	87	BKD
		persentase PNS Lulusan S1	%	55	BKD
		Persentase PNS Lulusan S2/ S3	%	4,8	BKD
		Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	%	54	BKD
		Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	%	100	BKD
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus	%	100	Bagian Pemerintahan Desa Setda
		Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	100	Bagian Pemerintahan Desa Setda
		Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	Bagian Pemerintahan Desa
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	%	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan	%	100	Sekretariat DPRD
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	85	Inspektorat
7	Program Penataan Peraturan	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	70	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Perundang-undangan	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	75	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
8	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	B	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kriteria	B	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	95	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
		Persentase Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	0	100	Bagian Umum
		Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	Bagian Pembangunan
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	Bagian Pembangunan
		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	Bagian Pembangunan
		Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	25	Bagian Hukum
		Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	100	DPPKAD
		Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	1	Bagian Umum
		Besaran kerjasama daerah	Dokumen	96,8	Bagian Pemerintahan Umum Setda
		Cakupan Pelaksanaan SPM	%	100	Bagian Pemerintahan Umum Setda
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	75	Bagian Pemerintahan Umum Setda
		Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan	%	100	Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Kecamatan
		Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	87	
11	Program Peningkatan dan Pengembangan	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	9	DPPKAD

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Keuangan Daerah				
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	DPPKAD
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	9	DPPKAD
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	32.58	DPPKAD
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	59.79	DPPKAD
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	100	
		Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	95	
16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur	%	100	KP3M
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	7	KP3M
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	14,43	KP3M
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	Hari	170 M	KP3M
17	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Investasi	%	1504	KP3M
18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi	Rupiah	7	KP3M
		Besaran jumlah Investor	investor	32	KP3M
		Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Kali/th	100	KP3M
		Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	unit	80	KP3M
		Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik	%	83	KP3M

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2017	SKPD PENANGGUNG JAWAB
19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	9	Kantor Arsip, Perpodok
		Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung	%	75	
20	Program Pengembangan Data/ Informasi	Besaran ketersediaan data statistik	dokumen	5	Bappeda
21	Program pengembangan informasi dan komunikasi	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	rasio	8	Dishubkominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional	kali	8	Dishubkominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal	kali	8	Dishubkominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	8	Dishubkominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	45	Dishubkominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru	hari	100	Dishubkominfo
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	75	Dishubkominfo
		Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun	%	75	Dishubkominfo
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog	%	86.33	Dishubkominfo
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital	%	40	Dishubkominfo
		22	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%
23	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	0	Dishubkominfo

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017**

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah serta program prioritas dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas tersebut terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

#### **A. Urusan Wajib**

##### **1. Pendidikan**

Program dan kegiatan urusan Pendidikan mempunyai sasaran meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penenganan kenakalan siswa didik. Sasaran lainnya adalah untuk meningkatkan akseibilitas pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini), meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Pengembangan pendidikan pada semua jenjang tersebut harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan manajemen sekolah serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pendidikan anak usia dini, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengembangan pendidikan anak usia dini, rehabilitasi gedung TK negeri, pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu, fasilitasi Ban-Keu penyelenggaraan lomba gugus paud dan lomba KB/TK berprestasi, bantuan penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi, workshop pengembangan kurikulum muatan lokal dan budi pekerti jawa, workshop pendidik PAUD tentang seni budaya jawa, pendampingan Ban-Keu pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu, pembangunan pagar keliling TK, pengadaan alat permainan edukatif PAUD, fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi, dan penguatan organisasi mitra PAUD;
- b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dilaksanakan dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan ruang ibadah SD, pembangunan perpustakaan SD, pelaksanaan program MBS dan lomba-lomba SD, pendampingan Ban-Keu Bidang Dikdas, pendampingan DAK

SD, pelaksanaan lomba bidang akademik SMP, pengadaan alat laboratorium IPA SMP, olimpiade Sain dan olimpiade olah raga siswa nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) SD, pelaksanaan lomba perpustakaan dan gugus SD, pendampingan bos dalam rangka mewujudkan sekolah murah di SD/MI (Ban-Keu), pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah di SMP/MTS (Ban-Keu), fasilitasi pendidikan inklusi SD (Ban-Keu), fasilitasi pendidikan inklusi SMP (Ban-Keu), rehab ruang kelas SD/SDLB (Ban-Keu), rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Ban-Keu), pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB (Ban-Keu), pengadaan TIK perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Gub), TPK Manajemen Berbasis Sekolah (Ban-Keu), fasilitasi program makanan tambahan anak sekolah (Ban-Keu), pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Ban-Keu), sosialisasi kurikulum 2013, pengadaan meubelair pengganti SD/SDLB (Ban-Gub), DAK SD, fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Ban-Keu), pendampingan BOS SMP, pelaksanaan lomba bidang akademik SMP, pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP, seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB, seleksi/lomba TUB/PBB SMP, pembinaan UKS/LSS LCC Dokter Kecil, pendampingan Ban-Keu SMP, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP (Ban-Gub), pengadaan buku mulok Bahasa Jawa SMP (Ban-Gub), pengadaan meubelair pengganti SMP (Ban-Keu), DAK SMP, fasilitasi kegiatan BOS SD, pengadaan meubelair sekolah (Ban-Keu), pembangunan pagar dan pengaspalan jalan , pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP, penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTS, pengadaan buku mulok Bahasa Jawa SMP (Ban-Keu), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP (Ban-Keu), fasilitasi kegiatan BOS SMP, fasilitasi bantuan keuangan SMP, DAK SMP, UAS/EHB SD/MI, seleksi/lomba TUB/PBB SMP, fasilitasi Ban-Keu SD, fasilitasi Ban-Keu Bidang Dikdas, dan pengadaan TIK pembelajaran SD/SDLB (Ban-Keu);

- c. Program pendidikan menengah, dengan prioritas kegiatan diantaranya :
- pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah,
  - pembangunan perpustakaan sekolah SMA/SMK, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Ban-Keu), rehabilitasi sedang/berat ruang guru SMA/SMK, penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA, MA, SMK, bantuan dana operasional pendidikan SMA/SMK, pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMA/SMK, pendampingan Ban-Keu Bidang Dikmen, pelaksanaan lomba bidang akademik (SMA DAN SMK), pengadaan alat laboratorium IPA SMA/SMK (Ban-Keu), pengadaan alat bengkel SMK (Ban-Keu), fasilitasi penelitian IPA/IPS siswa SMA (Ban-Keu), fasilitasi CC SMK (Ban-Keu), fasilitasi

peningkatan kemampuan bahasa inggris guru SMA (Ban-Keu), fasilitasi peningkatan kemampuan bahasa inggris guru SMK (Ban-Keu), pembangunan ruang kelas baru SMK/SMA (Ban-Keu), implementasi SMM ISO SMK/SMA (Ban-Keu), fasilitasi pemasaran tamatan SMK (Ban-Keu) , DAK SMA, DAK SMK, fasilitasi program kelas industri SMK (Ban-Keu), fasilitasi BOS SMA/SMK, penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya jawa SMA/MA/SMK, pengadaan buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tata krama atau nilai budaya daerah atau keteladanan SMA/MA/SMK, bantuan beasiswa SMA/MA/SMK dari keluarga kurang mampu (Ban-Keu), pembangunan perpustakaan sekolah SMA/SMK (Ban-Keu), fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (Ban-Keu), pengadaan komputer SMA/SMK (Ban-Keu), pendampingan DAK pendidikan (Dikmen), seleksi paskibraka, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA/SMK, dan seleksi/lomba TUB/PBB SMA;

- d. Program pendidikan non formal, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan pendidikan masyarakat, penyelenggaraan HAI dan HAN, penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP, pendampingan PNF, penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C, penyelenggaraan PKBM, fasilitasi Hari Aksara Internasional (Ban-Keu), pengadaan buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tata krama atau nilai budaya daerah atau keteladanan pendidikan non formal, penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya jawa pendidikan non formal, pelaksanaan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya jawa pendidikan non formal, tindak lanjut program pengurangan pekerja anak (PPA) Program Keluarga Harapan, fasilitasi pendidikan masyarakat, dan fasilitasi pendidikan kesetaraan;
- e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelaksanaan sertifikasi pendidik, penilaian kinerja kepala sekolah, seleksi kepala sekolah, seleksi guru berprestasi, fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT, fasilitasi bantuan tenaga pendidik, pengembangan profesi pendidik formal (Ban-Keu), pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Ban-Keu), penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal (Ban-Keu), pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, penilaian pak tenaga fungsional pendidikan, pelaksanaan program diklat PAK dan PKG, bantuan kesejahteraan PTT/GTT, kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti pendidik formal (Ban-Keu), peningkatan kualifikasi pendidikan S1/D4 pendidik formal (Ban-Keu), peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD non formal (Ban-Keu),



pelatihan guru mapel yang diujikan secara nasional, sosialisasi program induksi, bintek peningkatan kapasitas kerja karyawan, bintek penelitian tindakan kelas (PTK) pendidik TK, SD, SMP, SMA, SMK, pendampingan Ban-Keu penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi (Ban-Keu), operasional pengawas SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Ban-Keu), penyelenggaraan olimpiade sains guru, penerbitan jurnal pendidikan, BOS daerah (peningkatan mutu), pendampingan Ban-Keu kesejahteraan pendidik PAUD, diklat calon kepala sekolah, dan fasilitasi bantuan keuangan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi; dan

- f. Program manajemen pelayanan pendidikan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : profil dan pendataan pendidikan, lomba sekolah sehat TK, SMP dan SMA, manajemen pendataan pendidikan (Ban-Keu), bantuan operasional pengelolaan bantuan pendidikan (Ban-Keu), fasilitasi penyelenggaraan UN dan UNPK (Ban-Keu), akreditasi di sekolah madrasah (MI, MTS, MA), POPDA SD, SMP DAN SMA, festival dan lomba seni siswa, implementasi kurikulum 2013, penerimaan peserta didik baru secara online (PPDB online), pameran pendidikan, bantuan pengarusutamaan jender (Ban-Keu), bantuan fasilitasi kantin sehat (Ban-Keu), festival dan lomba seni siswa, dan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan (Ban-Keu).

## **2. Kesehatan**

Program dan kegiatan urusan Kesehatan mempunyai sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang bermutu mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi KLB, meningkatkan gizi masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan, meningkatkan sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan di semua tingkatan, meningkatkan lingkungan sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan pedesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, dengan prioritas kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, serta penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;

- b. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, kapitasi BPJS, Usaha Kesehatan Sekolah, penyediaan klinik kesehatan paru (DBHCHT), pelayanan Jampersal, fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP milik pemerintah daerah, kapitasi JKN pada Puskesmas Dharma Rini, kapitasi JKN pada Puskesmas Bulu, kapitasi JKN pada Puskesmas Tembarak, kapitasi JKN pada Puskesmas Selopampang, kapitasi JKN pada Puskesmas Temanggung, kapitasi JKN pada Puskesmas Kranggan, kapitasi JKN pada Puskesmas Tlogomulyo, kapitasi JKN pada Puskesmas Pringsurat, kapitasi JKN pada Puskesmas Kaloran, kapitasi JKN pada Puskesmas Kandangan, kapitasi JKN pada Puskesmas Kedu, kapitasi JKN pada Puskesmas Parakan, kapitasi JKN pada Puskesmas Bansari, kapitasi JKN pada Puskesmas Kledung, kapitasi JKN pada Puskesmas Ngadirejo, kapitasi JKN pada Puskesmas Jumo, kapitasi JKN pada Puskesmas Gemawang, kapitasi JKN pada Puskesmas Tretep, kapitasi JKN pada Puskesmas Candiroto, kapitasi JKN pada Puskesmas Bejen, kapitasi JKN pada Puskesmas Tepusen, kapitasi JKN pada Puskesmas Traji, kapitasi JKN pada Puskesmas Pare, kapitasi JKN pada Puskesmas Wonobojo, pelayanan kebidanan, dan pelayanan terapi rumatan metadon;
- c. Program pengawasan obat dan makanan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT, pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan, peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah, dan peningkatan kualitas tenaga pengawas keamanan pangan;
- d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan prioritas kegiatan pengembangan desa siaga dan promosi kesehatan;
- e. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, intervensi dan penanganan anak gizi buruk, evaluasi program gizi, penanggulangan GAKY di Kabupaten Temanggung (Ban-Keu), dan fasilitasi penanggulangan GAKY di Kabupaten Temanggung;
- f. Program pengembangan lingkungan sehat, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyehatan lingkungan pemukiman, hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, sanitasi total berbasis masyarakat, dan penyehatan air;
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengendalian penyakit menular, Bulan

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), penanggulangan KLB dan bencana, pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, pengendalian vektor, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan mata;

- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan, akreditasi Puskesmas, standarisasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dan rekomendasi dan perijinan kesehatan;
- i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pendampingan jaminan kesehatan Temanggung, dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelayanan kesehatan dasar (DAK), pelayanan kefarmasian (DAK), relokasi Puskesmas Jumo, pembangunan Puskesmas Selopampang \*), pembangunan Puskesmas Terpadu/Percontohan, fasilitasi Ban-Keu sarana prasarana pembangunan rehab sedang/berat Puskesmas pembantu tahun 2016, pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya Puskesmas percontohan, fasilitasi pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya Puskesmas Percontohan, rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo, tempuran Kecamatan Kaloran, Nglondong Kecamatan Parakan dan Morobongo Kecamatan Jumo tahun 2016, penunjang DAK pelayanan kesehatan dasar, penunjang DAK pelayanan kefarmasian, fasilitasi pembangunan Puskesmas Terpadu/Percontohan Pringsurat, dan pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak;
- k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan sistem rujukan, serta kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan pelayanan ibu, peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja, peningkatan pelayanan kesehatan remaja, dan peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- m. Program pengembangan sumber daya kesehatan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelatihan dan akreditasi tenaga kesehatan, revitalisasi sistem kesehatan dan peningkatan sumber daya kesehatan.

### 3. Pekerjaan Umum

Sasaran program dan kegiatan urusan Pekerjaan umum adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan jalan, perencanaan pembangunan jembatan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perdesaan, rehabilitasi / pemeliharaan jalan (DAK), peningkatan jembatan , reahabilitasi/pemeliharaan jalan (pendampingan DAK), peningkatan jalan (Ban-Keu), fasilitasi Ban-Keu peningkatan jalan, peningkatan jalan kabupaten, perencanaan pembangunan jembatan, perencanaan pemeliharaan jalan (DAK), perencanaan peningkatan jalan kabupaten, pembangunan jembatan Sungai Jambe Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung, pendampingan pembangunan jembatan Sungai Jambe Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung, pembangunan jembatan kali Sungai Kuas Kelurahan Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung, pendampingan pembangunan jembatan Sungai Kuas Kelurahan Walitelon Selatan kecamatan Temanggung, peningkatan Jalan Maron - Kandangan (lanjutan BanKeu 2015), pendampingan peningkatan Jalan Maron - Kandangan (lanjutan Ban-Keu 2015), peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran (lanjutan Ban-Keu 2015), pendampingan peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran (lanjutan Ban-Keu 2015), pembangunan Jembatan Bendo Peri Kali Lungge Desa Mudal, pendampingan pembangunan Jembatan Bendo Peri Kali Lungge Desa Mudal, penataan Jalan Pahlawan Jalan Paingan dan sarana prasarannya, pembangunan Jalan Campurejo - Wates (lanjutan BanKeu) tahun 2016, pendampingan jalan Campurejo - Wates tahun 2016, DED pembangunan infrastruktur jalan dan drainase untuk kawasan industri Kranggan – Pringsurat, peningkatan jalan Karangtejo-Jombor Kecamatan Jumo, peningkatan jalan Dusun Rowo Rejosari - Dusun Dlingu Tlogopucang Kecamatan Kandangan, peningkatan jalan Desa Sukomarto - Desa Karangtejo Kecamatan Jumo, peningkatan jalan Dusun Kendil-Dusun Bringin Desa Tegalsari Kecamatan Kedu, peningkatan jalan Bejen - Ngaliyan Kecamatan Bejen, pembangunan jembatan desa banjar kecamatan tretep, dan pembangunan jalan lingkaran Temanggung dan Parakan;
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan saluran

- drainase/gorong-gorong, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Program Pembangunan turap/talud/brojong, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan turap/talud/bronjong, pembangunan turap/talud pengaman jalan;
  - d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan;
  - e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : kegiatan pengadaan alat berat, rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan, rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat;
  - f. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, dengan prioritas kegiatan diantaranya : rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK non DR), rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum (DAK non DR), rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani pemakai air, pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP), rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (pendampingan DAK non DR) , pembangunan bendung dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Water Resources And Irrigation Sector Managemen Program (WISMP), fasilitasi forum daerah aliran sungai Kabupaten Temanggung, pembangunan gedung – gedung, pemeliharaan gedung - gedung pemerintah daerah, dan pembangunan Gedung DHC 45;
  - g. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi pembangunan infrastruktur pedesaan dan fasilitasi belanja hibah infrastruktur pedesaan;
  - h. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan trotoar, rehabilitasi/pemeliharaan trotoar, dan perencanaan pembangunan drainase dan trotar n-1; dan
  - i. Program Pemberdayaan jasa Konstruksi, dengan prioritas kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi.

#### **4. Perumahan Rakyat**

Program dan kegiatan urusan Perumahan bertujuan untuk meningkatkan rumah yang sehat dan layak huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum pemukiman. Program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Perumahan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi pemugaran pemukiman Rumah Tidak Layak Huni, pengadaan PSU Rusunawa Parakan, dan pengadaan PSU Rusunawa Kertosari.
- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat, bantuan gotong royong, pembangunan pagar keliling tanah IPHI, pembangunan gapura batas Kabupaten Temanggung \*), penyempurnaan fasilitas Masjid Agung Temanggung, pendampingan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM), fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP), dan peningkatan kualitas lingkungan; dan
- b. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, kesiapsiagaan penanganan kebakaran, dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

## **5. Penataan Ruang**

Program dan kegiatan urusan Penataan Ruang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pedestrian. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **6. Lingkungan Hidup**

Program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup bertujuan meningkatkan pengelolaan persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, pemeliharaan kebersihan kota, revitalisasi prasarana persampahan , operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik, peningkatan TPA Sangrahan, pengadaan Dump Truck, dan peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST 3R;
- b. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), dengan prioritas kegiatan diantaranya : penataan dan pemeliharaan RTH, pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), meterisasi dan instalasi

Penerangan Jalan Umum, pembangunan panggung reklame, pengadaan Mobil Sky Lift, pembangunan city walk jalan suwandi suwardi, renovasi rest area pringsurat, penataan Gumuk Lintang, pengadaan lampu kota \*), dan pendampingan kegiatan P2KH.

## **7. Perencanaan Pembangunan**

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah, pengkajian dan evaluasi pembangunan, operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung, koordinasi pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan, koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, koordinasi perencanaan dan monev PWK bidang prasarana wilayah, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD, penyusunan indikasi mutu dan kriteria tembakau temanggung, penyusunan indikasi geografis kopi robusta Temanggung, penguatan kelembagaan TKPK Kabupaten Temanggung, Pendidikan Untuk Semua (PUS), koordinasi data, pengendalian, evaluasi, litbang, dan kerjasama, fasilitasi pengembangan ekonomi lokal partisipatif (PEL), fasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS), Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas), koordinasi perencanaan pemantauan penanggulangan kemiskinan pedesaan, fasilitasi penyusunan data pencapaian MDGs, validasi data RTM/RTS, fasilitasi pencatatan penyandang masalah kesejahteraan sosial, analisis makro ekonomi Kabupaten Temanggung, penyusunan dan analisis data anak usia sekolah yang tidak sekolah, FEDEP (Ban-Keu), fasilitasi FEDEP, fasilitasi perencanaan dana DAK, tugas pembantuan dan bantuan dana pusat lainnya kepada kabupaten , Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), penyusunan evaluasi RTRW Kabupaten Temanggung, review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) data dan kemiskinan terpadu, analisis kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah, penyusunan masterplan pengembangan tanaman cengkeh, penyusunan masterplan investasi, penyusunan analisis ketahanan pangan daerah, penyusunan profil anak, penyusunan analisis indikator kesehatan, penyusunan review masterplan pendidikan, penyusunan analisis penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyusunan Masterplan Drainase Kota Kecamatan, penyusunan RPJM Cipta Karya, penyusunan kebijakan perencanaan irigasi, dan penyusunan Rencana

Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Pusaka Tahun 2016.

## **8. Statistik**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyusunan statistik daerah, visualisasi data pembangunan, penyusunan statistik sosial, penyusunan statistik ekonomi, koordinasi pengintegrasian data tingkat kabupaten, fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah, pengembangan integrasi data dan aplikasi, penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

## **9. Perhubungan**

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan prioritas kegiatan diantaranya : rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, rehabilitasi pemeliharaan terminal / pelabuhan, pemeliharaan traffic light, rehabilitasi/ pemeliharaan halte, pembangunan Terminal Temanggung, rehab sedang terminal, monitoring dan pengawasan operasional pelayanan terminal, pengadaan kendaraan operasional pengawasan terminal, keselamatan transportasi darat (DAK), pendampingan DAK, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengadaan Tatanan Transportasi Lokal, pemeliharaan SIM perlengkapan jalan, rehab terminal Tipe C Candiroto, dan DAK Bidang Transportasi Perhubungan-Fasilitasi Keselamatan Transportasi;
- b. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang, pemilihan awak kendaraan umum teladan tingkat kabupaten, pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat kabupaten, pengadaan halte, monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan umum, pemeliharaan SIM Angkutan, operasional bus sekolah, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengamanan, dan operasi penertiban angkutan umum; dan
- c. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : penataan perparkiran, pengadaan seragam parkir dan perlengkapan kerja, pengadaan SIM PKB, dan pengadaan sarana pelayanan pengujian kendaraan bermotor.



## **10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan informasi dan komunikasi, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelayanan informasi melalui kendaraan MCAP, sosialisasi internet sehat dan aman, pelatihan TIK sebagai media komunikasi dan informasi, pelayanan informasi publik, pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, dan pembangunan gedung dan sarana prasarana IT;
- b. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan dan pengembangan SDM Kominfo, lomba inovasi teknologi informasi dan komunikasi, diseminasi informasi melalui pentas seni FK Metra, pengadaan alat studio dan komunikasi, dan pemeliharaan alat studio; dan
- c. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan lembaga penyiaran dan Kominfo, pemeliharaan dan operasional pusat komunikasi kreatif, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, pengendalian dan pengawasan jasa layanan akses internet/warung internet, dan pengendalian dan pengawasan jasa titipan/pos.

## **11. Pertanahan**

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

## **12. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Rencana Program yang akan dilaksanakan adalah Program penataan administrasi kependudukan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan, peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil, peningkatan pelayanan publik Bidang Pencatatan Sipil, dan pengelolaan SIAK Pencatatan Sipil dan E – KTP.

## **13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi anak low vision, fasilitasi dan advokasi pengembangan kota layak anak( KLA), fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan fasilitasi pengarusutamaan gender ( PUG ) dan ARG.

- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi kegiatan forum anak, fasilitasi penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, anak dan GSIB, fasilitasi pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, fasilitasi kegiatan WCC, penyelenggaraan forum anak, fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ( PTP2A), advokasi pelaksanaan ARG di SKPD, pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender, dan pembinaan organisasi perempuan.

#### **14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program keluarga berencana, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelayanan KIE, rapat koordinasi kelembagaan, pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan, pengadaan sarpras KB ( DAK ), pendampingan pengadaan sarpras KB ( DAK ), pertemuan medis teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan KB dan PP, pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, pengadaan alat kontrasepsi, fasilitasi kelompok masyarakat / institusi / lembaga ( peduli KB ), pengembangan dan pemantapan program, pembangunan jaringan online dengan UPT kecamatan / SKPD, kegiatan sosialisasi KRR dan KHIBA, dan pertemuan penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.
- b. Program pembinaan kesejahteraan keluarga, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ), pembinaan pembantu petugas keluarga berencana desa ( PPKBD ), fasilitasi konseling kader keluarga berencana desa, pertemuan kelompok bina keluarga balita, dan pertemuan kelompok kegiatan bina ekonomi produktif ( UPPKS ).

#### **15. Sosial**

Sasaran program dan kegiatan urusan sosial adalah untuk meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui lembaga-lembaga sosial serta upaya tanggap darurat dan penanganan bencana alam. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi Program Keluarga Harapan, pelatihan kemampuan dan ketrampilan bagi keluarga Fakir Miskin (FM), peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi PRSE, bimbingan lanjut KUBE, Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar Potensial,

dan pelayanan sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan

- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengiriman dan penerimaan kembali petirah di PSPA Satria Baturaden, pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal, pengiriman dan penjemputan anak nakal, bimbingan dan pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi korban penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, fasilitasi UPSK dan bantuan sosial, pengiriman PGOT psikotik ke RSJ, Barehsos dan keluarga, pendidikan dan pelatihan bagi paca dan eks trauma di BBRSBG Prof. Dr. Suharso Surakarta dan Balatrans Semarang, pelatihan ketrampilan bagi PRSE di Barehsos Wanodyotomo Kendal, fasilitasi jaminan sosial bagi penderita penyakit kronis dan cacat berat, pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan fasilitasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH).
- c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pentas seni dan olah raga penyandang cacat tingkat provinsi, pendidikan dan pelatihan bagi petugas terapis pendamping paca tubuh, bantuan pengadaan kursi roda, bimbingan sosial dan bantuan UEP ketrampilan bagi eks penyakit kronis, cacat rungu wicara dan cacat netra, dan pelayanan sosial LUT non potensial.
- d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan dan pendataan bagi pengurus dan anak panti asuhan, peningkatan peran aktif masyarakat dunia usaha, fasilitasi kegiatan dan pembinaan PSKS, pembentukan dan fasilitasi kegiatan bagi FK PSM, capacity building bagi PSKS, pelatihan anggota KT, PSM dan pengurus ORSOS, Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT), fasilitasi kegiatan dan bantuan sosial bagi K3S, penyelenggaraan Hari Lansia Nasional, penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS PUSDATIN, fasilitasi dan bantuan sosial kegiatan FKKT, fasilitasi bantuan sosial dan kegiatan bagi PSM, fasilitasi bantuan sosial bagi FKPSM, fasilitasi bantuan sosial pemberdayaan KT, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), fasilitasi kegiatan Komda Lansia dan bantuan, pemutakhiran PMKS/PSKS, pembuatan data lansia, pembentukan dan fasilitasi bantuan sosial bagi WKSBM, operasional Rumah Perlindungan Sosial (RPS), fasilitasi bantuan sosial bagi panti dan anak panti asuhan, dan validasi dan verifikasi data PBI JKN.

- e. Program pencegahan dan kesiapsiagaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan dan Penanganan Bencana;
- f. Program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- g. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, dengan prioritas kegiatan diantaranya : bimbingan sosial ketrampilan bagi eks napi dan razia tuna sosial; dan
- h. Program pembinaan anak terlantar, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan anak nakal, anak jalanan, dan anak terlantar luar panti, Porseni anak panti tingkat kabupaten, dan pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan sosial bagi anak penghuni panti asuhan.

## **16. Ketenagakerjaan**

Sasaran program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan adalah untuk menurunkan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan prioritas program diantaranya : Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja, Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat, Pembuatan DED pembangunan gedung kantor SKPD Dinakertrans, Perencanaan Tenaga Kerja Makro, Pengembangan Kompetensi Instruktur Ketenagakerjaan;
- b. Program peningkatan kesempatan kerja, dengan prioritas kegiatan diantaranya : Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan, Pameran Bursa Tenaga Kerja (Job Market Fair), dan padat karya infrastruktur; dan
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), fasilitasi pengembangan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, pembinaan dan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, pengujian

peralatan di perusahaan dan pengadaan peralatan pendukung pengujian, pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja;

#### **17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan prioritas kegiatan diantaranya : monitoring, evaluasi dan pelaporan, penilaian kesehatan KSP/USP, peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM, pembinaan koperasi, pengawasan koperasi, sosialisasi dan pelatihan akuntansi dasar koperasi, dan fasilitasi perubahan anggaran dasar koperasi (PAD);
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan pengembangan sentra-sentra produksi unggulan berbasis OVOP, dan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.

#### **18. Penanaman Modal**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pelayanan perizinan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan pelayanan perijinan satu pintu, sistem informasi pelayanan perijinan, sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, monev dan pembinaan kecamatan, dan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perijinan;
- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyelenggaraan pameran investasi, penyelenggaraan Temu Usaha, pengembangan potensi unggulan daerah, kajian kebijakan penanaman modal, monev dan pelaporan, pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang PM.

#### **19. Kebudayaan**

Sasaran program dan kegiatan urusan Kebudayaan adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan serta meningkatkan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan nilai keagamaan, dengan prioritas kegiatan diantaranya :
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya, dengan prioritas kegiatan diantaranya : fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, Ekskavasi Situs Liangan, fasilitasi penetapan tim

pengkaji cagar budaya, pembebasan tanah situs Liangan, pembangunan museum, pemeliharaan Situs Liyangan, pembinaan kelompok budaya (pengalihan dari Bansos Kelompok Up. Adat), dan fasilitasi pembangunan museum;

- c. Program pengelolaan keragaman budaya, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, penghargaan budaya daerah, pelatihan seni/workshop, apresiasi Seni, dokumentasi seni budaya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan karya cetak dan karya rekam, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (fasilitasi bantuan hibah seni budaya), dan festival budaya Kabupaten Temanggung.

## **20. Pemuda dan Olahraga**

Sasaran program dan kegiatan urusan pemuda dan olah raga adalah untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, meningkatkan sarana dan prasana olahraga serta mendorong peningkatan prestasi olahraga. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, fasilitasi bantuan kepemudaan dan olah raga, seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan diklat kepemudaan, dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, penyelenggaraan kompetisi olahraga, pengiriman Kejuaraan Daerah, HAORNAS dan Hari Sumpah Pemuda, Porseni Pondok Pesantren, dan pengiriman calon pelatih olahraga dan pemuda;
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga, pembangunan Stadion Bhumi Phala, pembangunan Gedung lapangan Tennis Indoor, pemeliharaan rutin berkala Stadion Bhumi Phala, pembangunan lapangan tennis outdoor, fasilitasi pembangunan lapangan tennis outdoor, dan pengadaan sarana prasarana Mess Atlet.

## **21. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pendidikan politik masyarakat, dengan prioritas kegiatan diantaranya : sosialisasi Undang - Undang Bidang Politik, fasilitasi pembinaan dan monitoring Ormas, OKP, LSM, verifikasi proposal ijin riset / penelitian bagi mahasiswa / Lembaga, Monitoring, Evaluasi dan

- Pelaporan, peningkatan dan kapabilitas petugas penyelenggara Pilkada, dan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
- b. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, dengan prioritas kegiatan diantaranya : Penanganan Masalah Aktual, Komunitas Intelegen Daerah, dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN );
  - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan wawasan kebangsaan, revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila, pembinaan dan pengawasan orans asing, pembinaan FPBI, peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, sosialisasi dan pembentukan FKUB, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penhayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa, peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, koordinasi keamanan daerah, penertiban pedagang kaki lima, penegakan perda dan yustisi, penertiban pelajar, patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarkat, dan penertiban pertambangan mineral dan batubara;
  - e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan satuan linmas, diklat SAR anggota linmas, dan pengamanan PILKADES.

## **22. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- b. Program pendidikan kedinasan dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan penjenjangan structural;
- c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan prioritas kegiatan diantaranya : kegiatan penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, kegiatan pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, kegiatan pengangkatan PNS, kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS, kegiatan penyusunan formasi pegawai, kegiatan penyelenggaraan QAP, kegiatan penanganan proses ijin perceraian bagi

- PNS, seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kegiatan seleksi penerimaan calon PNS;
- d. Program administrasi kepegawaian, dengan prioritas kegiatan diantaranya : kegiatan pemberian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun, kegiatan pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK, kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan kegiatan pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah;
  - e. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, kegiatan reses, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah, dan hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli;
  - f. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pengelolaan LP2P, LHKASN dan LHKPN, pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut, pengolahan Data SIMWASDA, dan peningkatan sumber daya aparatur pengawas pengelolaan jabatan fungsional auditor;
  - g. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur pengawasan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, pelaksanaan pelatihan kantor sendiri, penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dan review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
  - h. Program pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD;
  - i. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penyusunan sistem informasi keuangan daerah, pengelolaan administrasi gaji, monitoring dan evaluasi pendapat asli daerah, stock opname benda/barang berharga (retribusi daerah), percepatan pemasukan PBB intensifikasi pajak daerah, verifikasi dan pengesahan DPA, pengelolaan keuangan daerah, penyusunan PERDA dan PERBUP tentang APBD Kab. Temanggung, verifikasi RKA, pendataan massal SISMIOP obyek/Subyek PBB-P2, pengelolaan administrasi pajak daerah, penelusuran , penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, pembinaan pejabat pengurus barang, analisis kebutuhan dan inventaris barang milik daerah, pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah, dan pemeliharaan SIMBADA;
  - j. Program penataan peraturan perundang-undangan;



- k. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- l. Program kerjasama daerah;
- m. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
- n. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- o. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

### **23. Ketahanan Pangan**

Fokus program dan kegiatan urusan ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Terdiri dari satu program yaitu: Program peningkatan ketahanan pangan dengan prioritas kegiatan diantaranya : pendampingan LDPM, pendampingan Desa Mandiri Pangan, pengembangan pengolahan pangan local, fasilitasi distribusi dan akses pangan, model pengembangan Kemandirian Pangan Desa, pengisian gudang cadangan pangan dan antisipasi kerawanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan, fasilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, pendampingan pengembangan konsumsi pangan B2SA, pendampingan P2KP, penyusunan data base ketahanan pangan, fasilitasi penyaluran bantuan hibah, dan peningkatan dan pengembangan keamanan pangan.

### **24. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan,serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan ketahanan masyarakat desa, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan, serta penyelenggaraan Lomba desa/kelurahan;
- b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.kelurahan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) SD/MI, fasilitasi bantuan gubernur kepada desa / kelurahan, Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM), fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, fasilitasi dana transfer ke desa, fasilitasi Permodalan Bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Desa, dan bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;

- c. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan prioritas kegiatan fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka Ketahanan Pangan;
- d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan, pembinaan adat istiadat, Anak Indonesia Menuju Damai, pemberayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dukungan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa, fasilitasi Karya Bhakti KODIM 0706, fasilitasi pengembangan Posyantek, fasilitasi bantuan stimulan pemugaran perumahan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi penanggulangan kemiskinan, fasilitasi bantuan peralatan teknologi tepat guna, dan fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

## **25. Statistik**

Rencana Program urusan statistic adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan prioritas kegiatan : penyusunan statistik daerah, visualisasi data pembangunan, penyusunan statistik sosial, penyusunan statistik ekonomi, koordinasi pengintegrasian data tingkat kabupaten, fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah, pengembangan integrasi data dan aplikasi, penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

## **26. Kearsipan**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, penataan dokumen negara dan pengadaan sarana arsip;
- b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

## **27. Perpustakaan**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

## **B. Urusan Pilihan**

### **1. Pertanian**

Sasaran program dan kegiatan pertanian adalah untuk meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan ketahanan pangan. Adapun program dalam urusan pertanian adalah:

- a. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- e. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- f. Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- g. Program pemberdayaan petani;
- h. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan;
- i. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- j. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- k. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- l. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- m. Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- n. Program pemberdayaan petani; dan
- o. Program pengembangan agribisnis.

### **2. Kehutanan**

Program dan kegiatan urusan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah melalui program-program berikut ini:

- a. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; dan
- c. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.

### **3. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

### **4. Pariwisata**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan destinasi wisata;
- b. Program pengembangan produk wisata; dan
- c. Program pengembangan kemitraan.

## **5. Kelautan dan Perikanan**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan budidaya perikanan;
- b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan;
- c. Program pengembangan kawasan budidaya air tawar; dan
- d. Program pengembangan perikanan tangkap.

## **6. Perdagangan**

Sasaran program dan kegiatan urusan perdagangan adalah untuk meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan serta melindungi produsen dan konsumen.melalui program-program berikut :

- a. Program pengelolaan pasar daerah;
- b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor; dan
- c. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
- d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pemantauan harga bahan pokok, fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok, Fasilitasi operasi pasar, pengawasan bahan pokok, bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya, pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol, sosialisasi kemetrologian, fasilitasi tera ulang UTTP, pembinaan dan pengembangan bidang kemetrologian, operasional BPSK, dan pengembangan kemetrologian yg dilayani dengan UPT;
- e. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan prioritas kegiatan diantaranya : peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah, fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang, dan kemitraan UMKM dan pasar modern;
- f. Program pengelolaan pasar daerah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : penertiban dan penataan pasar daerah, pemeliharaan pasar-pasar daerah, monev PAD retribusi pasar daerah, pendataan potensi pasar, pembinaan dan pengendalian perijinan, penataan Pasar Legi Parakan, pembangunan Terowongan Pasar Kliwon Temanggung
- g. Program peningkatan sarana dan prasarana lainnya, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pembangunan pasar kranggan, pembangunan gedung kantor Dinas Perindagkop & UMKM, pembangunan pasar pingit, renovasi atap, lantai, tangga dan mushola Pasar Temanggung, dan renovasi atap, lantai, tangga dan mushola Pasar Ngadirejo; dan
- h. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan prioritas kegiatan pembinaan pelaku usaha dagang kecil.

## **7. Perindustrian**

Program dan kegiatan urusan perindustrian bertujuan untuk meningkatkan agroindustri yang berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah. Program yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan prioritas kegiatan diantaranya : pengembangan industri kecil agro, pengembangan industri kecil aneka industry, temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi, pelatihan industri kecil, temu usaha industri mikro, dan fasilitasi Kegiatan Dekranasda.

## **8. Transmigrasi**

Sasaran program dan kegiatan urusan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi serta peningkatan kualitas transmigran. Adapun program yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan wilayah transmigrasi, dengan prioritas kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung tahun 2017 mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu : (1) menjadi pedoman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2017; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2017; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) RKPD sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada indikator kinerja sosial dan indikator kinerja ekonomi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Pencapaian target rencana program/kegiatan pemerintah daerah melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2017 dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, swasta, masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018.

Untuk itu, dengan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2017 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi semua pihak dalam mendukung upaya menuju Visi pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dalam dokumen RPJMD 2013-2018 adalah “Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih”.

BUPATI TEMANGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO